



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN**

**2024
[AUDITED]**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti, Kabupaten Kepulauan Anambas
Telp/Fax (0772) 31001, Website : www.anambaskab.go.id
PASIR PETI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
DI TAREMPA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DI BATAM**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 (AUDITED)	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.6.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Kewajiban Jangka Pendek yang menjelaskan bahwa penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum sepenuhnya memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penetapan anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat tidak sesuai dengan ketentuan dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mampu dalam menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp95.219.038.443,34 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Dari Utang Belanja tersebut sebesar Rp30.230.540.675,00 merupakan utang atas belanja kegiatan yang bersumber dari DAK dan DAU yang ditetapkan peruntukannya. Belanja kegiatan tersebut tidak terbayar di akhir tahun karena dananya terpakai untuk belanja kegiatan lainnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 88.B/LHP/XVIII.TJP/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 22 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Emmy Mutiarini, S.E., Ak. MUI, CA., CSFA, ACPA, GRCP, GRCA. 9

Register Negara Akuntan No. 2891

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan adalah:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki 34 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dilakukan sebanyak dua tahap yaitu pemeriksaan interim selama 31 hari (mulai tanggal 9 Februari s.d. 11 Maret 2025) berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/ST/XVIII.TJP/2/2025 tanggal 5 Februari 2025, dan tahap pemeriksaan terinci selama 29 hari (mulai tanggal 11 April s.d. 9 Mei 2025) berdasarkan Surat Tugas Nomor 61/ST/XVIII.TJP/4/2025 tanggal 8 April 2025 dan Surat Tugas Nomor 72/ST/XVIII.TJP/5/2025 tanggal 5 Mei 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua. Di Tahun 2024 ini merupakan Tahun ke-10 (Sepuluh) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 telah disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, disampaikan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Audited

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna. Karenanya, kami sangat berharap tanggapan, arahan, bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun dari segenap *stakeholders* terhadap Laporan Keuangan ini. Selanjutnya, kami akan tetap berusaha untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat serta andal sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Besar harapan kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun mendatang. Perhatian, saran dan rekomendasi perbaikan dari setiap *stakeholders* terutama dari eksternal dan internal auditor menjadi masukan paling berharga dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 adalah Laporan Keuangan ke-16 (Enam Belas), pada tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya dengan komitmen yang tinggi bersama semua jajaran secara maksimal melakukan perbaikan-perbaikan dalam mempertahankan hasil opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified*” dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tarempa, 22 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarempa, 22 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	11

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	20
Tabel 2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s.d, 2023	31
Tabel 3	PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s.d, 2023	32
Tabel 4	Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	35
Tabel 5	Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.....	36
Tabel 6	Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan	36
Tabel 7	Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	37
Tabel 8	Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	38
Tabel 9	Anggaran Unsur Perencanaan Urusan Pemerintah	38
Tabel 10	Anggaran Unsur Keuangan Urusan Pemerintah.....	38
Tabel 11	Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah	39
Tabel 12	Anggaran Unsur Penghubung Urusan Pemerintah	39
Tabel 13	Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024.....	40
Tabel 14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	89
Tabel 15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023	90
Tabel 16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	90
Tabel 17	Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 dan 2023.....	91
Tabel 18	Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023	92
Tabel 19	Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 dan 2023.....	93
Tabel 20	Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023	94
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 dan 2023	94
Tabel 22	Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 dan 2023	95
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 dan 2023	96
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 dan 2023	97
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	97
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2024 dan 2023	98
Tabel 27	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	99

Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023 .	99
Tabel 29	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dan 2023	100
Tabel 30	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Tahun 2024 dan 2023	101
Tabel 31	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 dan 2023	102
Tabel 32	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 dan 2023	102
Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023	103
Tabel 34	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2024 dan 2023	103
Tabel 35	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun 2024 dan 2023	104
Tabel 36	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2024 dan 2023	105
Tabel 37	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023	106
Tabel 38	Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	106
Tabel 39	Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 dan 2023	107
Tabel 40	Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023	107
Tabel 41	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023	108
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dan 2023	109
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023	110
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 dan 2023	110
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2023	111
Tabel 46	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 dan 2023	112
Tabel 47	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 dan 2023	112
Tabel 48	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2024 dan 2023	113
Tabel 49	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2024 dan 2023	113
Tabel 50	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2024 dan 2023	114
Tabel 51	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan 2023 ...	116

Tabel 52	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024 dan 2023	116
Tabel 53	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023	117
Tabel 54	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023 ..	117
Tabel 55	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023	118
Tabel 56	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023	119
Tabel 57	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023	119
Tabel 58	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan 2023	120
Tabel 59	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dan 2023	121
Tabel 60	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan 2023	122
Tabel 61	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan 2023	124
Tabel 62	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2024 dan 2023	125
Tabel 63	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 dan 2023	126
Tabel 64	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2024 dan 2023	126
Tabel 65	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2024 dan 2023 ..	126
Tabel 66	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 dan 2023 ...	128
Tabel 67	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 68	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 69	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 70	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023	131
Tabel 71	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023	132
Tabel 72	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023	132
Tabel 73	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	133
Tabel 74	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	134
Tabel 75	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023	136
Tabel 76	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 dan 2023	136
Tabel 77	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan 2023	137

Tabel 78	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 dan 2023	138
Tabel 79	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023	139
Tabel 80	Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 81	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 dan 2023	140
Tabel 82	Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	142
Tabel 83	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	143
Tabel 84	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023.....	144
Tabel 85	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2024	146
Tabel 86	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Tahun 2024 dan 2023 ..	146
Tabel 87	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.....	147
Tabel 88	Daftar Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggarn 2024	147
Tabel 89	Daftar Penerima Belanja Hibah Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024	148
Tabel 90	Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024	148
Tabel 91	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024	148
Tabel 92	Daftar Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024.....	149
Tabel 93	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024.....	149

Tabel 94	Daftar Penerima Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024	150
Tabel 95	Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggar 2024	150
Tabel 96	Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023	150
Tabel 97	Daftar Penerima Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024	151
Tabel 98	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024	151
Tabel 99	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	152
Tabel 100	Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggar 2024	152
Tabel 101	Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024	153
Tabel 102	Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2024	154
Tabel 103	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 104	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 105	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	156
Tabel 106	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	157
Tabel 107	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	160
Tabel 108	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	162
Tabel 109	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	163
Tabel 110	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023	165
Tabel 111	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	166
Tabel 112	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2024 dan 2023	168
Tabel 113	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023...	169
Tabel 114	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	169
Tabel 115	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023 ...	170

Tabel 116	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa Pada Tahun 2024 dan 2023	170
Tabel 117	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023	172
Tabel 118	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	172
Tabel 119	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	173
Tabel 120	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023	173
Tabel 121	Anggaran dan Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) Tahun 2024 dan 2023	174
Tabel 122	Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 123	Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023	176
Tabel 124	Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023	177
Tabel 125	Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	178
Tabel 126	Kas Di Rekening Kas Umum Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	178
Tabel 127	Kas Di Bendahara FKTP – Dana JKN Tahun 2024 dan 2023	179
Tabel 128	Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	180
Tabel 129	Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023	181
Tabel 130	Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023	181
Tabel 131	Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Dasar (SD) Per 31 Desember 2024 dan 2023	182
Tabel 132	Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per 31 Desember 2024 dan 2023	184
Tabel 133	Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	185
Tabel 134	Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	186
Tabel 135	Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023	187
Tabel 136	Mutasi Piutang PBBP2 Tahun 2024 dan 2023	187
Tabel 137	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023	188
Tabel 138	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH Tahun 2024 dan 2023	188
Tabel 139	Mutasi Piutang Remunerasi TDF Tahun 2024 dan 2023	189
Tabel 140	Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2024 dan 2023	189
Tabel 141	Mutasi Piutang Transfer Tahun 2024 dan 2023	190
Tabel 142	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023	190
Tabel 143	Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	191
Tabel 144	Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023	191
Tabel 145	Persediaan Konsolidasi Tahun 2024 dan 2023	192
Tabel 146	Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2024 dan 2023	193
Tabel 147	Rincian Persediaan Obat-obatan Kondisi Baik pada Setiap UPT dan SKPD	194
Tabel 148	Rincian Persediaan Obat-obatan Kondisi Rusak dan Kadaluarsa pada Setiap UPT dan SKPD	195

Tabel 149	Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023	197
Tabel 150	Dana Bergulir Tahun 2024	197
Tabel 151	NRV Dana Bergulir Tahun 2024	198
Tabel 152	Penyertaan Modal Tahun 2024	198
Tabel 153	Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)	200
Tabel 154	Mutasi Aset Tetap Tahun 2024	200
Tabel 155	Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024	201
Tabel 156	Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2024	201
Tabel 157	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap-Tanah 2024	203
Tabel 158	Rincian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah	203
Tabel 159	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	204
Tabel 160	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2024	205
Tabel 161	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2024	206
Tabel 162	Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2024.....	210
Tabel 163	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024	210
Tabel 164	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024.....	211
Tabel 165	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	222
Tabel 166	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2024	223
Tabel 167	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	224
Tabel 168	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	227
Tabel 169	Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024	227
Tabel 170	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	228
Tabel 171	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 229	
Tabel 172	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah – Bagian Umum Tahun 2024	230
Tabel 173	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024	230
Tabel 174	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	241
Tabel 175	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024.....	246
Tabel 176	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	261
Tabel 177	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Tahun 2024	261
Tabel 178	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024	263

Tabel 179	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024	280
Tabel 180	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024	281
Tabel 181	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024.....	282
Tabel 182	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024.....	282
Tabel 183	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2024.....	282
Tabel 184	Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomtabel) Per SKPD	284
Tabel 185	Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023.....	285
Tabel 186	Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023	287
Tabel 187	Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2024.....	288
	dan 2023	
Tabel 188	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023	289
Tabel 189	Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023	290
Tabel 190	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD Tahun 2024 dan 2023	291
Tabel 191	Mutasi Saldo Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2024 dan 2023	292
Tabel 192	Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024	293
Tabel 193	Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024	294
Tabel 194	Mutasi Utang Belanja Tahun 2024	295
Tabel 195	Rekapan Penambahan Utang Belanja per SKPD Tahun 2024.....	295
Tabel 196	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.....	296
Tabel 197	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.....	309
Tabel 198	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.....	317
Tabel 199	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.....	323
Tabel 200	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	324
Tabel 201	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.....	326
Tabel 202	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.....	326
Tabel 203	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	329

Tabel 204	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	331
Tabel 205	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.....	332
Tabel 206	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	333
Tabel 207	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024	337
Tabel 208	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024	340
Tabel 209	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	343
Tabel 210	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024	343
Tabel 211	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2024.....	344
Tabel 212	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024	345
Tabel 213	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024	347
Tabel 214	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	352
Tabel 215	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	357
Tabel 216	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024	360
Tabel 217	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	361
Tabel 218	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2024	363
Tabel 219	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Inspektorat Daerah Tahun 2024.....	364
Tabel 220	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Tahun 2024.....	366
Tabel 221	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja Tahun 2024.....	368
Tabel 222	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Palmatak Tahun 2024.....	368
Tabel 223	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Timur Tahun 2024.....	369
Tabel 224	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2024	370
Tabel 225	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2024	371
Tabel 226	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2024	372

Tabel 227	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2024	372
Tabel 228	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2024	373
Tabel 229	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kute Siantan Tahun 2024	373
Tabel 230	Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024	376
Tabel 231	Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	377
Tabel 232	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023	377
Tabel 233	Saldo Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023	378
Tabel 234	Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024	379
Tabel 235	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	379
Tabel 236	Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2024	380
Tabel 237	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023	381
Tabel 238	Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2024	381
Tabel 239	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023	381
Tabel 240	Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2024	384
Tabel 241	Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023	384
Tabel 242	Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2024...	385
Tabel 243	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 dan 2023	386
Tabel 244	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LO dan LRA Tahun 2024	386
Tabel 245	Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2024 dan 2023	387
Tabel 246	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2024 ...	387
Tabel 247	Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023	387
Tabel 248	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2024	388
Tabel 249	Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2024 dan 2023	388
Tabel 250	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2024	389
Tabel 251	Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2024 dan 2023	389
Tabel 252	Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan LRA Tahun 2024	390
Tabel 253	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023	390
Tabel 254	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024	390
Tabel 255	Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2024 dan	

	2023	391
Tabel 256	Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) antara LO dan LRA Tahun 2023.....	391
Tabel 257	Pendapatan Insentif Fiskal - LO Tahun 2024 dan 2023	391
Tabel 258	Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Fiskal antara LO dan LRA Tahun 2024	392
Tabel 259	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023	392
Tabel 260	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024	392
Tabel 261	Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2024 dan 2023	393
Tabel 262	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya LO dan LRA Tahun 2024.....	393
Tabel 263	Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2024 dan 2023	394
Tabel 264	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024.....	394
Tabel 265	Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023.....	394
Tabel 266	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2023.....	394
Tabel 267	Beban Operasi SKPKD Tahun 2024 dan 2023	395
Tabel 268	Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	396
Tabel 269	Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2024	398
Tabel 270	Realisasi Beban Barang Tahun 2024 dan 2023	399
Tabel 271	Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	402
Tabel 272	Perbedaan Realisasi Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang (Persediaan)-LRA Tahun 2024	403
Tabel 273	Beban Jasa-LO Tahun 2024 dan 2023.....	403
Tabel 274	Beban Jasa Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	407
Tabel 275	Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2024	408
Tabel 276	Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 dan 2023	409
Tabel 277	Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	410
Tabel 278	Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2024	411
Tabel 279	Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 dan 2023	412
Tabel 280	Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	412
Tabel 281	Perbedaan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2024.....	413
Tabel 282	Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	414
Tabel 283	Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2024	415
Tabel 284	Beban Hibah Per SKPD Tahun 2024 dan 2023.....	416
Tabel 285	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	416

Tabel 286	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	416
Tabel 287	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	417
Tabel 288	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Terdaftar Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	417
Tabel 289	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	417
Tabel 290	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	417
Tabel 291	Beban Hibah Dana BOS Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	418
Tabel 292	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	418
Tabel 293	Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	418
Tabel 294	Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2024	419
Tabel 295	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	419
Tabel 296	Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024	419
Tabel 297	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	419
Tabel 298	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024	420
Tabel 299	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	421
Tabel 300	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	421
Tabel 301	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 .	422
Tabel 302	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023	422
Tabel 303	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023	422
Tabel 304	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023	423
Tabel 305	Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	423
Tabel 306	Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023	424
Tabel 307	Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023	424
Tabel 308	Perbedaan Realisasi Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA Tahun 2024	424
Tabel 309	Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023	425
Tabel 310	Surplus/Defisit - LO Tahun 2024 dan 2023	426
Tabel 311	Realisasi Arus Kas Tahun 2024 dan 2023	427
Tabel 312	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	427
Tabel 313	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	430
Tabel 314	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023	431
Tabel 315	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	432
Tabel 316	Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2024	440
Tabel 317	Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2024	440
Tabel 318	Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah	

	yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2024	441
Tabel 319	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2024	441
Tabel 320	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2024	442
Tabel 321	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2024	442
Tabel 322	Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2024.....	442
Tabel 323	Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2024	443
Tabel 324	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	449
Tabel 325	Pelaksanaan Paket Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran	450

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Porsi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024	39

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Audited)	(%)	REALISASI 2023 (Audited)
1	PENDAPATAN - LRA	7.6.1.1.	984.762.634.724,32	809.505.443.369,94	82,20	998.370.281.042,73
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.6.1.1.1.	39.179.339.491,00	35.544.549.195,94	90,72	29.362.242.093,73
3	Pajak Daerah - LRA	7.6.1.1.1.1.	22.559.538.747,00	18.599.426.707,00	82,45	16.310.773.757,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.6.1.1.1.2.	4.650.745.981,00	1.566.244.153,00	33,68	7.134.834.674,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.6.1.1.1.3.	1.318.019.763,00	1.241.953.264,00	94,23	1.596.888.717,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.6.1.1.1.4.	10.651.035.000,00	14.136.925.071,94	132,73	4.319.744.945,73
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - (3 s/d 6)		39.179.339.491,00	35.544.549.195,94	90,72	29.362.242.093,73
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.6.1.1.2.	942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07	969.008.038.949,00
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan - LRA	7.6.1.1.2.1.				
10	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.6.1.1.2.1.1.	55.929.267.000,00	77.483.389.960,00	138,54	70.647.320.020,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	7.6.1.1.2.1.2.	242.378.019.066,00	82.228.186.000,00	33,93	250.956.541.788,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.6.1.1.2.1.3.	398.812.700.000,00	395.427.123.385,00	99,15	383.849.195.981,00
13	Dana Alokasi Khusus - LRA	7.6.1.1.2.1.4.	132.791.790.000,00	121.839.923.394,00	91,75	146.130.206.186,00
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERimbangan - (10 s/d 13)		829.911.776.066,00	676.978.622.739,00	81,57	851.583.263.975,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	7.6.1.1.2.2.				
16	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	7.6.1.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	10.659.002.000,00
17	Dana Desa - LRA	7.6.1.1.2.2.2.	39.367.634.000,00	39.367.634.000,00	100,00	39.126.062.000,00
18	Insentif Fiskal - LRA	7.6.1.1.2.2.3.	9.892.202.176,32	5.680.723.000,00	57,43	5.697.153.000,00
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - (16 s/d 18)		49.259.836.176,32	45.048.357.000,00	91,45	55.482.217.000,00
20	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	7.6.1.1.2.3.				
21	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	7.6.1.1.2.3.1.	63.546.682.991,00	51.691.545.772,00	81,34	56.757.976.060,00
22	Bantuan Keuangan - LRA	7.6.1.1.2.3.2.	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	5.184.581.914,00
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - (21 s/d 22) - LRA		63.632.182.991,00	51.777.045.772,00	81,37	61.942.557.974,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - (14 + 19 + 23)		942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07	969.008.038.949,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.6.1.1.3.				
26	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	7.6.1.1.3.1.	2.779.500.000,00	156.868.663,00	0,00	0,00
27	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - (26)		2.779.500.000,00	156.868.663,00	0,00	0,00
28	JUMLAH PENDAPATAN - (7 + 24 + 27)		984.762.634.724,32	809.505.443.369,94	82,20	998.370.281.042,73
29						
30	BELANJA - LRA	7.6.1.2.	1.009.212.363.684,00	832.217.333.836,00	82,46	980.270.183.929,64
31	BELANJA OPERASI - LRA	7.6.1.2.1.				
32	Belanja Pegawai - LRA	7.6.1.2.1.1.	398.951.969.307,00	354.110.209.828,00	88,76	333.755.055.240,00
33	Belanja Barang dan Jasa - LRA	7.6.1.2.1.2.	330.415.185.292,18	253.819.164.750,00	76,82	332.767.580.289,64
34	Belanja Hibah - LRA	7.6.1.2.1.3.	23.314.479.156,00	23.100.436.536,00	99,08	17.149.119.101,00
35	Belanja Bantuan Sosial - LRA	7.6.1.2.1.4.	682.796.000,00	629.305.000,00	92,17	161.614.000,00
36	JUMLAH BELANJA OPERASI - (32 s/d 35)		753.364.429.755,18	631.659.116.114,00	83,85	683.833.368.630,64
37	BELANJA MODAL - LRA	7.6.1.2.2.				
38	Belanja Modal Tanah - LRA	7.6.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA	7.6.1.2.2.2.	30.140.662.858,36	26.372.465.503,00	87,50	51.188.694.187,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Audited)	(%)	REALISASI 2023 (Audited)
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	7.6.1.2.2.3.	40.606.617.756,95	26.344.494.672,00	64,88	34.500.354.929,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA	7.6.1.2.2.4.	69.840.946.653,00	50.267.079.992,00	71,97	96.909.592.427,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	7.6.1.2.2.5.	1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	1.692.901.437,00
43	JUMLAH BELANJA MODAL - (38 s/d 42)		141.992.627.668,31	104.420.106.437,00	73,54	184.291.542.980,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	7.6.1.2.3.				
45	Belanja Tidak Terduga - LRA		1.959.397.381,51	0,00	0,00	0,00
46	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA - (45)		1.959.397.381,51	0,00	0,00	0,00
47	BELANJA TRANSFER - LRA	7.6.1.2.4.				
48	Belanja Bagi Hasil - LRA	7.6.1.2.4.1.	2.721.028.473,00	845.627.307,00	31,08	2.261.732.289,00
49	Belanja Bantuan Keuangan - LRA	7.6.1.2.4.2.	109.174.890.406,00	95.292.483.978,00	87,28	109.883.540.030,00
50	JUMLAH BELANJA TRANSFER - (48 s/d 49)		111.895.908.879,00	96.138.111.285,00	85,92	112.145.272.319,00
51	JUMLAH BELANJA (36 + 43 + 46 + 50)		1.009.212.363.684,00	832.217.333.836,00	82,46	980.270.183.929,64
52						
53	SURPLUS / (DEFISIT) (28 - 51)		(24.449.728.959,68)	(22.711.890.466,06)	92,89	18.100.097.113,09
54						
55	PEMBIAYAAN DAERAH - LRA	7.6.1.3.				
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA	7.6.1.3.1.				
57	Penggunaan SilPA - LRA		23.949.728.959,68	23.949.728.959,68	100,00	6.984.586.830,57
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat - LRA		500.000.000,00	984.223.303,67	196,84	865.045.016,02
59	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - (57 s/d 58)		24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	7.849.631.846,59
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA	7.6.1.3.2.				
61	Pemberian Pinjaman Daerah - LRA		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
62	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61)		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
63	PEMBIAYAAN NETTO (59 - 62)	7.6.1.3.3.	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	5.849.631.846,59
64						
65	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (53 + 63)	7.6.1.3.4.	0,00	2.222.061.797,29	0,00	23.949.728.959,68

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.6.2.	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih		23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
3	Sub Total (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
5	Sub Total (3 + 4)		2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		2.222.061.797,29	23.949.728.959,68

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



3. NERACA



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	ASET	7.6.3.1.		
2	ASET LANCAR	7.6.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	7.6.3.1.1.1.	2.222.061.797,29	23.949.728.959,88
4	Kas di Kas Daerah	7.6.3.1.1.1.1.	159.820.093,88	22.327.961.923,56
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.6.3.1.1.1.2.	0,00	15.369.994,00
6	Kas di BLUD	7.6.3.1.1.1.3.	1.456.758.963,29	0,00
7	Kas Dana BOS	7.6.3.1.1.1.4.	1,12	1,12
8	Kas Lainnya	7.6.3.1.1.1.5.	605.482.739,00	1.606.397.041,00
9	Piutang Pajak Daerah	7.6.3.1.1.2.	3.241.071.379,72	1.527.820.534,00
10	Piutang Retribusi Daerah	7.6.3.1.1.3.	0,00	0,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.6.3.1.1.4.	691.609.524,00	590.980.517,00
12	Piutang Transfer	7.6.3.1.1.5.	15.117.049.818,00	12.454.416.671,00
13	Piutang Lainnya	7.6.3.1.1.6.	214.473.933,32	214.473.933,32
14	Penyisihan Piutang	7.6.3.1.1.7.	(1.468.701.575,34)	(1.268.883.906,33)
15	Persediaan	7.6.3.1.1.8.	23.796.131.008,20	28.263.789.682,11
16	JUMLAH ASET LANCAR (4 s/d 14)		43.813.695.885,19	65.732.326.290,78
17	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.6.3.1.2.		
18	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.6.3.1.2.1.	2.562.479.202,10	3.513.807.035,59
19	Dana Bergulir		2.562.479.202,10	3.513.807.035,59
20	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (18)		2.562.479.202,10	3.513.807.035,59
21	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.6.3.1.2.2.		
22	Penyertaan Modal		7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
23	JUMLAH INVESTASI PERMANEN (21)		7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
24	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (19 + 22)		10.386.179.202,10	11.337.507.035,59
25	ASET TETAP	7.6.3.1.3.		
26	Tanah	7.6.3.1.3.1.	171.615.482.367,00	171.615.482.367,00
27	Peralatan dan Mesin	7.6.3.1.3.2.	486.175.619.991,10	459.753.167.299,10
28	Gedung dan Bangunan	7.6.3.1.3.3.	960.163.136.909,33	926.886.684.259,33
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.6.3.1.3.4.	1.359.868.793.774,63	1.294.517.038.574,14
30	Aset Tetap Lainnya	7.6.3.1.3.5.	17.579.137.862,16	16.202.632.592,16
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.6.3.1.3.6.	120.430.598.775,31	114.008.496.706,80
32	Akumulasi Penyusutan	7.6.3.1.3.7.	(1.327.618.403.969,23)	(1.150.571.959.997,60)
33	JUMLAH ASET TETAP (25 s/d 31)		1.788.214.365.710,30	1.832.411.541.800,93
34	ASET LAINNYA	7.6.3.1.4.		
35	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.6.3.1.4.1.	849.286.283,93	300.055.779,93
36	Aset Tidak Berwujud	7.6.3.1.4.2.	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
37	Aset Lain-lain	7.6.3.1.4.3.	65.668.702.177,71	66.785.086.747,71
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.6.3.1.4.4.	(46.292.912.290,66)	(45.499.679.364,00)
39	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.6.3.1.4.5.	(51.575.072.459,94)	(57.951.009.224,94)
40	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.6.3.1.4.6.	3.916.735.000,00	21.553.208.050,00
41	JUMLAH ASET LAINNYA (34 s/d 39)		19.906.176.355,04	32.527.099.632,70
42				
43	JUMLAH ASET (15+23+32+40)		1.862.320.417.152,63	1.942.008.474.760,00
44				
45	KEWAJIBAN	7.6.3.2.		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.6.3.2.1.		
47	Pendapatan Diterima Dimuka	7.6.3.2.1.1.	49.503.589,58	34.125.000,00
48	Utang Belanja	7.6.3.2.1.2.	95.219.038.443,34	2.893.625.345,36

No.	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
49	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.6.3.2.1.3.	0,00	99.044.000,00
50	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (46 s/d 48)		95.268.542.032,92	3.026.794.345,36
51				
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.6.3.2.2.		
53	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
54	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (52)		0,00	0,00
55	JUMLAH KEWAJIBAN (49 + 53)		95.268.542.032,92	3.026.794.345,36
56				
57	EKUITAS	7.6.3.3.	1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64
58	Ekuitas		1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64
59	JUMLAH EKUITAS (57)		1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54 + 58)		1.862.320.417.152,63	1.942.008.474.780,00



4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2024 (Audited)	2023 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.6.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.6.4.1.1.				
4	Pajak Daerah - LO	7.6.4.1.1.1.	20.312.677.552,72	16.409.048.498,92	3.903.629.053,80	23,79
5	Retribusi Daerah - LO	7.6.4.1.1.2.	1.550.865.563,42	6.997.096.274,00	(5.446.230.710,58)	(77,84)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.6.4.1.1.3.	1.241.953.264,00	1.596.888.717,00	(354.935.453,00)	(22,23)
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	7.6.4.1.1.4.	14.237.554.078,94	4.410.012.597,73	9.827.541.481,21	222,85
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO (4 s/d 7)		37.343.050.459,08	29.413.046.087,65	7.930.004.371,43	26,96
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.6.4.1.2.	719.462.551.608,00	937.673.160.793,00	(218.210.609.185,00)	(23,27)
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.6.4.1.2.1.				
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO	7.6.4.1.2.1.1.	56.219.955.910,00	47.698.074.070,00	8.521.881.840,00	17,87
12	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO	7.6.4.1.2.1.2.	85.855.147.000,00	282.137.285.000,00	(196.282.138.000,00)	(69,57)
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	7.6.4.1.2.1.3.	395.427.123.385,00	383.849.195.981,00	11.577.927.404,00	3,02
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	7.6.4.1.2.1.4.	121.839.923.394,00	146.130.206.186,00	(24.290.282.792,00)	(16,82)
15	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO (11 s/d 14)		659.342.149.689,00	859.814.761.237,00	(200.472.611.548,00)	(23,32)
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.6.4.1.2.2.				
17	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	7.6.4.1.2.2.1.	0,00	10.659.002.000,00	(10.659.002.000,00)	(100,00)
18	Insentif Fiskal - LO	7.6.4.1.2.2.2.	5.680.723.000,00	5.697.153.000,00	(16.430.000,00)	(0,29)
19	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO (17 s/d 18)		5.680.723.000,00	16.356.155.000,00	(10.675.432.000,00)	(65,27)
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA - LO	7.6.4.1.2.3.				
21	Pendapatan Bagi Hasil - LO	7.6.4.1.2.3.1.	54.354.178.919,00	56.317.662.642,00	(1.963.483.723,00)	(3,49)
22	Bantuan Keuangan - LO	7.6.4.1.2.3.2.	85.500.000,00	5.184.581.914,00	(5.099.081.914,00)	(98,35)
23	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA - LO (21 s/d 22)		54.439.678.919,00	61.502.244.556,00	(7.062.565.637,00)	(11,48)
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (15 + 19 + 23)		719.462.551.608,00	937.673.160.793,00	(218.210.609.185,00)	(23,27)
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.6.4.1.3.				
26	Pendapatan Lainnya - LO		156.868.663,00	55.976.134,00	100.892.529,00	180,24
27	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (26)		156.868.663,00	55.976.134,00	100.892.529,00	180,24
28	JUMLAH PENDAPATAN - LO (8 + 24 + 27)		756.962.470.730,08	967.142.183.014,65	(210.179.712.284,57)	(21,73)
29	BEBAN - LO	7.6.4.2.				
30	BEBAN OPERASI - LO	7.6.4.2.1.				
31	Beban Pegawai - LO	7.6.4.2.1.1.	385.656.673.477,00	334.517.144.489,73	51.139.528.987,27	15,29
32	Beban Barang - LO	7.6.4.2.1.2.	82.075.266.624,78	85.994.032.217,74	(3.918.745.592,96)	(4,56)
33	Beban Jasa - LO	7.6.4.2.1.3.	160.561.731.211,11	191.310.121.160,00	(30.748.389.948,89)	(16,07)
34	Beban Pemeliharaan - LO	7.6.4.2.1.4.	4.392.930.276,00	5.109.736.048,00	(716.805.772,00)	(14,03)
35	Beban Perjalanan Dinas - LO	7.6.4.2.1.5.	46.998.224.310,00	47.617.887.044,00	(619.662.734,00)	(1,30)
36	Beban Hibah - LO	7.6.4.2.1.6.	23.100.436.536,00	17.149.119.101,00	5.951.317.435,00	34,70
37	Beban Bantuan Sosial - LO	7.6.4.2.1.7.	629.305.000,00	161.614.000,00	467.691.000,00	289,39
38	Beban Penyisihan Piutang - LO	7.6.4.2.1.8.	199.817.669,01	177.056.125,80	22.761.543,21	12,86
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	7.6.4.2.1.9.	177.839.676.898,29	142.530.604.004,24	35.309.072.894,05	24,77
40	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO (31 s/d 39)		881.454.082.002,19	824.567.314.190,51	56.886.767.811,68	6,90
41	BEBAN TRANSFER - LO	7.6.4.2.2.				

No	URAIAN	Reff.	2024 (Audited)	2023 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
42	Beban Bagi Hasil - LO	7.6.4.2.2.1.	2.016.563.086,00	2.298.647.561,00	(282.084.475,00)	(12,27)
43	Beban Bantuan Keuangan - LO	7.6.4.2.2.2.	56.124.357.640,50	71.479.364.034,00	(15.355.006.393,50)	(21,48)
44	JUMLAH BEBAN TRANSFER – LO (42 s/d 43)		58.140.920.726,50	73.778.011.595,00	(15.637.090.868,50)	(21,19)
45	JUMLAH BEBAN – LO (40 + 44)		939.595.002.728,69	898.345.325.785,51	41.249.676.943,18	4,59
46	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (28 - 45)		(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)
47	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.6.4.3.				
48	Surplus dari Kegiatan Non Operasional -LO			0,00	0,00	0,00
49	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
50	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (48 + 49)		0,00	0,00	0,00	0,00
51	SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI (48) - (49)		0,00	0,00	0,00	0,00
52	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (46 - 51)		(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)
53	POS LUAR BIASA	7.6.4.4.				
54	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
55	JUMLAH POS LUAR BIASA (54)		0,00	0,00	0,00	0,00
56	SURPLUS/DEFISIT-LO (52 - 55)	7.6.4.5.	(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.6.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.6.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	a	18.599.426.707,00	16.310.773.757,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	b	1.566.244.153,00	7.134.834.674,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	c	1.241.953.264,00	1.596.888.717,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	d	14.136.925.071,94	4.319.744.945,73
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	e	159.711.575.960,00	321.603.861.808,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	f	395.427.123.385,00	383.849.195.981,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	g	77.454.547.851,00	100.946.353.790,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	h	44.385.375.543,00	45.183.852.396,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	i	0,00	10.659.002.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	j	39.367.634.000,00	39.126.062.000,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal	k	5.680.723.000,00	5.697.153.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	l	51.691.545.772,00	56.757.976.060,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	m	85.500.000,00	5.184.581.914,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	n	156.868.663,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		809.505.443.369,94	998.370.281.042,73
18	Arus Keluar Kas	7.6.5.1.2.		
19	Pembayaran Pegawai	a	354.110.209.828,00	333.755.055.240,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	b	253.819.164.750,00	332.767.580.289,64
21	Pembayaran Belanja Hibah	c	23.100.436.536,00	17.149.119.101,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	d	629.305.000,00	161.614.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga	e	0,00	0,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	f	96.138.111.285,00	112.145.272.319,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 24)		727.797.227.399,00	795.978.640.949,64
26	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (17 - 25)		81.708.215.970,94	202.391.640.093,09
27				
28	Arus Kas dari Aktifitas Investasi	7.6.5.2.		
29	Arus Masuk Kas	7.6.5.2.1.		
30	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (30)		0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	7.6.5.2.2.		
33	Perolehan Tanah	a	0,00	0,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	b	26.372.465.503,00	51.188.694.187,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	c	26.344.494.672,00	34.500.354.929,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	d	50.267.079.992,00	96.909.592.427,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	e	1.436.066.270,00	1.692.901.437,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 37)		104.420.106.437,00	184.291.542.980,00

No.	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		(104.420.106.437,00)	(184.291.542.980,00)
40				
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.6.5.3.		
42	Arus Masuk Kas	7.6.5.3.1.		
43	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		984.223.303,67	865.045.016,02
44	Jumlah Arus Masuk Kas (43)		984.223.303,67	865.045.016,02
45	Arus Keluar Kas	7.6.5.3.2.		
46	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	2.000.000.000,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas (46)		0,00	2.000.000.000,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44 - 47)		984.223.303,67	(1.134.954.983,98)
49				
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.6.5.4.		
51	Arus Masuk Kas	7.6.5.4.1.		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (52)		50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
54	Arus Kas Keluar	7.6.5.4.2.		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
56	Jumlah Arus Keluar Kas (55)		50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53 - 56)		0,00	0,00
58				
59	Kenaikan/ (Penurunan) Kas (26 + 39 + 48 + 57)		(21.727.667.162,39)	16.965.142.129,11
60	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan		23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
61	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan (60 + 59)		2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
62	Kas di Kas Daerah		159.820.093,88	22.327.961.923,56
63	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	15.369.994,00
64	Kas di BLUD		1.456.758.963,29	0,00
65	Kas Dana BOS		1,12	1,12
66	Kas Lainnya		605.482.739,00	1.606.397.041,00
67	Saldo Akhir Kas (62 s/d 65)	7.6.5.5.	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	EKUITAS AWAL	7.6.6.	1.938.981.680.414,64	1.861.703.346.979,38
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		(182.632.531.998,61)	68.796.657.229,14
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
4	Koreksi Ekuitas Lainnya		10.702.726.703,68	8.481.476.206,12
5	Koreksi Nilai Persediaan		(889.931.857,50)	(2.088.453.017,53)
6	Koreksi Atas Perubahan Nilai Aset Tetap		0,00	1.550.630.304,25
7	Lain-lain		11.592.658.561,18	9.019.298.919,40
8	EKUITAS AKHIR		1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2024 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

7.1. PENDAHULUAN

7.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan Umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 189 sampai dengan Pasal 93. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- hh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024;
- ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Umum Tahun 2024;
- jj. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024;
- kk. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
- ll. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk kategori Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- mm. Buku Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia Edisi 2019;
- nn. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- vv. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Kas Daerah;
- ww. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- xx. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
- yy. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- zz. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- aaa. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- bbb. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ccc. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ddd. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- eee. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- fff. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ggg. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- hhh. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- iii. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- jjj. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- kkk. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- lll. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1284 Tahun 2024 tentang Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024.

7.1.4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebanyak 34 SKPD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
18. Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
25. Kecamatan Siantan;
26. Kecamatan Jemaja;
27. Kecamatan Palmatak;
28. Kecamatan Siantan Timur;
29. Kecamatan Siantan Selatan;
30. Kecamatan Jemaja Timur;
31. Kecamatan Siantan Tengah;
32. Kecamatan Siantan Utara;
33. Kecamatan Jemaja Barat; dan
34. Kecamatan Kute Siantan.

7.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

7.1.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7.1.4.3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah; dan
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

7.1.4.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah bersangkutan.

7.1.4.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

7.1.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.1.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

7.1.5. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

a. Letak Geografi

Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Saat ini Kabupaten Kepulauan Riau telah dimekarkan menjadi 6 kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang. Secara geografis, Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten kepulauan yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau yang eksotis dan indah yang berjumlah 255 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Secara administratif, beberapa pulau tersebut berbatasan langsung dengan perairan Negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau sebanyak 238 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 Km², dimana luas lautan lebih besar dari pada luas daratan yaitu 46.029,77 Km² (98,65 persen) dan luas daratan 634,37 Km² (1,35 persen). Menjadi Kabupaten di wilayah perbatasan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, membuat Anambas mempunyai pulau-pulau terluar. Dari 255 pulau yang ada di Anambas, lima diantaranya adalah lima pulau terluar dari Republik Indonesia.

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur. Keberadaan Kabupaten Kepulauan Anambas secara administratif memiliki sepuluh kecamatan yaitu: Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Kute Siantan.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38.70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37.37 mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak (± 208.41 mil) dan Siantan Tengah (± 205.16 mil).

Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut, untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202.29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205.97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318.91 mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640.72 mil

b. Demografi

Sebagai modal dasar pembangunan, penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar saja tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan & kesejahteraan secara umum. Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 50.922 (lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua) jiwa yang terdiri dari 26.187 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh) jiwa (51,43%) penduduk laki-laki dan 24.735 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa (48,57%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Siantan yang merupakan Pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 13.758 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa.

Tabel 1
Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

(Dalam Angka)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Siantan	7.073	6.685	13.758
2	Palatak	4.164	3.968	8.132
3	Siantan Timur	2.439	2.316	4.755
4	Siantan Selatan	2.114	1.957	4.071
5	Jemaja Timur	1.560	1.404	2.964
6	Jemaja Barat	582	561	1.143
7	Jemaja	3.287	3.201	6.488
8	Siantan Tengah	1.844	1.749	3.593
9	Siantan Utara	1.115	1.042	2.157
10	Kute Siantan	2.009	1.852	3.861
Total		26.187	24.735	50.922

7.2. KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu Tahun dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran), yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer). Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 mengalami lima kali pergeseran sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

7.2.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Semua Pendapatan Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan/Pendapatan Daerah merupakan rencana penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari atas pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 2) Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - 1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (Antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
 - 1) Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja
 - 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, diupayakan secara mandiri dalam jangka panjang melalui optimalisasi peningkatan PAD, yang dapat ditempuh antara lain melalui:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- b. Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
- c. Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- d. Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan

- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Penerapan law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- g. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- h. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;
- i. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
- j. Mengupayakan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bidang Jasa Pelayanan Pertambangan, dan lain-lain; dan
- k. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Alokasi belanja daerah dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah tahun anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang mejadi kewenangan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus mengganggu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Seluruh Penerimaan dan Belanja Daerah dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan pembagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Negara.

Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

- a. Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan yang masih tertuang dalam KUA dan PPAS. Prioritas pembangunan dilaksanakan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
- e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;
- g. Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- h. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (2) belanja modal;
- j. Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- k. Klasifikasi beban menurut kelompok beban terdiri dari: (1) beban operasi, beban transfer, defisit non anggaran dan beban luar biasa;
- l. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:
 - 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
 - 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

- m. Untuk mendukung Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga melakukan dukungan pendanaan terhadap:
- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah (APBD) untuk menjaga tingkat konsumsi serta investasi untuk meningkatkan *demand* guna menstimulus perekonomian khususnya disektor riil, Percepatan belanja modal dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong investasi tetapi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya;
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor industri pengolahan dengan mengutamakan tender-tender proyek Pemerintah kepada industri domestik seperti proyek tol laut pemerintah bagi komoditas perdagangan;
 - 3) Mempercepat proses perizinan khususnya terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 4) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani dengan memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi. serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban. termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
 - 5) Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah. antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya; dan
 - 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.
- n. Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

7.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (*defisit*) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan

dengan belanja terjadi keseimbangan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu. Kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan (*good governance*) yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran pegawai negeri sipil daerah khususnya dan seluruh masyarakat daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahunan, yang merupakan penjabaran RPJMD Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Kebijakan Keuangan pada Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan keuangan pada belanja daerah lebih menitikberatkan pada anggaran yang bersifat efektif, efisien dan ekonomi yang lebih memprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pada pembiayaan daerah di penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber pada sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dengan memberikan pinjaman daerah yang bersifat dana bergulir untuk mengentas kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan

lanjutan. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

- b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- f. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

- a. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7.2.3. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi

yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Produk Domestik Bruto pada Tingkat Nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tingkat Regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Nilai PDRB Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 19,24 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 667,6 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,91 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini utamanya di pengaruhi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan dari 11,21 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,19 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,62 persen, mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan ini murni berasal dari peningkatan maupun penurunan produksi lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kepulauan Anambas didominasi oleh lima sektor lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Jika mengeluarkan sektor migas, maka sektor Konstruksi; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berperan paling tinggi dalam perekonomian di Kepulauan Anambas.

Struktur ekonomi Kepulauan Anambas hingga tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 81,79% terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 peranan Pertambangan dan Penggalian sebesar 82,96%, menurun menjadi 80,07% pada tahun 2020. Pada 2021,

lapangan usaha ini kembali mengalami peningkatan menjadi 81,88% lalu menjadi 83,64% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 peranan sektor ini kembali mengalami penurunan menjadi 81,79%. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Konstruksi. Selama tahun 2019-2023 persentase lapangan usaha ini stabil pada angka 5% hingga 6%. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Konstruksi. Pada tahun 2021-2022 peranan lapangan usaha ini mengalami penurunan berturut-turut mencapai 5,53% dan 4,98%. Namun pada tahun 2023 lapangan usaha ini mengalami peningkatan peranan menjadi 5,52%. Selanjutnya, di urutan keempat ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,91%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2,55%. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,95%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 21,75%.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sebesar 11.19 triliun rupiah, nilai ini meningkat 0,62% jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11.12 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,62%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang mencapai 0,09%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas selama lima tahun terakhir adalah -1,44% per tahun. Dengan mengeluarkan sektor migas, perekonomian Kepulauan Anambas juga mengalami peningkatan. Rata-Rata pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas tanpa migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,44% per tahun. Pada tahun 2023 perekonomian Kepulauan Anambas (PDRB non migas) tumbuh sebesar 4,12% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,62%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dicapai oleh kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,43%. Sementara itu hanya kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,21%.

Tabel 2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s.d. 2023

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	5,07	6,10	5,53	4,98	5,52
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	82,96	80,07	81,88	83,64	81,79
Industri Pengolahan/ Manufacturing	0,12	0,16	0,14	0,13	0,14
Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,05	0,07	0,06	0,05	0,06
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi/Construction	5,51	6,10	5,75	5,12	5,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,46	2,87	2,65	2,55	2,91
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,19	0,14	0,14	0,13	0,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,41	0,52	0,48	0,41	0,48
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,12	0,15	0,13	0,11	0,12
Real Estat/Real Estate Activities	0,58	0,67	0,62	0,55	0,59
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,94	2,43	2,02	1,75	1,95
Jasa Pendidikan/Education	0,19	0,25	0,21	0,19	0,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,21	0,25	0,23	0,21	0,21
Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan/Note: * Angka Sementara/ Preliminary figures

** Angka Sangat Sementara/Very preliminary figures

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

Tabel 3
PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s.d. 2023

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,49	(2,15)	0,76	1,68	2,77
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	(1,13)	(8,76)	(0,55)	(0,72)	(0,21)
Industri Pengolahan/ Manufacturing	4,91	2,40	2,18	3,13	1,47
Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	(0,40)	2,24	2,94	2,83	2,83
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,85	3,56	(1,57)	3,75	2,28
Konstruksi/Construction	8,33	(5,67)	6,58	2,87	5,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,64	(6,21)	2,66	10,16	6,05
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1,92	(35,96)	6,69	10,44	4,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	9,57	(19,71)	8,32	10,95	5,28
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	11,44	5,59	6,40	3,17	9,43
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	3,59	2,71	1,44	1,25	3,35
Real Estat/Real Estate Activities	6,19	(3,35)	4,42	3,20	0,35
Jasa Perusahaan/Business Activities	5,47	(2,38)	1,31	3,34	0,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,01	3,64	(3,75)	3,07	2,76
Jasa Pendidikan/Education	4,09	3,40	(1,86)	3,88	3,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	7,26	(0,40)	3,90	5,46	(6,83)
Jasa Lainnya/Other Services Activities	5,26	(10,46)	2,40	8,68	1,92
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	(0,13)	(7,83)	0,04	0,09	0,62

Catatan/Note: * Angka Sementara/ Preliminary figures

** Angka Sangat Sementara/Very preliminary figures

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

7.2.4. **PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD berkaitan dengan beberapa urusan yang menjadi tanggungjawab Daerah antara lain:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi;
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
 - 1) Tenaga Kerja
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Pertanahan
 - 5) Lingkungan Hidup
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9) Perhubungan
 - 10) Komunikasi dan Informatika
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 12) Penanaman Modal
 - 13) Kepemudaan dan Olahraga
 - 14) Statistik
 - 15) Persandian
 - 16) Kebudayaan
 - 17) Perpustakaan
 - 18) Kearsipan
- c. Urusan Pilihan;
 - 1) Kelautan dan Perikanan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pertanian
 - 4) Perdagangan
 - 5) Perindustrian
- d. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah:
 - 1) Sekretariat DPRD

2) Sekretariat Daerah

e. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah:

- 1) Perencanaan
- 2) Keuangan
- 3) Kepegawaian
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- 5) Penelitian dan Pengembangan
- 6) Pengelolaan Perbatasan

f. Urusan Pengawasan:

- 1) Inspektorat Daerah

g. Unsur Kewilayahan:

- 1) Kecamatan

h. Unsur Pemerintahan Umum:

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebanyak delapan urusan, yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

7.2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 108 Program 263 Kegiatan dan 877 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp597.319.583.563,00 pada delapan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari delapan Program, 19 Kegiatan dan 248 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp236.907.118.707,00;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 Program 37 Kegiatan dan 144 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.410.959.576,00;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 35 Program 56 Kegiatan dan 105 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.608.731.913,00;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari empat Program 22 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.219.901.675,00;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 12 Program 23 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.701.288.767,00;

- f. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 20 Program 42 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.280.513.646,00;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 4 Program 20 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.853.276.586,00; dan
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terdiri dari 3 Program 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.337.792.693,00;

Tabel 4

Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	236.907.118.707,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	200.410.959.576,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	93.608.731.913,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.219.901.675,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.701.288.767,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.280.513.646,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.853.276.586,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.337.792.693,00
Jumlah		597.319.583.563,00

7.2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 107 Program, 208 Kegiatan dan 519 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.478.419.926,86 pada tujuh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari sepuluh Program, 27 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.372.540.696,00;
- b. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari terdiri dari 24 Program, 46 Kegiatan dan 115 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.638.390.570,86;
- c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari sepuluh Program, 28 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.302.285.071,00;
- d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 38 Program, 52 Kegiatan dan 93 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.264.528.288,00;

- e. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari 12 Program, 26 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.786.488.418,00;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sepuluh Program, 22 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.828.038.171,00; dan
- g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari tiga Program, tujuh Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.286.148.712,00.

Tabel 5
Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.372.540.696,00
2	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	21.638.390.570,86
3	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	14.302.285.071,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	12.264.528.288,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.786.488.418,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.828.038.171,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.286.148.712,00
Jumlah		74.478.419.926,86

7.2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan pilihan ditetapkan sebanyak 41 Program, 94 Kegiatan dan 242 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.350.283.795,00 pada dua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari 23 Program, 56 Kegiatan dan 139 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.632.578.043,00; dan
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 18 Program, 38 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.717.705.752,00.

Tabel 6
Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	19.632.578.043,00
2	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.717.705.752,00
Jumlah		27.350.283.795,00

7.2.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pendukung urusan pemerintahan ditetapkan sebanyak 100 Program, 303 Kegiatan dan 807 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp130.826.351.361,49 pada 12 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdiri dari:

Tabel 7
Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	51.680.682.784,00
2	Sekretariat Dprd	38.483.022.472,00
3	Kecamatan Siantan	6.210.702.332,00
4	Kecamatan Jemaja	6.709.844.032,00
5	Kecamatan Palmatak	4.946.195.674,49
6	Kecamatan Siantan Timur	3.451.777.086,00
7	Kecamatan Siantan Selatan	2.886.761.830,00
8	Kecamatan Jemaja Timur	3.321.897.306,00
9	Kecamatan Siantan Tengah	3.390.391.736,00
10	Kecamatan Siantan Utara	2.723.527.209,00
11	Kecamatan Jemaja Barat	2.936.048.862,00
12	Kecamatan Kute Siantan	4.085.500.038,00
Jumlah		130.826.351.361,49

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 12 SKPD sebagai berikut.

- Sekretariat Daerah terdiri dari delapan Program, 37 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.680.682.784,00;
- Sekretariat DPRD terdiri dari empat Program, 28 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.483.022.472,00;
- Kecamatan Siantan terdiri dari delapan Program, 27 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.167.702.332,00;
- Kecamatan Jemaja terdiri dari delapan Program, 24 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.657.344.032,00;
- Kecamatan Palmatak terdiri dari delapan Program, 22 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.946.195.674,49;
- Kecamatan Siantan Timur terdiri dari empat Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.451.777.086,00;
- Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari sembilan Program, 25 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.886.761.830,00;
- Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari sepuluh Program, 25 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.321.897.306,00;
- Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 12 Program, 29 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.390.391.736,00;
- Kecamatan Siantan Utara terdiri dari sembilan Program, 23 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.723.527.209,00;
- Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari delapan Program, 24 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.936.048.862,00; dan
- Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 12 Program, 29 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.085.500.038,00.

7.2.4.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak enam Program, 23 Kegiatan dan 87 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.628.867.075,00,00.

Tabel 8
Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Inspektorat Daerah	13.628.867.075,00
Jumlah		13.628.867.075,00

7.2.4.6. Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur perencanaan urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak delapan Program, 29 Kegiatan dan 113 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.908.668.747,72.

Tabel 9
Anggaran Unsur Perencanaan Urusan Pemerintah

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.908.668.747,72
Jumlah		14.908.668.747,72

7.2.4.7. Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur keuangan urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak delapan Program, 27 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp137.510.459.896,93.

Tabel 10
Anggaran Unsur Keuangan Urusan Pemerintah

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	137.510.459.896,93
Jumlah		137.510.459.896,93

7.2.4.8. Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur kepegawaian urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan

sebanyak enam Program, 21 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.353.516.312,00.

Tabel 11
Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.353.516.312,00
Jumlah		9.353.516.312,00

7.2.4.9. Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur penghubung urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak empat Program, 18 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.836.213.006,00.

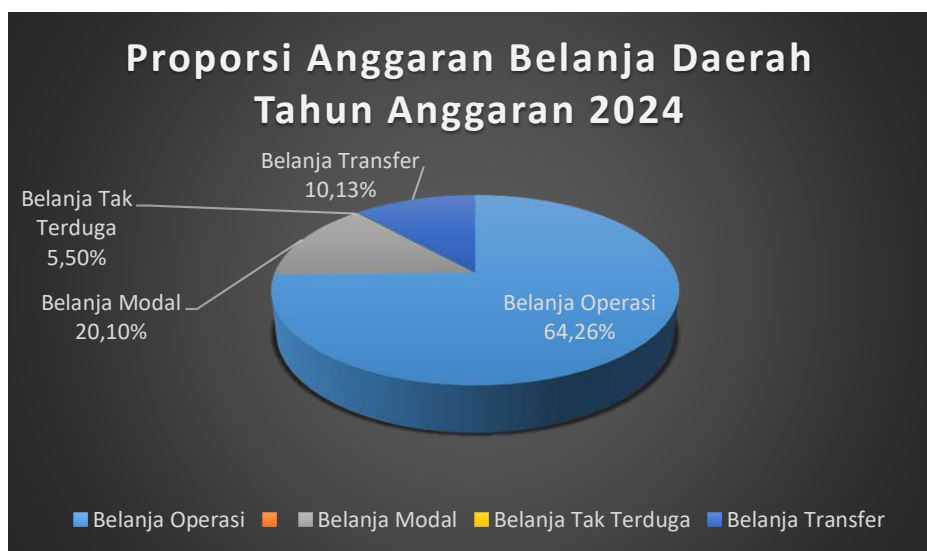
Tabel 12
Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.836.213.006,00
Jumlah		3.836.213.006,00

7.2.4.10. Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Adapun proporsi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 bila diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2024 dan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Pada Tahun 2024 terdapat dua kali Penetapan Perda APBD yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan yang ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama Tahun berjalan juga terdapat lima kali perubahan anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di Tahun 2024. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan – LRA	984.762.634.724,32	809.505.443.369,94	82,20	998.370.281.042,73
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	39.179.339.491,00	35.544.549.195,94	90,72	29.362.242.093,73
3	Pendapatan Transfer – LRA	942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07	969.008.038.949,00
4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA	2.779.500.000,00	156.868.663,00	5,64	0,00
5	Belanja Daerah	1.009.212.363.684,00	832.217.333.836,00	82,46	980.270.183.929,64
6	Belanja Operasi	753.364.429.755,18	631.659.116.114,00	83,85	683.833.368.630,64
7	Belanja Modal	141.992.627.668,31	104.420.106.437,00	73,54	184.291.542.980,00
8	Belanja Tak Terduga	1.959.397.381,51	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Transfer	111.895.908.879,00	96.138.111.285,00	85,92	112.145.272.319,00
10	Surplus / (Defisit)	(24.449.728.959,68)	(22.711.890.466,06)	92,89	18.100.097.113,09
11	Pembiayaan Daerah	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	5.849.631.846,57
12	Penerimaan Pembiayaan	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	7.849.631.846,59
13	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
14	Pembiayaan Netto	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	5.849.631.846,59
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	2.222.061.797,29	0,00	23.949.728.959,68

Pada bagian pendapatan terealisasi sebesar Rp809.505.443.369,94 dari target yang direncanakan sebesar Rp984.762.634.724,32 atau 82,20%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp832.217.333.836,00 dari target yang direncanakan sebesar Rp1.009.212.363.684,00 atau 82,46%. Akibat dari tidak tercapainya beberapa item pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit sebesar Rp22.711.890.466,06 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp24.449.728.959,68. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 adalah sebesar Rp24.933.952.263,35 bila dibandingkan dengan target TA 2024 sebesar

Rp24.449.728.959,68 atau 101,98%. Dengan Tercapainya beberapa anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

7.3.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

7.3.3.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.762.634.724,32 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp809.505.443.369,94 atau sebesar 82,20%.

Pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa kendala dalam penerimaan pada beberapa jenis pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp39.179.339.491,00 dan yang terealisasi sebesar Rp35.544.549.195,94 atau sebesar 90,72% yang disebabkan menurunnya penerimaan pendapatan atas target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024.
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Kepulauan Riau) yang ditargetkan sebesar Rp942.803.795.233,32 dan yang terealisasi sebesar Rp773.804.025.511,00 atau sebesar 82,07% dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik dalam penyerapan anggaran yang diterima dari pusat. dan tepat waktu pelaporan ke Kementerian Keuangan RI akan taatnya Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku akan tetapi ada beberapa kendala lain yaitu pengurangan Penyaluran penundaan transfer dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil, sehingga tidak tercapainya target pendapatan transfer Tahun 2024.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp2.779.500.000,00 dan terealisasi sebesar 156.868.663,00 atau sebesar 5,64% yang disebabkan tujuh Puskesmas dan tiga RSUD sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2024, sehingga Pendapatannya tidak lagi dicatat pada lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah, melainkan atas Pendapatan BLUD pada Lain-Lain PAD yang Sah.

7.3.3.2. Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.009.212.363.684,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp832.217.333.836,00 atau sebesar 82,46%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada kelompok yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp753.364.429.755,18 dan terealisasi sebesar Rp631.659.116.114,00 atau sebesar 83,85%;
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp141.992.627.668,31 dan terealisasi sebesar Rp104.420.106.437,00 atau sebesar 73,54%;

- c. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp1.959.397.381,51 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%; dan
- d. Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp111.895.908.879,00 dan terealisasi sebesar Rp96.138.111.285,00 atau sebesar 85,92%.

7.3.3.3. Surplus/Defisit

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2024, saat penganggaran mengalami defisit atas belanja daerah yang dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp24.449.728.959,68 dan pada saat sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit sebesar Rp22.711.890.466,06 atau sebesar 92,89%.

7.3.3.4. Pembiayaan Daerah Netto

Pembiayaan Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.449.728.959,68 dan terealisasi sebesar Rp24.933.952.263,35 atau sebesar 101,98% yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp24.449.728.959,68 dan terealisasi sebesar Rp24.933.952.263,35 atau sebesar 101,98% yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun lalu sebesar Rp23.949.728.959,68 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah atas Pokok Dana Bergulir sebesar Rp984.223.303,67.
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% artinya Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat ada pembiayaan dana bergulir bagi masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.3.3.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29.

7.4. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

7.4.2. Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi. dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabungkan dan/atau dikonsolidasikan di entitas pelaporan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023. Berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7.4.3. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. yang umumnya bercirikan (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024, meliputi 34 SKPD yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah yang mencakup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sembilan Bagian;
- b. Sekretariat DPRD mencakup DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. 14 Dinas yang mencakup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. Satu Satuan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Enam Badan yang mencakup Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah termasuk didalamnya SKPKD-PPKD, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- g. Sepuluh Kecamatan yang mencakup Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

7.4.4. Prosedur Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

7.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.5.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

7.5.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut melanjutkan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah berbasis akrual. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2024 telah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2024 adalah merupakan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pengakuan (*recognition*) dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

7.5.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

7.5.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD.
- d. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam

bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

7.5.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD.

- a. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan

terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan:

- a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah
 - 5) Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
 - 6) Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
 - 7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
 - 8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pendapatan-LO diakui apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retrisbusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Perda/Pergub/Perbup) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal bukti penerimaan dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengukuran Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- d. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.
- e. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - 1) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - 2) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- f. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- g. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam Surat Ketetapan dimaksud. Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, PERPRES tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.
- h. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan bersamaan dengan Pendapatan-LRA dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/BUD tanpa penetapan);
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi; dan
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA-LO adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.4.3. Akuntansi Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Belanja dan beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan organisasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga

Belanja dan Beban diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui penerbitan SP2D LS untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat SP2D GU/GUNihil/TU-Nihil terbit.
- c. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, BOS, JKN belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah, BOS, JKN dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
 Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
 Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah; dan
 - 2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
 Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
- d. Timbulnya kewajiban
 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Pengukuran

a. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Modal;
- c) Belanja Tak Terduga;
- d) Belanja Transfer.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.

d. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

e. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
- 3) Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO), Rincian dan Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Akun luar biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/Defisit dari kegiatan Non-Operasional.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e) Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

7.5.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat terjadinya penerimaan kas Daerah.
- b. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
- c. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas ke RKUD.
- d. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
- e. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi.
- f. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas keluar aktivitas operasi.
- g. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- h. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.

- i. Untuk kepentingan penyajian belanja transfer pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.
- j. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka dan dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengukuran

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
- c. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- d. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu

7.5.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengukuran

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- d. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengakuan

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - 1) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - 2) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
- b. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - 1) Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
 - 2) Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran
 - 3) Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - 4) Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - 5) Penerimaan daerah lainnya, antara lain penanaman perhitungan pihak ketiga.

- c. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - 1) Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran.
 - 2) Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah.
 - 3) Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga
- d. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penenmaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.
- e. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.
- f. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
- g. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - 1) Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
 - 2) Penyetoran uang pengembalian belanja UP/ GU /TU dan/ atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - 3) Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN
- h. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - 1) Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Penerimaan uang pengembalian belanja.
 - 3) Penerimaan jasa giro; dan
 - 4) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
- i. Uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.
- j. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

- k. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- l. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka Waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
- m. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - 1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - 2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
 - 3) Rincian dan nilai kas lainnya termasuk Dana BOS yang disajikan dalam laporan keuangan
- c. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- d. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
- f. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, mengungkapkan:
 - 1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah.

- 3) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.
- 4) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan.
- 5) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada).
- 6) Selisih kas (bila ada).
- 7) Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

7.5.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Pengakuan

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur.
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- c. Pengakuan Piutang Pajak:
 - 1) Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

- 2) Saldo Piutang Pajak diakui berdasarkan nilai tagihan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Kepulauan Anambas dikurangi dengan tagihan yang telah dibayar oleh wajib pajak.
 - 3) Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- d. Pengakuan Piutang:
- 1) Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan menggunakan karcis.
 - 2) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
 - 3) Piutang Retribusi diakui ketika wajib bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
 - 4) Penarikan pendapatan dengan menggunakan sistem karcis merupakan bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena penetapannya diakui pada saat karcis tersebut “terjual” kepada masyarakat (wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis. Karcis yang telah diporporasi dan masih dipegang oleh juru pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi.
 - 5) Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- e. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- f. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- g. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- h. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- i. Piutang transfer lainnya diakui:
- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima

- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- j. Piutang Bagi Hasil dari provinsi apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- k. Piutang transfer antar daerah apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- l. Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- m. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- n. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran dari piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebesar nilai penetapan yang diterbitkan oleh fungsi penetapan di SKPD. Besaran nilai penetapan didasarkan atas tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dikurangi dengan diskon atau potongan pendapatan. Dengan kata lain, Piutang Pendapatan disajikan secara netto.
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- 4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan perjanjian, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 5) Transaksi dibayar di muka
Dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan transfer yang berlaku;
 - 2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

- e. Dalam hal piutang atas objek pajak menjadi barang bukti atas kasus perdata atau pidana maka kualitas piutang menjadi macet.
- f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Piutang disajikan dan diungkapkan dalam neraca. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
 - 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - 5) Informasi lainnya yang dianggap penting.
- b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- d. Terhadap kejadian adanya kelebihan pembayaran piutang maka dilakukan pengembalian dengan mencatat:
 - 1) Mengurangi akun kas dan menambah akun Piutang; dan
 - 2) Mengurangi akun belanja yang digunakan untuk pengembalian kelebihan piutang dan akun Perubahan SAL.

7.5.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Pengakuan

- a. Persediaan diakui:
 - 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) pada saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- c. Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas sisa persediaan yang dimiliki secara berkala. Setelah stock opname, dilakukan rekonsiliasi atas saldo persediaan dengan fungsi akuntansi di PPK-SKPD hingga diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan P3B. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset, PPK-SKPD menerbitkan Memo Beban untuk mengakui beban persediaan tersebut.
- d. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
- e. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai Defisit Penghapusan Aset Lancar. Batasan materialitas atas persediaan adalah jika nilai selisih persediaan sebesar lebih dari 50% dari total nilai persediaan.
- f. Jika ditemukan beberapa persediaan barang yang masuk dalam kategori aset tetap ekstrakomptabel, maka Pengurus Barang melakukan koreksi pada saat stock opname, dengan mengurangi nilai Persediaan dan membebankannya pada Beban Persediaan.
- g. Jika terdapat retur atas persediaan, pengakuan atas retur tersebut bergantung pada jenis ganti rugi atas retur yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketentuan terkait retur adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa diakui sebagai pengurang persediaan dan beban (jika atas persediaan tersebut telah dibebankan di Laporan Operasional). Atas pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa yang tidak dimintakan penggantian berupa barang, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan penagihan untuk meminta pengembalian kas yang telah dibayarkan.
 - 2) Jika pengembalian persediaan kepada pihak ketiga berupa barang yang tidak sejenis dan berdampak pada penerimaan kas, maka dilakukan penjurnalan dengan menghapus persediaan yang lama dan menggantinya dengan yang baru serta menerima pengembalian kas. Kas yang diterima atas pengembalian retur tersebut disetorkan ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).
 - 3) Jika atas barang persediaan yang diretur tidak dilakukan penggantian dalam bentuk barang, maka Bendahara Pengeluaran meminta pengembalian dana atas pembelian persediaan dan menyetorkan penerimaan kas atas dana tersebut ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).
- h. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan.
- i. Persediaan diakui sebagai:
- 1) Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.
 - 2) Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Pengukuran

- a. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode:
- 1) Masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *First In First Out (FIFO)*, merupakan Metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama;
 - 2) Rata-rata atau yang dikenal dengan istilah *Average*, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga barang secara rata-rata selama periode Pelaporan; dan
 - 3) Harga perolehan terakhir, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.
- b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai

- benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.
- c. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.
 - d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 - e. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - f. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *FIFO*. Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.
 - g. Pembukuan atas persediaan terdiri dari:
 - 1) Buku penerimaan persediaan.
 - 2) Buku pengeluaran persediaan.
 - 3) Buku penyaluran persediaan.
 - 4) Kartu barang persediaan; dan
 - 5) Daftar persediaan rusak atau usang.
 - h. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - i. Nota permintaan persediaan sebagaimana diajukan kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.
 - j. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) atas persediaan yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b. Persediaan rusak atau usang dikeluarkan dari pencatatan persediaan.
- c. Mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengungkapan untuk Persediaan di dalam Laporan Keuangan antara lain:
- 1) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
 - b) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.5.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan

- a. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan

berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- b. Pada kondisi tertentu dimungkinkan terjadi perubahan status SKPD menjadi BUMD yang berdampak pada adanya transfer aset berupa barang dari SKPD kepada BUMD (inbreng). Inbreng aset tersebut menjadi salah satu bentuk penyertaan modal pemerintah kepada BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah penyertaan modal, untuk kemudian diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal. Jika proses aset ini dalam proses penyelesaian, maka perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - c. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
 - 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
 - 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
 - 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - 5) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- f. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- h. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyekproyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- i. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- j. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- k. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- l. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
 - 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - 6) Perubahan pos investasi; dan
 - 7) Penghapusbukuan investasi permanen dan non permanen.

7.5.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus

dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. **Penghentian dan Pelepasan**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.5.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
 - 3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 - 4) Jasa konsultasi yang dalam proses memperoleh aset tetap dimaksud pada tahun berjalan namun fisik atas aset tersebut belum selesai sampai tanggal pelaporan maka jasa konsultasi perencanaan tersebut dapat dicatat/disajikan ke dalam akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dibawah 4 (empat) Tahun. Namun jika fisik/konstruksi aset tetap tersebut belum selesai lebih dari masa 4 (empat) tahun maka jasa konsultasi tersebut dapat direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya (aset tak berwujud).
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
 - 3) Diterbitkannya BAPP/ PHO oleh Pengguna Anggaran/ PPKom.
- e. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- f. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dan disiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST). Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- i. DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang dipengaruhi oleh metode perolehan yang digunakan dalam proses konstruksi tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi serta biaya penyewaan sarana dan perlengkapan.
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain meliputi asuransi, biaya rancangan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.

- 2) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan.
 - 3) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana.
 - 4) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- 1) Asuransi.
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Sisa bahan pasca konstruksi yang dilakukan secara swakelola dan masih dapat digunakan kembali, maka akan dicatat sebagai persediaan dan mengurangi nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar nilai material yang tersisa.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah mencakup keduanya.
- i. Klaim pembayaran atas kontrak konstruksi dapat terjadi dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi biaya yang dapat diatribusikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- j. Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca.
- b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - 5) Retensi
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.
- d. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberikan gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

7.5.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pengakuan

- a. Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersamaan dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- d. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- f. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
- g. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- h. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran, dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan.
- i. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
- c. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada Kelompok Aset Non Lancar
- b. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah
- c. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya
- d. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang Sah sebagai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
- e. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Penerimaan Pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan

- f. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas masuk dari aktivitas investasi. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi
- g. Pengungkapan informasi mengenai Dana Cadangan pada akhir periode akuntansi, meliputi
 - 1) Rincian jenis Dana Cadangan dan dasar hukumnya
 - 2) Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan, dan tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan untuk setiap jenis dana cadangan
 - 3) Tujuan pembentukan setiap jenis Dana Cadangan
 - 4) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis Dana Cadangan; dan
 - 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Pengakuan

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- a. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Kepala

Daerah. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- e. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- f. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- g. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- h. Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar

pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.

- i. Dalam hal penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terdapat selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku kemitraan dengan pihak ketiga, maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan.
- j. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian

3) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

4) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset yang dikerjasamakan atau kemitraan dengan pihak ketiga selain tanah harus disusutkan selama masa kerjasama dan disajikan dalam Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Aset Lain-lain disajikan dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7.5.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, kerusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- d. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.

4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena Pemerintah Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

- e. Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai, barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.
- f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Kejadian yang diakui oleh pemerintah daerah ini dicatat sebagai kewajiban ketika memenuhi dua kriteria yaitu:
 - 1) Badan Legislatif telah menyetujui sumber daya yang akan digunakan
 - 2) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Pengukuran

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- d. Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- e. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Gati Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian

3) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

4) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
- b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Utang Pinjaman Jangka Pendek diungkapkan dalam CaLK.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.
- f. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/ akun Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masingmasing jenis utang diungkapkan dalam CaLK.
- h. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

7.5.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

- Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Penurunan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7.5.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

7.5.4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Penyajian

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
- d. Dalam Kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

7.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak melakukan Perubahan atas APBD dikarenakan tidak adanya kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan APBD-P yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, namun hanya mengadakan pergeseran APBD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati, hal ini disebabkan adanya target penerimaan yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga perlu adanya perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka penghematan belanja pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing jenis laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

7.6.1.1. PENDAPATAN - LRA

Penganggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sudah berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kode Akun Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek.

Kelompok Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	39.179.339.491,00	35.544.549.195,94	90,72	(3.634.790.295,06)	29.362.242.093,73
2	Pendapatan Transfer – LRA	942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07	(168.999.769.722,32)	969.008.038.949,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.779.500.000,00	156.868.663,00	5,64	(2.622.631.337,00)	0,00
JUMLAH		984.762.634.724,32	809.505.443.369,94	82,20	(175.257.191.354,38)	998.370.281.042,73

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.762.634.724,32 terealisasi sebesar Rp809.505.443.369,94 atau 82,20% mengalami penurunan sebesar Rp188.864.837.672,79 atau sebesar 18,92% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp998.370.281.042,73. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp35.544.549.195,94, Pendapatan Transfer sebesar Rp773.804.025.511,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp156.868.663,00. Masing-masing anggaran dan realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

7.6.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan potensi daerah yang dimiliki, tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerah tersebut. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pemungutan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi PAD untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.559.538.747,00	18.599.426.707,00	82,45	(3.960.112.040,00)	16.310.773.757,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.650.745.981,00	1.566.244.153,00	33,68	(3.084.501.828,00)	7.134.834.674,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1.241.953.264,00	94,23	(76.066.499,00)	1.596.888.717,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.651.035.000,00	14.136.925.071,94	132,73	3.485.890.071,94	4.319.744.945,73
JUMLAH		39.179.339.491,00	35.544.549.195,94	90,72	(3.634.790.295,06)	29.362.242.093,73

Tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Anggaran PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.179.339.491,00 dan direalisasikan sebesar Rp35.544.549.195,94 atau 90,72% mengalami peningkatan sebesar Rp6.182.307.102,21 atau 21,06% dibandingkan realisasi dari TA 2023 sebesar Rp29.362.242.093,73. Masing-masing PAD dengan rincian sebagai berikut.

7.6.1.1.1. Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak ini dikenakan atas kegiatan atau objek yang ada dalam daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan menjadi salah satu sumber utama PAD. Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	3.473.022.094,00	5.442.897.052,00	156,72	1.969.874.958,00	4.180.998.324,00
2	Pajak Restoran	11.572.998.115,00	9.590.597.282,00	82,87	(1.982.400.833,00)	8.394.722.978,00
3	Pajak Hiburan	173.509.307,00	64.588.609,00	37,22	(108.920.698,00)	68.345.250,00
4	Pajak Reklame	79.500.000,00	10.113.325,00	12,72	(69.386.675,00)	14.509.300,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.450.590.067,00	2.563.596.994,00	47,03	(2.886.993.073,00)	2.551.351.688,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	68.244.164,00	6.500.000,00	9,52	(61.744.164,00)	4.500.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan	639.975.000,00	33.516.661,00	5,24	(606.458.339,00)	155.490.397,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
8	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	545.200.000,00	403.033.850,00	73,92	(142.166.150,00)	431.488.704,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	556.500.000,00	481.482.934,00	86,52	(75.017.066,00)	509.367.116,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	0,00
JUMLAH		22.559.538.747,00	18.599.426.707,00	82,45	(3.960.112.040,00)	16.310.773.757,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.559.538.747,00 terealisasi sebesar Rp18.599.426.707,00 atau 82,45% dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.288.652.950,00 atau sebesar 14,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.310.773.757,00.

Terdapat dua metode pembayaran pajak daerah yaitu metode *self assessment* dan *official assessment*. Perhitungan pajak dengan *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Metode perhitungan *self assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan. Metode perhitungan *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Metode perhitungan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

7.6.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	3.473.022.094,00	5.442.897.052,00	156,72	1.969.874.958,00	4.180.998.324,00
JUMLAH		3.473.022.094,00	5.442.897.052,00	156,72	1.969.874.958,00	4.180.998.324,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.473.022.094,00 terealisasi sebesar Rp5.442.897.052,00 atau 156,72%. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.261.898.728,00 atau sebesar 30,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.180.998.324,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan dan tumbuhnya roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana salah satu Wajib Pajak penyumbang terbesar Tahun 2024 adalah PT. Pulau Bawah yang melakukan operasional dibidang pariwisata khususnya pengelolaan *resort*.

7.6.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.572.998.115,00	706.570.058,00	6,11	(10.866.428.057,00)	1.035.685.114,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	385.226.317,00	100,00	385.226.317,00	214.060.885,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	1.128.700,00	100,00	1.128.700,00	556.500,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	77.078.987,00	100,00	77.078.987,00	74.622.980,00
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	8.420.593.220,00	100,00	8.420.593.220,00	7.069.797.499,00
JUMLAH		11.572.998.115,00	9.590.597.282,00	82,87	(1.982.400.833,00)	8.394.722.978,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.572.998.115,00 terealisasi sebesar Rp9.590.597.282,00 atau 82,87% dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.195.874.304,00 atau sebesar 14,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.394.722.978,00. Kenaikan pajak restoran dikarenakan meningkatnya realisasi dibandingkan dengan tahun lalu yaitu pada pajak jasa boga/katering dan sejenisnya, Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, Pajak Kantin dan Sejenisnya, serta Pajak Warung dan Sejenisnya.

7.6.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pajak ini dikenakan pada berbagai kegiatan

hiburan yang diadakan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang diselenggarakan oleh individu atau badan usaha. Pendapatan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan komersil yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hiburan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya	173.509.307,00	64.588.609,00	37,22	(108.920.698,00)	60.067.250,00
2	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278.000,00
JUMLAH		173.509.307,00	64.588.609,00	37,22	(108.920.698,00)	68.345.250,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.509.307,00 terealisasi sebesar Rp64.588.609,00 atau 37,22% dan mengalami penurunan sebesar Rp3.756.641,00 atau sebesar 5,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.345.250,00. Penurunan tersebut dikarenakan berbagai faktor salah satu diantaranya yaitu berkurangnya frekuensi acara hiburan seiring dengan melemahnya kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

7.6.1.1.1.4. Pendapatan Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak atas pemasangan reklame atau iklan. Pajak ini dikenakan pada pihak yang menyelenggarakan atau memasang reklame dengan tujuan komersial, baik itu berupa iklan luar ruang (seperti baliho, spanduk, atau billboard) maupun bentuk reklame lainnya. Tarif Pajak Reklame yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Papan/Bill Board/Wideotron/Megatron	79.500.000,00	10.113.325,00	12,72	(69.386.675,00)	14.509.300,00
JUMLAH		79.500.000,00	10.113.325,00	12,72	(69.386.675,00)	14.509.300,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp79.500.000,00 terealisasi sebesar Rp10.113.325,00 atau 12,72% dan mengalami penurunan sebesar Rp4.395.975,00 atau sebesar 30,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.509.300,00. Penurunan tersebut dikarenakan salah satunya adanya pengurangan terhadap penempatan iklan fisik seperti reklame luar, baliho, dan peralihan ke iklan digital.

7.6.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum. Pajak ini dipungut dari pihak yang menyediakan layanan penerangan jalan, yang umumnya adalah pemerintah daerah atau pihak lain yang diberi izin untuk menyediakan penerangan di jalan-jalan umum. Pajak Penerangan Jalan biasanya dihitung berdasarkan penggunaan listrik untuk penerangan jalan yang diterima oleh pemerintah daerah dari PLN atau penyedia listrik lainnya. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem penerangan jalan di wilayah tersebut.

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	315.086.297,00	100,00	315.086.297,00	2.551.351.688,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.450.590.067,00	2.248.510.697,00	41,25	(3.202.079.370,00)	0,00
JUMLAH		5.450.590.067,00	2.563.596.994,00	47,03	(2.886.993.073,00)	2.551.351.688,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.450.590.067,00 terealisasi sebesar Rp2.563.596.994,00 atau 47,03% dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.245.306,00 atau sebesar 0,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.551.351.688,00. Kenaikan tersebut dikarenakan salah satu faktor yaitu adanya peningkatan jumlah konsumen dan bertambahnya wajib Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan perkembangan.

7.6.1.1.1.1.6. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Sarang Burung Walet	68.244.164,00	6.500.000,00	9,52	(61.744.164,00)	4.500.000,00
JUMLAH		68.244.164,00	6.500.000,00	9,52	(61.744.164,00)	4.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.244.164,00 terealisasi sebesar Rp6.500.000,00 atau 9,52% dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 44,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.500.000,00. Kenaikan tersebut dikarenakan salah satunya dengan adanya kenaikan produksi yang dihasilkan oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan telah dilakukan penagihan secara maksimal kepada wajib pajak.

7.6.1.1.1.1.7. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas kegiatan penambangan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam non-logam dan batuan. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	74.548,00
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	639.975.000,00	33.516.661,00	5,24	(606.458.339,00)	155.415.849,00
JUMLAH		639.975.000,00	33.516.661,00	5,24	(606.458.339,00)	155.490.397,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp639.975.000,00 terealisasi sebesar Rp33.516.661,00 atau 5,24% dan mengalami penurunan sebesar Rp121.973.736,00 atau sebesar 78,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp155.490.397,00. Penurunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi industri pertambangan, dan kebijakan pemerintah. Pada Tahun 2024 tidak dilakukan penagihan secara maksimal karena terkendala dengan wilayah tambang yang belum di tetapkan serta izin usaha tambang yang tidak ada. Kemudahan adanya larangan terhadap aktivitas pertambangan, baik penambangan pasir maupun bebatuan yang selama ini telah mendukung pembangunan di Kepulauan Anambas. Sehingga dengan adanya larangan tersebut maka pendapatan pajak atas mineral bukan logam dan batuan juga menurun.

7.6.1.1.1.8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2024 sudah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya telah mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan)	545.200.000,00	403.033.850,00	73,92	(142.166.150,00)	431.488.704,00
JUMLAH		545.200.000,00	403.033.850,00	73,92	(142.166.150,00)	431.488.704,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp545.200.000,00 terealisasi sebesar Rp403.033.850,00 atau 73,92% dan mengalami penurunan sebesar Rp28.454.854,00 atau 6,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.488.704,00. Penurunan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2024 disebabkan beberapa faktor diantaranya penurunan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sejalan dengan kondisi keuangan Daerah yang tidak setabil dan Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar karena sertifikat yang dimiliki masih terhutang meskipun sudah membayara PBB dan masyarkat tidak memahami perbedaan antara PBB dengan BPHTB.

7.6.1.1.1.9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pendapatan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPHTB berfungsi sebagai salah satu instrumen fiskal daerah yang mendukung pendapatan daerah dan memastikan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan tercatat dengan baik. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan BPHTB dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	BPHTB - Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	0,00	145.419.380,00
2	BPHTB - Pemberian Hak Baru	556.500.000,00	481.482.934,00	86,52	(75.017.066,00)	363.947.736,00
JUMLAH		556.500.000,00	481.482.934,00	86,52	(75.017.066,00)	509.367.116,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp556.500.000,00 terealisasi sebesar Rp481.482.934,00 atau 86,52% dan mengalami penurunan sebesar Rp27.884.182,00 atau sebesar 5,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp509.367.116,00. Penurunan tersebut

dikarenakan pendapatan BPHTB sering kali berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pasar properti dan transaksi properti, seperti berkurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.1.10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan PBJT dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan PBJT Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	0,00
JUMLAH		0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp3.100.000,00 atau 100% dan Tahun Anggaran 2023 tidak ada Realisasi. Kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 sudah mulai dilakukan pemungutan atas Pajak PBJT tersebut kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian ditambah dengan Adanya kegiatan hiburan yang dilakukan masyarakat dengan menginformasikan kepada BPKPD.

7.6.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Retribusi Daerah adalah pembayaran atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan atas pemanfaatan atau penggunaan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh SKPD penghasil, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dipungut berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	4.278.111.466,00	1.053.504.040,00	24,63	(3.224.607.426,00)	6.822.245.472,00
2	Retribusi Jasa Usaha	322.634.515,00	159.778.550,00	49,52	(162.855.965,00)	16.500.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	352.961.563,00	705,92	302.961.563,00	296.089.202,00
JUMLAH		4.650.745.981,00	1.566.244.153,00	33,68	(3.084.501.828,00)	7.134.834.674,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.650.745.981,00 terealisasi sebesar Rp1.566.244.153,00 atau sebesar 33,68% dan mengalami penurunan sebesar Rp5.568.590.521,00 atau sebesar 78,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.134.834.674,00. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan realisasi pada Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, di mana pada Tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki BLUD, sehingga Penganggaran Jasa Pelayanan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih dianggarkan pada rekening pendapatan retribusi, namun pada Tahun 2024 untuk Jasa Pelayanan Rumah Sakit Realisasinya sudah berada pada masing-masing BLUD serta dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.6.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap masyarakat sebagai imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas dan layanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa umum ini meliputi layanan yang bersifat non-komersial dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, persampahan, parkir, dan pasar. Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.248.111.466,00	722.067.300,00	17,00	(3.526.044.166,00)	6.450.166.852,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	30.884.000,00	123,54	5.884.000,00	54.408.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	287.002.740,00	100,00	287.002.740,00	317.670.620,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	13.550.000,00	271,00	8.550.000,00	0,00
JUMLAH		4.278.111.466,00	1.053.504.040,00	24,63	(3.224.607.426,00)	6.822.245.472,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.278.111.466,00 terealisasi sebesar Rp1.053.504.040,00 atau 24,63%. Mengalami penurunan sebesar Rp5.768.741.432,00 atau sebesar 84,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.822.245.472,00. Rincian lebih lanjut atas Retribusi Jasa Umum sebagai berikut.

7.6.1.1.2.1.1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	29.382.600,00	100,00	29.382.600,00	299.396.452,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.248.111.466,00	692.684.700,00	16,31	(3.555.426.766,00)	6.150.770.400,00
JUMLAH		4.248.111.466,00	722.067.300,00	17,00	(3.526.044.166,00)	6.450.166.852,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.248.111.466,00 terealisasi sebesar Rp722.067.300,00 atau 17,00% dan mengalami penurunan sebesar Rp5.728.099.552,00 atau sebesar 88,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.450.166.852,00. Penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuh Puskesmas dan tiga RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga Pencatatan atas Penerimaan jasa pelayanan yang diberikan tersebut tidak lagi pada pendapatan retribusi melainkan pada pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

7.6.1.1.2.1.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pungutan atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan untuk masyarakat. Retribusi ini termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau badan. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan masyarakat. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan persampahan atau kebersihan dilakukan oleh unit penghasil yaitu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	13.550.000,00	271,00	8.550.000,00	0,00
JUMLAH		5.000.000,00	13.550.000,00	271,00	8.550.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan atau kebersihan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.550.000,00 atau 271,00% dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.550.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah mengatur mekanisme dan tarif atas retribusi tersebut.

7.6.1.1.2.1.3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area tepi jalan umum. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan parkir, dan pengelolaan lalu lintas di area tersebut. Tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas

Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	30.884.000,00	123,54	5.884.000,00	54.408.000,00
JUMLAH		25.000.000,00	30.884.000,00	123,54	5.884.000,00	54.408.000,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.884.000,00 atau 123,54%. Mengalami penurunan sebesar Rp23.524.000,00 atau sebesar 43,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.408.000,00. Kenaikan tersebut dikarenakan semakin bertambahnya wajib pajak atas pertumbuhan jumlah kendaraan dari Tahun ke Tahun yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.2.1.4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Pasar dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Los	0,00	65.833.240,00	100,00	65.833.240,00	77.282.820,00
2	Retribusi Kios	0,00	221.169.500,00	100,00	221.169.500,00	240.387.800,00
JUMLAH		0,00	287.002.740,00	100,00	287.002.740,00	317.670.620,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp287.002.740,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp30.667.880,00 atau sebesar 9,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp317.670.620,00.

7.6.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat satu retribusi yaitu sebagai berikut.

Tabel 33
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	252.634.515,00	0,00	0,00	(252.634.515,00)	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
3	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	70.000.000,00	114.447.000,00	163,50	44.447.000,00	0,00
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	45.331.550,00	100,00	45.331.550,00	0,00
JUMLAH		322.634.515,00	159.778.550,00	49,52	(162.855.965,00)	16.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp322.634.515,00 terealisasi sebesar Rp159.778.550,00 atau sebesar 49,52% dan mengalami peningkatan sebesar Rp143.278.550,00 atau sebesar 868,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.500.000,00. Kenaikan tersebut didasari oleh beberapa faktor teknis yang dilakukan oleh Instansi Pengelola Retribusi, salah satu diantaranya yaitu dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karenanya dilakukan pengoptimalan dan juga sejalan atas rekomendasi temuan BPK pada Tahun 2023 atas pajak retribusi tersebut, misalnya retribusi atas jasa kepelabuhan Letung dan Palmatak yang pada Tahun sebelumnya belum optimal. Sehingga atas dasar tersebut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan meningkat dari tahun sebelumnya.

7.6.1.1.2.2.1. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	252.634.515,00	0,00	0,00	(252.634.515,00)	0,00
JUMLAH		252.634.515,00	0,00	0,00	(252.634.515,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.634.515,00 dan Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan pemindahan rekening penerimaan tersebut ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar.

7.6.1.1.2.2.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	70.000.000,00	114.447.000,00	163,50	44.447.000,00	16.500.000,00
JUMLAH		70.000.000,00	114.447.000,00	163,50	44.447.000,00	16.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar Rp114.447.000,00 atau 163,50% dan mengalami peningkatan sebesar Rp97.947.000,00 atau sebesar 593,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.500.000,00. Kenaikan tersebut salah satu diantaranya yaitu dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karenanya dilakukan pengoptimalan dan juga sejalan atas rekomendasi temuan BPK pada Tahun 2023 atas pajak retribusi tersebut, misalnya retribusi atas jasa kepelabuhan Letung dan Palmatak yang pada Tahun sebelumnya belum optimal. Sehingga atas dasar tersebut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan meningkat dari tahun sebelumnya.

7.6.1.1.2.2.3. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari pemanfaatan atau penggunaan aset-aset milik daerah, seperti tanah, gedung, bangunan, kendaraan, atau fasilitas lainnya. Aset daerah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, baik itu individu, perusahaan, atau instansi lain, dengan syarat membayar retribusi atau tarif yang telah ditentukan. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dari pemanfaatan atau penggunaan aset milik daerah oleh pihak lain. Aset daerah yang dimaksud bisa berupa tanah, bangunan, fasilitas, atau sumber daya lainnya yang

dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan atau diberikan izin pemanfaatannya kepada individu, badan usaha, atau pihak lain. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	45.331.550,00	100,00	45.331.550,00	0,00
JUMLAH		0,00	45.331.550,00	100,00	45.331.550,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp45.331.550,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp45.331.550,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 penganggaran dan realisasinya terdapat pada Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Sewa BMD, namun pada Tahun 2024 penganggaran dan realisasinya dipindahkan ke rekening yang sesuai yakni Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rincian atas Pemanfaatan Aset Daerah tersebut terdiri dari:

- Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Oleh PT. TELKOM INDONESIA, Tbk sebesar Rp37.500.000,00 selama jangka waktu 25 Tahun, dimulai dari 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2046;
- Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Daerah Oleh PT. PALAPA RING BARAT sebesar Rp Rp11.902.125,00 selama jangka waktu 5 Tahun, terhitung sejak 23 November 2024 sampai dengan 23 November 2029;
- Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Oleh PT. JASTIPMAN COMMERCE MART sebesar Rp31.049.000,00 selama 2 Tahun, namun sewanya baru dibayarkan oleh pihak ketiga selama 1 Tahun, terhitung mulai 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Februari 2026.

7.6.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah jenis pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang dianggap memerlukan izin dari pemerintah daerah, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, Izin Lingkungan ataupun Izin Reklame. Retribusi ini dikenakan kepada pihak yang ingin memperoleh izin tersebut sebagai kompensasi atas pelayanan atau pengawasan yang diberikan oleh pemerintah

daerah. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	296.089.202,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00	352.961.563,00	705,92	302.961.563,00	0,00
JUMLAH		50.000.000,00	352.961.563,00	705,92	302.961.563,00	296.089.202,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp352.961.563,00 atau 705,92% dan mengalami peningkatan sebesar Rp56.872.361,00 atau sebesar 19,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp296.089.202,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan atas permohonan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga secara otomatis pendapatan atas retribusi tersebut juga meningkat.

7.6.1.1.2.3.1. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	296.089.202,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	296.089.202,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi dan mengalami penurunan sebesar Rp296.089.202,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp296.089.202,00. Penurunan tersebut dikarenakan pada penganggaran dan Realisasi Tahun 2023 pada rekening Retribusi Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan sedangkan pada Tahun 2024 pada rekening Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

7.6.1.1.2.3.2. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi persetujuan Bangunan Gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00	352.961.563,00	705,92	302.961.563,00	0,00
JUMLAH		50.000.000,00	352.961.563,00	705,92	302.961.563,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp352.961.563,00 atau 705,92%. Mengalami kenaikan sebesar Rp352.961.563,00 atau sebesar 100% dan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan atas permohonan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga berdampak positif terhadap Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

7.6.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri Syariah. Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.318.019.763,00	1.241.953.264,00	94,23	(76.066.499,00)	1.596.888.717,00
JUMLAH		1.318.019.763,00	1.241.953.264,00	94,23	(76.066.499,00)	1.596.888.717,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.318.019.763,00 terealisasi sebesar Rp1.241.953.264,00 atau sebesar 94,23% merupakan pembagian laba hasil rapat umum pemegang saham tahun 2023 atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri Syariah. Mengalami penurunan sebesar Rp354.935.453,00 atau sebesar 22,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.596.888.717,00. Penurunan tersebut terjadi secara fluktuatif seiring dengan perkembangan dan kemajuan Bisnis Perseroan yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Syariah, Tbk atas Laba yang diperoleh selama tahun berjalan, dan atas Laba tersebutlah yang sebahagiannya akan dibagikan ke para pemegang saham dalam bentuk Dividen.

7.6.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah selain dari sumber-sumber pendapatan utama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini bersifat tidak rutin atau tidak terduga dan dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku. Jenis pendapatan ini umumnya berasal dari kegiatan atau sumber lain yang sah, yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau pendapatan daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Pendapatan dari 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro	1.020.000.000,00	294.915.462,00	28,91	(725.084.538,00)	393.602.509,00
2	Hasil Dari Pengelolaan dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873.135,00
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	245.677.995,00	100,00	245.677.995,00	299.985.828,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.079.950.187,47	100,00	1.079.950.187,47	350.982.674,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.915.000,00	3.199.734.979,59	818,52	2.808.819.979,59	284.238.838,59
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.400.000,00	111.382.220,00	545,99	90.982.220,00	157.602.101,10
7	Pendapatan Denda Retribusi	15.300.000,00	870.028,00	5,69	(14.429.972,00)	121.320,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	509.159.500,00	100,00	0,00	1.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
9	Pendapatan Dari Pengembalian	9.167.700.000,00	602.748.534,00	6,57	(8.564.951.466,00)	430.543.912,04
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.793.628,00
11	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.720.000,00	41.302.548,00	112,48	4.582.548,00	0,00
13	Pendapatan BLUD	0,00	8.051.183.617,88	100,00	8.051.183.617,88	0,00
JUMLAH		10.651.035.000,00	14.136.925.071,94	132,73	3.485.890.071,94	4.319.744.945,73

Tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.651.035.000,00 terealisasi sebesar Rp14.136.925.071,94 atau 132,73% dan mengalami peningkatan sebesar Rp9.817.180.126,21 atau sebesar 227,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.319.744.945,73. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapatnya Pendapatan dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah menjadi BLUD pada Tahun 2024, sehingga pencatatan Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas tersebut tidak lagi pada Pendapatan Retribusi seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan pada rekening Lain-lain PAD – Pendapatan BLUD.

7.6.1.1.4.1. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa atas penempatan dana pada perbankan. Penerimaan jasa giro dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.020.000.000,00	294.915.462,00	28,91	(725.084.538,00)	393.602.509,00
JUMLAH		1.020.000.000,00	294.915.462,00	28,91	(725.084.538,00)	393.602.509,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.020.000.000,00 terealisasi sebesar Rp294.915.462,00 atau 28,91% dan mengalami penurunan sebesar Rp98.687.047,00 atau sebesar 25,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.602.509,00. Penurunan atas pendapatan Jasa Giro disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah semakin banyak dana yang tersedia pada rekening bank dalam jangka waktu yang relatif lama, maka pendapatan jasa giro juga semakin besar, nah hal ini sejalan yang terjadi pada Tahun 2024 dengan ketidak stabilan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.4.2. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir merupakan bunga dari pengguliran pembiayaan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat untuk mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873.135,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	43.873.135,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 tidak terdapat Realisasi dan mengalami penurunan sebesar Rp43.873.135,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.873.135,00. Penurunan tersebut dikarenakan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi menyalurkan atas pengeluaran pembiayaan, kemudian penganggaran dan realisasi pada tahun sebelumnya juga berbeda dengan tahun 2024. Tahun sebelumnya terdapat pada rekening hasil pengelolaan dana bergulir, namun pada Tahun 2024 penganggaran dan realisasinya terdapat pada rekening pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

7.6.1.1.4.3. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil bunga yang diperoleh atas simpanan atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan bunga ini berasal dari dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau investasi lainnya yang menghasilkan bunga Pendapatan. Pendapatan Bunga pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* hasil penyaluran Dana Bagi Hasil atas Remunerasi pada rekening *TDF*. Penerimaan atas pendapatan Bunga dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	245.677.995,00	100,00	245.677.995,00	299.985.828,00
JUMLAH		0,00	245.677.995,00	100,00	245.677.995,00	299.985.828,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Rekening *TDF* Tahun Anggaran 2024 yang

dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp245.677.995,00 atau 100% dan mengalami penurunan sebesar Rp54.307.833,00 atau sebesar 18,10% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp299.985.828,00.

7.6.1.1.1.4.4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	81.307.000,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.079.950.187,47	100,00	1.079.950.187,47	269.675.674,00
JUMLAH		0,00	1.079.950.187,47	100,00	1.079.950.187,47	350.982.674,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah atas pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.079.950.187,47 atau 100% dan mengalami peningkatan sebesar Rp728.967.513,47 atau sebesar 207,69% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp350.982.674,00. Kenaikan tersebut seiring dengan dilakukan pembayaran atau penyetoran oleh pihak-pihak yang diharuskan melakukan pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti pengerjaan paket pekerjaan dll sebagainya atas kekurangan volume, denda keterlambatan maupun temuan lainnya.

7.6.1.1.1.4.5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.915.000,00	3.199.734.979,59	818,52	2.808.819.979,59	284.238.838,59
JUMLAH		390.915.000,00	3.199.734.979,59	818,52	2.808.819.979,59	284.238.838,59

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp390.915.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp3.199.734.979,59 atau 818,52%. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.915.496.141,00 atau sebesar 1.025,72% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp284.238.838,59. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pekerjaan yang menyebabkan adanya denda.

7.6.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan keterlambatan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda Pajak dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih / Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.400.000,00	8.108.883,00	39,75	(12.291.117,00)	53.922.580,00
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	103.273.337,00	100,00	103.273.337,00	103.331.811,10
3.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	152.910,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		20.400.000,00	111.382.220,00	545,99	90.982.220,00	157.602.101,10

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.400.000,00 terealisasi sebesar Rp111.382.220,00 atau 545,99% dan mengalami penurunan sebesar Rp46.219.881,10 atau sebesar 29,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp157.602.101,10. Penurunan tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, kedepan akan terus ditingkatkan dalam sosialisasi terhadap wajib pajak, sehingga memberikan edukasi

terhadap kewajiban yang timbul akibat pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pengembalian/penyetoran atas keterlambatan penyetoran atas retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	15.300.000,00	870.028,00	5,69	(14.429.972,00)	121.320,00
JUMLAH		15.300.000,00	870.028,00	5,69	(14.429.972,00)	121.320,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.300.000,00 terealisasi sebesar Rp870.028,00 atau 5,69% dan mengalami peningkatan sebesar Rp748.708,00 atau sebesar 617,13% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.320,00. Kenaikan tersebut sejalan dengan telah dibayarnya atas kewajiban denda oleh Wajib Pajak retribusi atas penyewaan kios/los/pelataran yang digunakan oleh wajib pajak itu sendiri.

7.6.1.1.4.8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan merupakan eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan/proyek yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	509.159.500,00	100,00	0,00	1.000,00
JUMLAH		0,00	509.159.500,00	100,00	0,00	1.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp509.159.500,00 atau sebesar 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar Rp509.158.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000,00. Kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat hasil klaim atas uang jaminan pekerjaan Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan.

7.6.1.1.4.9. Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengembalian dana atau aset yang sebelumnya telah dikeluarkan

atau disalurkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini biasanya berasal dari pengembalian pinjaman, pengembalian investasi, atau hasil dari transaksi lainnya yang melibatkan aliran dana. Pendapatan Dari Pengembalian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan perimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Barang Alat Tulis Kantor, Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	137.002.086,04
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	4.548.249,00	100,00	4.548.249,00	1.000.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	25.966.278,00	100,00	25.966.278,00	3.400,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	292.167.200,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	241.843.090,00	100,00	241.843.090,00	131.226,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.167.700.000,00	63.414.359,00	0,69	(9.104.285.641,00)	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	202.078.960,00	100,00	202.078.960,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	64.897.598,00	100,00	64.897.598,00	0,00
JUMLAH		9.167.700.000,00	602.748.534,00	6,57	(8.564.951.466,00)	430.543.912,04

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pengembalian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.167.700.000,00 terealisasi sebesar Rp602.748.534,00 atau 6,57% dan mengalami peningkatan sebesar Rp172.204.621,96 atau sebesar 40,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp430.543.912,04. Kenaikan atas pendapatan pengembalian tersebut diantaranya karena adanya kelebihan pembayaran yang telah dilakukan pada Tahun sebelumnya, seperti pengembalian belanja atas gaji pokok ASN, tambahan penghasilan, belanja atas barang dan jasa pada Tahun sebelumnya. Sehingga secara akuntansi diakui pada pendapatan atas pengembalian, namun apabila pengembalian belanja dilakukan pada tahun berjalan maka secara otomatis akan mengurangi atas belanja yang telah dilaksanakan.

7.6.1.1.4.10. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah pendapatan yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum Daerah dari kegiatan yang dilakukannya dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. BLUD merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan seperti efisiensi, efektivitas, dan transparansi, tanpa berorientasi pada keuntungan (*profit*). Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan BLUD masing-masing puskesmas dan RSUD. Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP2B) yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Pelayanan	0,00	8.051.183.617,88	100,00	8.051.183.617,88	0,00
JUMLAH		0,00	8.051.183.617,88	100,00	8.051.183.617,88	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp8.051.183.617,88 atau 100,00% dan Tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi dikarenakan belum terbentuknya BLUD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.1.4.11. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan masing-masing puskesmas dan Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 52
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Puskesmas Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00	247.586.209,00
2	Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	854.050.384,00
3	Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	239.970.909,00
4	Puskesmas Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	222.041.552,00
5	Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	118.059.505,00
6	Puskesmas Letung	0,00	0,00	0,00	0,00	413.155.710,00
7	Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	203.630.984,00
8	Puskesmas Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	60.298.375,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.793.628,00

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat Anggaran dan Realisasi pada Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun Anggaran 2024 pada Rekening Lain-lain PAD yang Sah dikarenakan tujuh puskesmas terkecuali Puskesmas Kute Siantan telah ditetapkan menjadi BLUD pada Tahun 2024, sedangkan Pendapatan JKN pada Puskesmas Kute Siantan dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024.

7.6.1.1.4.12. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir merupakan pendapatan atas bunga hasil dari penyaluran dana bergulir. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.720.000,00	41.302.548,00	112,48	4.582.548,00	0,00
	JUMLAH	36.720.000,00	41.302.548,00	112,48	4.582.548,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.302.548,00 atau 112,48%. Tidak terdapat Realisasi pada Tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pada Rekening Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

7.6.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan transfer adalah dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan ini tidak diperoleh melalui penerimaan daerah sendiri, seperti pajak atau retribusi, melainkan sebagai alokasi dari pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah. Pendapatan Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	829.911.776.066,00	676.978.622.739,00	81,57	(152.933.153.327,00)	851.583.263.975,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	49.259.836.176,32	45.048.357.000,00	91,45	(4.211.479.176,32)	55.482.217.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	63.632.182.991,00	51.777.045.772,00	81,37	(11.855.137.219,00)	61.942.557.974,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH	942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07	(168.999.769.722,32)	969.008.038.949,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp942.803.795.233,32 terealisasi sebesar Rp773.804.025.511,00 atau 82,07%. Mengalami penurunan sebesar Rp195.204.013.438,00 atau sebesar 20,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp969.008.038.949,00 penurunan tersebut dikarenakan tidak tercapainya realisasi Penerimaan Dana Transfer Pusat (DTU), dan tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui PMK nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

7.6.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN - LRA

Pendapatan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 55

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	55.929.267.000,00	77.483.389.960,00	138,54	21.554.122.960,00	70.647.320.020,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)-LRA	242.378.019.066,00	82.228.186.000,00	33,93	(160.149.833.066,00)	250.956.541.788,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	398.812.700.000,00	395.427.123.385,00	99,15	(3.385.576.615,00)	383.849.195.981,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	132.791.790.000,00	121.839.923.394,00	91,75	(10.951.866.606,00)	146.130.206.186,00
	JUMLAH	829.911.776.066,00	676.978.622.739,00	81,57	(152.933.153.327,00)	851.583.263.975,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp829.911.776.066,00 terealisasi sebesar Rp676.978.622.739,00 atau 81,57% dan mengalami penurunan sebesar Rp174.604.641.236,00 atau sebesar 20,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp851.583.263.975,00. Penurunan tersebut dikarenakan Pendapatan DBH Kabupaten Kepulauan Anambas terbesar bersumber dari bagi hasil migas, pada tahun 2024 penerimaan hasil *lifting* migas dan PNBP mengalami penurunan sehingga alokasi tahun 2024 disesuaikan oleh Pemerintah Pusat.

7.6.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan Pajak Sumber Daya Alam (SDA). Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	38.745.768.000,00	60.298.976.050,00	155,63	21.553.208.050,00	48.372.500.950,00
2	DBH PPh Pasal 21	17.173.096.000,00	16.485.571.000,00	96,00	(687.525.000,00)	21.245.524.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	0,00	687.525.000,00	100,00	687.525.000,00	1.025.591.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.403.000,00	11.317.910,00	108,79	914.910,00	3.704.070,00
JUMLAH		55.929.267.000,00	77.483.389.960,00	138,54	21.554.122.960,00	70.647.320.020,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.929.267.000,00 terealisasi sebesar Rp77.483.389.960,00 atau 138,54% dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.836.069.940,00 atau sebesar 9,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.647.320.020,00. Peningkatan atas Dana Bagi Hasil pajak tersebut dikarenakan satunya adalah adanya pencairan atas pencatatan TDF tahun sebelumnya yang baru dicairkan pada Tahun 2024 sebesar Rp21.553.208.050,00.

7.6.1.1.2.1.2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	76.026.621.000,00	15.826.261.000,00	20,82	(60.200.360.000,00)	120.101.629.788,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	160.149.833.066,00	60.200.360.000,00	37,59	(99.949.473.066,00)	121.755.230.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	339.945.000,00	339.945.000,00	100,00	0,00	1.456.472.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	0,00	884.582.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.219.000,00	12.219.000,00	100,00	0,00	20.186.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.849.401.000,00	5.849.401.000,00	100,00	0,00	6.738.442.000,00
JUMLAH		242.378.019.066,00	82.228.186.000,00	33,93	(160.149.833.066,00)	250.956.541.788,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.378.019.066,00 terealisasi sebesar Rp82.228.186.000,00 atau 33,93% dan mengalami penurunan sebesar Rp168.728.355.788,00 atau sebesar 67,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp250.956.541.788,00. Hal ini dikarenakan belum ditransfernya atas Kekurangan Bayar (KB) atas bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.2.1.3. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU Tahun Anggaran 2024 terdiri dari DAU Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	DAU	398.812.700.000,00	299.390.806.000,00	75,07	(99.421.894.000,00)	383.849.195.981,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	3.504.211.385,00	100,00	3.504.211.385,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	37.815.691.000,00	100,00	37.815.691.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	18.358.729.000,00	100,00	18.358.729.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	35.957.686.000,00	100,00	35.957.686.000,00	0,00
JUMLAH		398.812.700.000,00	395.427.123.385,00	99,15	(3.385.576.615,00)	383.849.195.981,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.812.700.000,00 terealisasi sebesar Rp395.427.123.385,00 atau 99,15% dan mengalami peningkatan sebesar Rp11.577.927.404,00 atau sebesar 3,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp383.849.195.981,00. Kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 penyaluran DAU sudah terbagi menjadi beberapa tambahan diantaranya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

7.6.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LRA

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. dana alokasi khusus yang dimaksud terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana DAK untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 59

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.130.560.000,00	77.454.547.851,00	90,98	(7.676.012.149,00)	100.946.353.790,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.661.230.000,00	44.385.375.543,00	93,13	(3.275.854.457,00)	45.183.852.396,00
JUMLAH		132.791.790.000,00	121.839.923.394,00	91,75	(10.951.866.606,00)	146.130.206.186,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan DAK yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Pendapatan DAK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.791.790.000,00 terealisasi sebesar Rp121.839.923.394,00 atau 91,75%. Mengalami penurunan sebesar Rp24.290.282.792,00 atau sebesar 16,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp146.130.206.186,00.

Penurunan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya DAK mengalami penurunan sesuai dengan ketetapan saat melakukan *desk* dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan penyerapan DAK tahun 2023. Semakin bagus kinerja pemda dalam kesiapan dokumen serta penyerapan pelaksanaan maka DAK yang diberikan juga semakin besar.

7.6.1.1.2.1.4.1. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024, dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	332.474.000,00	323.711.674,00	97,36	(8.762.326,00)	349.986.799,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.909.044.000,00	4.675.896.704,00	95,25	(233.147.296,00)	2.883.218.250,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.113.118.000,00	4.848.832.152,00	94,83	(264.285.848,00)	4.804.046.488,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	30.394.193.964,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	431.819.000,00	431.817.800,00	100,00	(1.200,00)	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.375.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.143.896,00
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.989.919.000,00	4.739.683.039,00	94,99	(250.235.961,00)	7.388.968.284,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	40.857.513.154,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan	43.139.480.000,00	36.834.695.472,00	85,39	(6.304.784.528,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Kesiapan Sistem Kesehatan					
14	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	740.308.155,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan - Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297.599.800,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	7.447.216.000,00	7.284.866.630,00	97,82	(162.349.370,00)	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	1.276.395.000,00	1.188.000.000,00	93,07	(88.395.000,00)	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Jalan- Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	9.708.592.000,00	9.482.820.726,00	97,67	(225.771.274,00)	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Jalan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.782.503.000,00	7.644.223.654,00	98,22	(138.279.346,00)	0,00
JUMLAH		85.130.560.000,00	77.454.547.851,00	90,98	(7.676.012.149,00)	100.946.353.790,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan DAK Fisik yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.130.560.000,00 terealisasi sebesar Rp77.454.547.851,00 atau 90,98%. Mengalami penurunan sebesar Rp23.491.805.939,00 atau sebesar 23,27% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp100.946.353.790,00. Akun-akun yang terdapat diatas disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penurunan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya DAK mengalami penurunan sesuai dengan ketentuan saat melakukan *desk* dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan penyerapan DAK tahun 2023. Semakin bagus kinerja pemda dalam kesiapan dokumen serta penyerapan pelaksanaan maka DAK yang diberikan juga semakin besar.

7.6.1.1.2.1.4.2. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 61
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	14.891.643.000,00	14.167.148.000,00	95,13	(724.495.000,00)	12.465.674.840,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	992.295.000,00	1.348.250.000,00	135,87	355.955.000,00	792.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.097.131.000,00	5.251.328.000,00	103,03	154.197.000,00	3.397.479.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.930.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	290.840.000,00	267.340.000,00	91,92	(23.500.000,00)	331.940.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.231.228.000,00	1.991.487.580,00	89,26	(239.740.420,00)	11.544.321.621,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.228.732,00
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00		0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00		0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00	220.971.000,00	53,22	(194.207.000,00)	311.077.880,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	106.146.862,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	478.768.000,00	92,07	(41.232.000,00)	598.000.000,00
13	DAK Non Fisik-BOS Reguler	11.577.680.000,00	11.577.680.000,00	100,00	0,00	12.117.053.461,00
14	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	362.566.000,00	362.566.000,00	100,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.586.870.000,00	1.586.870.000,00	100,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.732.781.000,00	3.117.590.409,00	83,52	(615.190.591,00)	0,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	341.831.000,00	0,00	0,00	(341.831.000,00)	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.121.187.000,00	3.515.376.554,00	68,64	(1.605.810.446,00)	0,00
JUMLAH		47.661.230.000,00	44.385.375.543,00	93,13	(3.275.854.457,00)	45.183.852.396,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan DAK Non Fisik yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.661.230.000,00 terealisasi sebesar Rp44.385.375.543,00 atau 93,13%. Mengalami penurunan sebesar Rp798.476.853,00 atau

sebesar 1,77% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp45.183.852.396,00. Penurunan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya DAK mengalami penurunan sesuai dengan ketentuan saat melakukan *desk* dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan penyerapan DAK tahun 2023. Semakin bagus kinerja pemda dalam kesiapan dokumen serta penyerapan pelaksanaan maka DAK yang diberikan juga semakin besar.

7.6.1.1.2.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA – LRA

Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 62
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659.002.000,00
2	Dana Desa	39.367.634.000,00	39.367.634.000,00	100,00	0,00	39.126.062.000,00
3	Insentif Fiskal	9.892.202.176,32	5.680.723.000,00	57,43	(4.211.479.176,32)	5.697.153.000,00
JUMLAH		49.259.836.176,32	45.048.357.000,00	91,45	(4.211.479.176,32)	55.482.217.000,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.259.836.176,32 terealisasi sebesar Rp45.048.357.000,00 atau 91,45%. Mengalami penurunan sebesar Rp10.433.860.000,00 atau sebesar 18,81% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp55.482.217.000,00. Penurunan atas realisasi tersebut merupakan penyesuaian dan perubahan atas alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi menerima Dana Insentif Daerah (DID), padahal Tahun sebelumnya menerima sebesar Rp10.659.002.000,00 atas kinerja, inovasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659.002.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	10.659.002.000,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasinya, dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 Sebesar Rp10.659.002.000,00.

7.6.1.1.2.2.2. Dana Desa - LRA

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Desa	39.367.634.000,00	39.367.634.000,00	100,00	0,00	39.126.062.000,00
JUMLAH		39.367.634.000,00	39.367.634.000,00	100,00	0,00	39.126.062.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.367.634.000,00 terealisasi sebesar Rp39.367.634.000,00 atau 100,00%. Mengalami peningkatan sebesar Rp241.572.000,00 atau sebesar 0,62% dibandingkan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp39.126.062.000,00. Berikut ini Rincian Anggaran dan Realisasi pada masing-masing Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kenaikan tersebut karena pada Tahun 2024 terdapat Insentif Desa setiap Desa sebagaimana terdapat pada PMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Nama Desa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	800.689.000	800.689.000	100,00	0,00	991.945.000
2	Desa Tarempa Selatan	955.408.000	955.408.000	100,00	0,00	872.105.000
3	Desa Tarempa Timur	748.684.000	748.684.000	100,00	0,00	1.002.162.000
4	Desa Pesisir Timur	678.344.000	678.344.000	100,00	0,00	671.635.000
5	Desa Sri Tanjung	681.762.000	681.762.000	100,00	0,00	799.774.000

No	Nama Desa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
6	Desa Tarempa Barat Daya	640.184.000	640.184.000	100,00	0,00	634.274.000
7	Desa Mampok	923.144.000	923.144.000	100,00	0,00	713.590.000
8	Desa Rewak	709.256.000	709.256.000	100,00	0,00	703.096.000
9	Desa Air Biru	695.457.000	695.457.000	100,00	0,00	689.561.000
10	Desa Batu Berapit	881.667.000	881.667.000	100,00	0,00	670.885.000
11	Desa Landak	686.606.000	686.606.000	100,00	0,00	680.085.000
12	Desa Tebang	698.927.000	698.927.000	100,00	0,00	1.081.844.000
13	Desa Ladan	957.673.000	957.673.000	100,00	0,00	746.267.000
14	Desa Piabung	747.838.000	747.838.000	100,00	0,00	874.892.000
15	Desa Langir	677.774.000	677.774.000	100,00	0,00	932.573.000
16	Desa Candi	767.922.000	767.922.000	100,00	0,00	629.281.000
17	Desa Putik	1.166.697.000	1.166.697.000	100,00	0,00	1.090.145.000
18	Desa Belibak	623.320.000	623.320.000	100,00	0,00	617.529.000
19	Desa Nyamuk	902.799.000	902.799.000	100,00	0,00	698.950.000
20	Desa Batu Belah	1.102.497.000	1.102.497.000	100,00	0,00	1.147.404.000
21	Desa Munjan	895.678.000	895.678.000	100,00	0,00	756.746.000
22	Desa Serat	680.175.000	680.175.000	100,00	0,00	674.255.000
23	Desa Air Putih	707.845.000	707.845.000	100,00	0,00	702.764.000
24	Desa Temburun	713.130.000	713.130.000	100,00	0,00	706.277.000
25	Desa Kiabu	751.619.000	751.619.000	100,00	0,00	744.704.000
26	Desa Telaga	671.536.000	671.536.000	100,00	0,00	665.602.000
27	Desa Mengkait	767.122.000	767.122.000	100,00	0,00	888.261.000
28	Desa Tiangau	777.918.000	777.918.000	100,00	0,00	639.676.000
29	Desa Telaga Kecil	665.936.000	665.936.000	100,00	0,00	659.681.000
30	Desa Lingai	680.118.000	680.118.000	100,00	0,00	674.151.000
31	Desa Air Bini	861.656.000	861.656.000	100,00	0,00	722.256.000
32	Desa Kuala Maras	737.588.000	737.588.000	100,00	0,00	731.632.000
33	Desa Ulu Maras	716.491.000	716.491.000	100,00	0,00	706.487.000
34	Desa Bukit Padi	691.657.000	691.657.000	100,00	0,00	681.761.000
35	Desa Genting Pulur	650.832.000	650.832.000	100,00	0,00	905.468.000
36	Desa Air Asuk	788.671.000	788.671.000	100,00	0,00	650.384.000
37	Desa Air Sena	693.728.000	693.728.000	100,00	0,00	688.077.000
38	Desa Teluk Siantan	806.556.000	806.556.000	100,00	0,00	668.006.000
39	Desa Lidi	630.395.000	630.395.000	100,00	0,00	624.698.000
40	Desa Liuk	606.193.000	606.193.000	100,00	0,00	600.696.000
41	Desa Teluk Sunting	614.549.000	614.549.000	100,00	0,00	736.870.000
42	Desa Impol	644.910.000	644.910.000	100,00	0,00	638.918.000
43	Desa Keramat	647.262.000	647.262.000	100,00	0,00	641.399.000
44	Desa Sunggak	857.183.000	857.183.000	100,00	0,00	652.591.000
45	Desa Mubur	729.990.000	729.990.000	100,00	0,00	723.964.000
46	Desa Piasan	1.037.280.000	1.037.280.000	100,00	0,00	1.083.472.000
47	Desa Bayat	740.184.000	740.184.000	100,00	0,00	861.829.000
48	Desa Payalaman	635.698.000	635.698.000	100,00	0,00	757.774.000

No	Nama Desa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
49	Desa Teluk Bayur	830.180.000	830.180.000	100,00	0,00	750.236.000
50	Desa Matak	711.520.000	711.520.000	100,00	0,00	573.735.000
51	Desa Batu Ampar	671.969.000	671.969.000	100,00	0,00	667.189.000
52	Desa Payamaram	705.417.000	705.417.000	100,00	0,00	698.506.000
JUMLAH		39.367.634.000	39.367.634.000	100,00	0,00	39.126.062.000

7.6.1.1.2.2.3. Insentif Fiskal - LRA

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja Tahun berjalan kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 353 Tahun 2024. Dana Insentif Fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 66
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Fiskal	9.892.202.176,32	5.680.723.000,00	57,43	(4.211.479.176,32)	5.697.153.000,00
JUMLAH		9.892.202.176,32	5.680.723.000,00	57,43	(4.211.479.176,32)	5.697.153.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.892.202.176,32 terealisasi sebesar Rp5.680.723.000,00 atau 57,43%. Mengalami penurunan sebesar Rp16.430.000,00 atau sebesar 0,29% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 Sebesar Rp5.697.153.000,00. Penurunan insentif fiskal pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan fiskal yang diambil oleh pemerintah, kondisi perekonomian nasional dan global serta pengalihan prioritas. Mungkin Pemerintah Pusat mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk insentif fiskal ke sektor-sektor yang dianggap lebih berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang misalnya Makan Bergizi.

7.6.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan di Kabupaten

Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil	63.546.682.991,00	51.691.545.772,00	81,34	(11.855.137.219,00)	56.757.976.060,00
2	Bantuan Keuangan	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	0,00	5.184.581.914,00
JUMLAH		63.632.182.991,00	51.777.045.772,00	81,37	(11.855.137.219,00)	61.942.557.974,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp63.632.182.991,00 terealisasi sebesar Rp51.777.045.772,00 atau 81,37%. Mengalami penurunan sebesar Rp10.165.512.202,00 atau sebesar 16,41% dibandingkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp61.942.557.974,00. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2024 terjadi karena terdapatnya tunda salur yang lebih besar dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dan pengurangan atas alokasi yang diberikan seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

7.6.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah atas Bagi Hasil Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Alokasi besaran bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 491 Tahun 2024. Perhitungan alokasi besaran bagi hasil pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan atau potensi antar Kabupaten/Kota. Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Kendaraan Bermotor	13.738.789.033,00	11.701.308.075,00	85,17	(2.037.480.958,00)	11.161.392.653,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.863.288.294,00	9.183.800.214,00	84,54	(1.679.488.080,00)	9.863.893.123,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	26.132.365.600,00	21.066.616.066,00	80,62	(5.065.749.534,00)	26.451.407.690,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
4	Pajak Air Permukaan	1.239.298.538,00	39.175.346,00	3,16	(1.200.123.192,00)	36.649.384,00
5	Pajak Rokok	11.572.941.526,00	9.700.646.071,00	83,82	(1.872.295.455,00)	9.244.633.210,00
JUMLAH		63.546.682.991,00	51.691.545.772,00	81,34	(11.855.137.219,00)	56.757.976.060,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp63.546.682.991,00 terealisasi sebesar Rp51.691.545.772,00 atau 81,34%. Mengalami penurunan sebesar Rp5.066.430.288,00 atau sebesar 8,93% dibandingkan realisasi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp56.757.976.060,00. Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil diatur dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 Tahun 2024 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Penurunan Pendapatan Bagi Hasil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 terjadi karena terdapatnya tunda salur yang lebih besar dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dan pengurangan atas alokasi yang diberikan seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

7.6.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah untuk membantu menjalankan program pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bantuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	0,00	5.184.581.914,00
JUMLAH		85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	0,00	5.184.581.914,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.500.000,00 terealisasi sebesar Rp85.500.000,00 atau 100%. Mengalami penurunan sebesar Rp5.099.081.914,00 atau sebesar 98,35% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.184.581.914,00. Besaran alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Riau diatur pada SK Gubernur Nomor 760 Tahun 2024 serta perubahan atas SK Gubernur Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dalam rangka operasional Pemerintah Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya pada Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka oprasioanal pemerintahan desa/kelurahan dan operasional lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan bukan pada Bantuan Keuangan dalam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas seperti tahun-tahun sebelumnya.

7.6.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

7.6.1.1.3.1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA

Pendapatan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) adalah dana yang diterima oleh FKTP, seperti Puskesmas, klinik, atau dokter, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Sistem kapitasi merupakan pembayaran tetap yang diberikan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar di fasilitas tersebut, tanpa memperhatikan jenis atau jumlah layanan yang diberikan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.779.500.000,00	156.868.663,00	5,64	(2.622.631.337,00)	0,00
JUMLAH		2.779.500.000,00	156.868.663,00	5,64	(2.622.631.337,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.779.500.000,00 terealisasi sebesar Rp156.868.663,00 atau 5,64%. Mengalami kenaikan sebesar Rp156.868.663,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut dikarenakan Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat pada rekening Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sedangkan pada Tahun 2023 pada Lain-lain PAD yang Sah hal ini dikarenakan mengikuti proses penganggaran yang telah ditetapkan melalui Perda APBD oleh TAPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.2. BELANJA – LRA

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Pengeluaran ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kode Akun Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek. Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana berikut.

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio	Lebih/	Realisasi
		2024	2024	(%)	(Kurang)	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Operasi	753.364.429.755,18	631.659.116.114,00	83,85	(121.705.313.641,18)	683.833.368.630,64
2	Belanja Modal	141.992.627.668,31	104.420.106.437,00	73,54	(38.081.680.731,31)	184.291.542.980,00
3	Belanja Tak Terduga	1.959.397.381,51	0,00	0,00	(1.959.397.381,51)	0,00
4	Belanja Transfer	111.895.908.879,00	96.138.111.285,00	85,99	(15.757.797.594,00)	112.145.272.319,00
JUMLAH		1.009.212.363.684,00	832.217.333.836,00	82,46	(176.995.029.848,00)	980.270.183.929,64

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.009.212.363.684,00 terealisasi sebesar Rp832.217.333.836,00 atau 82,46%. Mengalami penurunan sebesar Rp148.052.850.093,64 atau sebesar 15,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp980.270.183.929,64.

7.6.1.2.1. BELANJA OPERASI - LRA

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini bersifat rutin dan berkaitan langsung dengan operasional pemerintah. Belanja operasi meliputi berbagai jenis pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan administrasi dan kegiatan pemerintah yang berkelanjutan, misalnya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio	Lebih/	Realisasi
		2024	2024	(%)	(Kurang)	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	398.951.969.307,00	354.110.209.828,00	88,76	(44.841.759.479,00)	333.755.055.240,00
2	Belanja Barang dan Jasa	330.415.185.292,18	253.819.164.750,00	76,82	(76.596.020.542,18)	332.767.580.289,64
3	Belanja Hibah	23.314.479.156,00	23.100.436.536,00	99,08	(214.042.620,00)	17.149.119.101,00
4	Belanja Bantuan Sosial	682.796.000,00	629.305.000,00	92,17	(53.491.000,00)	161.614.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH	753.364.429.755,18	631.659.116.114,00	83,85	(121.705.313.641,18)	683.833.368.630,64

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp753.364.429.755,18 terealisasi sebesar Rp631.659.116.114,00 atau 83,85%. Mengalami penurunan sebesar Rp52.174.252.516,64 atau sebesar 7,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp683.833.368.630,64. Sedangkan untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan akan diungkapkan tersendiri yang tak terpisahkan dari Kelompok Belanja.

7.6.1.2.1.1. Belanja Pegawai -LRA

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	156.673.611.963,80	150.440.762.197,00	96,02	(6.232.849.766,80)	125.466.719.618,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	194.892.009.091,20	163.344.258.728,00	83,81	(31.547.750.363,20)	168.134.239.442,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.060.061.031,00	27.497.897.230,00	80,73	(6.562.163.801,00)	30.390.374.078,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.636.813.520,00	10.220.959.142,00	96,09	(415.854.378,00)	9.206.286.256,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.351.155,00	160.517.955,00	67,06	(78.833.200,00)	161.329.046,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	469.405.560,00	364.000.000,00	77,54	(105.405.560,00)	396.106.800,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.980.716.986,00	2.081.814.576,00	105,10	101.097.590,00	0,00
	JUMLAH	398.951.969.307,00	354.110.209.828,00	88,76	(44.841.759.479,00)	333.755.055.240,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.951.969.307,00 terealisasi sebesar Rp354.110.209.828,00 atau 88,76% dan mengalami peningkatan sebesar Rp20.355.154.588,00 atau sebesar 6,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp333.755.055.240,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	21.454.702.059,00	17.857.059.608,00	83,23	(3.597.642.451,00)	17.603.356.232,00
2	Sekretariat DPRD	14.970.880.905,00	13.843.643.853,00	92,47	(1.127.237.052,00)	12.843.317.578,00
3	Inspektorat	8.617.943.028,00	7.534.395.441,00	87,43	(1.083.547.587,00)	7.772.144.312,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	144.079.533.229,00	130.686.418.269,00	90,70	(13.393.114.960,00)	117.617.078.763,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.982.726.254,00	74.546.709.079,00	89,83	(8.436.017.175,00)	66.627.371.085,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.789.326.377,00	8.343.620.028,00	85,23	(1.445.706.349,00)	8.695.716.718,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.501.901.265,00	3.902.740.037,00	86,69	(599.161.228,00)	4.161.533.135,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.775.515.434,00	3.393.168.733,00	89,87	(382.346.701,00)	3.828.216.763,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	9.083.769.016,00	8.176.616.779,00	90,01	(907.152.237,00)	7.626.490.640,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6.154.185.247,00	5.429.979.814,00	88,23	(724.205.433,00)	5.376.411.982,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.380.382.775,00	5.730.738.595,00	89,82	(649.644.180,00)	5.504.281.975,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.610.061.617,00	4.049.918.389,00	87,85	(560.143.228,00)	4.315.969.388,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	6.829.382.420,00	5.131.059.365,00	75,13	(1.698.323.055,00)	5.146.383.341,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.670.246.462,00	3.322.987.282,00	90,54	(347.259.180,00)	3.311.086.807,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	5.101.200.084,00	4.551.077.100,00	89,22	(550.122.984,00)	4.680.803.256,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.195.246.813,00	5.511.305.725,00	88,96	(683.941.088,00)	4.900.028.328,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10.692.383.765,00	8.865.943.205,00	82,92	(1.826.440.560,00)	16.984.539.993,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	6.060.510.459,00	5.212.512.565,00	86,01	(847.997.894,00)	5.439.435.584,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.575.308.012,00	3.090.422.050,00	86,44	(484.885.962,00)	2.746.758.013,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.596.098.072,00	4.852.384.097,00	86,71	(743.713.975,00)	4.438.560.767,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.530.033.463,00	2.192.657.456,00	86,67	(337.376.007,00)	1.926.636.752,00
22	Kecamatan Jemaja	3.837.802.525,00	3.387.064.519,00	88,26	(450.738.006,00)	3.601.024.703,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	2.066.273.218,00	1.720.161.093,00	83,25	(346.112.125,00)	1.813.397.944,00
24	Kecamatan Palmatak	2.946.100.143,00	2.701.850.779,00	91,71	(244.249.364,00)	2.681.341.138,00
25	Kecamatan Siantan	3.140.501.345,00	2.747.005.745,00	87,47	(393.495.600,00)	2.797.666.959,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.820.442.307,00	1.635.206.248,00	89,82	(185.236.059,00)	1.701.746.408,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.926.492.805,00	1.738.705.488,00	90,25	(187.787.317,00)	1.784.013.433,00
28	Kecamatan Siantan Timur	1.764.063.335,00	1.462.903.016,00	82,93	(301.160.319,00)	1.637.451.453,00
29	Kecamatan Siantan Utara	1.812.577.202,00	1.551.967.000,00	85,62	(260.610.202,00)	1.504.523.042,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.796.133.501,00	1.287.048.723,00	71,66	(509.084.778,00)	1.448.141.201,00
31	Kecamatan Kute Siantan	2.309.936.679,00	1.975.224.953,00	85,51	(334.711.726,00)	2.094.104.999,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	4.690.649.926,00	4.087.407.029,00	87,14	(603.242.897,00)	46.080.000,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.300.716.788,00	1.941.388.531,00	84,38	(359.328.257,00)	91.907.000,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1.888.942.777,00	1.648.919.234,00	87,29	(240.023.543,00)	1.007.535.548,00
JUMLAH		398.951.969.307,00	354.110.209.828,00	88,76	(44.841.759.479,00)	333.755.055.240,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.951.969.307,00 terealisasi sebesar Rp354.110.209.828,00 atau 88,76% dan mengalami peningkatan sebesar Rp20.355.154.588,00 atau sebesar 6,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp333.755.055.240,00. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai adanya penambahan Formasi PPPK pada Tahun Anggaran 2024. Belanja Pimpinan DPRD dan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digabungkan dengan belanja pegawai di perangkat daerah itu sendiri.

7.6.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN diperuntukkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember 2024. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok ASN	112.195.401.476,00	110.077.696.541,00	98,11	(2.117.704.935,00)	90.116.986.541,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.653.943.407,00	9.953.963.600,00	93,43	(699.979.807,00)	8.156.746.277,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.943.988.145,80	3.807.970.400,00	96,55	(136.017.745,80)	3.754.655.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.731.899.868,00	8.363.199.000,00	95,78	(368.700.868,00)	6.316.921.870,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.215.120.525,00	1.105.360.000,00	90,97	(109.760.525,00)	1.344.430.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.878.247.093,00	6.484.548.023,00	94,28	(393.699.070,00)	5.767.166.700,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	169.887.876,00	98.939.301,00	58,24	(70.948.575,00)	54.346.452,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.701.402,00	1.698.921,00	17,51	(8.002.481,00)	1.432.371,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.937.422.171,00	9.639.822.666,00	80,75	(2.297.599.505,00)	9.206.276.294,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	248.000.000,00	231.794.000,00	93,47	(16.206.000,00)	186.426.386,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	690.000.000,00	675.769.745,00	97,94	(14.230.255,00)	561.331.727,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	156.673.611.963,80	150.440.762.197,00	96,02	(6.232.849.766,80)	125.466.719.618,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp156.673.611.963,80 terealisasi sebesar Rp150.440.762.197,00 atau 96,02%. Mengalami peningkatan sebesar Rp24.974.042.579,00 atau sebesar 19,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.413.961.852,00.

7.6.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, anggaran dan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN yang berakhir per 31 Desember 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.869.605.368,00	86.128.120.741,00	83,73	(16.741.484.627,00)	94.254.917.743,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.067.628.082,00	2.640.620.089,00	86,08	(427.007.993,00)	3.169.553.468,00
3	Tambahan Penghasilan	10.298.890.007,00	8.746.353.798,00	84,93	(1.552.536.209,00)	9.124.619.053,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	berdasarkan Kondisi Kerja ASN					
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.015.103.273,00	6.540.936.397,00	81,61	(1.474.166.876,00)	6.816.897.503,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	70.640.782.361,20	59.288.227.703,00	83,93	(11.352.554.658,20)	54.768.251.675,00
JUMLAH		194.892.009.091,20	163.344.258.728,00	83,81	(31.547.750.363,20)	168.134.239.442,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp194.892.009.091,20 terealisasi sebesar Rp163.344.258.728,00 atau 83,81 % dan mengalami penurunan sebesar Rp4.789.980.714,00 atau sebesar 2,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp168.134.239.442,00.

7.6.1.2.1.1.3. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada pengeluaran yang diberikan kepada ASN selain gaji pokok dan tunjangan reguler, yang diberikan dengan alasan atau pertimbangan objektif yang spesifik. Hal ini bisa melibatkan faktor-faktor tertentu yang mendasari pemberian tambahan penghasilan tersebut, seperti beban kerja, kinerja, atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian ekstra. Anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2024, serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.147.706.018,00	385.033.611,00	33,55	(762.672.407,00)	511.320.297,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	212.304.799,00	12.698.794,00	5,98	(199.606.005,00)	224.494.903,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	14.959.316.760,00	14.128.866.400,00	94,45	(830.450.360,00)	12.667.889.668,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.147.761.400,00	5.127.536.200,00	99,61	(20.225.200,00)	3.385.688.400,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.031.295.000,00	781.250.000,00	75,75	(250.045.000,00)	773.750.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan	1.060.776.090,00	634.207.397,00	59,79	(426.568.693,00)	2.416.073.732,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kesehatan bagi ASN					
7	Belanja Honorarium	10.468.500.964,00	6.401.304.828,00	61,15	(4.067.196.136,00)	10.378.757.078,00
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	32.400.000,00	27.000.000,00	83,33	(5.400.000,00)	32.400.000,00
JUMLAH		34.060.061.031,00	27.497.897.230,00	80,73	(6.562.163.801,00)	30.390.374.078,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.060.061.031,00 terealisasi sebesar Rp27.497.897.230,00 atau 80,73%. Mengalami penurunan sebesar Rp2.892.476.848,00 atau sebesar 9,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp30.390.374.078,00.

7.6.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Uang Representasi DPRD	462.572.250,00	438.795.000,00	94,86	(23.777.250,00)	448.140.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.514.450,00	37.174.200,00	40,18	(55.340.250,00)	40.038.600,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.353.620,00	50.766.420,00	81,42	(11.587.200,00)	56.487.600,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	37.747.500,00	97,58	(934.500,00)	38.367.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	636.252.750,00	97,23	(18.117.750,00)	649.803.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.358.900,00	57.824.550,00	77,76	(16.534.350,00)	70.339.500,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.481.800,00	0,00	0,00	(24.481.800,00)	5.008.650,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.467.500.000,00	2.467.500.000,00	100,00	0,00	1.499.400.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	420.000.000,00	66,67	(210.000.000,00)	371.700.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan	1.230.000,00	656.412,00	53,37	(573.588,00)	765.814,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	dan Anggota DPRD					
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.988.574.000,00	2.946.517.310,00	98,59	(42.056.690,00)	3.003.136.092,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.979.000.000,00	2.976.000.000,00	99,90	(3.000.000,00)	3.016.800.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.176.000,00	151.725.000,00	94,14	(9.451.000,00)	6.300.000,00
JUMLAH		10.636.813.520,00	10.220.959.142,00	96,09	(415.854.378,00)	9.206.286.256,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.636.813.520,00 terealisasi sebesar Rp10.220.959.142,00 atau 96,09 % dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.014.672.886,00 atau sebesar 11,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.206.286.256,00.

7.6.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.400.000,00	54.600.000,00	82,23	(11.800.000,00)	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.150.000,00	0,00	0,00	(5.150.000,00)	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.500.000,00	98.280.000,00	98,77	(1.220.000,00)	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.375,00	1.738.080,00	33,33	(3.476.295,00)	2.027.760,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.000.000,00	656.355,00	6,56	(9.343.645,00)	1.177.446,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000,00	1.920,00	1,92	(98.080,00)	2.240,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.100.000,00	5.241.600,00	64,71	(2.858.400,00)	5.241.600,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	(112.320,00)	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	(336.960,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	44.437.500,00	0,00	0,00	(44.437.500,00)	0,00
JUMLAH		239.351.155,00	160.517.955,00	67,06	(78.833.200,00)	161.329.046,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp239.351.155,00 terealisasi sebesar Rp160.517.955,00 atau 67,06 % dan mengalami penurunan sebesar Rp811.091,00 atau sebesar 0,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.329.046,00.

7.6.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	(33.600.000,00)	111.106.800,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	267.805.560,00	196.000.000,00	73,19	(71.805.560,00)	285.000.000,00
JUMLAH		469.405.560,00	364.000.000,00	77,54	(105.405.560,00)	396.106.800,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp469.405.560,00 terealisasi sebesar Rp364.000.000,00 atau 77,54% dan mengalami penurunan sebesar Rp32.106.800,00 atau sebesar 8,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp396.106.800,00.

7.6.1.2.1.1.7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai yang bekerja di BLUD. BLUD sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik tertentu, seperti rumah sakit ataupun puskesmas, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efisien. Anggaran dan Realisasi Pegawai BLUD Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 81
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai BLUD	1.980.716.986,00	2.081.814.576,00	105,10	101.097.590,00	0,00
	JUMLAH	1.980.716.986,00	2.081.814.576,00	105,10	101.097.590,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.980.716.986,00 terealisasi sebesar Rp2.081.814.576,00 atau 105,10%. Kelebihan realisasi atas anggaran tersebut disebabkan kesalahan penganggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN pada SIPD yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa. Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada Tahun 2023, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baru membentuk BLUD pada Tahun 2024.

7.6.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability pagmenQ, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial. Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BOS. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Barang Pakai Habis	68.280.800.840,94	45.580.918.424,00	66,76	(22.699.882.416,94)	77.458.658.922,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai/Material	538.734.269,00	535.563.250,00	99,41	(3.171.019,00)	530.499.740,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	628.812.492,00	424.112.492,00	67,45	(204.700.000,00)	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	139.334.650.384,21	118.897.534.052,00	85,33	(20.437.116.332,21)	150.457.694.753,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.002.684.253,28	17.492.776.459,00	92,05	(1.509.907.794,28)	18.419.830.506,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.657.813.933,00	1.919.798.958,00	72,23	(738.014.975,00)	2.476.019.518,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.018.128.776,00	4.608.107.936,00	91,83	(410.020.840,00)	5.721.302.916,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	190.138.022,00	123.353.500,00	64,88	(66.784.522,00)	205.447.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.274.833.221,93	1.859.714.297,00	35,26	(3.415.118.924,93)	13.493.784.370,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	177.500.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	899.202.000,00	500.493.000,00	55,66	(398.709.000,00)	1.113.150.600,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.580.343.951,00	1.979.452.557,00	55,29	(1.600.891.394,00)	3.419.249.260,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.615.143.386,00	1.097.213.673,00	67,93	(517.929.713,00)	1.537.567.880,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	82.775.630,00	0,00	0,00	(82.775.630,00)	216.172.500,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00		0,00	0,00	0,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.886.748.798,82	40.854.707.865,00	67,10	(20.032.040.933,82)	47.617.887.044,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			0,00	0,00	0,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.028.940.000,00	1.862.240.000,00	46,22	(2.166.700.000,00)	2.243.828.000,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	211.264.722,00	199.914.022,00	94,63	(11.350.700,00)	12.604.000,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.067.523.021,00	7.258.208.007,00	102,70	190.684.986,00	7.666.383.280,64
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.290.802.380,00	3.622.156.077,00	84,42	(668.646.303,00)	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.705.845.211,00	4.882.900.181,00	72,82	(1.822.945.030,00)	0,00
JUMLAH		330.415.185.292,18	253.819.164.750,00	76,82	(76.596.020.542,18)	332.767.580.289,64

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330.415.185.292,18 terealisasi sebesar Rp253.819.164.750,00 atau 76,82%. Mengalami penurunan sebesar Rp78.948.415.539,64 atau sebesar 23,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp332.767.580.289,64. Untuk akun nomenklatur telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berikut

ini akan diuraikan Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	28.732.415.234,00	22.241.574.547,00	77,41	(6.490.840.687,00)	29.886.448.230,00
2	Sekretariat DPRD	23.244.853.405,00	14.264.327.312,00	61,37	(8.980.526.093,00)	17.454.342.147,00
3	Inspektorat	4.825.556.745,00	3.129.690.777,00	64,86	(1.695.865.968,00)	3.853.774.605,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	64.864.048.548,00	49.578.334.876,00	76,43	(15.285.713.672,00)	64.764.646.469,64
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.580.323.016,00	60.000.210.257,00	81,54	(13.580.112.759,00)	72.247.896.630,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.834.261.632,00	12.057.547.356,00	64,02	(6.776.714.276,00)	28.047.941.768,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.763.931.694,00	2.489.816.981,00	66,15	(1.274.114.713,00)	3.301.598.436,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.010.972.984,00	1.824.962.873,00	90,75	(186.010.111,00)	2.003.903.482,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	10.290.415.289,00	9.340.912.485,00	90,77	(949.502.804,00)	16.703.398.218,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	10.931.909.543,00	8.388.813.094,00	76,74	(2.543.096.449,00)	10.426.554.740,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.785.272.300,00	3.439.707.363,00	90,87	(345.564.937,00)	3.769.820.573,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.262.273.772,00	6.398.897.270,00	69,09	(2.863.376.502,00)	8.245.355.704,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	5.322.310.095,00	3.954.939.688,00	74,31	(1.367.370.407,00)	5.395.237.887,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.568.771.892,00	3.327.761.953,00	93,25	(241.009.939,00)	7.043.856.766,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	7.116.781.591,00	6.583.419.554,00	92,51	(533.362.037,00)	8.931.600.811,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.128.279.089,00	2.238.411.612,00	71,55	(889.867.477,00)	2.555.987.693,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.486.139.829,00	9.991.572.138,00	80,02	(2.494.567.691,00)	12.842.311.447,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.408.487.994,00	4.762.103.302,00	56,63	(3.646.384.692,00)	5.223.906.659,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Politik	3.267.202.438,00	2.486.432.966,00	76,10	(780.769.472,00)	2.039.658.742,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.030.400.479,00	5.450.775.675,00	90,39	(579.624.804,00)	5.926.677.696,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.148.895.543,00	835.349.799,00	72,71	(313.545.744,00)	804.416.499,00
22	Kecamatan Jemaja	2.747.514.433,00	2.312.089.233,00	84,15	(435.425.200,00)	2.239.042.630,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	1.255.624.088,00	979.874.788,00	78,04	(275.749.300,00)	1.045.854.400,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
24	Kecamatan Palmatak	2.000.095.531,00	1.888.110.257,00	94,40	(111.985.274,00)	2.489.872.865,00
25	Kecamatan Siantan	2.994.072.264,00	2.493.374.989,00	83,28	(500.697.275,00)	3.343.043.107,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	975.822.464,00	810.499.254,00	83,06	(165.323.210,00)	945.601.855,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.424.522.894,00	1.181.058.688,00	82,91	(243.464.206,00)	1.484.592.521,00
28	Kecamatan Siantan Timur	1.687.713.751,00	996.033.079,00	59,02	(691.680.672,00)	1.664.351.553,00
29	Kecamatan Siantan Utara	910.950.007,00	798.954.610,00	87,71	(111.995.397,00)	825.012.396,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.107.289.496,00	839.383.241,00	75,81	(267.906.255,00)	1.004.807.396,00
31	Kecamatan Kute Siantan	1.773.265.885,00	1.419.166.706,00	80,03	(354.099.179,00)	1.605.113.141,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.243.925.227,00	2.769.523.384,00	85,38	(474.401.843,00)	764.259.813,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.342.658.291,00	2.431.975.276,00	72,76	(910.683.015,00)	2.011.475.775,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	2.348.227.846,00	2.113.559.367,00	90,01	(234.668.479,00)	1.875.217.635,00
JUMLAH		330.415.185.289,00	253.819.164.750,00	76,82	(76.596.020.539,00)	332.767.580.289,64

7.6.1.2.1.3. Belanja Hibah – LRA

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, guna menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 84
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.489.136.481,00	20.540.586.300,00	100,25	51.449.819,00	12.954.870.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	127.756.920,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	245.000.000,00	170.501.800,00	69,59	(74.498.200,00)	239.990.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.404.650,00
6	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	360.000.000,00	297.400.761,00	82,61	(62.599.239,00)	1.166.185.714,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	489.360.000,00	499.360.000,00	102,04	10.000.000,00	460.784.099,00
9	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	404.587.675,00	404.587.675,00	100,00	0,00	397.127.718,00
10	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.276.395.000,00	1.188.000.000,00	93,07	(88.395.000,00)	0,00
JUMLAH		23.314.479.156,00	23.100.436.536,00	99,08	(214.042.620,00)	17.149.119.101,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.314.479.156,00 terealisasi sebesar Rp23.100.436.536,00 atau 99,08% dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.951.317.435,00 atau sebesar 34,70% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.149.119.101,00. Belanja Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada SKPD teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 di masing-masing SKPD yang disebut diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut.

Tabel 85
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	100,00	0,00	1.130.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.572.120.181,00	2.583.570.000,00	100,45	11.449.819,00	2.627.654.099,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	245.000.000,00	170.501.800,00	69,59	(74.498.200,00)	2.486.902.064,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	360.000.000,00	297.400.761,00	82,61	(62.599.239,00)	338.100.000,00
5	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.730.963.975,00	17.730.963.975,00	100,00	0,00	9.805.127.718,00
9	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	127.756.920,00
10	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	383.578.300,00
12	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.276.395.000,00	1.188.000.000,00	93,07	(88.395.000,00)	0,00
JUMLAH		23.314.479.156,00	23.100.436.536,00	99,08	(214.042.620,00)	17.149.119.101,00

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada lima Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 86

Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	100,00	0,00	1.130.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.032.760.181,00	2.084.210.000,00	102,53	51.449.819,00	2.166.870.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.326.376.300,00	17.326.376.300,00	100,00	0,00	9.408.000.000,00
JUMLAH		20.489.136.481,00	20.540.586.300,00	100,25	51.449.819,00	12.954.870.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.489.136.481,00 terealisasi sebesar Rp20.540.586.300,00 atau sebesar 100,25%. Berikut ini Rincian masing-masing SKPD Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 87
Daftar Penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)			
No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).	Tarempa - Kep. Anambas	880.000.000,00
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	100.000.000,00
3	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	50.000.000,00
4	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	50.000.000,00
5	Diniyah Awaliyah (MDA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas	Jemaja - Kep. Anambas	50.000.000,00
JUMLAH			1.130.000.000,00

Tabel 88
Daftar Penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)			
No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	KWARCAB Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	200.000.000,00
2	BOP PAUD	Tarempa - Kep. Anambas	1.616.870.000,00
3	BOP Kesetaraan	Tarempa - Kep. Anambas	267.340.000,00
JUMLAH			2.084.210.000,00

Tabel 89

Daftar Penerima

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN ANAMBAS	Tarempa - Kep. Anambas	1.526.515.300,00
2.	POLRES KEPULAUAN ANAMBAS	Tarempa - Kep. Anambas	500.000.000,00
3	BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Tarempa - Kep. Anambas	4.812.000.000,00
4	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Tarempa - Kep. Anambas	9.300.000.000,00
5	KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0318/NATUNA	Tarempa - Kep. Anambas	487.956.000,00
6	PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAREMPA	Tarempa - Kep. Anambas	499.905.000,00
7	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Tarempa - Kep. Anambas	200.000.000,00
JUMLAH			17.326.376.300,00

Tabel 90

Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
JUMLAH		50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 91

Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan	245.000.000,00	170.501.800,00	69,59	(74.498.200,00)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
	Rakyat dan Kawasan Permukiman				
JUMLAH		245.000.000,00	170.501.800,00	69,59	(74.498.200,00)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp245.000.000,00 terealisasi sebesar Rp170.501.800,00 atau sebesar 69,59%.

Tabel 92

Daftar Penerima

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Termin 40% Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur	Desa Munjan – Kec Siantan Timur	97.429.600,00
2	Termin 70% Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur	Desa Munjan – Kec Siantan Timur	73.072.200,00
JUMLAH			170.501.800,00

Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 terdapat pada satu Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 93

Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	360.000.000,00	297.400.761,00	82,61	(62.599.239,00)
Jumlah		360.000.000,00	297.400.761,00	82,61	(62.599.239,00)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp360.000.000,00 terealisasi sebesar Rp297.400.761,00 atau sebesar 82,61%. Atas sisa hibah Dana Hibah KPPAD tersebut sudah dikembalikan Tahun Anggaran 2024 ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp62.599.239,00.

Tabel 94
Daftar Penerima
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran
2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahap I Tahun Anggaran 2024	Tarempa -Siantan	215.000.000,00
2	Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahap II Tahun Anggaran 2024	Tarempa -Siantan	145.000.000,00
3	Pengembalia Dana Hibah KPPAD Tahun Anggaran 2024 ke KASDA Kab. Kep. Anambas		(62.599.239,00)
JUMLAH			297.400.761,00

Tabel 95
Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas
Swasta Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	489.360.000,00	499.360.000,00	102,04	10.000.000,00
JUMLAH		489.360.000,00	499.360.000,00	102,04	10.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp489.360.000,00 terealisasi sebesar Rp499.360.000,00 atau sebesar 102,04%.

Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 terdapat pada satu Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

Tabel 96
Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	404.587.675,00	404.587.675,00	100%	0,00
JUMLAH		404.587.675,00	404.587.675,00	100%	0,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp404.587.675,00 terealisasi sebesar Rp404.587.675,00 atau sebesar 100,00%.

Tabel 97
Daftar Penerima
Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Tarempa	50.448.554,00
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tarempa	39.240.114,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	Tarempa	49.301.275,00
4	Partai Demokrat	Tarempa	36.940.269,00
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tarempa	16.151.785,00
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Tarempa	29.252.971,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tarempa	44.114.728,00
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tarempa	81.160.737,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Tarempa	29.855.689,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Tarempa	14.687.286,00
11	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tarempa	7.095.154,00
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Tarempa	6.339.113,00
JUMLAH			404.587.675,00

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024 terdapat pada satu Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

Tabel 98
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.276.395.000,00	1.188.000.000,00	93,07	(88.395.000,00)
JUMLAH		1.276.395.000,00	1.188.000.000,00	93,07	(88.395.000,00)

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Transportasi Darat pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.276.395.000,00 terealisasi sebesar Rp1.188.000.000,00 atau sebesar 93,07%.

7.6.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial - LRA

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial. Bantuan sosial ini biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, atau kelompok lainnya

yang membutuhkan dukungan finansial atau layanan sosial. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat dua Perangkat Daerah yang menganggarkan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut:

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	682.796.000,00	629.305.000,00	92,17	(53.491.000,00)	161.614.000,00
JUMLAH		682.796.000,00	629.305.000,00	92,17	(53.491.000,00)	161.614.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp682.796.000,00 terealisasi sebesar Rp629.305.000,00 atau 92,17% dan mengalami peningkatan sebesar Rp467.691.000,00 atau sebesar 289,39% dibandingkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp161.614.000,00.

Tabel 100
Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	184.556.000,00	184.003.000,00	99,70	(553.000,00)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	498.240.000,00	445.302.000,00	89,38	(52.938.000,00)
JUMLAH		682.796.000,00	629.305.000,00	92,17	(53.491.000,00)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang per SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp682.796.000,00 terealisasi sebesar Rp629.305.000,00 atau sebesar 92,17%. Terdapat kenaikan sebesar Rp467.691.000,00 atau 289,39% dari Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp161.614.000,00.

Tabel 101
Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Haryanto	Kepulauan Anambas	2.310.000,00
2	Burhan	Kepulauan Anambas	1.225.000,00
3	Muhammad Patihi	Kepulauan Anambas	9.401.000,00
4	Aprianzen	Kepulauan Anambas	10.690.000,00
5	Khaidir	Kepulauan Anambas	4.375.000,00
6	Afandi	Kepulauan Anambas	4.950.000,00
7	Jabarudin	Kepulauan Anambas	9.762.000,00
8	Ahmad Safri	Kepulauan Anambas	1.150.000,00
9	Superi	Kepulauan Anambas	9.650.000,00
10	Ismail	Kepulauan Anambas	9.500.000,00
11	Muslimin Can	Kepulauan Anambas	4.834.000,00
12	Samsul Bahri	Kepulauan Anambas	13.350.000,00
13	Herman Sina	Kepulauan Anambas	4.090.000,00
14	Mawardi	Kepulauan Anambas	6.770.000,00
15	Abd. Haris	Kepulauan Anambas	7.750.000,00
16	Husin	Kepulauan Anambas	5.675.000,00
17	Zainal	Kepulauan Anambas	3.535.000,00
18	Darman	Kepulauan Anambas	14.750.000,00
19	Andriansyah	Kepulauan Anambas	4.880.000,00
20	Budi Triawan	Kepulauan Anambas	553.000,00
21	Budi Triawan	Kepulauan Anambas	4.027.000,00
22	Kokok	Kepulauan Anambas	8.200.000,00
23	Yuli	Kepulauan Anambas	14.856.000,00
24	Slamet	Kepulauan Anambas	10.200.000,00
25	Soris Irpansyah	Kepulauan Anambas	12.920.000,00
26	Eko Purnomo	Kepulauan Anambas	4.600.000,00
JUMLAH			184.003.000,00

Tabel 102
Daftar Penerima
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Palatak	M. Nuh	Piabung RT/RW 004/002	12.456.000,00
2	Palatak	Salipah	Piabung RT/RW 004/002	12.456.000,00
3	Palatak	Aminah	Candi RT/RW 002/001	12.456.000,00
4	Palatak	Arpah	Candi RT/RW 002/001	12.456.000,00
5	Palatak	Sulaiman	Ladan RT/RW 003/001	12.456.000,00
6	Palatak	Laili	Ladan RT/RW 006/002	12.456.000,00
7	Palatak	Ilyas	Ladan RT/RW 010/003	12.456.000,00
8	Palatak	Harun	Ladan RT/RW 003/001	12.456.000,00
9	Palatak	Abdul Halik	Tebang RT/RW 004/001	12.456.000,00
10	Palatak	Khairuddin	Tebang RT/RW 003/001	12.456.000,00
11	Siantan Utara	Zakaria P.M.B	Air Bandung RT/RW 008/004	12.456.000,00
12	Siantan Utara	Masanah	Air Luguk RT/RW 006/003	12.456.000,00
13	Kute Siantan	Azman	Bayur RT/RW 001/002	6.228.000,00
14	Kute Siantan	Mariyam	Matak RT/RW 001/001	12.456.000,00
15	Kute Siantan	Zauyah	Nuan RT/RW 003/001	12.456.000,00
16	Kute Siantan	Abd. Samad	Nuan RT/RW 003/001	12.456.000,00
17	Kute Siantan	Adam	Nuan RT/RW 003/001	12.456.000,00
18	Siantan Tengah	Mastura	Teluk Sunting RT/RW 003/002	12.456.000,00
19	Siantan Tengah	Sanim	Lidi RT/RW 004/002	12.456.000,00
20	Siantan Tengah	Yang Besar	Lidi RT/RW 003/002	12.456.000,00
21	Siantan Tengah	Dima	Lidi RT/RW 002/003	6.228.000,00
22	Siantan Tengah	Nizam	Lidi RT/RW 004/002	12.456.000,00
23	Siantan Tengah	Engsan	Air Sena RT/RW 001/005	12.456.000,00
24	Siantan Tengah	Mui	Air Sena RT/RW 001/005	12.456.000,00
25	Siantan Timur	Maimun	Etang RT/RW 005/002	12.456.000,00
26	Siantan Timur	Zhainudin	Batu Belah RT/RW 008/004	9.342.000,00
27	Siantan Timur	M. Isa	Jl. M. Kasim Usman RT/RW 006/002	12.456.000,00
28	Siantan	Murhini	Tarempa Barat	12.456.000,00
29	Siantan Selatan	Yosua Gigok	Mengkait RT/RW 005/003	12.456.000,00
30	Siantan Selatan	Banggo	Mengkait RT/RW 003/002	12.456.000,00
31	Siantan Selatan	Senek	Mengkait RT/RW 005/003	12.456.000,00
32	Jemaja Timur	Ir.M.Machrus. S	Pasiran Dusun 1 RT/RW 002/001	12.456.000,00
33	Jemaja Timur	Murni Yati	Bukit Padi RT/RW 005/002	12.456.000,00
34	Jemaja Timur	Nurpah	Genting Pulur RT/RW 004/002	12.456.000,00
35	Jemaja Timur	M. Ali M Nur	Dapit Ulu Maras	12.456.000,00
36	Jemaja	Zainab	Mampok	12.456.000,00
37	Jemaja	Kateman	Letung Jl. Tanjung	12.456.000,00
Total				445.302.000,00

7.6.1.2.2. BELANJA MODAL – LRA

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.140.662.658,36	26.372.465.503,00	87,50	(3.768.197.155,36)	51.188.694.187,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.606.617.756,95	26.344.494.672,00	64,88	(14.262.123.084,95)	34.500.354.929,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.840.946.653,00	50.267.079.992,00	71,97	(19.573.866.661,00)	96.909.592.427,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	31.665.670,00	1.692.901.437,00
JUMLAH		141.992.627.668,31	104.420.106.437,00	73,54	(37.572.521.231,31)	184.291.542.980,00

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp141.992.627.668,31 terealisasi sebesar Rp104.420.106.437,00 atau 73,54% dan mengalami penurunan sebesar Rp79.871.436.543,00 atau sebesar 43,34% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp184.291.542.980,00. Penurunan ini disebabkan adanya penyaluran Kurang Bayar (KB) atas Dana Bagi Hasil ke Daerah sehingga Daerah tidak maksimal dalam realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2024

7.6.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah - LRA

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap Tanah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 pada Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi pada Belanja Modal Tanah.

7.6.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 105

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	363.565.491,00	101.260.000,00	27,85	(262.305.491,00)	663.468.450,00
2	Sekretariat DPRD	267.288.162,00	181.440.000,00	67,88	(85.848.162,00)	203.369.000,00
3	Inspektorat	185.367.302,00	111.720.000,00	60,27	(73.647.302,00)	70.500.000,00
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	6.024.349.299,00	5.920.450.723,00	98,28	(103.898.576,00)	4.042.119.522,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.410.145.541,00	17.797.744.755,00	91,69	(1.612.400.786,00)	29.690.795.919,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.622.800,00	0,00	0,00	(10.622.800,00)	403.910.000,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	156.440.687,00	0,00	0,00	(156.440.687,00)	18.500.000,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	212.080.000,00
9	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	258.393.738,00	210.577.000,00	81,49	(47.816.738,00)	670.087.850,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	258.965.131,00	69.375.300,00	26,79	(189.589.831,00)	10.898.989.170,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	206.885.621,00	206.646.000,00	99,88	(239.621,00)	365.261.300,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	429.949.682,00	417.407.000,00	97,08	(12.542.682,00)	1.608.607.670,00
13	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	112.835.773,00	0,00	0,00	(112.835.773,00)	23.842.800,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	178.011.356,00	167.980.000,00	94,36	(10.031.356,00)	41.390.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1.920.000,00	1.680.000,00	87,50	(240.000,00)	518.314.370,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.990.410,00	0,00	0,00	(29.990.410,00)	208.369.600,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	572.130.042,00	328.992.000,00	57,50	(243.138.042,00)	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	439.670.294,00	352.334.325,00	80,14	(87.335.969,00)	140.018.600,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	127.814.342,00	0,00	0,00	(127.814.342,00)	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.222.035,00	41.310.400,00	97,84	(911.635,00)	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	157.284.000,00	24.300.000,00	15,45	(132.984.000,00)	155.218.950,00
22	Kecamatan Jemaja	72.027.073,00	8.600.000,00	11,94	(63.427.073,00)	68.431.500,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	37.146.150,00
25	Kecamatan Siantan	33.128.723,00	0,00	0,00	(33.128.723,00)	201.910.000,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	90.497.059,00	0,00	0,00	(90.497.059,00)	50.200.000,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	39.376.036,00	24.600.000,00	62,47	(14.776.036,00)	181.900.000,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	32.625.865,00	0,00	0,00	(32.625.865,00)	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	2.297.474,00	0,00	0,00	(2.297.474,00)	87.929.000,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	403.217.540,00	276.790.000,00	68,65	(126.427.540,00)	463.824.320,00
33	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	48.978.089,00	81.080.000,00	165,54	32.101.911,00	122.510.016,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	184.663.092,00	48.178.000,00	26,09	(136.485.092,00)	0,00
Jumlah		30.140.662.657,00	26.372.465.503,00	87,50	(3.768.197.154,00)	51.188.694.187,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.140.662.657,00 terealisasi sebesar Rp26.372.465.503,00 atau 87,50% dan mengalami penurunan sebesar Rp24.816.228.684,00 atau sebesar 48,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.188.694.187,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Mesin Proses	1.573.894.077,00	1.142.700.000,00	72,60	(431.194.077,00)	1.296.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Mesin Proses Apung	15.908.803,00	15.500.000,00	97,43	(408.803,00)	0,00
4	Belanja Modal Electric Generating Set	556.031.288,00	13.000.000,00	2,34	(543.031.288,00)	2.981.007.090,00
5	Belanja Modal Pompa	62.000.000,00	60.720.000,00	97,94	(1.280.000,00)	5.100.000,00
6	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	152.020.500,00	151.480.000,00	99,64	(540.500,00)	0,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	855.207.650,00	726.230.000,00	84,92	(128.977.650,00)	379.618.300,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	132.750.000,00
11	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.050.000.000,00	2.047.000.000,00	99,85	(3.000.000,00)	0,00
13	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.867.998,00	0,00	0,00	(1.867.998,00)	0,00
14	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839.325.000,00
15	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	6.820.497,00	6.420.000,00	94,13	(400.497,00)	
17	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	18.986.015,00	18.400.000,00	96,91	(586.015,00)	0,00
18	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000
19	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
20	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.000,00
21	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	282.612.105,00	129.485.900,00	45,82	(153.126.205,00)	374.361.610,00
23	Belanja Modal Mebel	235.449.257,00	36.415.825,00	15,47	(199.033.432,00)	712.432.800,00
24	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.948.000,00
25	Belanja Modal Alat Pendingin	687.893.713,00	359.958.268,00	52,33	(327.935.445,00)	775.898.936,00
26	Belanja Modal Alat Dapur	21.879.398,00	17.224.452,00	78,72	(4.654.946,00)	8.644.458,00
27	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.042.000,00
28	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	228.068.760,00	185.500.000,00	81,34	(42.568.760,00)	184.637.400,00
29	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	192.609.269,40	134.180.000,00	69,66	(58.429.269,40)	213.526.058,00
30	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	189.178.138,00	101.200.000,00	53,49	(87.978.138,00)	236.690.188,00
32	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960.000,00
34	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	34.865.569,00	21.000.000,00	60,23	(13.865.569,00)	13.209.000,00
35	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	78.865.617,00	35.000.000,00	44,38	(43.865.617,00)	99.126.000,00
36	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	82.520.030,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
37	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.804.640,00
38	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	79.731.500,00
39	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	87.438.720,00	62.400.000,00	71,36	(25.038.720,00)	0,00
40	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
42	Belanja Modal Switcher/ Menara Antena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal Sumber Tenaga	2.778.994,00	0,00	0,00	(2.778.994,00)	0,00
44	Belanja Modal Program Input Equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.318.154.168,00	3.146.063.800,00	94,81	(172.090.368,00)	9.190.423.060,00
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.200.897.110,00	2.183.714.000,00	99,22	(17.183.110,00)	4.994.770.793,00
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.126.341.835,00	1.104.576.800,00	98,07	(21.765.035,00)	3.161.310.622,00
49	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.170,00
50	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.603.989.435,00	2.592.893.000,00	99,57	(11.096.435,00)	84.022.000,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.127.186.631,00	3.074.985.000,00	98,33	(52.201.631,00)	1.077.567.850,00
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	1.423.036.600,00	1.376.979.572,00	96,76	(46.057.028,00)	1.495.204.900,00
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.880.000,00
54	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464.000,00
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00
56	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Modal Photo and Film Equipment	29.577.544,00	9.080.000,00	30,70	(20.497.544,00)	30.870.000,00
58	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
59	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja Modal Personal Computer	4.476.750.459,96	3.489.481.000,00	77,95	(987.269.459,96)	1.869.720.150,00
61	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
62	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	476.552.100,00
64	Belanja Modal Peralatan Jaringan	268.242.600,00	268.239.000,00	100,00	(3.600,00)	523.364.000,00
65	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	648.986.565,00	331.226.500,00	51,04	(317.760.065,00)	2.818.381.100,00
66	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.760,00
67	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	279.142.800,00
68	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	225.186.400,00
70	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0,00	171.128.700,00
71	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	0,00	302.580.000,00
72	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	0,00	397.779.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
73	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	73.676.250,00
74	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.799.596.379,00	2.854.045.723,00	101,94	54.449.344,00	2.772.140.522,00
76	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	4.503.348,00	4.400.000,00	97,71	(103.348,00)	0,00
79	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.000,00
80	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	37.110.000,00
81	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	26.468.005,00	26.468.000,00	100,00	(5,00)	0,00
82	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	752.555.610,00	646.498.663,00	85,91	(106.056.947,00)	0,00
JUMLAH		30.140.662.658,36	26.372.465.503,00	87,50	(3.768.197.155,36)	51.188.694.187,00

Anggaran dan realisasi diatas merupakan akun sub rincian objek belanja yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.6.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17.962.666.849,95	12.022.660.178,00	66,93	(5.940.006.671,95)	15.715.732.941,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.113.274.865,00	14.128.717.824,00	63,89	(7.984.557.041,00)	6.837.450.520,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	230.000.000,00	193.116.670,00	83,96	(36.883.330,00)	7.032.351.438,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.652.619,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.167.411,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	300.676.042,00	0,00	0,00	(300.676.042,00)	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Padam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		40.606.617.756,95	26.344.494.672,00	64,88	(14.262.123.084,95)	34.500.354.929,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.606.617.756,95 terealisasi sebesar Rp26.344.494.672,00 atau 64,88%. Mengalami penurunan sebesar Rp8.155.860.257,00 atau sebesar 23,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.500.354.929,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 108
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasi (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	815.057.916,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.113.274.865,00	14.128.717.824,00	63,89	(7.984.557.041,00)	6.837.450.520,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.957.722,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.192.666.849,95	12.215.776.848,00	67,15	(5.976.890.001,95)	15.030.733.941,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasi (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	684.999.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.312.711,00
8	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.676.042,00	0,00	0,00	(200.676.042,00)	101.686.119,00
9	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	828.014.674,00
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	198.326.848,00
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	251.473.049,00
14	Belanja Modal Bangunan Taman	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
17	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	74.363.429,00
JUMLAH		40.606.617.756,95	26.344.494.672,00	64,88	(14.262.123.084,95)	34.500.354.929,00

7.6.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi- LRA

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.324.489.900,00	1.938.722.000,00	83,40	(385.767.900,00)	199.333.100,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	64.499.521.104,00	47.063.750.169,00	72,97	(17.435.770.935,00)	94.521.946.536,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	000	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	3.016.935.649,00	1.264.607.823,00	41,92	(1.752.327.826,00)	2.188.312.791,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		69.840.946.653,00	50.267.079.992,00	71,97	(19.573.866.661,00)	96.909.592.427,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.840.946.653,00 terealisasi sebesar Rp50.267.079.992,00 atau 71,97% dan mengalami penurunan sebesar Rp46.642.512.435,00 atau sebesar 48,13% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.909.592.427,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	51.368.175.844,00	41.831.352.199,00	81,43	(9.536.823.645,00)	62.652.897.152,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	1.555.407.301,00	1.198.503.108,00	77,05	(356.904.193,00)	13.046.878.777,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	690.736.246,00	690.736.245,00	100,00	(1,00)	9.176.924.402,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.143.200,00
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	624.483.967,00
6	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	3.016.935.649,00	1.264.607.823,00	41,92	(1.752.327.826,00)	2.188.312.791,00
7	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.082.460,00
9	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.627.624,00
10	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	199.739.974,00
12	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.463.159,00
13	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.971.742,00
14	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	199.333.100,00
15	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	10.885.201.713,00	3.343.158.617,00	30,71	(7.542.043.096,00)	631.576.727,00
16	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
17	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	82.157.352,00
20	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	2.324.489.900,00	1.938.722.000,00	83,40	(385.767.900,00)	
JUMLAH		69.840.946.653,00	50.267.079.992,00	71,97	(19.573.866.661,00)	96.909.592.427,00

7.6.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap selain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	31.665.670,00	1.690.921.437,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	31.665.670,00	1.692.901.437,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.404.400.600,00 terealisasi sebesar Rp1.436.066.270,00 atau 102,25% dan mengalami penurunan sebesar Rp256.835.167,00 atau sebesar 15,17% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.692.901.437,00. Atas kelebihan Realisasi tersebut dikarenakan terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada SKPD Dinas Pendidikan dan Olahraga yang melebihi Pagu Anggaran akibat Belanja BOSP Kinerja tidak teranggarkan.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 112

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	172.136.580,00
4	Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	99.080.070,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	198.246.000,00
8	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
9	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	31.665.670,00	1.221.458.787,00
JUMLAH		1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25	31.665.670,00	1.692.901.437,00

7.6.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang tidak terdapat dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain bencana alam dan lain sebagainya. Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2024 dapat di rinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Terduga	1.959.397.381,51	0,00	0,00	(1.959.397.381,51)	0,00
JUMLAH		1.959.397.381,51	0,00	0,00	(1.959.397.381,51)	0,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.959.397.381,51 dan tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga baik Tahun 2024 maupun Tahun 2023.

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.959.397.381,51	0,00	0,00	(1.959.397.381,51)	0,00
JUMLAH		1.959.397.381,51	0,00	0,00	(1.959.397.381,51)	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.959.397.381,51 dianggarkan pada DPA/DPPA SKPKD-PPKD. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat realisasi pada akun belanja ini.

7.6.1.2.4. BELANJA TRANSFER - LRA

7.6.1.2.4.1. Belanja Transfer Bagi Hasil - LRA

Belanja Bagi Hasil adalah penyaluran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.255.953.875,00	808.858.916,00	35,85	(1.447.094.959,00)	1.871.700.186,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	465.074.598,00	36.768.391,00	7,91	(428.306.207,00)	390.032.103,00
JUMLAH		2.721.028.473,00	845.627.307,00	31,08	(1.875.401.166,00)	2.261.732.289,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.721.028.473,00 terealisasi sebesar Rp845.627.307,00 atau 31,08% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.416.104.982,00 atau sebesar 62,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.261.732.289,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa Pada Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	115.609.068,00	35.928.395,00	31,08	(79.680.673,00)	96.094.828,00
2	Desa Tarempa Selatan	135.793.817,00	42.201.308,00	31,08	(93.592.509,00)	112.872.490,00
3	Desa Tarempa Timur	121.592.171,00	37.787.786,00	31,08	(83.804.385,00)	101.068.013,00
4	Desa Pesisir Timur	47.406.582,00	14.732.775,00	31,08	(32.673.807,00)	39.404.586,00
5	Desa Sri Tanjung	67.214.448,00	20.888.558,00	31,08	(46.325.890,00)	55.868.963,00
6	Desa Tarempa Barat Daya	75.180.530,00	23.364.221,00	31,08	(51.816.309,00)	62.490.427,00
7	Desa Mampok	35.653.799,00	11.080.305,00	31,08	(24.573.494,00)	29.635.614,00
8	Desa Rewak	40.867.470,00	12.700.583,00	31,08	(28.166.887,00)	33.969.243,00
9	Desa Air Biru	34.403.275,00	10.691.673,00	31,08	(23.711.602,00)	28.596.171,00
10	Desa Batu Berapit	35.489.512,00	11.029.249,00	31,08	(24.460.263,00)	29.499.058,00
11	Desa Landak	57.629.120,00	17.909.683,00	31,08	(39.719.437,00)	47.901.609,00
12	Desa Tebang	78.155.134,00	24.288.653,00	31,08	(53.866.481,00)	64.962.933,00
13	Desa Ladan	77.722.651,00	24.154.248,00	31,08	(53.568.403,00)	64.603.451,00
14	Desa Piabung	31.961.694,00	9.932.892,00	31,08	(22.028.802,00)	26.566.718,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
15	Desa Langir	43.711.496,00	13.584.436,00	31,08	(30.127.060,00)	36.333.211,00
16	Desa Candi	44.889.940,00	13.950.667,00	31,08	(30.939.273,00)	37.312.739,00
17	Desa Putik	50.246.650,00	15.615.397,00	31,08	(34.631.253,00)	41.765.263,00
18	Desa Belibak	40.796.683,00	12.678.585,00	31,08	(28.118.098,00)	33.910.404,00
19	Desa Nyamuk	48.704.190,00	15.136.039,00	31,08	(33.568.151,00)	40.483.163,00
20	Desa Batu Belah	38.037.771,00	11.821.184,00	31,08	(26.216.587,00)	31.617.183,00
21	Desa Munjan	31.396.482,00	9.757.238,00	31,08	(21.639.244,00)	26.096.911,00
22	Desa Serat	41.638.029,00	12.940.053,00	31,08	(28.697.976,00)	34.609.734,00
23	Desa Air Putih	34.575.404,00	10.745.167,00	31,08	(23.830.237,00)	28.739.248,00
24	Desa Temburun	55.972.554,00	17.394.864,00	31,08	(38.577.690,00)	46.524.663,00
25	Desa Kiabu	142.855.007,00	44.395.749,00	31,08	(98.459.258,00)	118.741.787,00
26	Desa Telaga	55.341.376,00	17.198.710,00	31,08	(38.142.666,00)	46.000.025,00
27	Desa Mengkai	54.206.200,00	16.845.925,00	31,08	(37.360.275,00)	45.056.461,00
28	Desa Tiangau	56.036.265,00	17.414.664,00	31,08	(38.621.601,00)	46.577.620,00
29	Desa Telaga Kecil	42.765.598,00	13.290.474,00	31,08	(29.475.124,00)	35.546.976,00
30	Desa Lingai	32.771.233,00	10.184.476,00	31,08	(22.586.757,00)	27.239.611,00
31	Desa Air Bini	37.762.795,00	11.735.728,00	31,08	(26.027.067,00)	31.388.622,00
32	Desa Kuala Maras	71.245.890,00	22.141.433,00	31,08	(49.104.457,00)	59.219.952,00
33	Desa Ulu Maras	69.594.174,00	21.628.122,00	31,08	(47.966.052,00)	57.847.021,00
34	Desa Bukit Padi	56.090.036,00	17.431.375,00	31,08	(38.658.661,00)	46.622.314,00
35	Desa Genting Pulur	55.684.630,00	17.305.385,00	31,08	(38.379.245,00)	46.285.339,00
36	Desa Air Asuk	56.771.521,00	17.643.164,00	31,08	(39.128.357,00)	47.188.769,00
37	Desa Air Sena	49.185.456,00	15.285.605,00	31,08	(33.899.851,00)	40.883.194,00
38	Desa Teluk Siantan	43.304.258,00	13.457.876,00	31,08	(29.846.382,00)	35.994.713,00
39	Desa Lidi	38.235.437,00	11.882.613,00	31,08	(26.352.824,00)	31.781.483,00
40	Desa Liuk	36.194.921,00	11.248.472,00	31,08	(24.946.449,00)	30.085.397,00
41	Desa Teluk Sunting	36.708.341,00	11.408.030,00	31,08	(25.300.311,00)	30.512.154,00
42	Desa Impol	33.647.847,00	10.456.906,00	31,08	(23.190.941,00)	27.968.257,00
43	Desa Keramat	32.971.020,00	10.246.565,00	31,08	(22.724.455,00)	27.405.674,00
44	Desa Sunggak	37.146.188,00	11.544.103,00	31,08	(25.602.085,00)	30.876.095,00
45	Desa Mubur	32.464.207,00	10.089.061,00	31,08	(22.375.146,00)	26.984.407,00
46	Desa Piasan	38.691.520,00	12.024.353,00	31,08	(26.667.167,00)	32.160.582,00
47	Desa Bayat	31.531.343,00	9.799.150,00	31,08	(21.732.193,00)	26.209.008,00
48	Desa Payalaman	43.972.681,00	13.665.605,00	31,08	(30.307.076,00)	36.550.310,00
49	Desa Teluk Bayur	31.396.482,00	9.757.238,00	31,08	(21.639.244,00)	26.096.911,00
50	Desa Matak	53.111.659,00	16.505.770,00	31,08	(36.605.889,00)	44.146.671,00
51	Desa Batu Ampar	31.909.184,00	9.916.574,00	31,08	(21.992.610,00)	26.523.071,00
52	Desa Payamaram	34.784.734,00	10.810.222,00	31,08	(23.974.512,00)	28.913.242,00
JUMLAH		2.721.028.473,00	845.627.307,00	31,08	(1.875.401.166,00)	2.261.732.289,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.721.028.473,00 terealisasi sebesar Rp845.627.307,00 atau 31,08%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.261.732.289,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.416.104.982,00 atau sebesar 62,61%. Bagi hasil pajak dan retribusi ini disalurkan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak dan retribusi daerah yang dikompensasikan ke Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan - LRA

Belanja Bantuan Keuangan adalah Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke Pemerintah Desa selama satu Tahun Anggaran. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

N	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Keuangan	109.174.880.406,00	95.292.483.978,00	87,28	(13.882.396.428,00)	109.883.540.030,00
	JUMLAH	109.174.880.406,00	95.292.483.978,00	87,28	(13.882.396.428,00)	109.883.540.030,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.079.380.406,00 terealisasi sebesar Rp95.292.483.978,00 atau 87,28% dan mengalami penurunan sebesar Rp14.591.056.052,00 atau sebesar Rp13,28% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp109.883.540.030,00.

7.6.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH - LRA

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali di mana dalam penganggaran pemerintah dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal antara lain dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali Pinjaman kepada Masyarakat, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal antara lain dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat.

7.6.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun lalu. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.949.728.959,68	23.949.728.959,68	100,00	0,00	6.984.586.830,57
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	984.223.303,67	196,84	484.223.303,67	865.045.016,02
	JUMLAH	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	484.223.303,67	7.849.631.846,59

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.449.728.959,68 terealisasi sebesar Rp24.933.952.263,35

atau 101,98% dan mengalami kenaikan sebesar Rp17.084.320.416,76 atau 217,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.849.631.846,59.

7.6.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 119
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang berada pada SKPD Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

7.6.1.3.3. PEMBIAYAAN NETTO - LRA

Pembiayaan netto merupakan perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 120
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan	24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	484.223.303,67	7.849.631.846,59
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
JUMLAH		24.449.728.959,68	24.933.952.263,35	101,98	484.223.303,67	5.849.631.846,59

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.449.728.959,68 terealisasi sebesar Rp24.933.952.263,35 atau 101,98%

dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.084.320.416,76 atau sebesar 326,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.849.631.846,59.

7.6.1.3.4. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN APBD (SiLPA/SiKPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 121
Anggaran dan Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) Tahun 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	2.222.061.797,29	100,00	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
JUMLAH		0,00	2.222.061.797,29	100,00	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68

Tabel di atas menunjukkan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp2.222.061.797,29 atau 100,00% dan mengalami penurunan sebesar Rp21.727.667.162,39 atau sebesar 90,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68.

7.6.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjelasan atas pos-pos perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2024 sebesar Rp23.949.728.959,68 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.965.142.129,11 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp6.984.586.830,57.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.949.728.959,68 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.965.142.129,11 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp6.984.586.830,57.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode pembukuan tahun sebelumnya. Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

Tabel 122
Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
5	Sub Total (3+4)	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		2.222.061.797,29	23.949.728.959,68

7.6.3. NERACA

7.6.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jenis Aset yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.862.320.417.152,63 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.942.008.474.760,00. Berikut ini akan diuraikan dari masing-masing jenis Aset.

7.6.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar (*Current Assets*) adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas, Aset Lancar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Kas dan Setara Kas, (2) Investasi Jangka Pendek, (3) Piutang dan (4) Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.813.695.885,19 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 123
Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3
Kas Di Kas Daerah	159.820.093,88	22.327.961.923,56
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	15.369.994,00
Kas di BLUD	1.456.758.963,29	0,00
Kas Dana BOS	1,12	1,12
Kas Lainnya	605.482.739,00	1.606.397.041,00
Piutang Pajak Daerah	3.241.071.379,72	1.527.820.534,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	691.609.524,00	590.980.517,00
Piutang Transfer	15.117.049.818,00	12.454.416.671,00
Penyisihan Piutang	(1.468.701.575,34)	(1.268.883.906,33)
Piutang Lainnya	214.473.933,32	214.473.933,32
Persediaan	23.796.131.008,20	28.263.789.582,11
JUMLAH ASET LANCAR	43.813.695.885,19	65.732.326.290,78

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp43.813.695.885,19 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp65.732.326.290,78.

7.6.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang harus dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah, serta uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Dana BOS, Kas Dana Desa, dan Kas Lainnya. Sedangkan Setara kas terdiri Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan. Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per tanggal neraca 31 Desember 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29, yang terdiri dari:

Tabel 124
Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3
Kas di Kas Daerah	159.820.093,88	22.327.961.923,56
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	15.369.994,00
Kas di BLUD	1.456.758.963,29	0,00
Kas Di Bendahara BOS	1,12	1,12
Kas Lainnya	605.482.739,00	1.606.397.041,00
Jumlah	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68.

7.6.3.1.1.1.1. Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah. Penunjukan Pengelolaan Kas Daerah tertuang dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1285 Tahun 2023 tentang Penunjukkan PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tarempa dalam Penempatan Dana Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayaran dan Penerimaan Uang Kas Daerah Tahun Anggaran 2024. Kas Daerah ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, atau sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas Penerimaan, Kas Pengeluaran dan Kas pada FKTP. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 125
Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	0,00	17.211.236.555,00
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	91.928.105,88	4.039.638.228,15
Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi	67.891.988,00	1.077.087.140,41
Jumlah	159.820.093,88	22.327.961.923,56

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp159.820.093,88 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp22.327.961.923,56. Saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kas di BUD

Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari Rekening Kas Umum Daerah Pengeluaran dengan Nomor Rekening 170-020-0001 atas nama Pemerintah Kab Kepulauan Anambas sampai dengan 31 Desember 2024 dengan sisa saldo Rp0,00 dan Kas Penerimaan Daerah dengan Nomor Rekening 170-020-0002 atas nama RKUD Kab Kepulauan Anambas dengan Saldo Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.928.105,88. Saldo kas secara pembukuan sebesar Rp91.928.105,88, dan saldo bank sebesar Rp91.928.105,88. Tidak terdapat Perbedaan saldo kas pada Laporan Keuangan dengan saldo kas buku, dan adapaun terdapat kesalahan pencatatan oleh bank pada tahun berjalan telah dilakukan penyesuaian per 31 Desember 2024.

Jumlah Kas Di Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp91.928.105,88 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 126
Kas Di Rekening Kas Umum Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	0,00	17.211.236.555,00
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	91.928.105,88	4.039.638.228,15
Jumlah	91.928.105,88	21.250.874.783,15

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas di BUD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp91.928.105,88 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp21.250.874.783,15.

b. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar

Rp67.891.988,00. Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.891.988,00 terdiri dari:

Tabel 127
Kas Di Bendahara FKTP - Dana JKN Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal (2023)	Pendapatan	Belanja/Beban	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
Puskesmas Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Letung	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Kute Siantan	60.298.375,00	156.868.663,00	149.275.050,00	67.891.988,00
JUMLAH	60.298.375,00	156.868.663,00	149.275.050,00	67.891.988,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Di Bendahara FKTP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp67.891.988,00 terdapat pada Puskesmas Kute Siantan, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp60.298.375,00, hal ini merupakan salah satu Puskesmas yang sampai saat ini masih berstatus Non BLUD.

7.6.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang yang diterima oleh bendahara penerimaan, baik itu dari pajak, retribusi, sumbangan, atau sumber lainnya yang sah. Kas Di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan tidak terdapat penerimaan yang belum disetorakan selama Tahun 2024, dan kemudian disetorakan pada Tahun 2025. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 128
Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal (2023)	Retribusi	Non Kapitasi (INA CBG'S)	Jasa Raharja	Setor Ke Kasda	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5	6	7
RSUD Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Tarempa	1.597.100,00	0,00	0,00	0,00	1.597.100,00	0,00
Puskesmas Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Letung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	13.772.894,00	0,00	0,00	0,00	13.772.894,00	
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	15.369.994,00	0,00	0,00	0,00	15.369.994,00	0,00

Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.369.994,00 merupakan pendapatan yang diterima pada Tahun 2023 dan disetor ke RKUD oleh Petugas Pemungut di Tahun 2024, terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA sebesar Rp1.597.100,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024;
- Retribusi Kios – LRA sebesar Rp12.312.350,00 disetorkan tanggal 7 Februari dan 13 Februari 2024;
- Retribusi Los - LRA sebesar Rp1.438.200,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024; dan
- Pendapatan Denda Retribusi Kios - LRA sebesar Rp22.344,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024.

7.6.3.1.1.1.3. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab pengelola keuangan BLUD, bendahara penerimaan BLUD dan bendahara

pengeluaran BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar 1.456.758.963,29 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 129
Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Faskes	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan BLUD	Pendapatan Setelah Koreksi (Setor ke Kasda)	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tarempa	409.200.613,00	2.397.100,00	1.032.812.593,00	1.030.415.493,00	1.236.421.432,00	203.194.674,00
2	Palatak	134.971.937,00	13.794.200,00	866.347.440,00	852.553.240,00	652.790.323,00	334.734.854,00
3	Letung	181.398.837,00	8.794.200,00	602.270.159,00	593.475.959,00	540.170.468,00	234.704.328,00
4	Siantan Selatan	90.847.132,00	0,00	272.536.381,00	272.536.381,00	221.377.139,00	142.006.374,00
5	Siantan Tengah	61.682.958,94	0,00	275.473.958,00	275.473.958,00	212.528.797,00	124.628.119,94
6	Siantan Timur	92.079.173,00	0,00	276.839.929,00	276.839.929,00	265.199.601,00	103.719.501,00
7	Jemaja Timur	46.608.114,47	0,00	227.618.359,00	227.618.359,00	229.043.627,00	45.182.846,47
8	RSUD Tarempa	0,00	435.747.700,00	2.924.508.532,00	2.488.760.832,00	2.351.949.932,00	136.810.900,00
9	RSUD Palatak	0,00	239.216.000,00	2.023.970.227,88	1.784.754.227,88	1.752.573.198,00	32.181.029,88
10	RSUD Jemaja	0,00	17.721.000,00	266.476.239,00	248.755.239,00	149.158.903,00	99.596.336,00
Total		1.016.788.765,41	717.670.200,00	8.768.853.817,88	8.051.183.617,88	7.611.213.420,00	1.456.758.963,29

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas di BLUD pada masing-masing Faskes Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.456.758.963,29.

7.6.3.1.1.1.4. Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari program BOS yang dikelola oleh bendahara sekolah. Dana BOS diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasional dan pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah, seperti biaya pengadaan buku, alat peraga, gaji tenaga pendukung, dan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kas Di Bendahara BOS merupakan saldo di rekening dana BOS yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BOS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sumbernya dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke Rekening Sekolah. Saldo Kas Di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,12 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 130
Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SD Negeri	0,88	7.584.160.000,00	7.584.160.000,00	0,88
SMP Negeri	0,24	3.964.160.000,00	3.964.160.000,00	0,24
JUMLAH	1,12	11.548.320.000,00	11.548.320.000,00	1,12

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,12. Terdiri dari BOS SD Negeri sebesar Rp0,88

dan BOS SMP Negeri sebesar Rp0,24. Hal tersebut merupakan sisa saldo Tahun 2023 yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk dan sampai per 31 Desember 2024 belum dilakukan penutupan rekening bank. Tahun 2024 Kas di Bendahara Bos sudah berada pada Bank Riau Kepri Syariah, Tbk dan tidak terdapat saldo pada buku bank atau bersaldo Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan SD per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,88 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 131
Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Dasar (SD) Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SDN 001 LETUNG	0,00	237.360.000,00	237.360.000,00	0,00
SDN 002 REWAK	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00
SDN 003 MAMPOK	0,00	99.360.000,00	99.360.000,00	0,00
SDN 004 LETUNG	0,19	205.080.000,00	205.080.000,00	0,19
SDN 005 LEMBAH REWAK	0,00	86.940.000,00	86.940.000,00	0,00
SDN 006 LETUNG	0,00	179.400.000,00	179.400.000,00	0,00
SDN 007 PULAU DARAK	0,00	105.300.000,00	105.300.000,00	0,00
SDN 008 AIR BIRU	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 009 LANDAK	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
SDN 001 KUALA MARAS	0,00	125.580.000,00	125.580.000,00	0,00
SDN 002 ULU MARAS	0,00	132.480.000,00	132.480.000,00	0,00
SDN 003 BUKIT PADI	0,00	97.980.000,00	97.980.000,00	0,00
SDN 004 GENTING PULUR	0,00	94.260.000,00	94.260.000,00	0,00
SDN 001 TAREMPA	0,00	328.440.000,00	328.440.000,00	0,00
SDN 002 TAREMPA	0,00	356.040.000,00	356.040.000,00	0,00
SDN 003 TAREMPA	0,00	162.840.000,00	162.840.000,00	0,00
SDN 004 BUKIT TAMBUN	0,00	175.260.000,00	175.260.000,00	0,00
SDN 005 ANTANG	0,00	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
SDN 006 TANJUNG	0,00	147.660.000,00	147.660.000,00	0,00
SDN 007 SEDAK	0,00	69.420.000,00	69.420.000,00	0,00
SDN 008 DUSUN	0,00	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
SDN 009 REKAM	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00
SDN 001 LADAN	0,00	309.540.000,00	309.540.000,00	0,00
SDN 002 PUTIK	0,00	191.820.000,00	191.820.000,00	0,00
SDN 003 PIABUNG	0,00	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00
SDN 004 LANGIR	0,00	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
SDN 005 CANDI	0,00	120.060.000,00	120.060.000,00	0,00
SDN 006 TEBANG	0,00	150.420.000,00	150.420.000,00	0,00
SDN 007 BELIBAK	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 001 TELAGA	0,00	72.180.000,00	72.180.000,00	0,00

Nama Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SDN 002 KIABU	0,00	104.880.000,00	104.880.000,00	0,00
SDN 003 MENGKAIT	0,00	152.220.000,00	152.220.000,00	0,00
SDN 004 GENTING	0,00	97.980.000,00	97.980.000,00	0,00
SDN 005 LINGAI	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 006 TELAGA KECIL	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
SDN 007 LINGAI BESAR	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 008 HARUNG HIJAU	0,00	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00
SDN 001 NYAMUK	0,69	215.280.000,00	215.280.000,00	0,69
SDN 002 MUNJAN	0,00	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00
SDN 003 AIR PUTIH	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 004 SERAT	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 005 TEMBURUN	0,00	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00
SDN 006 BATU BELAH	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00
SDN 007 ETANG	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 008 PENEBUG	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 009 NOKOK	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 010 LUAP	0,00	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00
SDN 001 AIR ASUK	0,00	139.380.000,00	139.380.000,00	0,00
SDN 002 AIR NANGAK	0,00	93.840.000,00	93.840.000,00	0,00
SDN 003 AIR SENA	0,00	131.260.000,00	131.260.000,00	0,00
SDN 004 TELUK SUNTING	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 005 LIDI	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
SDN 006 LIUK	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00
SDN 007 MUNTAL	0,00	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00
SDN 001 KERAMUT	0,00	51.060.000,00	51.060.000,00	0,00
SDN 002 IMPOL	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
SDN 003 SUNGGAK	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00
SDN 001 PAYALAMAN	0,00	224.940.000,00	224.940.000,00	0,00
SDN 002 MATAK	0,00	74.520.000,00	74.520.000,00	0,00
SDN 003 BATU AMPAR	0,00	121.440.000,00	121.440.000,00	0,00
SDN 004 TELUK DURIAN	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00
SDN 001 PIASAN	0,00	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00
SDN 002 BAYAT	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
SDN 003 PALAH	0,00	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00
SDN 004 PIAN PASIR	0,00	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00

Nama Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SDN 005 MUBUR KECIL	0,00	62.520.000,00	62.520.000,00	0,00
Total	0,88	7.584.160.000,00	7.584.160.000,00	0,88

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkat SMP per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,24 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 132

Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SMPN 1 JEMAJA	0,00	476.440.000,00	476.440.000,00	0,00
SMPN 2 LEMBAH REWAK	0,00	99.760.000,00	99.760.000,00	0,00
SMPN 1 JEMAJA TIMUR	0,00	178.880.000,00	178.880.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN	0,00	301.600.000,00	301.600.000,00	0,00
SMPN 2 SIANTAN	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00
SMPN 3 SEDAK	0,00	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00
SMPN 4 DUSUN	0,00	99.760.000,00	99.760.000,00	0,00
SMPN 5 BUKIT TAMBUN	0,00	118.680.000,00	118.680.000,00	0,00
SMPN 1 PALMATAK	0,00	368.080.000,00	368.080.000,00	0,00
SMPN 2 PIABUNG	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
SMPN 3 PUTIK	0,00	177.160.000,00	177.160.000,00	0,00
SMPN 1 KIABU	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
SMPN 2 MENGKAIT	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
SMPN 3 TELAGA	0,05	55.040.000,00	55.040.000,00	0,05
SMPN 4 GENTING	0,06	48.160.000,00	48.160.000,00	0,06
SMPN 5 HARUNG HIJAU	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00
SMPN 6 LINGAI	0,00	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN TIMUR	0,13	166.840.000,00	166.840.000,00	0,13
SMPN 2 BATU BELAH	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
SMPN 3 MUNJAN	0,00	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00
SMPN 1 AIR NANGAK	0,00	175.440.000,00	175.440.000,00	0,00
SMPN 2 AIR ASUK	0,00	116.960.000,00	116.960.000,00	0,00

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal (2023)	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2024	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5
SMPN 1 SUNGGAK	0,00	70.520.000,00	70.520.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN UTARA	0,00	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00
SMPN 2 BAYAT	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
Total	0,24	3.964.160.000,00	3.964.160.000,00	0,24

7.6.3.1.1.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah Kas dan Setara Kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Kas Lainnya mencatat penerimaan atau pengeluaran uang yang tidak termasuk dalam kategori kas utama seperti Kas Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, atau Kas di Bendahara BOS. Kas ini bisa mencakup berbagai jenis sumber dana atau transaksi yang tidak termasuk dalam kategori khusus yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya adalah pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (*deposit in transit*). Kas Lainnya merupakan saldo Kas pada BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.482.739,00. Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.482.739,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 133
Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal (2023)	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo Akhir (2024)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
Puskesmas Tarempa	153.248.349,00	485.275.651,00	518.821.467,00	119.702.533,00
Puskesmas Palatak	195.412.621,00	383.811.379,00	494.116.401,00	85.107.599,00
Puskesmas Letung	176.950.908,00	365.183.092,00	488.708.917,00	53.425.083,00
Puskesmas Siantan Selatan	382.002.000,00	185.454.595,00	512.124.963,00	55.331.632,00
Puskesmas Siantan Tengah	90.474.886,00	517.259.114,00	566.875.133,00	40.858.867,00
Puskesmas Siantan Timur	157.996.666,00	349.825.334,00	475.948.200,00	31.873.800,00
Puskesmas Jemaja Timur	84.025.129,00	358.674.871,00	401.391.947,00	41.308.053,00
Puskesmas Kute Siantan	152.554.249,00	255.013.751,00	355.437.034,00	52.130.966,00
Puskesmas Jemaja Barat	76.009.849,00	352.992.151,00	380.530.712,00	48.471.288,00
Puskesmas Siantan Utara	136.680.384,00	261.886.616,00	321.294.082,00	77.272.918,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	0,00
JUMLAH	1.606.397.041,00	3.515.376.554,00	4.516.290.856,00	605.482.739,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas pada Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.482.739,00 dan itu merupakan saldo Kas BOK Puskesmas yang terdapat pada 10 Puskesmas yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp1.606.397.041,00 yang terdiri dari Kas pada BOK Puskesmas dan Kas Pokok Dana Bergulir yang tidak disetorkan Bendahara Penerimaan pada Tahun berjalan.

7.6.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan jumlah uang yang terutang oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah yang timbul akibat kewajiban membayar pajak daerah, tetapi belum dibayar atau dilunasi pada periode tertentu. Piutang ini dapat timbul karena ketidakpatuhan atau keterlambatan pembayaran pajak oleh individu atau badan usaha yang dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.241.071.379,72. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan dan penambahan piutang pajak karena adanya pelunasan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jumlah Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.241.071.379,72 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 134
Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Restoran	14.345.634,00	1.431.841.405,00	8.066.155,28	1.438.120.883,72
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.513.474.900,00	692.509.446,00	403.033.850,00	1.802.950.496,00
	Jumlah	1.527.820.534,00	2.124.350.851,00	411.100.005,28	3.241.071.379,72

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.241.071.379,72 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.527.820.534,00. Piutang Pajak Daerah terdiri dari Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.438.120.883,72 dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), dengan rincian sebagai berikut.

7.6.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada restoran, rumah makan, kafe, dan tempat sejenis lainnya yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Saldo Piutang Pendapatan Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.279.478,72 merupakan sisa Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 135
Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.345.634,00	0,00	8.066.155,28	6.279.478,72
2	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	1.431.841.405,00	0,00	1.431.841.405,00
	Jumlah	14.345.634,00	1.431.841.405,00	8.066.155,28	1.438.120.883,72

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.438.120.883,72 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp14.345.634,00.

7.6.3.1.1.2.2. Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)

Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) merupakan jumlah uang yang terutang oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah atas kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti atau tanah yang dimiliki, yang belum dibayar atau dilunasi dalam periode yang ditentukan. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan bangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pajak ini memiliki dasar pengenaan yang mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Piutang ini terjadi jika wajib pajak (baik perorangan maupun badan) belum melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan batas waktu yang berlaku. Pemerintah daerah akan mencatat piutang tersebut dalam pembukuan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Saldo Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.802.950.496,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 136
Mutasi Piutang PBBP2 Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.513.474.900,00	692.509.446,00	403.033.850,00	1.802.950.496,00
	Jumlah	1.513.474.900,00	692.509.446,00	403.033.850,00	1.802.950.496,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.802.950.496,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.513.474.900,00.

7.6.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang terutang oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan kewajiban membayar retribusi yang belum dibayar atau dilunasi pada periode yang telah ditentukan. Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang diberikan kepada masyarakat, misalnya pelayanan pasar, persampahan, parkir dan fasilitas umum lainnya. Piutang retribusi tercatat jika ada pihak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi yang terutang. Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi tambah dan kurang Piutang Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 137
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

7.6.3.1.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah jumlah uang yang terutang kepada pemerintah daerah, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) selain dari pajak dan retribusi yang sah, dan belum dibayar atau dilunasi dalam periode yang telah ditentukan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan hasil penjualan BMD yang dipisahkan, piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, dan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang PBBP2 (Denda) Tahun 2024 sebesar 691.609.524,00 yang belum dibayarkan Tahun 2024, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 590.980.517,00.

Tabel 138
Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Remunerasi TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	590.980.517,00	100.629.007,00	0,00	691.609.524,00
	Jumlah	590.980.517,00	100.629.007,00	0,00	691.609.524,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 terdiri atas Piutang Remunerasi TDF sebesar Rp,00 dan Denda PBBP2 sebesar Rp691.609.524,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp590.980.517,00.

7.6.3.1.1.4.1. Piutang Remunerasi TDF

Piutang Remunerasi TDF merupakan pendapatan bagi hasil atas penempatan dana atau imbalan bunga atas penyimpanan dana milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada fasilitas TDF. Piutang Remunerasi TDF Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Mutasi tambah dan kurang Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 139
Mutasi Piutang Remunerasi TDF Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	6
Remunerasi TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

7.6.3.1.1.4.2. Piutang Pendapatan Denda PBB-P2

Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 merupakan imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari masyarakat sehubungan dengan denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140
Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	590.980.517,00	100.629.007,00	0,00	691.609.524,00
	Jumlah	590.980.517,00	100.629.007,00	0,00	691.609.524,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 terdiri sebesar Rp691.609.524,00 bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp590.980.517,00.

7.6.3.1.1.5. Piutang Transfer

Piutang Transfer merupakan jumlah uang yang terutang kepada pemerintah daerah yang berasal dari transfer dana atau bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau lembaga lain yang belum diterima atau dibayarkan pada periode Tahun Anggaran. Transfer ini biasanya berkaitan dengan dana yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, atau kegiatan lainnya yang mendukung pembangunan daerah. Piutang Transfer merupakan piutang yang timbul karena ada bagian dari dana transfer atas dana bagi hasil pemerintah pusat sesuai PMK maupun dana transfer atas dana bagi hasil provinsi atas sesuai Surat Keputusan Gubernur. Mutasi Piutang Transfer Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 141
Mutasi Piutang Transfer Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Transfer Antar Daerah	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00
	Jumlah	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00

Piutang Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.117.049.818,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp12.454.416.671,00 merupakan piutang transfer dana bagi hasil dari Provinsi Kepulauan Riau atas bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 142
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.551.384.241,00	4.715.945.807,00	3.551.384.241,00	4.715.945.807,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB)	2.465.847.894,00	4.619.033.355,00	2.465.847.894,00	4.619.033.355,00
Pajak Air Permukaan	9.909.490,00	13.750.497,00	9.909.490,00	13.750.497,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.427.275.046,00	5.768.320.159,00	6.427.275.046,00	5.768.320.159,00
Jumlah	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00	12.454.416.671,00	15.117.049.818,00

7.6.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.473.933,32 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp214.473.933,32 merupakan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atas imbalan yang diperoleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan tuntutan ganti rugi daerah terhadap bendahara dan pihak ketiga. Piutang Lainnya Bagian Lancar TP-TGR Tahun 2024 terdiri dari:

- Piutang TGR PT. Natuna Insani berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp96.876.570,47; dan
- Piutang TGR PT. Andesta/R. Taufan Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362,85.

Tidak terdapat penambahan atas Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp214.473.933,32 merupakan piutang tuntutan ganti rugi Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 yang telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang diatur paling lambat 24 bulan dari tanggal penandatanganan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak. Saldo piutang

lainnya ini telah dilakukan penyisihan per 31 Desember 2023, sehingga nilai piutang lainnya secara netto adalah sebesar Rp0,00.

7.6.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.468.701.575,34 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.268.883.906,41. Penyisihan Piutang Tahun 2024 terdiri dari.

Tabel 143
Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	712.884.254,00	843.923.186,86
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	340.091.155,61	400.005.508,77
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	1.434.563,40	10.298.946,39
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	214.473.933,32	214.473.933,32
	Jumlah	1.268.883.906,33	1.468.701.575,34

Tabel 144
Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar (< 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 Tahun s/d 2 Tahun)	Diragukan (> 2 Tahun s/d 5 Tahun)	Macet (> 5 Tahun)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Restoran	1.431.841.405,00	6.279.478,72	0,00	0,00	1.438.120.883,72
2	Penyisihan	(7.159.207,03)	(3.139.739,36)	0,00	0,00	(10.298.946,39)
	Piutang Pajak Restoran Netto (1-2)	1.424.682.197,98	1.424.682.197,97	3.139.739,36	0,00	0,00
1	Piutang PBB-P2	347.613.031,00	498.190.607,00	329.561.594,00	627.585.264,00	1.802.950.496,00
2	Penyisihan	(1.738.065,16)	(49.819.060,70)	(164.780.797,00)	(627.585.264,00)	(843.923.186,86)
	Piutang PBB-P2 Netto (1-2)	345.874.965,85	345.874.965,84	448.371.546,30	164.780.797,00	0,00
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	34.537.754,00	198.157.440,00	157.794.508,00	301.119.822,00	691.609.524,00
2	Penyisihan	(172.688,77)	(19.815.744,00)	(78.897.254,00)	(301.119.822,00)	(400.005.508,77)
	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Netto (1-2)	34.365.065,23	34.365.065,23	178.341.696,00	78.897.254,00	0,00
1	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	214.473.933,32	214.473.933,32

2	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(214.473.933,32)	(214.473.933,32)
Piutang Lainnya Netto (1-2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.6.3.1.1.8. Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merujuk pada barang atau bahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan pelayanan publik, yang belum digunakan atau belum habis. Persediaan ini mencakup berbagai jenis barang yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat satuan kerja perangkat daerah, seperti untuk penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, atau keperluan administratif. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp23.796.131.008,20 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp28.263.789.582,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 145
Persediaan Konsolidasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3
Bahan	4.921.223.548,23	4.921.853.548,23
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.226.682.570,00	492.281.236,00
Obat-obatan	12.544.099.895,97	9.717.634.855,25
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.104.124.994,00	13.132.019.942,63
Jumlah Akhir Persediaan	23.796.131.008,20	28.263.789.582,11

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 memiliki 2 (dua) akun untuk menjadikan persediaan s.d. akhir tahun yaitu Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Saldo Persediaan Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai pada akhir periode 31 Desember 2024 sebesar Rp23.796.131.008,20. Mutasi Persediaan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo awal persediaan Tahun 2023	28.263.789.582,11
b. (+) Persediaan pada tahun 2024	46.540.594.166,00
c. (-) Persediaan atas penyesuaian saldo tahun lalu dan pemakaian Tahun 2024	51.286.778.839,91
d. (+) Reklas ke Persediaan atas Belanja Modal Tahun 2024	278.526.100,00
e. Saldo akhir Persediaan Tahun 2024	23.796.131.008,20

Rincian Persediaan pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 146
Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke Persediaan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	4	5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	246.546.080,00	3.981.898.769,00	4.225.890.273,00	278.526.100,00	281.080.676,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.831.842.726,98	14.213.436.356,00	11.039.843.331,93	0,00	18.005.435.751,05
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.627.513.414,63	5.706.409.373,00	11.849.866.373,63	0,00	4.484.056.414,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.695.000,00	304.186.484,00	304.684.484,00	0,00	1.197.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.615.500,00	683.900.500,00	687.921.250,00	0,00	1.594.750,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	331.400,00	481.909.496,00	482.030.896,00	0,00	210.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.182.393.948,00	320.387.032,00	1.779.344.400,00	0,00	723.436.580,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.044.345,00	536.580.383,00	504.289.773,00	0,00	87.334.955,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	323.840,00	109.619.058,00	109.406.498,00	0,00	536.400,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	29.982.033,00	951.993.643,00	948.132.343,00	0,00	33.843.333,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.113.700,00	313.607.341,00	313.629.810,00	0,00	1.091.231,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	5.608.000,00	519.881.135,00	518.807.035,00	0,00	6.682.100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.629.620,00	156.523.324,00	150.625.044,00	0,00	18.527.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.083.800,00	189.261.150,00	185.943.950,00	0,00	4.401.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	806.450,00	539.203.653,00	539.861.103,00	0,00	149.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	71.792.041,50	4.819.954.801,00	4.849.693.186,35	0,00	42.053.656,15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	695.600,00	495.019.100,00	495.207.700,00	0,00	507.000,00

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke Persediaan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	4	5
Sekretariat Daerah	39.852.135,00	4.244.326.749,00	4.272.754.884,00	0,00	11.424.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	1.627.496.742,00	1.627.496.742,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.622.706,00	1.077.177.673,00	1.077.092.279,00	0,00	1.708.100,00
Kecamatan Jemaja	985.100,00	625.198.405,00	624.994.605,00	0,00	1.188.900,00
Kecamatan Palmatak	886.000,00	458.947.500,00	459.239.500,00	0,00	594.000,00
Kecamatan Siantan Timur	740.600,00	417.549.479,00	417.470.079,00	0,00	820.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.075.900,00	285.916.010,00	285.732.910,00	0,00	1.259.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	508.000,00	277.360.100,00	277.259.100,00	0,00	609.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	939.550,00	200.915.100,00	201.009.650,00	0,00	845.000,00
Kecamatan Siantan Utara	590.700,00	203.065.365,00	203.321.065,00	0,00	335.000,00
Kecamatan Jemaja Barat	225.000,00	240.114.350,00	240.061.350,00	0,00	278.000,00
Kecamatan Kute Siantan	8.550.000,00	199.510.000,00	203.155.105,00	0,00	4.904.895,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	174.400,00	63.763.441,00	61.653.041,00	0,00	2.284.800,00
Inspektorat Daerah	419.200,00	195.372.871,00	195.019.231,00	0,00	772.840,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	590.000,00	869.735.042,00	869.915.742,00	0,00	409.300,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	130.236.285,00	920.604.841,00	981.767.699,00	0,00	69.073.427,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.376.507,00	309.768.900,00	303.658.407,00	0,00	7.487.000,00
JUMLAH	28.263.789.582,11	46.540.594.166,00	51.286.778.839,91	278.526.100,00	23.796.131.008,20

Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Baik pada setiap UPT dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 147
Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Baik Pada Setiap UPT dan SKPD

(Dalam Rupiah)

No	DINKES PPKB Dan UPT	Nilai Persediaan Obat Dan BMHP Kondisi Baik
1	2	3
1	Dinas Kesehatan - PPKB	0,00
2	Balai Farmasi & Alat Kesehatan	4.345.593.410,00
3	Rsud Tarempa	3.951.326.876,50
4	Rsud Palmatak	3.774.386.953,25
5	Rsud Jemaja	2.214.554.695,99

No	DINKES PPKB Dan UPT	Nilai Persediaan Obat Dan BMHP Kondisi Baik
6	Puskesmas Tarempa	557.906.242,81
7	Puskesmas Palmatak	496.402.742,24
8	Puskesmas Letung	361.353.322,53
9	Puskesmas Siantan Selatan	377.911.157,04
10	Puskesmas Siantan Tengah	197.659.078,41
11	Puskesmas Siantan Timur	372.631.081,30
12	Puskesmas Jemaja Timur	275.870.100,69
13	Puskesmas Jemaja Barat	89.222.964,86
14	Puskesmas Kute Siantan	218.621.848,63
15	Puskesmas Siantan Utara	193.037.313,80
Total		17.426.477.788,05

Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Rusak dan Kadaluarsa pada setiap UPT dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 148

Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Rusak dan Kadaluarsa Pada Setiap UPT dan SKPD

(Dalam Rupiah)

No	DINKES PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat dan BMHP kondisi Rusak	Nilai Persediaan Obat dan BMHP kondisi Kadaluarsa
1	2	3	3
1	Dinas Kesehatan - PPKB	0	0
2	Balai Farmasi & Alat Kesehatan	1.650,000	1.273.655,312
3	Rsud Tarempa	0,00	1.332.296.053,65
4	Rsud Palmatak	0,00	2.906.265.516,81
5	Rsud Jemaja	0,00	1.536.106.284,28
6	Puskesmas Tarempa	0,00	295.862.305,39
7	Puskesmas Palmatak	0,00	101.123.927,28
8	Puskesmas Letung	0,00	221.420.035,35
9	Puskesmas Siantan Selatan	0,00	74.998.142,49
10	Puskesmas Siantan Tengah	0,00	204.731.604,96
11	Puskesmas Siantan Timur	923.540,00	154.857.257,80
12	Puskesmas Jemaja Timur	0,00	249.058.516,71
13	Puskesmas Jemaja Barat	0,00	52.620.254,28
14	Puskesmas Kute Siantan	0,00	16.095.601,73
15	Puskesmas Siantan Utara	276.540,00	26.564.834,26
Total		1.200.080,00	7.172.000.334,99

7.6.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam periode waktu yang relatif lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Investasi jangka panjang sering kali berfokus pada aset atau proyek yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan imbal hasil yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.386.179.202,10 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.562.479.202,10 dan Investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.823.700.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 149
Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	12.854.825.583,33	15.241.643.610,00
Dana Bergulir Tak Tertagih	(10.292.346.381,23)	(11.727.836.574,41)
Jumlah Investasi Non Permanen	2.562.479.202,10	3.513.807.035,59
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah s/d Tahun 2023 (Bank Riau)	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2023	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	10.386.179.202,10	11.337.507.035,59

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.386.179.202,10 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp11.337.507.035,59. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Dana Bergulir sesuai dengan nilai NRV sebesar Rp2.562.479.202,10 dan Penyertaan Modal kepada Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.823.700.000,00.

7.6.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan 5 Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.562.479.202,10 merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir yang disajikan dengan *net realizable value*. Rincian nilai investasi non permanen lainnya - dana bergulir per 31 Desember 2024 yang terdapat pada UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagai berikut.

Tabel 150
Dana Bergulir Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
1	2
A. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2023	13.818.710.275,00
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2024	0,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2024	967.678.903,67
4. Koreksi Atas Pengembalian Pokok Tahun 2024	(555.600,00)
5. Jurnal Penyesuaian Pokok Tahun 2024	(3.238.612,00)
6. Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 Sebelum Penyisihan (1+2-3-4-5)	12.854.825.583,33
7. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2024	10.292.346.381,23
8. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Netto (6 -7)	2.562.479.202,10
B. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2023	1.429.183.335,00
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2024	0,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2024	17.100.000
4. Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Sebelum Penyisihan (1+2-3)	1.412.083.335,00
5. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2023	(1.412.083.335,00)
6. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Netto (4 – 5)	0,00
Jumlah A.8 + B.6	2.562.479.202,10

Dari saldo di atas diketahui NRV per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.562.479.202,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 151
NRV Dana Bergulir Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Tahun	Baki Debet	Umur Piutang				Total Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
		0-1 Thn 0,50%	1-2 Thn 10%	2-5 Thn 50%	>5 Thn 100%		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8 = 2 - 7
A	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian						
2007	9.993.589.788,00	0,00	0,00	0,00	9.993.589.788,00	9.993.589.788,00	0,00
2014	107.104.171,00	0,00	0,00	0,00	107.104.171,00	107.104.171,00	0,00
2015	148.180.167,00	0,00	0,00	0,00	148.180.167,00	148.180.167,00	0,00
2017	16.709.671,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	14.059.671,00
2018	49.271.280,00	0,00	0,00	24.635.640,00	0,00	24.635.640,00	24.635.640,00
2019	98.729.353,00	0,00	9.872.935,30	4,00	0,00	9.872.939,30	88.856.413,70
2020	387.252.015,00	145.833,00	5.920.980,00	0,00	0,00	6.066.813,00	381.185.202,00
2021	336.766.087,33	214.583,33	13.529,60	0,00	0,00	228.112,93	336.537.974,40
2022	397.051.249,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	397.032.499,00
2023	1.320.171.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.171.802,00
	12.854.825.583,33	379.166,33	15.807.444,90	27.285.644,00	10.248.874.126,00	10.292.346.381,23	2.562.479.202,10
B	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan						
2002 & 2003	1.412.083.335,00	0,00	0,00	0,00	1.412.083.335,00	1.412.083.335,00	0,00
A + B	14.266.908.918,33	379.166,33	15.807.444,90	27.285.644,00	11.660.957.461,00	11.704.429.716,23	2.562.479.202,10

7.6.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.823.700.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 152
Penyertaan Modal Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024
1	2	3	4	5
PT. Bank Riau Kepri	7.823.700.000,00	0,00	0,00	7.823.700.000,00
Perusda Anambas Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH (1+2)	7.823.700.000,00	0,00	0,00	7.823.700.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.823.700.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri. Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Anambas Sejahtera per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan nilai kerugian yang disajikan dalam laporan rugi/laba per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.337.832.656,00 melebihi nilai Ekuitas dan kewajiban.

PT Bank Riau Kepri Syariah

Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0.71%. Metode penilaian investasi PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah metode biaya. Tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) selama Tahun 2023. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT Bank Riau Kepri Syariah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah, dimana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar Rp7.500.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menetapkan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sesuai dengan ketentuan maka perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro. SH. M.Kn. Nomor 03. tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah berasal dari konversi atas Dividen Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa dividen saham sebesar Rp323.700,000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham.

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah daerah adalah 100%. Laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DR.H.E.R. Suhardjadinata & Rekan untuk periode audit terakhir per 31 Desember 2017.

Pada Tahun 2024, Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera telah berganti nama menjadi PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera, namun sampai dengan saat ini belum ada menjalankan operasional perusahaan. Tahun 2024 Laporan Keuangan Perusda untuk dijadikan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan Perusda yang sampai sat ini tidak lagi menjalankan operasionalnya atau Perusahaan tersebut dalam keadaan beku (*frez*) sejak akhir Tahun 2017. Nilai kerugian per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.337.832.656,00 dan saldo ekuitas dan kewajiban sebesar Rp10.337.832.656,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 153
Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Audit Independen 2017
1	2	3	4
1.	Aset Lancar	0,00	144.467.308,00
2.	Aset Tidak Lancar	0,00	78.849.479,00
3.	Jumlah Aset (1+2)	0,00	223.316.787,00
4.	Kewajiban Lancar	10.337.832.656,00	7.074.920.945,00
5.	Kewajiban Tidak Lancar	0,00	4.562.500.000,00
6.	Jumlah Kewajiban (4+5)	10.337.832.656,00	11.637.420.945,00
7.	Modal Setor	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
8.	Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-6-7)	(16.337.832.656,00)	(17.414.104.158,00)
9.	Jumlah Ekuitas (1 - 6)	(10.337.832.656,00)	(11.414.104.158,00)
10.	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas (6+9)	(10.337.832.656,00)	223.316.787,00
11.	Penjualan	0,00	349.700.000,00
12.	Beban Pokok Penjualan	0,00	1.398.000,00
13.	Laba (Rugi) Kotor	0,00	348.302.000,00
14.	Beban Penjualan	0,00	0,00
15.	Beban Administrasi dan Umum	0,00	385.973.101,00
16.	Jumlah Beban Usaha	0,00	385.973.101,00
17.	Laba (Rugi) Usaha	0,00	(37.671.101,00)
18.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	15.440,00
19.	Beban Lain-Lain	0,00	(1.617.483,00)
20.	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	0,00	(1.602.043,00)
21.	Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	0,00	(39.273.144,00)
22.	Pajak Tangguhan	0,00	0,00
23.	Laba (Rugi) Periode Berjalan	0,00	(39.273.144,00)
24.	Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain	0,00	0,00
25.	Jumlah Laba (Rugi) Periode Berjalan	0,00	(39.273.144,00)

7.6.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi, (5) Aset Tetap Lainnya dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar 1.788.214.365.710,30 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.832.411.541.800,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 154
Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	2	3	4	5
Tanah	171.615.482.367,00	171.615.482.367,00	-	-

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Peralatan Dan Mesin	486.175.619.991,10	459.753.167.299,10	26.422.452.692,00	5,75
Gedung Dan Bangunan	960.163.136.909,33	926.886.684.259,33	33.276.452.650,00	3,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.359.868.793.774,63	1.294.517.038.574,14	65.351.755.200,49	5,05
Aset Tetap Lainnya	17.579.137.862,16	16.202.632.592,16	1.376.505.270,00	8,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.430.598.775,31	114.008.496.706,80	6.422.102.068,51	5,63
Akumulasi Penyusutan	(1.327.618.403.969,23)	(1.150.571.959.997,60)	(177.046.443.971,63)	15,39
JUMLAH ASET TETAP	1.788.214.365.710,30	1.832.411.541.800,93	(44.197.176.090,63)	43,90

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2024 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.788.214.365.710,30 Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

7.6.3.1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp171.615.482.367,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp171.615.482.367,00.

Tabel 155
Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Tanah Persil	86.038.298.558,00	31.485.000,00	31.485.000,00	86.038.298.558,00
Tanah Non Persil	29.210.873.500,00	0,00	0,00	29.210.873.500,00
Lapangan	56.366.310.309,00	0,00	0,00	56.366.310.309,00
JUMLAH	171.615.482.367,00	31.485.000,00	31.485.000,00	171.615.482.367,00

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2024. dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 156
Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	65.091.907.195,00	0,00	31.485.000,00	65.060.422.195,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	69.404.915.500,00	0,00	0,00	69.404.915.500,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.752.322.250,00	0,00	0,00	2.752.322.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.536.616.019,00	0,00	0,00	27.536.616.019,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	344.250.000,00	0,00	0,00	344.250.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	495.370.750,00	0,00	0,00	495.370.750,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	775.072.323,00	0,00	0,00	775.072.323,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	-
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	165.404.000,00	0,00	0,00	165.404.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	655.562.080,00	0,00	0,00	655.562.080,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	716.283.000,00	0,00	0,00	716.283.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	630.890.000,00	0,00	0,00	630.890.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.288.065.000,00	0,00	0,00	1.288.065.000,00
Kecamatan Palmatak	237.750.750,00	0,00	0,00	237.750.750,00
Kecamatan Siantan	1.206.605.000,00	0,00	0,00	1.206.605.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	33.356.000,00	0,00	0,00	33.356.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	86.982.000,00	31.485.000,00	0,00	118.467.000,00
Kecamatan Siantan Timur	194.130.500,00	0,00	0,00	194.130.500,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
JUMLAH	171.615.482.367,00	31.485.000,00	31.485.000,00	171.615.482.367,00

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.485.000,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.485.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 157
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap-Tanah 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2
Saldo Per 31 Desember 2023	171.615.482.367,00
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap tanah pada Kecamatan Siantan Tengah atas pengalihan status penggunaan dari Sekretariat Daerah-Bagian Pemerintahan Umum berupa tanah persil (tanah untuk bangunan tempat kerja) sebesar Rp.31.485.000 berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024	31.485.000,00
Total Mutasi Tambah	31.485.000,00
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset tetap tanah pada Sekretariat Daerah-Bagian Pemerintahan Umum atas pengalihan status penggunaan kepada Kecamatan Siantan Tengah berupa tanah persil (tanah untuk bangunan tempat kerja) sebesar Rp.31.485.000 berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024	31.485.000,00
Total Mutasi Kurang	31.485.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	171.615.482.367,00

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024 belum termasuk Tanah sebanyak 61 persil hasil penilaian Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan penilaian barang milik daerah atas Aset Tanah sebanyak 61 persil sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 1077 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rincian Aset Tanah pada Lampiran tersebut sebagai berikut.

Tabel 158
Rincian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

Tahun Perolehan	Jumlah Persil	Jumlah Luas (m ²)	Nilai Appraisal KPKNL (Rp)	NJOP Tersedia
1	2	3	4	5
1994	2	715	1.045.140.000,00	NJOP Tersedia untuk Tahun 2016, 2018, dan 2021
2008	1	20.000	1.898.493.000,00	
2009	1	3.000	3.712.342.000,00	
2011	1	163	33.087.000,00	
2012	1	800	134.710.000,00	
2016	1	2.030	2.099.771.000,00	
2017	46	359.894	122.071.876.000,00	
2018	4	4.773	2.373.765.000,00	
2019	1	225	50.850.000,00	
2022	3	1.200	127.057.000,00	
Jumlah	61	392.800	133.547.091.000,00	

Pelaksanaan penilaian oleh KPKNL mengacu pada PMK No.173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nilai barang milik daerah hasil penilaian belum menghasilkan nilai Aset Tanah pada saat perolehan, melainkan nilai wajar pada tanggal penilaian.

7.6.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat keselamatan kerja, peralatan proses/produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp486.175.619.991,10 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp459.753.167.299,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Alat Besar	7.893.196.229,00	110.765.000,00	0,00	8.003.961.229,00
Alat Angkutan	92.506.240.478,45	3.818.739.971,00	1.618.995.971,00	94.705.984.478,45
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	4.429.593.177,00	128.080.500,00	0,00	4.557.673.677,00
Alat Pertanian	3.008.522.243,00	7.075.000,00	0,00	3.015.597.243,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.309.095.102,91	4.122.388.443,00	1.122.267.651,00	92.309.215.894,91
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	22.258.190.959,18	315.467.000,00	0,00	22.573.657.959,18
Alat Kedokteran dan Kesehatan	98.467.967.586,54	11.328.620.313,00	0,00	109.796.587.899,54
Alat Laboratorium	41.415.991.183,00	2.989.478.067,00	0,00	44.405.469.250,00
Alat Persenjataan	1.413.506.188,00	5.160.000,00	0,00	1.418.666.188,00
Komputer	64.026.251.568,50	6.217.508.020,00	0,00	70.243.759.588,50
Alat Eksplorasi	8.979.472,00	0,00	0,00	8.979.472,00
Alat Pengeboran	1.947.000,00	0,00	0,00	1.947.000,00
Alat Keselamatan Kerja	4.813.288.997,00	101.900.000,00	0,00	4.915.188.997,00
Peralatan Proses/Produksi	373.349.000,00	10.314.000,00	0,00	383.663.000,00
Rambu-rambu	17.613.214.248,52	0,00	0,00	17.613.214.248,52
Peralatan Olah Raga	12.213.833.866,00	8.220.000,00	0,00	12.222.053.866,00
JUMLAH	459.753.167.299,10	29.163.716.314,00	2.741.263.622,00	486.175.619.991,10

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per SKPD Tahun 2024, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 160
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	65.303.226.278,00	347.560.000,00	767.195.971,00	64.883.590.307,00
Sekretariat DPRD	11.835.785.375,00	181.440.000,00	0,00	12.017.225.375,00
Inspektorat Daerah	2.067.331.473,00	111.720.000,00	0,00	2.179.051.473,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	77.964.758.711,36	5.966.388.723,00	656.747.243,00	83.274.400.191,36
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	156.615.347.736,77	18.049.283.755,00	873.860.968,00	173.790.770.523,77
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.012.571.772,00	10.600.000,00	0,00	12.023.171.772,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.335.402.764,00	70.000.000,00	378.016.440,00	2.027.386.324,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.698.191.510,00	0,00	0,00	2.698.191.510,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	11.979.483.487,00	251.377.000,00	6.500.000,00	12.224.360.487,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	45.671.208.930,97	177.125.100,00	0,00	45.848.334.030,97
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.826.864.000,00	206.646.000,00	0,00	3.033.510.000,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	8.186.670.948,00	417.407.000,00	0,00	8.604.077.948,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	7.989.520.338,00	80.208.600,00	20.313.000,00	8.049.415.938,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.330.039.343,00	176.729.000,00	0,00	4.506.768.343,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	540.386.440,00	0,00	540.386.440,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	458.184.320,00	559.640.000,00	3.250.000,00	1.014.574.320,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	122.510.016,00	48.178.000,00	0,00	170.688.016,00
Satuan Polisi Pamong Praja	13.618.444.466,00	1.680.000,00	1.680.000,00	13.618.444.466,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.757.020.848,00	29.250.000,00	0,00	2.786.270.848,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.732.676.206,00	417.692.000,00	10.400.000,00	7.139.968.206,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.750.860.776,00	438.334.325,00	0,00	5.189.195.101,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.089.541.918,00	111.700.000,00	0,00	1.201.241.918,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.621.280.400,00	41.310.400,00	0,00	4.662.590.800,00

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	295.277.862,00	157.214.000,00	7.500.000,00	444.991.862,00
Kecamatan Jemaja	1.329.880.750,00	70.250.000,00	0,00	1.400.130.750,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.216.599.600,00	21.714.596,00	0,00	1.238.314.196,00
Kecamatan Palmatak	1.642.891.706,00	0,00	0,00	1.642.891.706,00
Kecamatan Siantan	3.029.267.251,00	33.100.000,00	0,00	3.062.367.251,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.549.130.281,00	247.527.125,00	14.000.000,00	1.782.657.406,00
Kecamatan Siantan Tengah	2.248.403.391,00	210.727.125,00	1.800.000,00	2.457.330.516,00
Kecamatan Siantan Timur	840.270.951,00	184.327.125,00	0,00	1.024.598.076,00
Kecamatan Siantan Utara	276.904.800,00	0,00	0,00	276.904.800,00
Kecamatan Jemaja Barat	537.404.890,00	4.200.000,00	0,00	541.604.890,00
Kecamatan Kute Siantan	820.214.200,00	0,00	0,00	820.214.200,00
JUMLAH	459.753.167.299,10	29.163.716.314,00	2.741.263.622,00	486.175.619.991,10

Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 161
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2024

(Dalam Rupiah)	
Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
Saldo Per 31 Desember 2023	459.753.167.299,10
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 pada: • Sekretariat Daerah-Bagian Pengadaan Barang & Jasa sebesar Rp.32.060.000 dan Bagian Umum sebesar Rp.69.200.000; • Sekretariat DPRD sebesar Rp.181.440.000; • Inspektorat Daerah sebesar Rp.111.720.000; • Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga sebesar Rp.3.066.405.000; • Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.17.085.726.092 beserta RSUD Tarempa sebesar Rp.49.680.000 dan RSUD Jemaja sebesar Rp.11.340.000; • Dinas Perikanan, Pertanian & Pangan sebesar Rp.210.577.000; • Dinas Perhubungan & LH sebesar Rp.69.375.300; • Dinas Kependudukan & Capil sebesar Rp.206.646.000; • Dinas Komunikasi, Informatika & Statistika sebesar Rp.417.407.000; • Dinas Pariwisata & Kebudayaan sebesar Rp.167.980.000; • Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa sebesar Rp.81.080.000; • Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan sebesar Rp.276.790.000; • Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah sebesar Rp.48.178.000; • Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.1.680.000; • BPKPD sebesar Rp.328.992.000; • BAPPEDA sebesar Rp.352.334.325; • BPBD sebesar Rp.41.310.400; • BPPD sebesar Rp.24.300.000; • Kecamatan Jemaja sebesar Rp.8.600.000; dan • - Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.24.600.000.	22.867.421.117,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal yang terhutang/tunda bayar Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah-Bagian Umum sebesar Rp.246.300.000 terdiri dari:	1.617.600.400,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
• AC Floor standing sebesar Rp.170.000.000; • Camera DSLR dan tripod Rp.7.200.000; • Personal computer Rp.20.600.000; • Printer Rp.16.000.000; dan • Scanner Rp.32.500.000. 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.12.500.000 berupa kursi tamu 3. Dinas Kesehatan dan PPKB sebesar Rp.251.539.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp. 43.770.000; • Alat pendingin sebesar Rp. 28.860.000; • Peralatan komputer lainnya sebesar Rp. 32.965.000; • Printer Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp. 9.000.000; • Peralatan komputer lainnya sebesar Rp. 7.818.000; • Kasur pasien sebesar Rp. 27.450.000; • Tempat tidur pasien sebesar Rp. 95.000.000; dan • Penghancur kertas sebesar Rp. 6.676.000. 4. Dinas Pekerjaan Umum dan PRPRKP sebesar Rp.10.600.000 berupa 2 (dua) unit printer 5. Dinas Sosial PPPA sebesar Rp.70.000.000 terdiri dari: • Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp.14.000.000; • Mebel sebesar Rp.5.000.000; dan • Personal computer sebesar Rp.51.000.000. 6. Dinas Perikanan, Pertanian & Pangan sebesar Rp.40.800.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp.16.000.000; • Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp.4.400.000; • Personal computer sebesar Rp.16.000.000; dan • Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp.4.400.000. 7. Dinas Perhubungan dan LH sebesar Rp.107.749.800 terdiri dari: • Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp.39.000.000; • Personal Komputer sebesar Rp.36.600.000; • Peralatan Komputer Lainnya Printer sebesar Rp.16.800.000; dan • Personal Computer-Laptop sebesar Rp.15.349.800. 8. Dinas Koperasi UMPP sebesar Rp.80.208.600 terdiri dari: • Soundsystem, papan nama instansi sebesar Rp.7.503.600; • Lemari dan arsip pejabat sebesar Rp.6.660.000; • Alat Pendingin sebesar Rp.13.764.000; • Meja Kerja Pejabat sebesar Rp.17.760.000; dan • Kursi Kerja Pejabat Rp.34.521.000. 9. Dinas Pariwisata & Kebudayaan sebesar Rp.8.749.000 terdiri dari: • Printer sebesar Rp.5.675.000; dan • Pendingin (Kipas Angin 3 in 1) sebesar Rp.3.074.000. 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa sebesar Rp.86.290.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp.38.500.000; • Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp.20.500.000; dan • Meja Kerja Pejabat sebesar Rp.27.290.000. 11. Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan sebesar Rp.90.350.000 terdiri dari: • Mebel sebesar Rp.49.500.000; • Tangga Penyelamat sebesar Rp.9.500.000; dan • Apar sebesar Rp.31.350.000. 12. BKPSDM sebesar Rp.29.250.000 terdiri dari: • Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp.7.250.000; dan • Personal computer sebesar Rp.22.000.000. 13. BPKPD sebesar Rp.88.700.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp.49.900.000; • AC sebesar Rp.22.400.000; • Rak Buku sebesar Rp.8.900.000; dan • Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp.7.500.000. 14. BAPPEDA sebesar Rp.86.000.000 terdiri dari: • cctv sebesar Rp.35.000.000; dan • Digital ADL sebesar Rp.51.000.000. 15. Badan Kesatuan, Bangsa & Politik sebesar Rp.111.700.000 terdiri dari: • Alat dapur tabung gas dan regulator set sebesar Rp.2.000.000; • Personal computer sebesar Rp.28.600.000; dan • Printer,Scanner dan Handy Talky sebesar Rp.81.100.000. 16. BPPD sebesar Rp.132.914.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp.15.300.000; • Kursi sebesar Rp.7.500.000;	

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
• Lemari Arsip dan Laci sebesar Rp.30.500.000; dan • Kendaraan Roda Dua sebesar Rp.79.614.000. 17. Kecamatan Jemaja sebesar Rp.61.650.000 terdiri dari: • Laptop sebesar Rp.40.300.000; • Infocus sebesar Rp.12.500.000; dan • Printer sebesar Rp.8.850.000. 18. Kecamatan Siantan sebesar Rp.33.100.000 terdiri dari: • Alat Pendingin sebesar Rp.16.950.000; dan • Personal computer sebesar Rp.16.150.000. 19. Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.63.200.000 terdiri dari: • Personal computer sebesar Rp.40.800.000; • Printer sebesar Rp.8.400.000; • Kipas Angin sebesar Rp.2.600.000 dan • Kursi Plastik sebesar Rp.11.400.000. 20. Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.1.800.000 berupa 2 (dua) unit gerobak.	
21. Kecamatan Jemaja Barat sebesar Rp.4.200.000 berupa printer.	
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana kapitasi pada Dinkes PPKB berupa 1 (satu) unit printer sebesar Rp.4.500.000.	4.500.000,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana BLUD terdiri dari: 1. RSUD Tarempa berupa: • AC sebesar Rp.94.072.500; • Personal computer sebesar Rp.47.002.500; • Printer sebesar Rp.8.436.000; dan • Printer sebesar Rp.16.650.000. 2. RSUD Palmatak berupa: • Laptop sebesar Rp.13.040.000; • Printer sebesar Rp.25.308.000; • Personal computer sebesar Rp.94.305.600; • Personal computer sebesar Rp.62.675.040; dan • Printer sebesar Rp.4.162.500. 3. Puskesmas Tarempa berupa: • Infocus sebesar Rp.7.500.000; • Personal computer sebesar Rp.71.000.000; • Lemari es sebesar Rp.5.100.000; • Kursi sebesar Rp.12.900.000; dan • Printer sebesar Rp.20.500.000. 4. Puskesmas Palmatak berupa: • APAR sebesar Rp.6.645.570; • Alat pendingin sebesar Rp.22.560.750; • Personal computer sebesar Rp.39.960.000; dan • Blender sebesar Rp.4.400.000. 5. Puskesmas Siantan Selatan berupa aki genset sebesar Rp.1.700.000 6. Puskesmas Jemaja Timur berupa personal computer sebesar Rp.35.298.000 7. Puskesmas Letung berupa • Alat kedokteran gigi sebesar Rp.15.937.368; • Alat kedokteran umum sebesar Rp.12.703.340; • Alat pemadam kebakaran sebesar Rp.3.441.000; dan • - Alat Pendingin sebesar Rp.21.200.495	646.498.663,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.854.045.723,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi dari KIB E (dana BOS) karena kesalahan kode rekening pada Disdikpora berupa rebana, proyektor, speaker mini, papan data, speaker aktif, microphone dan printer.	33.438.000,00
Penambahan aset peralatan dan mesin atas pengalihan status Penggunaan BMD pada: • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.373.016.440 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Penghapusan Nomor 217 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024; • Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan sebesar Rp.192.500.000 dari Sekretariat Daerah-Bagian Umum berupa Pick Up berdasarkan SK penghapusan Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024; • Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp.21.714.600 dari Sekretariat Daerah-Bagian Umum berupa Sepeda Motor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 603 Tahun 2024; • Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.184.327.125 dari Sekretariat Daerah-Bagian Umum berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan BMD Nomor 700 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024;	1.140.212.411,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
- Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.184.327.125 dari Sekretariat Daerah-Bagian Umum berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024; - Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.184.327.125 dari Sekretariat Daerah-Bagian Umum berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 732 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024	
Total Mutasi Tambah	29.163.716.314,00
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas BMD yang dihibahkan kembali ke Yayasan BUMN untuk Indonesia berupa ambulance laut berdasarkan SK Penghapusan Nomor 218 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024	850.000.000,00
Pengurangan aset peralatan dan mesin atas pengalihan status Penggunaan BMD pada: - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.373.016.440 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 217 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024; - Sekretariat Daerah-Bagian Umum kepada : - Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan sebesar Rp.192.500.000 berupa Pick Up berdasarkan SK penghapusan Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024; - Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp.21.714.600 berupa Sepeda Motor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 603 Tahun 2024; - Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.184.327.125 berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan BMD Nomor 700 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024; - Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.184.327.125 berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024; - Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.184.327.125 berupa Speed Boat / Motor Tempel berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 732 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024	1.140.212.411,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas Reklasifikasi ke ekstrakompatabel pada: - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.400.744.143 (dari dan BOS) - Dinas Kesehatan dan PPKB dan lingkungannya sebesar Rp.23.860.968 terdiri dari: - Dinkes PPKB berupa: - Kipas angin Sebesar Rp.2.304.968; dan - Mouse sebesar Rp.765.000 (hutang/tunda bayar tahun 2024). - RSUD Tarempa berupa kursi besi/metal sebesar Rp.4.450.000 - Puskesmas Tarempa berupa kursi besi/metal sebesar Rp.12.900.000 - Puskesmas Letung berupa apar sebesar Rp.3.441.000 - Dinas Sosial PPPA berupa kursi besi/metal sebesar Rp.5.000.000 (hutang/tunda bayar tahun 2024); - Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan berupa kursi kerja sebesar Rp.6.500.000; - Dinas Koperasi UMPP berupa kursi kerja sebesar Rp.20.313.000; - Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan berupa kursi plastik sebesar Rp.3.250.000; - Satuan Polisi Pamong Praja berupa tripod camera sebesar Rp.1.680.000; - BPKPD berupa kursi besi/metal sebesar Rp.10.400.000; - BPPD berupa kursi besi/metal sebesar Rp.7.500.000; - Kecamatan Siantan Selatan berupa: - Kipas angin sebesar Rp.2.600.000; dan - Kursi plastik sebesar Rp.11.400.000. - Kecamatan Siantan Tengah berupa gerobak (hutang/tunda bayar tahun 2024)	495.048.111,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset tetap lainnya berupa buku bahan perpustakaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	15.747.000,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke persediaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang berasal dari dana BOS	240.256.100,00
Total Mutasi Kurang	2.741.263.622,00
Saldo Per 31 Desember 2024	486.175.619.991,10

7.6.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, candi/tugu peringatan/prasasti, bangunan menara perambuan, tugu/tanda batas. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp960.163.136.909,33 dibandingkan dengan Tahun 2023 Rp926.886.684.259,33.

Tabel 162
Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja	856.033.971.028,93	69.902.341.113,00	40.703.710.150,00	885.232.601.991,93
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.812.429.897,40	4.241.612.457,00	163.790.770,00	54.890.251.584,40
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.441.523.986,00	0,00	0,00	2.441.523.986,00
Bangunan Menara Perambuan	10.045.732.731,00	0,00	0,00	10.045.732.731,00
Tugu/Tanda Batas	7.553.026.616,00	0,00	0,00	7.553.026.616,00
JUMLAH	926.886.684.259,33	74.143.953.570,00	40.867.500.920,00	960.163.136.909,33

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 163
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	26.349.979.059,00	24.538.402.641,00	5.696.609.000,00	45.191.772.700,00
Sekretariat DPRD	5.133.756.317,00	0,00	0,00	5.133.756.317,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	320.406.278.136,92	20.292.014.425,00	2.218.702.204,00	338.479.590.357,92
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	165.428.506.936,00	18.706.201.640,00	8.315.050.355,00	175.819.658.221,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	210.118.549.566,94	4.613.687.111,00	24.538.402.641,00	190.193.834.036,94
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	419.986.000,00	0,00	0,00	419.986.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	9.832.918.311,00	0,00	0,00	9.832.918.311,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	87.791.967.047,47	0,00	0,00	87.791.967.047,47

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	382.836.000,00	0,00	0,00	382.836.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.286.891.731,00	0,00	0,00	7.286.891.731,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	54.396.333.088,00	0,00	0,00	54.396.333.088,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.601.563.541,00	297.038.753,00	98.736.720,00	16.799.865.574,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	784.399.000,00	0,00	0,00	784.399.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	1.220.445.000,00	0,00	0,00	1.220.445.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	3.852.151.845,00	0,00	0,00	3.852.151.845,00
Kecamatan Palmatak	5.093.323.549,00	0,00	0,00	5.093.323.549,00
Kecamatan Siantan	4.402.524.502,00	5.696.609.000,00	0,00	10.099.133.502,00
Kecamatan Siantan Selatan	3.541.036.222,00	0,00	0,00	3.541.036.222,00
Kecamatan Siantan Tengah	1.449.850.033,00	0,00	0,00	1.449.850.033,00
Kecamatan Siantan Timur	2.393.388.374,00	0,00	0,00	2.393.388.374,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	926.886.684.259,33	74.143.953.570,00	40.867.500.920,00	960.163.136.909,33

Berdasarkan tabel diatas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 164
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Saldo Per 31 Desember 2023	926.886.684.259,33

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal tahun 2024 pada: - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.12.022.660.178; - Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.14.128.717.824; dan - Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.193.116.670.	26.344.494.672,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas pengalihan status penggunaan BMD pada: - Pengelola Barang dari Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP berupa pembangunan gedung kantor OPD dan Landclearing sebesar Rp.24.538.402.641 berdasarkan SK Penetapan Bupati Nomor 626 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024. - Dinas Kesehatan PPKB dari Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga berupa bangunan SMAN 1 Siantan sebesar Rp.842.380.000 dan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Siantan sebesar Rp.190.000.000 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024; dan - Kecamatan Siantan dari Pengelola Barang berupa bangunan gedung BPMS sebesar Rp.5.696.609.000 berdasarkan SK Penetapan Bupati Nomor 474 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024.	31.267.391.641,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi dari KDP pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga sebesar Rp.1.077.313.150 berupa: - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk sebesar Rp. 94.311.150 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja sebesar Rp. 74.758.056 - Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak sebesar Rp. 65.987.169 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp. 74.205.153 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Besertas Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp. 98.257.200 - Belanja Konsultansi Perencanaan Kantin SD 001 Ladan Kecamatan Palmatak (DAU SG 2023) sebesar Rp. 22.910.400 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp. 34.919.046 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp. 55.660.950 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 004 Genting Pulur sebesar Rp. 53.424.300 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp. 40.370.700 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras sebesar Rp. 53.424.300 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp. 61.320.007 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya TK Negeri Pembina sebesar Rp. 45.002.730 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakannya Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp. 16.905.300 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Denang Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SDN 008 Air Biru sebesar Rp. 13.408.800 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang (UKS) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras sebesar Rp. 19.454.970 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sdn 001 Kuala Maras sebesar Rp. 23.520.900 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Siantan (DAU SG 2023) sebesar Rp. 26.989.650 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja sebesar Rp. 38.046.970 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp. 48.129.600	1.268.649.400,00

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak sebesar Rp. 37.111.129 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp. 41.980.200 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp. 37.214.470 2. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.191.336.250 berupa: - 100% Belanja Modal pada Pekerjaan Belanja DED Rehab Puskesmas Pembantu Air Biru (DAU SG) (KDP Tahun 2023 sebesar Rp.25.818.600 - 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Jemaja Barat (DAU SG) sebesar Rp.48.684.600 - 100% Belanja Modal pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara (DAU SG) sebesar Rp.46.930.800 - 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kute Siantan (DAU SG) sebesar Rp.46.930.800 - Termin 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Batu Miring Pustu Teluk Sunting (DAU SG) sebesar Rp.22.971.450	
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal yang terhutang/tunda bayar tahun 2024 pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.7.192.041.097 berupa: - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp.17.633.793; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Guru Dan Atau Kepala Sekolah Beserta Perabotnya Tk Negeri Pembina Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp.45.301.639; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp.18.921.733; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 17.279.814; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 37.047.804; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 95.698.314; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah	12.729.742.491,00

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 38.335.404; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 95.973.609; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 53.951.239; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 179.875.788; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 51.894.098; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 181.205.923; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 36.810.530; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 92.555.576; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 41.723.479; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN2 Piabung Kecamatan Palmatak (DAK 2024) sebesar Rp. 143.747.363; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 42.477.657; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 108.576.517; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 34.010.400; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 124.633.776; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium (IPA) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk Kec. Siantan Tengah (DAK 2024) sebesar Rp. 65.563.881; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah (DAK 2024) sebesar Rp. 233.765.957; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 45.493.447; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 161.016.662; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 38.779.404; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 97.275.184; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 93.763.920; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 355.920.023; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 41.906.140;	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
- Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 106.476.641; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 48.516.768; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 125.070.402; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 004 Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 34.010.400; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 004 Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 125.867.323; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 34.010.400; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru Kecamatan Jemaja (DAK 2024) sebesar Rp. 130.518.163; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 45.303.540; - Pembayaran Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 276.024.885; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.076.900; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.778.981; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001 Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.437.650; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001 Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.928.042; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 003 Bayat Kecamatan Siantan Utara (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.798.290; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 003 Bayat Kecamatan Siantan Utara (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.731.954; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN Telaga Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.425.550; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN Telaga Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.706.563; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 006 Tebang Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.820.490; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 006 Tebang Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.634.677; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 003 Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.100.320; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 003 Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAU SG 2024) sebesar Rp. 139.078.513; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN Lingai Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.481.050; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN Lingai Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 138.543.916; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 004 Genting Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.478.830; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 004 Genting Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 123.260.942; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Dusun	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 197.401.122; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Dusun Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.854.125; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Uks Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 24.046.507; - Pembayaran Rehabilitasi Ruang Uks Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (DAK 2024) sebesar Rp. 198.391.850; - Pembayaran Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Tebang Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 23.979.129; - Pembayaran Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Tebang Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 23.509.711; - Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Tebang Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 199.062.923; - Pembayaran Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Putik Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 24.366.702; - Pembayaran Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Putik Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 24.761.679; - Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Putik Kecamatan Palmatak sebesar Rp. 199.330.876; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 004 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAU SG 2024) sebesar Rp. 197.111.294; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 004 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.257.830; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 010 Dusun Luap Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 198.153.139; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 010 Dusun Luap Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.853.900; - Pembayaran Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 003 Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 197.944.912; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 003 Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.220.645; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Majelis Guru Tk Negeri 1 Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 50.693.180; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Uks Beserta Perabotnya Tk Negeri 1 Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.633.010; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Kanopi Tk Negeri 1 Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.258.940; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Tk Negeri 1 Kute Siantan Kecamatan Kute Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.050.150; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.907.960; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Semenisasi Halaman SMPN 5 Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.573.180; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.866.000; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Smp Satap 6 Lingai Lengke Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.554.310; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.898.300; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.171.250; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 002 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.889.310; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet/Wc	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.879.433; - Pembayaran Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Majelis Guru SMPN 005 Harung Hijau sebesar Rp. 22.042.179; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halaman Atap Kanopi Tk Negeri Pembina Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 19.997.760; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Laboratorium Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Uks Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 31.471.314; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 32.781.114; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 002 Bayat Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp. 94.072.793; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 06 Lingai Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp. 35.776.632; - Pembayaran Belanja Jasa Perencanaan Ruang Administrasi Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 70.075.916; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 28.271.034; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 006 Lingai Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp. 19.591.020; - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; dan - Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya SDN 009 Nokok Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp. 79.635.600. 2. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.2.084.684.971 berupa: - Termin 100% pekerjaan pembangunan puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting sebesar Rp.338.456.181; - Termin 100% pekerjaan pembangunan batu miring Puskesmas Pembantu Teluk Sunting sebesar Rp.198.349.000; - Termin 100% pekerjaan konsultasi perencanaan DED pembangunan Pos Kesehatan Dusun Palah sebesar Rp.25.158.150; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultasi perencanaan (DED) pembangunan rumah mesin gasmedik RSUD sebesar Rp.49.605.900; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar sebesar Rp.58.136.250; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Berapit sebesar Rp.58.084.080; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) revitalisasi instalasi farmasi RSUD Tarempa sebesar Rp.43.406.550; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) pemasangan paving blok fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp.23.032.500; - Termin 100% pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting sebesar Rp.78.465.900; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan rumah dinas puskesmas siantan utara sebesar Rp.59.151.900; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan rumah dinas Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.59.151.900; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) pembangunan ruang operasi RSUD Jemaja sebesar Rp.73.482.000; - Termin 100% jasa konsultasi pengawasan pembangunan air bersih di RSUD Palmatak sebesar Rp.25.296.900; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultansi perencanaan DED pembangunan incenerator RSUD Jemaja sebesar Rp.23.088.000;	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
- Pembayaran 100% pekerjaan konsultan pengawasan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Air Biru sebesar Rp.25.964.010; - Termin 100% pekerjaan konsultan pengawas pembangunan rumah dinas Puskesmas Jemaja Barat sebesar Rp.62.082.300; - Termin 100% pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan batu miring Puskesmas Pembantu Teluk Sunting sebesar Rp.25.224.750; - Termin 100% pekerjaan konsultan perencanaan DED pembangunan TPS limbah padat RSUD Tarempa sebesar Rp.22.510.800; - 100% pekerjaan konsultan perencanaan (DED) pembangunan ruang IPSRS RSUD Tarempa sebesar Rp.74.053.650; - Termin 100% pekerjaan revitalisasi bangunan rawat jalan RSUD Palmatak sebesar Rp.364.054.800; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan pengawasan revitalisasi bangunan rawat jalan RSUD Palmatak sebesar Rp.96.608.850; - Pembayaran 100% pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.301.320.600; dan - Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan) sebesar Rp.1.269.082.595 (penyelesaian pekerjaan tahun 2025). 3. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.1.886.895.075 berupa: - Pembayaran termin 100% pengawasan lanjutan pembangunan ruang studio DPUPRPRKP Kepulauan Anambas sebesar Rp.29.542.650; - Pembayaran Termin 100% PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG) sebesar Rp.1.559.490.585; - Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG) sebesar Rp.297.861.840. 4. Dinas Pariwisata & Kebudayaan sebesar Rp.297.038.753 berupa: - Gapura Kampung Tangguh Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan sebesar Rp.6.937.500 DED; - Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gapura Kampung Tangguh Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan sebesar Rp.9.668.100; - Pembangunan Gapura Kampung Tangguh Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan sebesar Rp.48.683.202; - Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Objek Wisata Air Terjun Neraja Kecamatan Jemaja Tmur sebesar Rp.6.576.750; - Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Objek Wisata Air Terjun Neraja Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp.126.436.481; - Belanja Modal Taman Pekerjaan Ded Tugu Penyu Kec. Siantan Tahun 2024 sebesar Rp.49.368.360; dan - Belanja Modal Taman Pekerjaan Ded Agro Wisata Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2024 Rp.49.368.360.	
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada dinas DPUPRPRKP berupa: - Pembayaran Uang Muka 30% PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG) sebesar Rp.993.579.024; - Pembayaran Uang Muka 40% PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG) sebesar Rp.1.039.660.390; - Pembayaran Uang Muka 20% PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG) sebesar Rp.74.465.460; dan - Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Jemaja sebesar Rp.425.970.492.	2.533.675.366,00
Total Mutasi Tambah	74.143.953.570,00
Mutasi Kurang	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas pengalihan status penggunaan BMD pada: - Pengelola Barang kepada Kecamatan Siantan berupa bangunan gedung BPMS sebesar Rp.5.696.609.000 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 423 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024. - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga kepada Dinas Kesehatan PPKB berupa bangunan SMAN 1 Siantan sebesar Rp.842.380.000 dan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Siantan sebesar Rp.190.000.000 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024; dan - Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP kepada Pengelola Barang berupa pembangunan gedung kantor OPD dan Landclearing sebesar Rp.24.538.402.641 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 481 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024.	31.267.391.641,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke KIB D karena kesalahan kode rekening pada Dinas Kesehatan PPKB berupa Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Air Bersih Di Rsud Palmatak sebesar Rp. 25.296.900.	25.296.900,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke KDP pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga sebesar Rp.1.014.081.204 berupa: - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.957.020; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas SDN 001 Tarempa Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.877.990; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.628.680; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDN 001 Kuala Maras Kec. Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.332.200; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 53.710.680; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 52.303.200; - Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbunan Batu Miring Tk Negeri 4 Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.696.945; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Majelis Guru Tk Negeri 1 Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 50.693.180; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Uks Beserta Perabotnya Tk Negeri 1 Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.633.010; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Kanopi Tk Negeri 1 Jemaja Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.258.940; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Tk Negeri 1 Kute Siantan Kecamatan Kute Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.050.150; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.907.960; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Semenisasi Halaman SMPN 5 Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.573.180; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.866.000; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Smp Satap 6 Lingai Lengke Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 24.554.310; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.898.300; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAU SG 2024) sebesar Rp. 23.171.250; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 002 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah (DAU SG 2024) sebesar Rp. 22.889.310; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet/Wc SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 20.879.433; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Majelis Guru SMPN 005 Harung Hijau sebesar Rp. 22.042.179; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halaman Atap Kanopi Tk Negeri Pembina Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp. 19.997.760; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Laboratorium Beserta Perabotnya	9.378.064.379,00

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; - Jasa Konsultansi Perencanaan Uks Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 31.471.314; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 32.781.114; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 002 Bayat Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp. 94.072.793; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 06 Lingai Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp. 35.776.632; - Jasa Perencanaan Ruang Administrasi Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 70.075.916; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan sebesar Rp. 28.271.034; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 006 Lingai Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp. 19.591.020; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp. 18.161.368; dan - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya SDN 009 Nokok Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp. 79.635.600. 2. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.8.265.246.455 berupa: Realisasi Belanja Modal Lunas - Pembayaran Termin 100% Belanja Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan Ded Pembangunan Batu Miring Puskesmas Siantan Selatan (Dau Sg) Sebesar Rp.27.065.130 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan Ded Pembangunan Selasar Rsud Tarempa (Dau Sg) Sebesar Rp. 50.005.500 - Pembayaran Termin 100% Belanja Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan Ded Pembangunan Batu Miring Puskesmas Siantan Timur (Dau Sg) Sebesar Rp. 26.622.240 - Pembayaran Termin 100% Belanja Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Belanja Konsultasn Perencanaan Ded Pembangunan Batu Miring Puskesmas Siantan Tengah (Dau Sg) Rp. 25.496.700 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan Ded Pembangunan Selasar Rsud Jemaja (Dau Sg) Rp. 54.778.500 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Ded Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) (Dau Sg) Rp. 137.584.500 - Pembayaran Uang Muka 30% Belanja Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak) Sebesar Rp. 2.538.287.790 - Pembayaran Termin 47% Pada Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan) Sebesar Rp. 1.438.363.081 - Pembayaran Termin 75% Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan) Sebesar Rp. 2.369.068.604 - Pembayaran Termin 85% Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan) Sebesar Rp. 846.095.93 Hutang Tahun 2024 - Pembayaran Termin 100% Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pada Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Ded Pembangunan Pos Kesehatan Dusun Palah (Dau Sg) Sebesar Rp. 25.158.150 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pembangunan Rumah Mesin Gasmedik Rsud Sebesar Rp. 49.605.900 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar Sebesar Rp. 58.136.250 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pembangunan Puekesmas Pembantu Batu Berapit Sebesar Rp. 58.084.080 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan	

Uraian	Saldo
	Per 31 Desember 2024
1	2
Perencanaan (Ded) Revitalisasi Instalasi Farmasi Rsud Tarempa Sebesar Rp. 43.406.550 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pemasangan Paving Blok Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp. 23.032.500 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pembangunan Ruang Operasi Rsud Jemaja Sebesar Rp. 73.482.000 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Ded Pembangunan Incenerator Rsud Jemaja Sebesar Rp. 23.088.000 - Pembayaran Termin 100% Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan Ded Pembangunan Tps Limbah Padat Rsud Tarempa Sebesar Rp. 22.510.800 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Perencanaan (Ded) Pembangunan Ruang Ipsrs Rsud Tarempa Sebesar Rp. 74.053.650 - Pembayaran 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kute Siantan (Dau Sg) Sebesar Rp. 301.320.600 3. Dinas Pariwisata & Kebudayaan sebesar Rp.98.736.720 berupa: Tunda Bayar 2024 - Belanja Modal Taman Pekerjaan Ded Tugu Penyu Kec. Siantan Tahun 2024 sebesar Rp.49.368.360; dan - Belanja Modal Taman Pekerjaan Ded Agro Wisata Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2024 sebesar Rp.49.368.360.	
Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan atas temuan dari BPK RI berdasarkan surat nomor 12/S/Terinci-LKPD-KKA/05/2025 berupa kekurangan volume pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.172.241.000 terdiri dari: - Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja sebesar Rp.18.642.000; - Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja sebesar Rp.7.402.000; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.27.182.000; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.36.534.000; - Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.25.394.000; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.12.223.000; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak sebesar Rp.16.692.000; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak sebesar Rp.10.589.000; - Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak sebesar Rp.13.288.000; dan - Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak sebesar Rp.4.295.000; 2. Dinas Kesehatan dan PPKB sebesar Rp.24.507.000 terdiri dari: - Pekerjaan Revitalisasi Bangunan Rawat Jalan RSUD Palmatak (DAK Fisik Kesehatan) sebesar Rp 16.175.000; dan - Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.8.332.000;	196.748.000,00
Total Mutasi Kurang	40.867.500.920,00
Saldo Per 31 Desember 2024	960.163.136.909,33

7.6.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi Jalan, Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah. Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.359.868.793.774,63 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.294.517.038.574,14.

Tabel 165
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Jalan	1.004.301.512.471,84	68.706.233.288,80	10.733.575.416,31	1.062.274.170.344,33
Jembatan	32.295.460.159,62	3.012.792.827,00	698.958.859,00	34.609.294.127,62
Bangunan Air Irigasi	46.038.431.062,59	0,00	0,00	46.038.431.062,59
Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.508.718.328,00	0,00	0,00	1.508.718.328,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	10.997.079.085,00	0,00	0,00	10.997.079.085,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	28.274.812.740,09	2.747.102.757,00	2.747.102.757,00	28.274.812.740,09
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	92.437.292.895,00	248.190.570,00	0,00	92.685.483.465,00
Bangunan Air Kotor	8.881.629.000,00	224.434.790,00	0,00	9.106.063.790,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	13.467.392.881,00	1.457.200.000,00	0,00	14.924.592.881,00
Instalasi Air Kotor	3.556.044.000,00	283.600.000,00	0,00	3.839.644.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	6.643.612.000,00	0,00	0,00	6.643.612.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	2.094.726.300,00	2.851.838.000,00	0,00	4.946.564.300,00
Instalasi Gardu Listrik	197.862.000,00	0,00	0,00	197.862.000,00
Instalasi Pertahanan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Instalasi Pengaman	198.946.000,00	0,00	0,00	198.946.000,00
Jaringan Air Minum	35.711.111.389,00	0,00	0,00	35.711.111.389,00
Jaringan Listrik	3.419.457.937,00	0,00	0,00	3.419.457.937,00
Jaringan Telepon	2.313.876.925,00	0,00	0,00	2.313.876.925,00
Jaringan Gas	2.174.073.400,00	0,00	0,00	2.174.073.400,00
JUMLAH	1.294.517.038.574,14	79.531.392.232,80	14.179.637.032,31	1.359.868.793.774,63

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 166
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	20.583.510.900,00	0,00	0,00	20.583.510.900,00
Sekretariat DPRD	174.139.800,00	0,00	0,00	174.139.800,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	5.209.603.555,00	0,00	0,00	5.209.603.555,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.746.144.779,00	4.840.828.570,00	0,00	18.586.973.349,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.163.647.456.200,75	71.677.770.835,80	12.026.136.273,00	1.223.299.090.763,55
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.454.541.900,31	0,00	1.454.541.900,31	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132.202.500,00	0,00	0,00	132.202.500,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	7.705.890.823,00	0,00	0,00	7.705.890.823,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	68.299.175.943,08	3.012.792.827,00	698.958.859,00	70.613.009.911,08
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	2.097.537.005,00	0,00	0,00	2.097.537.005,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.098.147.108,00	0,00	0,00	1.098.147.108,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.076.145.184,00	0,00	0,00	3.076.145.184,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	19.755.500,00	0,00	0,00	19.755.500,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	330.896.720,00	0,00	0,00	330.896.720,00

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.478.000,00	0,00	0,00	41.478.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	3.086.582.856,00	0,00	0,00	3.086.582.856,00
Kecamatan Jemaja Timur	2.001.079.500,00	0,00	0,00	2.001.079.500,00
Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.812.750.300,00	0,00	0,00	1.812.750.300,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.294.517.038.574,14	79.531.392.232,80	14.179.637.032,31	1.359.868.793.774,63

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 167
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2
Saldo Per 31 Desember 2023	1.294.517.038.574,14
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal tahun 2024 pada: 1. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.1.938.722.000; 2. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.47.063.750.169; dan 3. Dinas Perhubungan & LH sebesar Rp.1.264.607.823.	50.267.079.992,00
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal yang terhutang/tunda bayar tahun 2024 pada: 1. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.6.259.136.428, berupa: - Pembayaran Termin 100% Penanganan Long Segment Jalan Impol - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAK) sebesar Rp.2.067.931.523; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Teluk Kaut- semuak-Atap Kec. Jemaja (DAU SG) sebesar Rp.441.055.566; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Pembuangan Sampah RT. 03 RW. 02 Desa Piabung Kecamatan Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.197.591.587; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Masuk Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG) sebesar Rp.48.581.506; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) (DAU SG) sebesar	10.954.157.398,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2
Rp.539.997.485; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (DAU SG) sebesar Rp.49.877.850; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Menuju Rumah Khusus (DAU SG) sebesar Rp.87.688.890; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Bunga Tanjung RT. 05 RW. 03 Dusun II Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur (DAU SG) sebesar Rp.198.666.229; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung - Air Tang Kecamatan Siantan Timur (DAU SG) sebesar Rp.103.163.400; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut - Semuak - Atap Kec. Jemaja (DAU SG) sebesar Rp.154.163.194; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.55.186.980; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Bunga Tanjung RT. 05 RW. 03 Dusun II Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur dan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Pembuangan Sampah RT. 03 RW. 02 Desa Piabung Kecamatan Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.46.797.795; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG) sebesar Rp.48.925.727; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Dusun Batu Nyodong - Desa Batu Ampar sebesar Rp.198.814.814; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Semenisasi Jalan lingkaran Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp.73.567.095; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Semenisasi Jalan lingkaran Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp.24.741.900; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur (DAU SG) sebesar Rp.611.834.052; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Penghubung Antar Desa Belibak - Desa Tebang Kecamatan Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.160.084.200; - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa (DAU SG) sebesar Rp.134.448.080; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Penghubung Desa Tebang - Desa Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.878.480.125 - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pemeliharaan Drainase Kecamatan Siantan (DAU SG) sebesar Rp.25.129.290; - Pembayaran Termin 45,29% Pengawasan Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG) sebesar Rp.112.409.140; - Long Segmen Jalan Arung Hijau - Limbung - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAK) sebesar Rp.1.388.731.090 (penyelesaian pekerjaan tahun 2025); dan - Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan (DAU SG) sebesar Rp.1.558.104.876 (penyelesaian pekerjaan tahun 2025). 2. Dinas Perhubungan & LH sebesar Rp.708.563.359, berupa: - Pekerjaan Pemeliharaan Pelabuhan Apung di Pelabuhan Sri Siantan Kec.Siantan sebesar Rp.29.664.000; - Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi sebesar Rp.87.617.000; - Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp.591.282.359; dan - Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Berapit Kec. Jemaja 100% sebesar Rp.1.039.621.645 (penyelesaian pekerjaan tahun 2025).	
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan atas reklasifikasi dari KIB C pada Dinas Kesehatan PPKB berupa jasa konsultasi pengawasan pembangunan air bersih di RSUD Palmatak sebesar Rp. 25.296.900 (tunda bayar tahun 2024)	25.296.900,00
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP atas pengalihan status penggunaan BMD dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Penghapusan Nomor 482 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024	1.454.541.900,31

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan atas reklasifikasi dari KDP pada: 1. Dinas Kesehatan PPKB berupa belanja jasa konsultansi perencanaan DED pembangunan air bersih RSUD Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.24.971.670; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP berupa : - Uang muka 30% Rekonstruksi Jalan Selayang Pandang sebesar Rp.4.096.072.310; - DED Rekonstruksi Jalan Selayang Pandang sebesar Rp.99.178.500; dan - Peningkatan Jalan Lingkar Perkantoran Pasir Peti Kecamatan Siantan (DAU SG) (Fisik s.d 93% + Pengawasan) Sebesar Rp.9.758.255.562,49	13.978.478.042,49
Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan atas reklasifikasi dari persediaan karena kesalahan kode rekening berupa solar cell Puskesmas Siantan Timur sebesar Rp.1.060.000.000, solar cell Puskesmas Siantan Tengah sebesar Rp.895.919.000 dan solar cell Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.895.919.000	2.851.838.000,00
Total Mutasi Tambah	79.531.392.232,80
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas pengalihan status penggunaan BMD kepada Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP berdasarkan SK Penghapusan Nomor 482 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024	1.454.541.900,31
Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan atas reklasifikasi ke KDP pada: 1. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.11.316.784.773, berupa: - Peningkatan jalan datok kaya dewaperkasa kec. Siantan sebesar Rp.1.381.715.644; - Penganganan Longsegment jalan arung hijau tiangau kec. Sinsel sebesar Rp.6.778.930.060; - Pengawasan Sodedan drainase penghubung dari sungai sugi menuju laut kec. siantan sebesar Rp.88.896.117; - Pengawasan Jalan Kecamatan Siantan Selatan dari nilai Rp.307.727.075 dipecah menjadi 33.138.843 (fisik sudah di KIB D berupa penanganan longsegment Jalan genting air bini) dan Rp.274.588.232 (fisik masih di KDP longsegment jalan arung hijau - limbung tiangau); - Pengawasan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa sebesar Rp.134.448.080; - Pembayaran Termin 45,29% Pengawasan Sodedan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG) sebesar Rp.112.409.140; dan - Pembayaran Uang Muka 30% Sodedan drainase penghubung dari sungai sugi menuju laut kec. Siantan sebesar Rp.3.054.957.000 2. Dinas Perhubungan & LH sebesar Rp.698.958.859, berupa: - Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja sebesar Rp.445.552.134; dan - Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp. 253.406.725.	12.524.903.132,00
Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas DPUPRPRKP atas temuan dari BPK RI berdasarkan surat nomor 12/S/Terinci-LKPD-KKA/05/2025 berupa kekurangan volume pada: - Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.73.936.000; - Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jeimaja Timur sebesar Rp.73.057.000; dan - Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Kaut - Semuak - Atap Kec. Jemaja sebesar Rp.53.199.000.	200.192.000,00
Total Mutasi Kurang	14.179.637.032,31
Saldo Per 31 Desember 2024	1.359.868.793.774,63

7.6.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi bahan perpustakaan tercetak, *three dimensional artefacts and realita*, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika (*graphic material*), barang bercorak kesenian/kebudayaan, tanaman, aset tetap dalam renovasi. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.579.137.862,16 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp16.202.632.592,16.

Tabel 168
Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Bahan Perpustakaan Tercetak	10.146.755.822,16	1.451.813.270,00	75.308.000,00	11.523.261.092,16
Three Dimensional Artefacts And Realita	290.732.200,00	0,00	0,00	290.732.200,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.354.056.000,00	0,00	0,00	1.354.056.000,00
Musik	386.749.000,00	0,00	0,00	386.749.000,00
Karya Grafika (Graphic Material)	247.699.000,00	0,00	0,00	247.699.000,00
Barang Bercorak Kesenian	3.430.475.870,00	0,00	0,00	3.430.475.870,00
Alat Bercorak Kebudayaan	136.618.000,00	0,00	0,00	136.618.000,00
Tanaman	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	199.546.700,00	0,00	0,00	199.546.700,00
JUMLAH	16.202.632.592,16	1.451.813.270,00	75.308.000,00	17.579.137.862,16

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun 2024. dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 169
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	2.166.038.200,00	0,00	0,00	2.166.038.200,00
Sekretariat DPRD	486.916.181,00	0,00	0,00	486.916.181,00
Inspektorat Daerah	49.755.172,00	0,00	0,00	49.755.172,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	11.028.217.703,16	1.451.813.270,00	75.308.000,00	12.404.722.973,16
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.862.200,00	0,00	0,00	34.862.200,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	43.118.600,00	0,00	0,00	43.118.600,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	931.229.900,00	0,00	0,00	931.229.900,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	36.159.500,00	0,00	0,00	36.159.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	323.864.700,00	0,00	0,00	323.864.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.922.500,00	0,00	0,00	9.922.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	499.543.800,00	0,00	0,00	499.543.800,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.915.000,00	0,00	0,00	24.915.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	168.050.000,00	0,00	0,00	168.050.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palmatak	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Kecamatan Siantan	318.748.000,00	0,00	0,00	318.748.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	31.180.000,00	0,00	0,00	31.180.000,00
Kecamatan Siantan Timur	11.248.136,00	0,00	0,00	11.248.136,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.202.632.592,16	1.451.813.270,00	75.308.000,00	17.579.137.862,16

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 170
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
1	2
Saldo Per 31 Desember 2023	16.202.632.592,16
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap lainnya atas belanja modal Tahun 2024 dari dan BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.1.436.066.270.	1.436.066.270,00
Penambahan aset tetap lainnya atas reklasifikasi dari KIB B berupa buku bahan perpustakaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	15.747.000,00

Total Mutasi Tambah	1.451.813.270,00
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset tetap lainnya atas reklasifikasi ke KIB B (dana BOS) karena kesalahan kode rekening pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa rebana, proyektor, speaker mini, papan data, speaker aktif, microphone dan printer.	33.438.000,00
Pengurangan aset tetap lainnya atas reklasifikasi ke: - Persediaan (dana BOS) karena kesalahan kode rekening pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.38.270.000 berupa pakaian seni, kabel HDMI dan tanjak; dan - KIB B (ekstrakompatabel) sebesar 2.700.000 berupa microphone.	41.870.000,00
Total Mutasi Kurang	75.308.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	17.579.137.862,16

7.6.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang di akumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp120.430.598.775,31 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp114.008.496.706,80.

Tabel 171
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	23.421.000,00	0,00	0,00	23.421.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.864.395.865,00	1.014.081.204,00	1.077.313.150,00	4.801.163.919,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.960.505.720,00	8.265.246.455,00	261.440.920,00	9.964.311.255,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	96.727.246.544,80	11.825.944.273,00	14.099.829.372,49	94.453.361.445,31
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96.855.000,00	0,00	0,00	96.855.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	815.425.250,00	0,00	0,00	815.425.250,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	8.851.029.550,00	698.958.859,00	42.282.000,00	9.507.706.409,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	495.277.777,00	0,00	0,00	495.277.777,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	174.340.000,00	98.736.720,00	0,00	273.076.720,00
Jumlah	114.008.496.706,80	21.902.967.511,00	15.480.865.442,49	120.430.598.775,31

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.430.598.775,31 pada 9 (Sembilan) SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 172
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah-Bagian Umum Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2022	23.421.000,00		2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Perlengkapan
	J U M L A H		23.421.000,00			

Tabel 173
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	448.000.000,00	Kec. Siantan	2025	Reklas dari Dinas PU
2	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	1.082.130.000,00	Kec. Siantan	2025	Reklas dari Dinas PU
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	41.635.000,00	Kec. Siantan	2025	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	31.923.000,00	Kec. Palmatak	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Palmatak
5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	40.943.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja Timur
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	39.909.000,00	Kec. Jemaja	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	9.934.000,00	Kec. Siantan	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Siantan
8	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	26.874.000,00	Kec. Palmatak	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Palmatak
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	24.894.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Selatan
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	11.859.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Komputer Kecamatan Siantan Tengah
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	20.879.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Timur
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	36.884.000,00	Kec. Jemaja	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan
14	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	7.954.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja Timur
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	38.864.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan Tengah
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	49.864.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	41.779.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	16.941.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Tengah
20	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	20.356.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Timur
21	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2018	3.905.000,00	Tarempa Kec. Siantan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TK Negeri Pembina Tarempa Kec. Siantan
22	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018	7.909.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Gasing Dusun Muntai Desa Teluk Siantan Kec. Tengah
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018	12.859.000,00	Kec. Kute Siantan dan Siantan Utara	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis Desa Langir,

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Batu Miring Lapangan Futsal Desa Piasan Kec. Palmatak
24	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2018	30.305.000,00	Kecamatan Jemaja	2025	Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan Sumber Pusat Inklusif Kecamatan Jemaja (DED DAK SMP 2019)
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	81.800.000,00	Kec. Siantan	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PGRI (DED)
26	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	21.659.000,00	Kec. Palmatak	2025	DED Pembangunan Ruang Inklusif SMP 4 Putik (DAK 2020)
27	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	6.897.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penimbunan TK Siantan Selatan Kec Siantan Selatan
28	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	13.420.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kec. Jemaja Timur
29	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2019	15.884.000,00	Kec. Jemaja Barat	2025	DED Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 011 Air Biru (DAK 2020)
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	15.988.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	SDN 015 Teluk Durian
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	36.982.000,00	Kec. Siantan	2025	SMPN 4 Dusun Kec. Siantan
32	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.927.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
33	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SD 014 Batu Ampar) Tunda Bayar Tahap I

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
34	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Pagar SMPN 4 Genting) Tunda Bayar Tahap I
35	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.960.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
36	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.520.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Konsultansi Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 001 Ladan)
37	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.351.500,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN 4 Arung Hijau Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I
38	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Siantan Utara	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN Bayat Kec. Siantan Utara) Tunda Bayar Tahap I
39	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.476.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Renovasi Atap dan Plafon SDN Batu Ampar Kec.Kute

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Siantan) Tunda Bayar Tahap I
40	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
41	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.204.500,00	Kec. Siantan	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehabilitas SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
42	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.210.000,00	Kec. Siantan	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab Sekolah SDN 003 Tarempa) Tunda Bayar Tahap I
43	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SDN 005 Candi) Tunda Bayar Tahap I
44	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.976.500,00	Kec. Jemaja	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Landak) Tunda Bayar Tahap I
45	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.664.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SD Munjan) Tunda Bayar Tahap I

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
46	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.133.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Batu Miring SDN 005 Antang Desa Tarempa Timur Tunda Bayar Tahap I
47	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
48	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.144.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
49	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.105.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Desa Pesisir Timur Tunda Bayar Tahap I
50	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.503.500,00	Kec. Palmatak	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan pagar SDN Tebang Kec. Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
51	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.653.000,00	Kec. Jemaja Barat	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Keramut) Tunda Bayar Tahap I
52	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Palmatak	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
53	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.248.500,00	Kec. Siantan	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehabilitas Rumah Guru SDN 003 Tarempa Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
54	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.595.000,00	Kec. Jemaja	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja) Tunda Bayar Tahap I
55	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	82.214.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I
56	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.625.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Perencanaan Rehabilitas Sekolah SDN 010 Luap Kec. Siantan Timur) Tunda Bayar Tahap I
57	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Paud (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Penimbungan TK Negeri 3 Putik) Tunda Bayar Tahap I
58	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.642.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran DED Revitalisasi Perpustakaan SMPN 3 Munjan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
59	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran DED Rehab Plapon SMP 2 Mengkait
60	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.542.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembayaran DED Renovasi Atap SMP N 1 Desa Landan Kecamatan Palmatak
61	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.379.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran DED Rehab Sekolah SMPN 04 Genting Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan
62	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.390.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran DED Rehab Ruang Belajar 2 Kelas SMPN 2 Satap Mengkait
63	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran DED Revitalisasi SDN 001 Air Asuk Kec. Siantan Tengah
64	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.307.500,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran DED Rehab Plapon SDN 001 Desa Telaga
65	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.362.500,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran DED Rehab Sekolah SDN 004 Genting Desa Air Bini
66	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.592.500,00	Kec. Jemaja Barat	2025	Pembayaran DED Rehabilitasi Perumahan Guru SDN 010 Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat
67	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2025	Pembayaran DED Renovasi SDN 001 Desa Ladan
68	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.481.500,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran DED Rehab Atap Perumahan Guru dan RKB SD 004 Teluk Sunting kec. Siantan Tengah
69	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	34.804.000,00		2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Berserta Perabotnya (5 Paket) (DAK 2022)
70	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	76.642.500,00	Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Siantan Utara
71	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	23.177.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembayaran DED Rehab/Revitalisasi WC SMPN 1 Siantan
72	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	18.469.000,00		2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (2 Paket) (DAK 2022)
73	Bangunan Gedung	2022	45.487.245,00		2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Seluruh Pembangunan Ruang

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Laboratorium Lain-lain (dst)					Laboratorium komputer Beserta perabotnya DAK 2023
74	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2022	20.987.325,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK 2023)
75	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	23.045.265,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
76	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	22.995.315,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
77	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	21.059.475,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya (DAK 2023)
78	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	2022	16.131.075,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK 2023)
79	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2022	22.978.665,00		2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya DAK 2023
80	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	23.137.950,00	Smpn 1 Palmatak	2025	Perencanaan Rehabilitasi Smpn 1 Palmatak (Dau Sg 2023)
81	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	23.520.900,00	Sdn 002 Ulu Maras	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Sdn 002 Ulu Maras (Dau Sg 2023)
82	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah
83	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	79.635.600,00	SDN 009 Nokok Nyamuk Siantan Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya SDN 009 Nokok Kecamatan Siantan Timur
84	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	32.781.114,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Siantan Tengah
85	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	94.072.793,00	SMPN 2 Bayat Bayat Siantan Utara	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 002 Bayat Kecamatan Siantan Utara
86	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	35.776.632,00	SMPN 6 Lingai Lingai Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 06 Lingai Kecamatan Siantan Selatan
87	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	70.075.916,00	SMPN 4 Dusun Pesisir Timur Siantan	2025	Pembayaran Belanja Jasa Perencanaan Ruang Administrasi Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan
88	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	28.271.034,00	SMPN 4 Dusun Pesisir Timur Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan
89	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	19.591.020,00	SMPN 6 Lingai Lingai Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 006 Lingai Kecamatan Siantan Selatan
90	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	20.879.433,00	SMPN 2 Siantan Terempa Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet/Wc SMPN 2 Siantan
91	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.042.179,00	SMPN 5 Arung Hijau Tiangau Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Majelis Guru SMPN 005 Harung Hijau
92	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	19.997.760,00	TKN Pembina Terempa Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halaman Atap Kanopi Tk Negeri Pembina Kecamatan Siantan (DAU SG 2024)
93	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah
94	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Laboratorium Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
95	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	31.471.314,00		2025	
96	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	24.573.180,00	SMPN 5 Arung Hijau Tiangau Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Semenisasi Halaman SMPN 5 Arung Hijau
97	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.866.000,00	SDN 007 Belibak Belibak Palmatak	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Belibak
98	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	24.554.310,00	SMPN Satap 6 Lingai Lengke Lingai Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN Satap 6 Lingai Lengke
99	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.898.300,00	SMPN 1 Siantan Timur Nyamuk Siantan Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Siantan Timur
100	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.171.250,00	SDN 005 Lembah Rewak Rewak Jemaja	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Lembah Rewak
101	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.889.310,00	SDN 002 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 002 Air Nangak
102	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	24.696.945,00	TKN 4 Palmatak Candi Palmatak	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbunan Batu Miring Tk Negeri 4 Palmatak
103	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	50.693.180,00	TKN 1 Jemaja Timur Kuala Maras Jemaja Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Majelis Guru Tk Negeri 1 Jemaja Timur
104	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.633.010,00	TKN 1 Siantan Selatan Air Bini Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Uks Beserta Perabotnya Tk Negeri 1 Siantan Selatan
105	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.258.940,00	TKN 1 Jemaja Timur Kuala Maras Jemaja Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Kanopi Tk Negeri 1 Jemaja Timur
106	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.050.150,00	TKN 1 Kute Siantan Payalaman Kute Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Tk Negeri 1 Kute Siantan Kecamatan Kute Siantan (DAU SG 2024)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
107	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	20.907.960,00	SMPN 2 Siantan Terempa Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan
108	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.957.020,00	SDN 004 Langir Langir Palmatak	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Langir Kecamatan Palmatak
109	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	20.877.990,00	SDN 001 Tarempa Terempa Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas SDN 001 Tarempa Kecamatan Siantan
110	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	24.628.680,00	SDN 002 Kiabu Kiabu Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan
111	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.332.200,00	SDN 001 Kuala Maras Kuala Maras Jemaja Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDN 001 Kuala Maras
112	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	53.710.680,00	TKN 1 Siantan Selatan Air Bini Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Selatan
113	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	52.303.200,00	TKN 1 Siantan Timur Nyamuk Siantan Timur	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur
J U M L A H			4.801.163.919,00			

Tabel 174

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2018	11.902.000,00	Desa Air Sena. Kecamatan Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Parit Puskesmas Pembantu Air Sena (1 Paket)
2	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Timur	2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kesehatan Dasar (DAK)
3	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	92.785.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2025	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)
4	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Selatan	2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
5	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Tengah	2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
6	Pagar Permanen	2020	13.887.000,00	Desa Pesisir Timur. Kec. Siantan	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Semenisasi Pustu Desa Pesisir Timur (1 Paket)
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	39.710.000,00	Kecamatan Jemaja Barat	2025	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Jemaja Barat
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	32.835.000,00	Kecamatan Siantan Utara	2025	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Siantan Utara
9	Pagar Permanen	2021	44.990.000,00	Jln. Soekarno-Hatta No.16 RT.IV RW.II Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2025	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk dan Pagar UPT Puskesmas tarempa
10	Pagar Permanen	2021	5.720.000,00	PIABUNG, RT 003 / RW 002 DESA PIABUNG, KEC. PALMATAK	2025	Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Pustu

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						RT.003/002 Desa Piabung
11	Jalan Khusus Kompleks	2021	5.720.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2025	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk Ruang IGD RSUD Jemaja
12	Bangunan Rumah Sakit Umum	2022	24.900.000,00	Jl. Padang Melang, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja	2025	Jreview DED Pembangunan Ruang Operasi RSUD JEMAJA
13	Bangunan Klinik/Puskesmas	2022	97.600.000,00	Jl. Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Tarempa, kecamatan Siantan	2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan Lahan Puskesmas Tarempa (Gedung Baru Puskesmas Tarempa)
14	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.248.600,00	Kec. Siantan Utara	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Siantan Utara (DAU SG)
15	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.071.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Kute Siantan (DAU SG)
16	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	374.358.600,00	Kec. Jemaja Barat	2025	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Jemaja Barat (DAU SG)
17	Bangunan Puskesmas Pembantu	2023	235.584.600,00	Desa Belibak, Kec. Palmatak	2025	Belanja Pematangan Lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting (194.447.000) + Pengawasan (17.937.600)+ Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Desa Belibak Kecamatan Palmatak (23.200.000)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
18	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	58.136.250,00	Batu Ampar Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar
19	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.032.500,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pemasangan Paving Blok Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	301.320.600,00	Payalaman Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kute Siantan
21	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.605.900,00	Jl. Imam Bonjol Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Rumah Mesin Gasmedik RSUD Tarempa
22	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	43.406.550,00	Jl. Imam Bonjol Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Revitalisasi Instalasi Farmasi RSUD Tarempa
23	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	7.146.682.405,00	Payalaman Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Termin 85% Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	54.778.500,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Selasar RSUD Jemaja
25	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	25.158.150,00		2025	Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pos Kesehatan Dusun Palah
26	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.088.000,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Incenerator RSUD Jemaja
27	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	73.482.000,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja
28	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	74.053.650,00	Jl. Imam Bonjol Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Ruang IPSRS RSUD
29	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	58.084.080,00	Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Berapit
30	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	50.005.500,00	Jl. Imam Bonjol Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	DED SELASAR RSUD TAREMPA
31	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	137.584.500,00	Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	DED Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
32	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	26.622.240,00	Jl. Abdul Kadir RT 004/RW II Nyamuk Siantan Timur KABUPATEN KEPULAUAN RIAU	2025	DED Pembangunan Batu Miring Puskesmas Siantan Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
33	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	27.065.130,00	Air Bini Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	DED BATU MIRING PUSKESMAS SIANTAN SELATAN
34	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	25.496.700,00	Air Asuk Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	DED BATU MIRING PUSKEMAS SIANTAN TENGAH
35	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	22.510.800,00	Jl. Imam Bonjol Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan TPS Limbah Padat RSUD Tarempa
	J U M L A H		9.964.311.255,00			

Tabel 175
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	30.793.636.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2025	Pembangunan dan Penimbunan Water Front City Kota Tarempa (Tahap I) Kec. Siantan Lanjutan TA 2013 + Realisasi 2013
2	Jalan Kabupaten Lokal	2014	269.225.000,00	Jl. Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak	2025	Perencanaan Pembangunan Jalan Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak
3	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	2014	28.633.000,00	Dusun Teluk Pering, Desa Putik, Kec. Palmatak	2025	Perencanaan Pembuatan Pagar atau Wiremesh Dusun Teluk Pering Desa Putik Kec. Palmatak
4	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenia n Permanen	2017	48.785.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2025	DED PEMBANGUNAN ASTAKA

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5	tugu lainnya (dst)	2017	48.730.000,00		2025	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
6	Jalan Kabupaten Lokal	2017	49.225.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2025	DED PEMBANGUNAN JALAN PADANG MELANG JALUR II KECAMATAN JEMAJA
7	Jalan Kabupaten Lokal	2017	190.135.000,00	Jl. Bayat - Mubur Kecil - Piasan - Pian Pasir - Palah, Kec. Palmatak	2025	DED PEMBANGUNAN JALAN BAYAT-MUBUR KECIL-PIASAN-PIAN PASIR-PALAH KECAMATAN PALMATAK
8	Jalan Kabupaten Lokal	2017	89.265.000,00	Jl. Pasir Merah - Cengkareng, Kec. Siantan	2025	DED PEMBANGUNAN JALAN PASIR MERAH-CENGKARENG KEC. SIANTAN
9	Jalan Kabupaten Lokal	2017	270.105.000,00	Jl. Genting Pulur - Besuh, Kec. Jemaja Timur	2025	SSID JALAN GNETING PULUR-BESUH
10	Jalan Kabupaten Lokal	2017	284.625.000,00	Jl. Lingkar Desa Tiangau - Teluk Rambut - Desan, Kec. Siantan Selatan	2025	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DESA TIANGAU-TELUK RAMBUT-DESAN
11	Jalan Kabupaten Lokal	2017	239.085.000,00	Jl. Lingkar Matak Kecil - Teluk Durian - Nuan - Buton - Sedak	2025	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MATAK KECIL-TELUK DURIAN-NUAN-BUTON-SEDAK
12	Jalan Kabupaten Lokal	2017	266.805.000,00	Jl. Lingkar Muntai - Kampung Baru	2025	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MUNTAI-KAMPUNG BARU
13	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	169.345.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2025	DED PEMBANGUNAN PADANG MELANG JALUR II
14	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	302.005.000,00	Desa Belibak - Tebang, Kec. Palmatak	2025	SSID JALAN PELANTAR BETON PENGHUBUNG ANTAR DESA BELIBAK-DESA TEBANG
15	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	49.225.000,00	Desa Payalaman - Batu Ampar, Kec. Kute Siantan	2025	DED PELANTAR BETON PAYALAMAN-BATU AMPAR
16	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	125.125.000,00	Jl. Pelantar Serkah dan Lorong Sempit, Kec. Siantan	2025	DED JALAN PELANTAR SERKAH DESA TAREMPA BARAT DAN DED LORONG SEMPIIT

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						KELURAHAN TAREMPA
17	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	286.935.000,00	Antang, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2025	SSID PEMBANGUNAN PELANTAN BETON ANTANG DESA TAREMPA TIMUR
18	Jalan Kabupaten Arteri	2018	48.565.000,00	Kec. Siantan	2025	DED Pembangunan Jalan Menuju TPA Siantan Kec. Siantan
19	Jalan Kabupaten Lokal	2018	5.461.767.906,00	Jl. Genting - Desan, Kec. Siantan Selatan	2025	Peningkatan jalan Genting-Desan kec. Siantan Selatan
20	Jalan Kabupaten Lokal	2018	97.075.000,00		2025	
21	Jalan Kabupaten Lokal	2018	449.625.000,00	Jl. Sri Tanjung Luwe, Desa Tarempa Barat Daya, Kec. Siantan	2025	DED Jalan Sri Tanjung - Luwe Desa Tarempa Barat Daya Kec. Siantan
22	Jalan Kabupaten Lokal	2018	48.565.000,00	Jl. Putik - Teluk Pering, Kec. Palmatak	2025	DED Pembangunan Jalan Putik - Teluk Pring Kecamatan Palmatak
23	Bangunan Pengambilan Bebas	2018	97.515.000,00	Desa Dapit, Kec. Jemaja Timur	2025	DED Normalisasi Bendung Dapit Kecamatan Jemaja Timur
24	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	11.935.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2025	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Letung Kec. Jemaja
25	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	22.110.000,00	Desa Air Sena dan Desa Air Asuk, Kec. Siantan Tengah	2025	Perencanaan Lanjutan Penimbunan tanah gereja santa Desa Air Sena, Perencana lanjutan pemasangan batu miring Gg.Nangka Desa Air Asuk
26	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	36.080.000,00	Desa Telaga Besar, Kec. Siantan Selatan	2025	perencanaan pemasangan batu miring Abrasi Pantai Desa Telaga Besar Dusun 1 Panjang, Perencanaan penimbunan dan pemabngunan Batu Miring
27	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00		2025	Perencanaan Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi 2019

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
28	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	DED Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja Timur
29	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00		2025	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Matan
30	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2025	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja
31	Bangunan Waduk	2018	96.085.000,00	Gunung Lintang, Kec. Siantan	2025	DED Normalisasi Gunung Lintang Kecamatan Siantan
32	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	2018	10.340.000,00	Jl. Abdul Rahman - Kp. Baru	2025	Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong-gorong jalan Abdul Rahman ke Jalan Kp. Baru RT 02 RW 03
33	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2019	434.914.000,00	Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2025	Pematangan lahan perumahan Khusus di Tarempa Selatan + Perencanaan dan Pengawasan
34	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.495.000,00	Jl. SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil, Kec. Siantan Timur	2025	DED Peningkatan Jalan SP. Serat – Teluk Rung - SP. Tinggil Kec. Siantan Timur
35	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Air Bayo - Mampok, Kec. Jemaja	2025	DED Jalan Air Bayo - Mampok Kec. Jemaja
36	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.601.005,00	Jl. Bukit Padi - Air Biru, Kec. Jemaja	2025	DED Jalan Bukit Padi-Air Biru Kecamatan Jemaja
37	Jalan Kabupaten Lokal	2019	98.601.000,00	Jl. SP. Letung - SP. Pelabuhan Letung - SP. Rewak, Kec. Jemaja	2025	DED Peningkatan Jalan Sp.Letung – Sp.Pelabuhan Letung - Sp. Rewak
38	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Rewak - Sedanau, Kec. Jemaja	2025	ded peningkatan jalan rewak-sedanau (hutang)
39	Jalan Khusus Lain-lain	2019	449.095.500,00	Jl. Pasir Peti, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2025	Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA
40	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2025	Perencanaan Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Jemaja
41	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.110.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2025	DED Jaringan Sekunder Daerah Irigasi Jemaja Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
42	Bangunan Waduk Lain-lain	2019	73.870.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2025	pembangunan penampung air desa payalaman kec palmatak (lanjutan) Hutang
43	Bangunan Waduk	2019	192.995.000,00	Kec. Siantan	2025	Review Desain Pembangunan Embung Batu Tabir Kecamatan Siantan
44	Saluran Drainage	2019	266.750.000,00	Kec. Siantan	2025	Penyusunan Masterplan Drainase Kec. Siantan
45	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	13.750.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2025	Perencanaan Pembangunan Pemecah Ombak Desa Landak Kecamatan Jemaja
46	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	790.597.214,00	Desa Mengkai, Kec. Siantan Selatan	2025	Renovasi Talud Pemecah Ombak Desa Mengkai Dusun I dan Dusun II Desa Mengkai Kecamatan Siantan Selatan
47	Bangunan Pemecah Gelombang	2019	98.010.000,00	Desa Dapit - Kuala Maras, Kec. Jemaja Timur	2025	Review DED Pengerukan Normalisasi Sungai Dapit menuju Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur
48	Sumur Resapan	2019	381.257.710,00	Kec. Siantan	2025	Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK. Siantan
49	Sumur Resapan	2019	97.790.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2025	Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Jaringan SPAM Kelurahan Letung Kec. Jemaja
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Desa Ladan, Kec. Palmatak	2025	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Palmatak (LUNAS TAHUN 2022)
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	97.462.200,00	Kec. Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% DED Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Kute Siantan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	35.846.800,00	Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Utara
54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	82.914.700,00	Kec. Siantan	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Di Kecamatan Siantan
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.330.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Siantan Selatan
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.776.160,00	Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Timur
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.350.240,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan gedung kantor di Kecamatan Siantan Tengah
58	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2021	23.155.000,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2025	Pembayaran 100% Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kec. Siantan
59	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	98.945.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute siantan
60	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	95.106.000,00	Kec. Palmatak	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak (Sisa 40% Hutang Tahun 2021)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
61	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	176.735.000,00	Kec. Jemaja	2025	Belanja jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan jemaja No. 303/SPP-SPM-LS/1.03.1.1 Tunda Bayar Tahap I (- 72.000.000 JK BPK)
62	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	59.508.900,00		2025	Belanja Modal Jalan Bangunan terbuka -DED sarana prasarana dan utilitas rumah khusus (Sudah dibayarkan tahun 2022)
63	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	142.659.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembayaran Termin 60% Belanja Jasa Konsultan Perencanaaan pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak
64	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.405.000,00	Jl. Kampung Baru - Payalaman - Batu Ampar	2025	DED Lanjutan jalan kampung baru kelurahan pelantar beton nyondong - Payalaman Desa Batu Ampar
65	Jalan Kabupaten Lokal	2021	109.802.220,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2025	Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung-Landak (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
66	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.386.500,00	Jl. Balau Kuning - Bak Air Antang, Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan	2025	DED Pembangunan Jalan Balau Kuning- Bak Air Antang
67	Jalan Kabupaten Lokal	2021	52.580.000,00	Jl. Kampung Baru, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2025	DED lanjutan jalan kampung baru Kelurahan Tarempa
68	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.041.000,00	Jl. Pasir Peti - Konjo, Kec. Siantan	2025	DED Pembangunan Jalan Pasir Peti - Konjo
69	Jalan Kabupaten Lokal	2021	1.189.353.529,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2025	Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak
70	Jalan Kabupaten Lokal	2021	160.098.180,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran 60% (Termin 57%) Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung -

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Landak (Lunas 60%)
71	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. Pasir Peti, Kec. Siantan	2025	DED Jalan Komplek Pasir Peti
72	Jalan Kabupaten Lokal	2021	746.816.820,00		2025	Pembangunan Jalan Lingkungan (Sudah dibayarkan tahun 2022 termin 60%)
73	Jalan Kabupaten Lokal	2021	49.907.000,00		2025	Pembayaran 100 % Pengawasan Jalan lingkungan se Kabupaten Kepulauan Anambas
74	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. SP. SMA 1 Letung - Padang Melang, Kec, Jemaja	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan SP SMA 1 Letung - Padang Melang
75	Jalan Kabupaten Lokal	2021	94.831.000,00	Jl. SP - Air Padang - Antang, Kec. Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% Belanja Konsultasi Perencanaan Rekayasa DED Pembangunan Jalan SP - Air Padang - Antang
76	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.073.000,00	Jl. Gudang Tengah - Lokasi TPU, Kec. Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Lokasi TPU
77	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.277.500,00	Kec. Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Reservasi Jalan Kecamatan Siantan
78	Jalan Kabupaten Lokal	2021	232.650.000,00	Jl. Peninting - Payalaman	2025	Pembayaran Termin 100% Fisibility Study (FS) Pembangunan Jalan Peninting Payalaman
79	Jalan Kabupaten Lokal	2021	22.954.800,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2025	Pembayaran 100% Perencanaan Semenisasi Jalan Imam Bonjol RT 01 RW 01 Kelurahan tarempa Kec.Siantan
80	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.347.800,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Tengah
81	Jalan Kabupaten Lokal	2021	99.275.000,00	Kec, Jemaja, Jemaja Timur	2025	Pembayaran 100% Belanja Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				dan Jemaja Barat		pengembangan Infrastruktur kawasan permukiman jemaja, jemaja timur dan jemaja Barat
82	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.340.500,00	Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Utara
83	Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.565.500,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan permukiman di Kecamatan Siantan Selatan
84	Jalan Kabupaten Lokal	2021	123.288.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Pembayaran 60% Belanja Konsultan Pengawasan pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan
85	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.192.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Belanja Konsultan Pengawasan pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
86	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	98.230.000,00	Kec. Siantan	2025	DED Jalan Lingkungan dan dinding penahan tanah polres kabupaten
87	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	24.920.500,00	Gg. Musliadi, Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Gg. Musliadi RT 02 RW 01 Air Sena Kec. Siantan Tengah
88	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	96.305.000,00	Jl. Pelantar Loka, Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran 100% DED Jalan Pelantar Loka Letung
89	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	22.899.800,00	Gg. Anggrek Antang Tengah, Desa Tarempa	2025	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Timur, Kec. Siantan		lanjutan Pembangunan gang Anggrek RT02/RW 01 Antang Tengah Desa Tarempa Timur Kec. Siantan
90	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	47.298.900,00	Gg. Mabai, Desa Lingai, Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran 100 % DED gang Mabai RT.03.Rw.01 Lingai siantan Selatan
91	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	49.478.000,00	Gunung. Kuatang	2025	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Jalan Menuju Gunung Kuatang
92	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	94.996.000,00	Jl. Gudang Tengah - Arung Hijau, Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Arung Hijau
93	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	58.300.000,00	Matan	2025	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Penguatan data Base dan survey kondisi jaringan irigasi aplikasi e-paksi di matan
94	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	95.562.500,00	Jl. Laut Sri Tanjung	2025	Pembayaran 100% DED Jalan Laut Sri Tanjung
95	Jalan Desa	2021	57.088.900,00	Jl. Lingkar Batu Belah, Kec. Siantan Timur	2025	Jalan Lingkar Batu Belah
96	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.406.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jembatan Gantung Sekubit Payalaman
97	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi	2025	Pembayaran Termin 100% Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi
98	Jembatan Fly Over	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi	2025	Pembayaran Termin 50% Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk, Genting - Penebung, Air Asuk - Lidi
99	Jembatan Fly Over	2021	718.238.400,00		2025	Pembayaran Termin 40% Kajian Lingkungan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jembatan (Swakelola)
100	Bangunan Got Miring	2021	98.827.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2025	Pemeliharaan Batu Miring Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
101	Saluran Drainage	2021	36.286.000,00	Kec. Jemaja Timur	2025	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Jemaja Timur
102	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	22.000.000,00	Kec. Jemaja	2025	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing di Kecamatan Jemaja
103	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	97.350.000,00	Desa Telaga Kecil, Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran 100% DED Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan
104	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	21.725.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan perkuat Tebing di Kecamatan Siantan Selatan
105	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	98.175.000,00		2025	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Se Kabupaten Kepulauan Anambas
106	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	96.745.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pemecah Ombak Desa Air Biru
107	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	78.100.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran 100% DED Pemecah Ombak Desa Landak
108	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	84.824.300,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah
109	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	57.255.000,00	Kec. Siantan Timur	2025	Belanja Konsultansi Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						SPAM di Kawasan Siantan Timur
110	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	56.100.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Belanja Jasa Konsultasi perencanaan SPAM Siantan Selatan
111	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	49.808.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah
112	Bangunan penampung sampah	2021	44.594.000,00	Desa Candi, Kec. Palmatak	2025	Belanja jasa Konsultans ipembangunan gedung tempat sampah (TPS) desa Candi
113	Jaringan air minum lainnya	2021	27.390.000,00	Kec. Kute Siantan	2025	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Kute Siantan
114	Jaringan air minum lainnya	2021	44.055.000,00	Kec. Palmatak	2025	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Palmatak
115	Jalan Kabupaten Lokal	2022	466.777.200,00	Kampung Baru - Air Asuk	2025	Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk (Multi Years)
116	Jalan Kabupaten Lokal	2022	49.533.750,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Menuju Perkebunan Masyarakat RT 002 / RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
117	Jalan Desa	2022	49.550.400,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Termin 100% DED Pelebaran Jalan RT.002/RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
118	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2022	2.176.560.999,41	Desa Putik, Kec. Palmatak	2025	Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring)
119	Jalan Kabupaten Kolektor	2023	98.912.100,00	Jalan Payalaman-Langir	2025	DED Peningkatan Jalan Payalaman-Langir (DAU SG)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
120	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jl. Mampok - Teluk Kaut, Kecamatan Jemaja	2025	Reviu DED Peningkatan Mampok - Teluk Kaut Kecamatan Jemaja (DAU SG)
121	Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.845.500,00	Jl. Arung Hijau - Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan	2025	Reviu DED Peningkatan Jalan Arung Hijau - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
122	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jl. Rekam - Takari, Kecamatan Siantan	2025	Peningkatan Jalan Rekam - Takari Kecamatan Siantan (DAU SG)
123	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.039.750,00	Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur	2025	100% DED Peningkatan Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur (DAU SG)
124	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)	2025	Reviu DED peningkatkan Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)
125	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jalan Air Asuk Tanjung Lidi Kecamatan Siantan Tengah	2025	DED Rekonstruksi Jalan Air Asuk Tanjung Lidi (DAU SG)
126	Jalan Kabupaten Lokal	2023	13.438.425.130,90	Jalan Bukit Padi - Air biru	2025	Penganaganan Long Segment Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (DAK)
127	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.012.000,00	Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur	2025	Reviu DED peningkatkan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG)
128	Jalan Kabupaten Lokal	2023	8.374.192.409,00	Jl. Genting - Air Bini, Kec. Siantan Selatan	2025	Penanganan Long Segment Jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAK)
129	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	2025	Reviu DED peningkatkan jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
130	Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.984.250,00	Jalan Impul - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat	2025	Reviu DED Peningkatan Jalan Impul - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAU SG)
131	Jalan Kabupaten Lokal	2023	279.047.340,00	Jl. Lingkar Pulau Bajau	2025	Reviu DED Jalan Lingkar Pulau Bajau (DAU SG)
132	Jalan Desa	2023	98.956.500,00	Desa Genting, Kec. Siantan Selatan	2025	DED jalan menuju pelabuhan bongkar muat genting kec siantan selatan (DAU SG)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
133	Jalan Desa	2023	497.877.880,00		2025	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Lingkungan (Tunda Bayar 2021)
134	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.912.100,00	Desa Tebang-Belibak, Kecamatan Palmatak	2025	Reviu DED Jembatan Tebang - Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG)
135	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2023	32.387.580,00	Jl. Raden Saleh, Kel. Tarempa, Kec. Siantan	2025	Perencanaan Perkuatan Tebing Pemakaman Raden Saleh
136	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.289.500,00	KECAMATAN SIANTAN UTARA	2025	DED SPAM IKK SIANTAN UTARA
137	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.012.000,00	Desa Ulu Maras, Kec. Jemaja Timur	2025	Perencanaan Pengaman Tebing Bendung Jemaja Timur
138	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	2023	55.389.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2025	DED Saluran Pembuang DI Jemaja
139	Bangunan Waduk	2023	98.790.000,00	Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan	2025	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan
140	Bangunan Waduk	2023	99.234.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2025	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Lintang Kecamatan Siantan (Jalan menuju temburun)
141	Saluran Drainage	2023	99.123.000,00	Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur	2025	Perencanaan Rehab Saluran Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur
142	Saluran Drainage	2023	49.373.910,00	Kec. Jemaja	2025	Jasa Perencanaan Drainase Kecamatan Jemaja
143	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.256.200,00	Jalan Raden Saleh Kecamatan Siantan	2025	Perencanaan Tanggul Sungai Raden Saleh
144	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.269.520,00	Tanggul Sungai Tarempa Selatan	2025	Perencanaan Tanggul Sungai Tarempa Selatan
145	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.178.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2025	Perencanaan Tanggul Sungai Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
146	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.956.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2025	Perencanaan Tebing Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
147	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	161.438.319,00	RT.12/RW.04 Rintis Desa	2025	Pemasangan Batu Miring Sungai

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengada an	Nilai	Lokasi	Target Penyelesai an	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Tarempa Selatan		RT.12/RW.04 Rintis Desa Tarempa Selatan (Dekat Rumah Sis Panjang)
148	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.790.000,00	Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur	2025	Perencanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Neraja Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur
149	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	1.573.082.460,00	Desa Putik, Kec. Palmatak	2025	Pembayaran Termin 41,70% Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring) (Tunda Bayar Tahun 2021)
150	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	49.783.500,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2025	DED optimalisasi IPA SPAM Dapit Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur
151	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	70.818.000,00	Kec. Jemaja	2025	DED Optimalisasi IKK SPAM Jemaja
152	Bangunan penampung sampah	2023	69.540.390,00	Desa Landak Kecamatan Jemaja	2025	Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Landak Kecamatan Jemaja
153	Jaringan air minum lainnya	2023	99.012.000,00	DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur	2025	Perencanaan Dinding Penahan Tanah IPA DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur
154	Jaringan air minum lainnya	2023	49.672.500,00	instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja	2025	DED pembangunan instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja
155	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	6.703.007.060,00	Jalan limbung Tiangau Tiangau Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Pembayaran Termin 25%
156	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	201.305.257,00	Drainase dari Jalan dari SMP 2 MENUJU RSUD Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Pengawasan Sodedan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
157	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	274.588.232,00	Jalan limbung Tiangau	2025	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Arung Hijau Limbung Tiangau Kecamatan Siantan Selatan DAK
158	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	134.448.080,00		2025	Pengawasan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa (DAU SG)
159	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	3.054.957.000,00	Drainase dari Jalan dari SMP 2 MENUJU RSUD Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	SODETAN DRAINASE PENGHUBUNG DARI SUNGAI SUGI MENUJU LAUT KECAMATAN SIANTAN (DAU SG)
160	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	1.311.315.644,00	Jalan Simpang Rumah R.Room Menuju Antang Tarempa Timur Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2025	Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan (DAU SG)
	J U M L A H		94.453.361.445,31			

Tabel 176

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Desa	2022	96.855.000,00		2025	Perencanaan Jalan Strategis Desa
	J U M L A H		96.855.000,00			

Tabel 177

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	2015	26.950.000,00	Desa Keramat. Kec. Jemaja Barat	2025	Perencanaan Pembangunan Pabrik Es

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pabrik Permanen					
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	340.000.000,00	Desa Air Putih Kec. Siantan Timur	2025	
3	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2025	
4	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Kec. Palmatak	2025	
5	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.645.000,00	Kec. Siantan	2025	
6	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.370.000,00	Kec. Siantan	2025	
7	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2018	9.950.000,00	Kec. Palmatak	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling PUSKESWAN
8	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	24.667.500,00	Kec. Siantan	2025	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumput Laut
9	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	29.700.000,00	Kec. Siantan	2025	DED Renivasi Balai Penyuluhan Pertanian
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	29.892.500,00		2025	Penyusunan DED sarana dan Prasarana HSRT
11	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	2021	89.760.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembangunan Pelantar Tempat Pendaratan Ikan (Tunda Bayar Tahun 2021)
12	Bangunan Untuk Kandang	2021	19.981.000,00	Kecamatan Siantan	2025	DED Pembuatan Kandang Penggemukan Sapi dan Pagar hijau Makan Ternak
13	Pagar Permanen	2021	19.992.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	2025	DED Pembangunan Pagar Balai Benih Pertanian Terpadu Jemaja Timur
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kecamatan Palmatak	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Palmatak

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	6.021.750,00	Kec. Siantan Timur	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Timur
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kec. Siantan Tengah	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Tengah
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.696.400,00	Kec. Jemaja Timur	2025	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	11.754.900,00	Kec. Siantan Selatan	2025	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.663.100,00	Kec. Palmatak	2025	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Palmatak
20	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	2022	50.627.100,00	Kec. Jemaja Timur	2025	DED Pembangunan Jaringan Irigasi di Kecamatan Jemaja Timur
	J U M L A H		815.425.250,00			

Tabel 178

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	14.883.000,00	Kecamatan Palmatak	2025	
2	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	29.700.000,00	Desa Air Bini dan Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan	2025	
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	34.540.000,00	Desa Genting Kecamatan Siantan Selatan	2025	
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	2017	49.060.000,00	Pelabuhan Pariwisata Manda Riau	2025	

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	han/Bandara Permanen					
5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	49.500.000,00	Pulau Penjalin	2025	
6	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	44.220.000,00	Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan	2025	
7	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	48.565.000,00	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan	2025	
8	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	49.544.000,00	Pelabuhan Pemda Letung	2025	
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	48.950.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	2025	
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.800.000,00	Desa Air Bini dan Desa Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan	2025	
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.810.000,00	Umum Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur	2025	
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.850.000,00	Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	2025	
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.920.000,00	Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	2025	
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2018	9.910.000,00	RT.05/RW.03 Desa Kiabu Kec. Siantan Selatan	2025	
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	79.799.000,00	Tarempa	2025	
16	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.700.000,00	Kelurahan Letung di Kecamatan Jemaja	2025	
17	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	2025	
18	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.800.000,00	Pelabuhan Pemda Letung di Kecamatan Jemaja	2025	
19	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.528.000,00	Matak Kecil	2025	

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
20	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	79.766.000,00	Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara	2025	
21	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	29.826.000,00	Desa Temburun	2025	
22	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	64.064.000,00	Sri Tanjung Kecamatan Siantan	2025	
23	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	59.620.000,00	Desa Ladan	2025	
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2020	13.860.000,00	Kec. Siantan	2025	
25	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	10.653.000,00	Air Bandung Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	
26	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	88.671.000,00	Desa Air Asuk Kec. Siantan Tengah	2025	
27	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	99.715.000,00	Desa Serat Kec. Siantan Timur	2025	
28	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	49.868.000,00	Desa Teluk Mabai Desa Pesisir Timur Kec. Siantan	2025	
29	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	24.800.000,00	Kantor Camat Siantan Timur	2025	
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	45.226.000,00	Dusun Muntai Desa Teluk Siantan	2025	
31	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.882.000,00	Pulau Darak Kec. Jemaja	2025	
32	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.810.000,00	Tarempa	2025	
33	Rambu Jalan	2021	7.250.000,00	Kec. Siantan Selatan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu Wilayah Zona Selamat Sekolah di Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
34	Rambu Jalan	2021	30.415.000,00	Kec Siantan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan marka dan rambu wilayah zona selamat sekolah
35	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	2021	15.900.000,00		2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Subkeg. Perlengkapan Jalan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						di Jalan Kabupaten/Kota (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
36	Guardrail	2021	10.935.000,00	Kec. Siantan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
37	Guardrail	2021	19.745.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Jl.Raden Saleh RT.03 Gang Durian Kelurahan Tarempa Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota
38	Guardrail	2021	39.270.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Desa Teluk Siantan Kec.Siantan tengah Sub keg.Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
39	Guardrail	2021	34.345.500,00	Kec. Jemaja	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
40	Guardrail	2021	21.939.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Desa Telaga Kecil Kec.Siantan Selatan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
41	Guardrail	2021	39.105.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota
42	Guardrail	2021	49.665.000,00	Dusun Selambak	2025	Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Pemasangan Guardrail Jl. Sudirman Dusun Selambak
43	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.373.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa Konsultansi perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya desa air biru kec.jemaja pada sub keg.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
44	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.758.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa Konsultansi Perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya jalan puskesmas air asuk kec.siantan tengah pada sub keg.penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota
45	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	35.926.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Batu Ampar-Payalaman-Matak-Teluk Bayur Kec.Kute Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
46	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.340.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Temburun,Kec.Siantan Timur Sub Keg Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota
47	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	22.110.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan jalan Umum (PJU) RT.Kel.Letung Kec.Jemaja sub Keg.Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
48	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	49.890.000,00	RT.003/RW.00 2 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.003/RW.002 Dusun 2 (DARMAWI) Desa Munjan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
49	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	88.864.000,00	Gang Tamban 1 RT.002/RW.00 1 Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa konsultansi perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu gang Tamban 1 RT.002 RW.001 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
50	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.396.000,00	RT.002/RW.00 2 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran terminj 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.02/RW.02 Dusun2 (Herman) Desa Munjan Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
51	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.143.000,00	SMP 05 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan SMP 05 Desa Bayat Kec.Siantan UtaraSub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
52	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.495.000,00	RT.03/RW.02 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Pelabuhan RT.03 RW.02 Desa Bayat Kec.Siantan Utara Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
53	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	19.745.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Batu RT.03 Desa Bayat Kec.Siantan Utara sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
54	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	14.663.000,00	Desa Keramat Kec. Jemaja Barat	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tangga Turun dari Pompong Desa Keramat Kec.jemaja barat sub keg.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
55	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	50.303.000,00	Desa Batu Ampar	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Desa Batu Ampar Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
56	Bangunan Tempat Parkir	2021	45.650.000,00	Kecamatan Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaa Pembuatan Tempat Parkir Alat Berat/Excavator pada sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,pendauran ulang dan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						pemanfaatan kembali
57	Bangunan Tempat Parkir	2021	48.466.000,00	Air Nangak Kec. Siantan Tengah	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Air Nangak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
58	Bangunan Parkir lainnya (dst)	2021	49.511.000,00	Desa Candi	2025	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan Batu Miring Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi Kec.Palmatak
59	Taman lainnya	2021	21.175.000,00	SMP N 2 Siantan Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SMP 2 Siantan pad sub keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
60	Taman lainnya	2021	24.975.000,00	SMP Arung Hijau Kec Siantan Selatan	2025	Pembayaran Terminj 100% belanja jasa konsultansi perencanaan taman hijau di SMP Arung Hijau pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
61	Taman lainnya	2021	21.169.000,00	SMP N 1 Siantan Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SMP 1 Siantan pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
62	Taman lainnya	2021	23.710.000,00	SD 08 Lembah Rewak	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 08 Lembah Rewak pada Sub Keg.pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
63	Bangunan Dermaga	2021	14.619.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Terminj 100% pekerjaan perencanaan pembangunan pelantar beton tambatan perahu desa keramut kec.jemaja barat sub keg.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
64	Bangunan Dermaga	2021	11.330.000,00	Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun 1 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
65	Bangunan Dermaga	2021	12.745.000,00	Desa Piabung Kecamatan Palmatak	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Piabung Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
66	Bangunan Dermaga	2021	50.237.000,00	Desa Payamaram	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun Sekubik Desa Payamaram Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
67	Bangunan Dermaga	2021	15.059.000,00		2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 RW.03 Desa Putik Kec.Palmatak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan pengumpan Lokal
68	Bangunan Dermaga	2021	51.141.000,00	Batu Berapit Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu RT 7 RW 3 Air Ipe Desa Batu Berapit Kec.Jemaja Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
69	Bangunan Dermaga	2021	44.709.000,00	RT.006/RW.00 2 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT 006/RW 002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
70	Bangunan Dermaga	2021	41.998.000,00	RT.02/RW.02 Desa Munjan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Kec. Siantan Timur		Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW02 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
71	Bangunan Dermaga	2021	49.142.000,00	RT.003/RW.00 2 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Jl.Usman RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
72	Bangunan Dermaga	2021	49.313.000,00	RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec Kute Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec.Kute Siantan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
73	Bangunan Dermaga	2021	49.720.000,00	Kec. Jemaja Barat	2025	Pembayaran terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Tambatan Perahu Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
74	Bangunan Dermaga	2021	48.004.000,00	RT.02/RW.02 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.002/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
75	Bangunan Dermaga	2021	98.393.000,00	RT.06 Desa Nyamuk Kec. Siantan timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 Nyamuk Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
76	Bangunan Dermaga	2021	99.412.000,00	RT.004 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Mayang Sari RT.04 Desa Bayat Kec.Siantan Utara
77	Bangunan Dermaga	2021	90.409.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Bayat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
78	Bangunan Dermaga	2021	90.420.000,00	Dusun Sedak Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sedak Sub Keg.Siantan Sub Keg Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
79	Bangunan Dermaga	2021	99.863.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat	2025	Pembayaran Terminj 100% belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Keramut Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
80	Bangunan Dermaga	2021	99.418.000,00	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Payalaman Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
81	Bangunan Dermaga	2021	99.907.000,00	RT.05/RW.03/ asban Desa Candi Kec. Palmatak	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.05 RW03 /asban desa candi kec.palmatak sub keg pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						pelabuhan pengumpan lokal
82	Bangunan Dermaga	2021	34.610.000,00	Desa Munjan	2025	Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.002/003 Dusun III Desa Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
83	Bangunan Dermaga	2021	35.525.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu Lapangan Bola Desa Munjan
84	Bangunan Dermaga	2021	28.750.000,00		2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbun Pelabuhan Desa Candi (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
85	Bangunan Dermaga	2021	32.650.000,00	Desa Putik	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.006/RW.03 Desa Putik Kec. Palmatak (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
86	Bangunan Dermaga	2021	18.155.000,00	Desa Payalaman	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu Kp. Umbar Desa Payalaman Kec. Kute Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
87	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Sri Tanjung	2025	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sri Tanjung (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
88	Bangunan Dermaga	2021	29.120.000,00	Teluk Denung, Desa Pesisir Timur	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Pesisir Timur Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
89	Bangunan Dermaga	2021	33.480.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.001/RW.003 (Gang Zul) Desa

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
90	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Teluk Siantan	2025	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Sandar Kapal Penyeberangan Desa Teluk Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
91	Bangunan Dermaga	2021	33.750.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu RT.003/RW.002 Desa Munjan Kec, Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
92	Bangunan Dermaga	2021	34.400.000,00	Desa Nyamuk	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Nyamuk Kec, Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
93	Bangunan Dermaga	2021	7.160.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Saat Desa Munjan Kec. Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
94	Bangunan Dermaga	2021	40.400.000,00	Kelurahan Letung	2025	Pekerjaan Perencanaan Pelabuhan Apung Berhala Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
95	Bangunan Dermaga	2021	33.490.000,00	Desa Air Biru	2025	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Pelantar Beton Pelabuhan Nelayan Desa Air Biru Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
96	Bangunan Dermaga	2021	28.450.000,00	Desa Batu Berapit	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
97	Bangunan Dermaga	2021	30.340.000,00	Desa Air Bini	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pelabuhan Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
98	Bangunan Dermaga	2021	28.145.000,00	Desa Impol	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Desa Impol Kec. Jemaja Barat (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
99	Bangunan Dermaga	2021	99.500.000,00	Desa Air Bni	2025	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW.04 Desa Air Bini Genting Kec. Siantan Selatan
100	Bangunan Dermaga	2021	99.896.000,00	Desa Batu Ampar	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sambungan Tambatan Perahu Desa Batu Ampar
101	Bangunan Dermaga	2021	99.891.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Karman RT 02 RW 02 Desa Munjan Kec. Siantan
102	Bangunan Dermaga	2021	98.131.000,00	Desa Mengkait	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan
103	Bangunan Dermaga	2021	99.852.000,00	Desa Candi	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan RT.003/RW.002 Desa Candi Kec. Palmtak
104	Bangunan Dermaga	2021	99.401.000,00	Desa Pian Pasir	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pian Pasir Kecamatan Siantan Utara
105	Bangunan Dermaga	2021	99.880.000,00	Desa Langir	2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Nur Arifin RT.04 RW.02 Desa Langir Kec. Palmtak
106	Bangunan Dermaga	2021	99.407.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultansi

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan (Harun)
107	Bangunan Dermaga	2021	99.975.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tangga dan Semenisasi Pelabuhan Puskesmas Pembantu Desa Munjan Kec. Siantan Timur
108	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Tarempa Timur	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Teluk Red Desa Tarempa Timur
109	Bangunan Dermaga	2021	79.343.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Dusun Teluk Rung Desa Munjan
110	Bangunan Dermaga	2021	99.935.000,00	Desa Air Sena	2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Tanjung Mulia Desa Air Sena
111	Bangunan Dermaga	2021	80.844.000,00	Desa Payakmaram	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sekubik Desa Payakmaram
112	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Nyamuk	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Dam RT.10 Nyamuk Kec. Siantan Timur
113	Bangunan Dermaga	2021	98.406.000,00	Desa Munjan	2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/001 Dusun 1 Desa Munjan
114	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	19.316.000,00	Desa Nyamuk Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC Pelabuhan Desa Nyamuk Pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan Pengumpukan Lokal
115	Buku Umum Lain-lain	2021	99.858.000,00		2025	
116	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	8.750.000,00		2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 001
117	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00	Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pada Sub Keg.Pengelolaa Ruang Terbuka Hijau (RTH)
118	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00		2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
119	Kapal Motor	2022	99.345.000,00		2025	Belanja jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan - pembangunan bus air ro-ro-DAK penugasan sub keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota TA 2022
120	Kapal Motor	2022	98.790.000,00		2025	Belanja Jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan- pembangunan bus air Ro-Ro peninting-konjo (kecamatan siantan) Sub keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dal
121	Bangunan Dermaga	2022	24.353.000,00		2025	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Dolpin Roro Pelabuhan di Desa Batu Belah

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Siantan Timur
122	Bangunan Dermaga	2022	51.115.000,00		2025	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Kusik Kecamatan Jemaja
123	Bangunan Dermaga	2022	23.254.000,00		2025	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan di Desa Lidi Kecamatan Siantan Tengah
124	Bangunan Dermaga	2022	52.591.000,00		2025	Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
125	Bangunan Dermaga	2022	45.660.000,00		2025	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Peningkatan Pelabuhan di Desa Pesisir Timur Kec. Siantan
126	Kapal Motor	2023	99.644.700,00		2025	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kapal Cepat Mengkait-Air Bini Siantan Selatan
127	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2023	99.239.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Ruang Tunggu Pelabuhan Pemda Kec. Siantan
128	Bangunan Dermaga	2023	99.463.770,00	Desa Rewak	2025	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Desa Rewak Tahap II pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
129	Bangunan Dermaga	2023	99.119.670,00	Kec. Siantan Timur	2025	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Pelabuhan SMA Negeri 1 Siantan Timur pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
130	Bangunan Dermaga	2023	99.211.800,00	Desa Sunggak	2025	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
131	Bangunan Dermaga	2023	99.567.000,00	Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2025	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Momong Kec. Siantan pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
132	Bangunan Dermaga	2023	99.235.110,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2025	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Pelabuhan Nelayan Tunjuk RT.01/RW.01 Desa Landak, Kec. Jemaja pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
133	Bangunan Dermaga	2023	1.625.000.000,00	Pulau Siantan-Pulau Matak, Jemaja-Jemaja Barat	2025	Pembayaran Jasa Konsultansi Perencana SSID Pelabuhan Multipurpose Pulau Siantan-Pulau Matak dan SSID Penyeberangan Jemaja-Jemaja Barat
134	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	403.270.134,00	Pelabuhan Air Sungkit Mampok Jemaja	2025	Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja
135	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2024	253.406.725,00	Pelabuhan Desa Matak Matak Kute Siantan	2025	Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan
	J U M L A H		9.507.706.409,00			

Tabel 179

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2017	98.230.000,00	Pasar Inpress	2025	
2	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2018	372.880.777,00	Jl. Hang Tuah Tarempa	2025	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pasir Loka

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
3	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2021	12.551.000,00	Jl. Batu Tambun Kec. Siantan	2025	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat
4	Bangunan Tempat Parkir	2021	11.616.000,00	Tanjung Desa Tarempa Barat	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Area Parkir
	J U M L A H		495.277.777,00			

Tabel 180
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Teluk Denung Pesisir Timur RT.001/RW.001 Kec. Siantan	2025	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Balai Kesenian RT.001 RW,001 Teluk Denung Pesisir Timur Kec. Siantan
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2020	35.145.000,00	Jl. Pasir Merah SP	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjut Pembangunan Destinasi Wisata Batu Tompak Tiga
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2025	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo di Pulau Kuku Desa Air biru Kec.Jemaja
4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	9.845.000,00	Desa Batu Ampar, Kec. Palmatak	2025	Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo Desa Batu Ampar Kec. Palmatak
5	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	2020	9.900.000,00	Tanjung Momong, Kec. Siantan	2025	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Dive Center Tanjung Momong
6	Bangunan Gedung Musium Permanen	2022	98.770.000,00	Kab. Kepulauan Anambas	2025	DED Pembangunan Musium Kab. Kep. Anambas
7	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.368.360,00	Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur	2025	DED Agro Wisata Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2024
8	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.368.360,00	Kecamatan Siantan	2025	DED Tugu Penyus Kec. Siantan Tahun 2024
	J U M L A H		273.076.720,00			

7.6.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60.

Tabel 181
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan	(1.150.571.959.997,60)	(177.054.286.306,63)	(7.842.335,00)	(1.327.618.403.969,23)
Jumlah	(1.150.571.959.997,60)	(177.054.286.306,63)	(7.842.335,00)	(1.327.618.403.969,23)

Rincian perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23 sebagai berikut

Tabel 182
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Peralatan Dan Mesin	(355.212.901.470,07)	(9.757.682.414,09)	(43.994.938.423,26)	(408.965.522.307,43)
Gedung dan Bangunan	(84.007.036.842,07)	0,00	(31.235.811.618,37)	(115.242.848.460,44)
Jalan. Irigasi dan Jaringan	(711.352.021.685,46)	0,00	(90.556.897.515,91)	(801.908.919.201,37)
Aset Tetap Lainnya	0,00	(1.390.811.100,00)	(110.302.900,00)	(1.501.114.000,00)
Jumlah	(1.150.571.959.997,60)	(11.148.493.514,09)	(165.897.950.457,53)	(1.327.618.403.969,23)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 183
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Sekretariat DPRD	(11.507.908.449,00)	(1,00)	(561.622.204,93)	(12.069.530.654,93)
Sekretariat Daerah	(86.646.331.551,00)	(539.399.725,81)	(9.788.648.541,17)	(96.974.379.817,98)
Inspektorat Daerah	(1.920.075.824,00)	1.187.500,00	(70.176.515,13)	(1.989.064.839,13)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	(667.827.183.447,23)	(10.755.895.009,63)	(87.568.968.890,05)	(766.152.047.346,91)

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(54.304.580.339,50)	30.152.176,48	(11.782.691.680,28)	(66.057.119.843,30)
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(121.766.227.154,87)	(2.648.523.733,73)	(28.776.320.071,89)	(153.191.070.960,49)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(18.317.726,00)	0,57	(22.556.569,30)	(40.874.294,73)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(105.134.132.599,00)	377.914.676,00	(13.255.577.037,59)	(118.011.794.960,59)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.461.280.656,00)	0,00	584.725.822,59	(1.876.554.833,41)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.270.129.341,00)	3.346.002,00	(246.038.996,44)	(2.512.822.335,44)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(16.144.966.359,00)	14.826.605,00	(843.090.364,83)	(16.973.230.118,83)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	(13.336.351.519,00)	(199.546.719,00)	(1.784.215.062,34)	(15.320.113.300,34)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.611.199.720,00)	(1,00)	(114.764.609,31)	(2.725.964.330,31)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(8.511.687.648,00)	(2.420.005,00)	(952.808.717,97)	(9.466.916.370,97)
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	(7.721.418.100,00)	1.236.669,00	(1.188.591.042,96)	(8.908.772.473,96)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(34.621.860,00)	(174.668.200,00)	(111.045.095,38)	(320.335.155,38)
Satuan Polisi Pamong Praja	(12.218.433.799,00)	(188.228.741,38)	(644.843.808,17)	(13.051.506.348,56)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(6.462.343.770,00)	(2.287.997,00)	(344.579.866,95)	(6.809.211.633,95)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.419.671.393,00)	(0,29)	(152.560.429,64)	(4.572.231.822,93)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(2.286.925.349,00)	0,00	(163.869.895,62)	(2.450.795.244,62)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.068.069.151,00)	0,00	(12.182.434,00)	(1.080.251.585,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.290.516.378,00)	(384.619.820,10)	(714.700.548,55)	(2.389.836.746,65)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(63.345.666,00)	0,00	(62.402.058,12)	(125.747.724,12)
Kecamatan Siantan	(4.312.307.765,00)	4.233.353.102,75	(6.031.435.182,46)	(6.110.389.844,71)

SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Kecamatan Siantan Selatan	(2.364.195.567,00)	(184.327.123,00)	(184.761.472,23)	(2.733.284.162,23)
Kecamatan Siantan Timur	(1.112.073.791,00)	(184.327.126,00)	(89.227.228,00)	(1.385.628.145,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(2.193.128.994,00)	(184.327.130,00)	(148.176.717,00)	(2.525.632.841,00)
Kecamatan Palmatak	(3.104.597.662,00)	(4,00)	(182.257.722,00)	(3.286.855.388,00)
Kecamatan Jemaja	(3.023.850.149,00)	(1,00)	(199.784.325,67)	(3.223.634.475,67)
Kecamatan Jemaja Timur	(3.399.301.276,00)	(21.714.593,00)	(173.359.181,00)	(3.594.375.050,00)
Kecamatan Siantan Utara	(170.122.407,00)	(1.090.833,00)	(35.206.674,77)	(206.419.914,77)
Kecamatan Jemaja Barat	(410.138.979,00)	(9.566.700,00)	(88.554.925,00)	(508.260.604,00)
Kecamatan Kute Siantan	(456.525.608,00)	757.461,00	(149.322.168,00)	(605.090.315,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(330.324.242,96)	(38.336.243,37)	(368.660.486,33)
Jumlah	(1.150.571.959.997,60)	(11.148.493.514,09)	(165.897.950.457,53)	(1.327.618.403.969,23)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23 tidak termasuk aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184
Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomptabel) Per SKPD

(Dalam Rupiah)			
SKPD	Tahun 2023	Tahun 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	2	3	4 = 2 + 3
Sekretariat Daerah	1.035.631.944,00	0,00	1.035.631.944,00
Sekretariat DPRD	343.511.300,00	0,00	343.511.300,00
Inspektorat Daerah	117.191.000,00	0,00	117.191.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.005.849.617,00	404.344.143,00	4.410.193.760,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.489.061.787,82	23.860.968,00	1.512.922.755,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82.092.503,00	0,00	82.092.503,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.215.200,00	5.000.000,00	46.215.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.991.300,00	0,00	69.991.300,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	422.476.620,00	6.500.000,00	428.976.620,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	214.732.017,00	0,00	214.732.017,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.497.800,00	0,00	20.497.800,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	36.105.000,00	0,00	36.105.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	148.761.718,00	20.313.000,00	169.074.718,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	63.094.000,00	0,00	63.094.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.640.000,00	3.250.000,00	8.890.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	541.714.288,00	1.680.000,00	543.394.288,00

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	2	3	4 = 2 + 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.743.223,00	0,00	68.743.223,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	48.097.500,00	10.400.000,00	58.497.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.438.200,00	0,00	100.438.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.692.500,00	0,00	41.692.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.428.000,00	0,00	10.428.000,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Kecamatan Jemaja	96.263.769,00	0,00	96.263.769,00
Kecamatan Jemaja Timur	175.708.500,00	0,00	175.708.500,00
Kecamatan Palmatak	202.665.000,00	0,00	202.665.000,00
Kecamatan Siantan	286.370.400,00	0,00	286.370.400,00
Kecamatan Siantan Selatan	160.446.000,00	14.000.000,00	174.446.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	86.022.000,00	1.800.000,00	87.822.000,00
Kecamatan Siantan Timur	116.744.800,00	0,00	116.744.800,00
Kecamatan Siantan Utara	23.409.500,00	0,00	23.409.500,00
Kecamatan Jemaja Barat	3.492.500,00	0,00	3.492.500,00
Kecamatan Kute Siantan	80.243.500,00	0,00	80.243.500,00
Jumlah	10.138.331.486,82	498.648.111,00	10.636.979.597,82

7.6.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan Jangka Panjang (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (3) Aset Tak Berwujud dan (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp19.906.176.355,04 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp32.527.099.632,70.

Tabel 185
Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	2024	2023
1	2	3	4
1	Tuntutan Ganti Rugi	849.286.283,93	300.055.779,93
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi Netto (1+2)	218.608.283,93	300.055.779,93
4	Aset Tak Berwujud	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(46.292.912.290,66)	(45.499.679.364,00)
6	Aset Tak Berwujud Netto (4+5)	1.046.525.353,34	1.839.758.280,00
7	Aset Lain-lain	65.668.702.177,71	66.785.086.747,71
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(51.575.072.459,94)	(57.951.009.224,94)
9	Aset Lain-lain Netto (7+8)	14.093.629.717,77	8.834.077.522,77
10	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.916.735.000,00	21.553.208.050,00
Jumlah Aset Lainnya (3+6+9+10)		19.275.498.355,04	19.906.176.355,04

7.6.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Kerugian ini bisa terjadi, misalnya, akibat tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah, kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, atau adanya kerugian finansial akibat kontrak yang merugikan daerah. Tujuan utama dari tuntutan ini adalah untuk memulihkan posisi finansial daerah yang terganggu akibat tindakan yang merugikan, serta untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp849.286.283,93 terdiri dari Piutang TGR berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) bulan Maret 2019 dan penambahan atas sisa temuan BPK. Rincian saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

TGR PUPR

- CV. BLM	42.282.000,00
Jumlah	<u>42.282.000,00</u>

TGR PUPR

- CV. CNB	118.133.968,45
- CV. MAB	55.535.765,48
- CV. KKK	144.336.000,00
- CV. AT	75.923.000,00
- CV. KS	73.057.000,00
- CV. AGM	53.199.000,00
Jumlah	<u>520.184.733,93</u>

TGR DISDIKPORA

- CV. SA	18.642.000,00
- CV. NJ	7.402.000,00
- CV. ADP	27.182.000,00
- CV. RB	36.534.000,00
- CV. FC	25.394.000,00
- CV. NB	12.223.000,00
- CV. LLA	29.980.000,00
- CV. TBR	10.589.000,00
- CV. TK	4.295.000,00
Jumlah	<u>172.241.000,00</u>

TGR DINKESPPKB

- CV. SNP	16.175.000,00
- PT. BSP	8.332.000,00
- CV. MAB	45.133.000,00
Jumlah	<u>69.640.000,00</u>

TGR BPKPD

- RP	44.938.550,00
Jumlah	<u>44.938.550,00</u>
Total	<u>849.286.283,93</u>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 masih terdapat saldo atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp849.286.283,93 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp300.055.779,93.

7.6.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.339.437.644,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp47.339.437.644,00. Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud pada masing-masing SKPD Tahun 2024. Rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 186
Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)	
SKPD	Saldo 31 Desember 2024
1	2
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	69.410.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00
JUMLAH	47.339.437.644,00

7.6.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif ke rusak berat karena pemakaian dan aset yang belum diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024. Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.668.702.177,71 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp66.785.086.747,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 187
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	6.296.351.124,00	0,00	0,00	6.296.351.124,00
Sekretariat DPRD	261.434.000,00	0,00	0,00	261.434.000,00
Inspektorat Daerah	329.659.100,00	0,00	0,00	329.659.100,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.908.738.778,00	0,00	0,00	5.908.738.778,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.319.775.715,23	0,00	0,00	8.319.775.715,23
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.856.509.920,00	0,00	0,00	3.856.509.920,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.847.808.065,00	0,00	0,00	2.847.808.065,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	392.382.910,00	0,00	0,00	392.382.910,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.172.511.316,00	0,00	0,00	1.172.511.316,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	13.298.438.380,48	0,00	0,00	13.298.438.380,48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.770.853.370,00	0,00	1.116.584.570,00	654.268.800,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	5.302.579.150,00	0,00	0,00	5.302.579.150,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.441.153.700,00	0,00	0,00	1.441.153.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.137.559.444,00	0,00	0,00	5.137.559.444,00
Satuan Polisi Pamong Praja	665.194.500,00	0,00	0,00	665.194.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.604.158.258,00	0,00	0,00	1.604.158.258,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	720.708.530,00	0,00	0,00	720.708.530,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	936.628.000,00	0,00	0,00	936.628.000,00

SKPD	Saldo 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-24
1	2	3	4	5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	973.474.002,00	200.000,00	0,00	973.674.002,00
Kecamatan Jemaja	2.064.367.184,00	0,00	0,00	2.064.367.184,00
Kecamatan Jemaja Timur	371.964.800,00	0,00	0,00	371.964.800,00
Kecamatan Palmatak	844.072.801,00	0,00	0,00	844.072.801,00
Kecamatan Siantan	674.586.000,00	0,00	0,00	674.586.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	530.554.300,00	0,00	0,00	530.554.300,00
Kecamatan Siantan Tengah	185.599.000,00	0,00	0,00	185.599.000,00
Kecamatan Siantan Timur	878.024.400,00	0,00	0,00	878.024.400,00
JUMLAH	66.785.086.747,71	200.000,00	1.116.584.570,00	65.668.702.177,71

7.6.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yang dibatasi berdasarkan umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.292.912.290,66 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 188
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)			
SKPD	Amortisasi Per 31 Des 2023	Penambahan Amortisasi Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	(1.899.586.883,33)	(91.637.616,66)	(1.991.224.499,99)
Sekretariat DPRD	(39.600.000,00)	0,00	(39.600.000,00)
Inspektorat Daerah	(186.500.000,00)	0,00	(186.500.000,00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(1.877.260.400,00)	0,00	(1.877.260.400,00)
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(46.083.333,33)	(39.500.000,00)	(85.583.333,33)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(24.881.130.433,34)	(347.777.166,68)	(25.228.907.600,02)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(77.640.000,00)	0,00	(77.640.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(241.178.000,00)	(6.650.000,00)	(247.828.000,00)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(1.368.129.666,67)	(88.641.666,67)	(1.456.771.333,34)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(2.106.158.320,00)	(9.985.560,00)	(2.116.143.880,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(17.669.400,00)	0,00	(17.669.400,00)
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	(69.410.000,00)	0,00	(69.410.000,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	(279.848.244,00)	(24.469.500,00)	(304.317.744,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(6.465.730.300,00)	(108.164.399,98)	(6.573.894.699,98)

SKPD	Amortisasi Per 31 Des 2023	Penambahan Amortisasi Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024
1	2	3	4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(531.685.000,00)	0,00	(531.685.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(967.970.383,33)	(76.407.016,67)	(1.044.377.400,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.444.099.000,00)	0,00	(4.444.099.000,00)
JUMLAH	(45.499.679.364,00)	(793.232.926,66)	(46.292.912.290,66)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terdapat saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp46.292.912.290,66 terdiri dari saldo awal sebesar Rp45.499.679.364,00 dan adanya penambahan nilai amortisasi pada Tahun berjalan sebesar Rp793.232.926,66. Nilai buku Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp1.046.525.353,34 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)			
SKPD	Aset Tak Berwujud 31-Des-23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2024
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00	(1.991.224.500,00)	53.021.000,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00	(39.600.000,00)	0,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00	(186.500.000,00)	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00	(1.877.260.400,00)	0,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00	(85.583.333,33)	111.916.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00	(25.228.907.600,00)	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00	(77.640.000,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00	(247.828.000,00)	0,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00	(1.456.771.333,34)	110.608.666,66
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00	(2.116.143.880,00)	78.220.220,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00	(17.669.400,00)	0,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	69.410.000,00	(69.410.000,00)	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00	(304.317.744,00)	27.515.400,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00	(6.573.894.699,99)	573.509.800,01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00	(531.685.000,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00	(1.044.377.400,00)	91.733.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00	(4.444.099.000,00)	0,00
JUMLAH	47.339.437.644,00	(46.292.912.290,66)	1.046.525.353,34

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terdapat saldo Nilai buku Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp1.046.525.353,34 terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.339.437.644,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp46.292.912.290,66.

7.6.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan penyusutan terhadap Aset dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang belum/tidak digunakan karena menunggu proses pemindahan tangan. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.575.072.459,94 sama dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp57.951.009.224,94 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 190
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Tahun 2023	Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2024	Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2024	Saldo Akhir Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	(2.232.983.418,00)	1.478.038.446,00	0,00	(754.944.972,00)
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.108.074.598,26)	72.125.323,26	0,00	(7.035.949.275,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.806.559.920,00)	431.518.860,00	0,00	(3.375.041.060,00)
Kantor Satuan Pamong Praja	(665.194.500,00)	97.900.000,00	0,00	(567.294.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(973.474.002,00)	98.650.000,00	0,00	(874.824.002,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.839.935.562,00)	31.098.540,00	0,00	(2.808.837.022,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.766.869.751,00)	94.596.854,00	(1.018.134.570,00)	(654.138.327,00)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(10.750.372.501,00)	(1.405.344.111,40)	0,00	(12.155.716.612,40)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	(5.302.579.150,00)	98.450.000,00	0,00	(5.204.129.150,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian	(1.441.153.700,00)	1.267.809.740,00	0,00	(173.343.960,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.291.640.073,79)	899.257.163,79	0,00	(392.382.910,00)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(1.172.511.316,00)	230.158.958,00	0,00	(942.352.358,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(2.511.477.174,39)	(337.456.572,15)	0,00	(2.848.933.746,54)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo Awal Tahun 2023	Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2024	Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2024	Saldo Akhir Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	(6.296.351.124,00)	227.550.000,00	0,00	(6.068.801.124,00)
Sekretariat DPRD	(261.434.000,00)	97.900.000,00	0,00	(163.534.000,00)
Kecamatan Siantan	(674.586.000,00)	254.775.000,00	0,00	(419.811.000,00)
Kecamatan Jemaja	(2.057.577.184,00)	389.004.032,00	0,00	(1.668.573.152,00)
Kecamatan Palmatak	(844.072.801,00)	216.574.600,00	0,00	(627.498.201,00)
Kecamatan Siantan Timur	(875.651.837,50)	96.077.437,50	0,00	(779.574.400,00)
Kecamatan Siantan Selatan	(530.554.300,00)	98.450.000,00	0,00	(432.104.300,00)
Kecamatan Jemaja Timur	(256.318.500,00)	104.350.000,00	0,00	(151.968.500,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(185.599.000,00)	98.450.000,00	0,00	(87.149.000,00)
Inspektorat Daerah	(329.659.100,00)	97.900.000,00	0,00	(231.759.100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(936.628.000,00)	-	0,00	(936.628.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.263.055.389,00)	549.529.859,00	0,00	(713.525.530,00)
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.576.696.323,00)	70.438.065,00	0,00	(1.506.258.258,00)
Total	(57.951.009.224,94)	5.357.802.195,00	(1.018.134.570,00)	(51.575.072.459,94)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terdapat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp51.575.072.459,94 terdiri dari saldo awal sebesar Rp57.951.009.224,94, Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2024 sebesar Rp5.357.802.195,00 dan Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2024 sebesar Rp1.018.134.570,00.

7.6.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan DBH/DAU yang disalurkan secara non tunai dari RKUN pada masing-masing Rekening *Deposit Facility* milik Pemerintah Daerah yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia. Jumlah saldo rekening TDF atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember dengan nomor Rekening 519000665980 sebesar 3.916.735.000,00 TDF tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil yang disalurkan pada Tahun 2024.

Tabel 191
Mutasi Saldo Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Saldo Awal (2023)	Penambahan TDF	Pencairan TDF	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6
1	TDF	21.553.208.050,00	3.916.735.000,00	21.553.208.050,00	3.916.735.000,00
Jumlah TDF		21.553.208.050,00	3.916.735.000,00	21.553.208.050,00	3.916.735.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

masih memiliki Saldo pada Rekening Bank Indonesia yang telah di TDF kan sebesar Rp3.916.735.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp21.553.208.050,00. Atas Saldo Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* tersebut yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan di Hold minimal selama 3 Bulan, sehingga baru bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan dengan melihat posisi KASDA pada bulan ke empat Tahun Anggaran.

7.6.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp95.490.878.032,92 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.026.794.345,36.

7.6.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp95.268.542.032,92 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.026.794.345,36 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja.

Tabel 192
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4
Pendapatan diterima dimuka	49.503.589,58	34.125.000,00	15.378.589,58
Utang Belanja	95.219.038.443,34	2.893.625.345,36	92.325.413.097,98
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	99.044.000,00	(99.044.000,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	95.268.542.032,92	3.026.794.345,36	92.241.747.687,56

Berdasarkan table diatas menunjukkan kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2024 sebesar Rp92.464.083.687,56 dibanding Tahun 2023. Kenaikan signifikan atas Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2024 disebabkan oleh ketidakakuratan dalam prediksi pendapatan dan lemahnya manajemen kas daerah dalam mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka di pemerintah daerah merujuk pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari masyarakat atau pihak lain sebelum pemerintah daerah memberikan layanan atau memenuhi kewajiban tertentu. Dalam hal ini, pemerintah daerah menerima uang terlebih dahulu, namun layanan atau kegiatan yang menjadi imbalan atas pembayaran tersebut baru akan dilakukan di masa depan, misalnya Sewa Barang Milik Daerah (BMD). Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.503.589,58 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp34.125.000,00. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan pendapatan yang diterima dari hasil perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak ketiga, antara lain:

- Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Oleh PT. TELKOM INDONESIA, Tbk sebesar Rp32.625.000,00;
- Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Daerah Oleh PT. PALAPA RING BARAT Rp11.703.756,25; dan
- Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Oleh PT. JASTIPMAN COMMERCE MART Rp 5.174.833,33.

Mutasi penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193
Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Pendapatan diterima dimuka	34.125.000,00	16.878.589,58	1.500.000,00	49.503.589,58
Jumlah	34.125.000,00	16.878.589,58	1.500.000,00	49.503.589,58

7.6.3.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja Daerah adalah kewajiban yang timbul akibat pengeluaran atau belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi pembayarannya belum dilakukan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Utang ini tercatat ketika pemerintah daerah telah memesan atau menerima barang dan jasa, namun belum membayar atau melunasi tagihan tersebut. Utang belanja daerah biasanya berkaitan dengan transaksi belanja yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Utang ini dapat timbul akibat berbagai jenis belanja, seperti belanja barang, belanja modal, atau belanja jasa yang belum dibayar.

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir periode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah Utang Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp95.219.038.443,34

dibandingkan dengan Tahun 2023 Rp2.893.625.345,36 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 194
Mutasi Utang Belanja Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Utang Belanja	2.893.625.345,36	94.136.695.586,50	1.811.282.488,52	95.219.038.443,34
Jumlah	2.893.625.345,36	94.136.695.586,50	1.811.282.488,52	95.219.038.443,34

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.441.374.443,34 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 195
Rekapan Penambahan Utang Belanja per SKPD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Total
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	22.767.205.129,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.467.159.098,00
3	Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.377.253.762,00
4	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	656.777.110,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.050.978.952,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	904.149.276,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	766.497.267,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	962.908.787,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	863.251.840,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	462.573.869,00
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	3.977.255.807,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.638.996.378,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.035.471.108,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	423.949.340,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	254.138.842,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.157.435.313,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	759.725.964,00
18	Sekretariat Daerah	6.273.749.292,00
19	Sekretariat DPRD	3.476.225.229,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.404.366.175,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.493.866.533,50
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	994.674.247,00
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	639.222.750,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Total
1	2	3
24	Inspektorat Daerah	1.750.211.359,00
25	Kecamatan Siantan	660.515.398,00
26	Kecamatan Jemaja	603.312.243,00
27	Kecamatan Palmatak	335.491.080,00
28	Kecamatan Siantan Timur	289.052.278,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	295.797.942,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	283.870.389,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	272.517.461,00
32	Kecamatan Siantan Utara	188.573.618,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	203.390.967,00
34	Kecamatan Kute Siantan	446.130.783,00
Total		94.136.695.586,50

Tabel 196

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000539/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	355.920.023,00
2	21.05/03.0/000540/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 AIR ASUK KECAMATAN SIANTAN TENGAH (DAK 2024)	233.765.957,00
3	21.05/03.0/000541/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 JEMAJA KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	179.875.788,00
4	21.05/03.0/000542/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	125.070.402,00
5	21.05/03.0/000543/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	92.555.576,00
6	21.05/03.0/000544/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LEMBAH REWAK KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	161.016.662,00
7	21.05/03.0/000545/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 JEMAJA KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	97.275.184,00
8	21.05/03.0/000546/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	108.576.517,00
9	21.05/03.0/000547/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA	95.973.609,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	
10	21.05/03.0/000548/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	106.476.641,00
11	21.05/03.0/000549/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMPN2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	143.747.363,00
12	21.05/03.0/000550/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	181.205.923,00
13	21.05/03.0/000551/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LEMBAH REWAK KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	95.698.314,00
14	21.05/03.0/000552/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 002 ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	124.633.776,00
15	21.05/03.0/000553/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 004 GENTING PULUR KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	125.867.323,00
16	21.05/03.0/000554/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	130.518.163,00
17	21.05/03.0/000555/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN REHABILITASI RUANG UKS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SDN 002 ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	198.391.850,00
18	21.05/03.0/000556/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK (DAK 2024)	5.850.000,00
19	21.05/03.0/000557/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN GAJI PTT SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	2.752.016.608,00
20	21.05/03.0/000557/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN GAJI PTT SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	225.226.432,00
21	21.05/03.0/000558/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAGIHAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KEPESERTAAN PTT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	8.127.450,00
22	21.05/03.0/000558/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAGIHAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KEPESERTAAN PTT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	6.501.960,00
23	21.05/03.0/000559/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	2.820.334.000,00
24	21.05/03.0/000559/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	121.990.000,00
25	21.05/03.0/000559/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	164.256.000,00
26	21.05/03.0/000559/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	122.620.101,00
27	21.05/03.0/000560/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	1.026.480.000,00
28	21.05/03.0/000560/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	41.121.600,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
29	21.05/03.0/000560/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN NOVEMBER 2024	1.560.000,00
30	21.05/03.0/000561/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DESEMBER 2024	1.560.000,00
31	21.05/03.0/000561/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DESEMBER 2024	1.028.560.000,00
32	21.05/03.0/000561/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DESEMBER 2024	41.204.800,00
33	21.05/03.0/000562/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.05 (DAK 2024)	66.218.000,00
34	21.05/03.0/000563/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 02.04 (DAK 2024)	54.918.000,00
35	21.05/03.0/000564/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSI) GURU PNSD TW III (JULI DAN AGUSTUS) 2024	192.000.000,00
36	21.05/03.0/000566/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN, BELANJA HONORARIUM JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN BULAN AGUSTUS - DESEMBER 2024	442.650.000,00
37	21.05/03.0/000567/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBACA DOA KEGIATAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	26.475.000,00
38	21.05/03.0/000568/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	3.300.000,00
39	21.05/03.0/000569/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	1.300.000,00
40	21.05/03.0/000570/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bulan JULI- OKTOBER Tahun 2024 - Kurang Bayar a.n Tarmizi (DAU SG 2024)	11.592.000,00
41	21.05/03.0/000571/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang (Transfortasi Siswa SD Bulan NOVEMBER) (DAU SG 2024)	56.800.000,00
42	21.05/03.0/000572/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang (Transfortasi Siswa SMP Bulan NOVEMBER) (DAU SG 2024)	109.900.000,00
43	21.05/03.0/000573/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang (Transfortasi Siswa SD Bulan DESEMBER) (DAU SG 2024)	31.808.000,00
44	21.05/03.0/000574/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang (Transfortasi Siswa SMP Bulan DESEMBER) (DAU SG 2024)	61.544.000,00
45	21.05/03.0/000575/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (ANBK) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEP. ANAMBAS TAHUN 2024 (DAU SG 2024)	10.400.000,00
46	21.05/03.0/000576/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM MANAJEMEN BOS/BOSDA PRIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2024 (DAU SG 2024)	71.250.000,00
47	21.05/03.0/000577/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM OPERATOR SEKOLAH TK NEGERI DAN SD NEGERI SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PRIODE JANUARI S.D DESEMBER 2024	319.200.000,00
48	21.05/03.0/000578/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM OPERATOR JENJANG SMP NEGERI SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PRIODE JANUARI S.D DESEMBER 2024 (DAU SG 2024)	105.000.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
49	21.05/03.0/000579/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) SD PERIODE JANUARI s.d DESEMBER 2024 (DAU SG 2024)	310.080.000,00
50	21.05/03.0/000580/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) SMP PRIODE JANUARI s.d DESEMBER 2024 (DAU SG 2024)	102.000.000,00
51	21.05/03.0/000581/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD (DAU SG 2024)	35.770.000,00
52	21.05/03.0/000582/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	12.110.200,00
53	21.05/03.0/000583/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD (DAU SG 2024)	7.980.000,00
54	21.05/03.0/000584/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/ KESETARAAN (DAU SG 2024)	3.130.000,00
55	21.05/03.0/000586/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN (DAU SG 2024)	2.800.000,00
56	21.05/03.0/000587/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN PAGAR LAPANGAN VOLY DESON DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	137.997.081,00
57	21.05/03.0/000588/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR LAPANGAN VOLY DESON DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.089.220,00
58	21.05/03.0/000589/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.06 (DAU SG 2024)	4.160.000,00
59	21.05/03.0/000590/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.13 (DAU SG 2024)	6.810.000,00
60	21.05/03.0/000592/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.49 (DAU SG 2024)	29.775.000,00
61	21.05/03.0/000593/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 02.40 (DAU SG 2024)	5.525.510,00
62	21.05/03.0/000594/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.25 (DAU SG 2024)	4.225.000,00
63	21.05/03.0/000595/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.38 (DAU SG 2024)	3.763.700,00
64	21.05/03.0/000596/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 02.58 (DAU SG 2024)	24.538.000,00
65	21.05/03.0/000597/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.39 (DAU SG 2024)	7.395.600,00
66	21.05/03.0/000598/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.28 (DAU SG 2024)	10.000.000,00
67	21.05/03.0/000599/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.28 (DAU SG 2024)	4.700.000,00
68	21.05/03.0/000600/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 02.58 (DAU SG 2024)	2.625.200,00
69	21.05/03.0/000601/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.27 (DAU SG 2024)	19.452.000,00
70	21.05/03.0/000602/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.27 (DAU SG 2024)	14.664.000,00
71	21.05/03.0/000603/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.27 (DAU SG 2024)	20.270.000,00
72	21.05/03.0/000604/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.27 (DAU SG 2024)	7.844.800,00
73	21.05/03.0/000605/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.27 (DAU SG 2024)	15.217.000,00
74	21.05/03.0/000606/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.26 (DAU SG 2024)	10.960.000,00
75	21.05/03.0/000607/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.41 (DAU SG 2024)	11.491.200,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
76	21.05/03.0/000608/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.39 (DAU SG 2024)	3.250.000,00
77	21.05/03.0/000609/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.38 (DAU SG 2024)	3.600.000,00
78	21.05/03.0/000610/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 02.58 (DAU SG 2024)	6.300.000,00
79	21.05/03.0/000611/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 01.39 (DAU SG 2024)	10.148.000,00
80	21.05/03.0/000612/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (DAU SG 2024)	8.250.000,00
81	21.05/03.0/000613/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (02.01) DAU SG 2024	6.684.800,00
82	21.05/03.0/000614/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	51.894.098,00
83	21.05/03.0/000615/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 02.40 (DAU SG 2024)	7.745.600,00
84	21.05/03.0/000616/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.39 (DAU SG 2024)	6.349.600,00
85	21.05/03.0/000617/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 02.58 (DAU SG 2024)	11.347.200,00
86	21.05/03.0/000618/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA 01.38 (DAU SG 2024)	3.222.800,00
87	21.05/03.0/000620/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	19.080.000,00
88	21.05/03.0/000621/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR -BAHAN KOMPUTER KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMENPAUD (DAU SG 2024)	1.397.400,00
89	21.05/03.0/000622/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	4.400.000,00
90	21.05/03.0/000623/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	1.700.000,00
91	21.05/03.0/000624/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BELANJA UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK (FOTOCOPY) KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	6.500.000,00
92	21.05/03.0/000625/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT /BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK SPANDUK KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	1.206.000,00
93	21.05/03.0/000626/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	1.827.000,00
94	21.05/03.0/000627/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	3.000.000,00
95	21.05/03.0/000628/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN TENGAH - DAU SG 2024	15.980.910,00
96	21.05/03.0/000629/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SUVENIR/CENDERA MATA (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN TIMUR-DAU SG 2024	12.005.760,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
97	21.05/03.0/000630/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SUVENIR/CENDERA MATA (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN TENGAH-DAU SG 2024	10.158.720,00
98	21.05/03.0/000631/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SUVENIR/CENDERA MATA (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN UTARA-DAU SG 2024	3.578.640,00
99	21.05/03.0/000632/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN TIMUR - DAU SG 2024	17.368.560,00
100	21.05/03.0/000633/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN PALMATAK, KUTE SIANTAN, DAN SIANTAN - DAU SG 2024	50.370.210,00
101	21.05/03.0/000634/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SUVENIR/CENDERA MATA (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN SELATAN, PALMATAK, KUTE SIANTAN, DAN SIANTAN- DAU SG 2024	60.836.880,00
102	21.05/03.0/000635/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN SELATAN - DAU SG 2024	11.703.396,00
103	21.05/03.0/000636/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (KEGIATAN GEBYAR PESERTA DIDIK PAUD) KECAMATAN SIANTAN UTARA - DAU SG 2024	5.851.698,00
104	21.05/03.0/000637/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.28 (DAU SG 2024)	909.000,00
105	21.05/03.0/000638/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 02.41 (DAU SG 2024)	909.000,00
106	21.05/03.0/000639/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/NAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 01.28 (DAU SG 2024)	1.965.000,00
107	21.05/03.0/000640/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK 02.58 (DAU SG 2024)	404.400,00
108	21.05/03.0/000641/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.38 (DAU SG 2024)	909.000,00
109	21.05/03.0/000642/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/NAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 01.38 (DAU SG 2024)	1.274.000,00
110	21.05/03.0/000643/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/NAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 02.41 (DAU SG 2024)	708.000,00
111	21.05/03.0/000644/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 02.58 (DAU SG 2024)	429.000,00
112	21.05/03.0/000645/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK 02.58 (DAU SG 2024)	450.000,00
113	21.05/03.0/000646/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 02.38 (DAU SG 2024)	1.129.000,00
114	21.05/03.0/000647/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.25 (DAU SG 2024)	2.050.000,00
115	21.05/03.0/000648/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 01.13 (DAU SG 2024)	2.077.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
116	21.05/03.0/000649/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.13 (DAU SG 2024)	5.750.000,00
117	21.05/03.0/000650/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER 01.13 (DAU SG 2024)	1.964.800,00
118	21.05/03.0/000651/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 01.26 (DAU SG 2024)	635.000,00
119	21.05/03.0/000652/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BE;ANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR 01.27 (DAU SG 2024)	1.432.000,00
120	21.05/03.0/000653/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.27 (DAU SG 2024)	1.831.500,00
121	21.05/03.0/000654/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER 01.26 (DAU SG 2024)	926.000,00
122	21.05/03.0/000655/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD (DAU SG 2024)	20.160.000,00
123	21.05/03.0/000656/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (ANGKA KREDIT) DAU SG 2024	16.000.000,00
124	21.05/03.0/000657/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LPTK (DAU SG 2024)	85.000.000,00
125	21.05/03.0/000658/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PPPK (DAU SG 2024)	16.950.000,00
126	21.05/03.0/000659/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 02.40 (DAU SG 2024)	17.640.000,00
127	21.05/03.0/000660/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 006 TEBANG KECAMATAN PALMATAK	199.062.923,00
128	21.05/03.0/000661/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 006 TEBANG KECAMATAN PALMATAK	23.509.711,00
129	21.05/03.0/000662/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 3 PUTIK KECAMATAN PALMATAK	199.330.876,00
130	21.05/03.0/000663/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 3 PUTIK KECAMATAN PALMATAK	24.366.702,00
131	21.05/03.0/000664/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SMPN 1 SIANTAN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	276.024.885,00
132	21.05/03.0/000666/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB RUANG MAJELIS GURU SMPN 005 HARUNG HIJAU	22.042.179,00
133	21.05/03.0/000667/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 006 TEBANG KECAMATAN PALMATAK	23.979.129,00
134	21.05/03.0/000668/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 3 PUTIK KECAMATAN PALMATAK	24.761.679,00
135	21.05/03.0/000669/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SMPN 1 SIANTAN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	45.303.540,00
136	21.05/03.0/000670/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA PERENCANAAN REHAP PAUD KASIH IBU KECAMATAN JEMAJA (DAU SG 2024)	22.483.050,00
137	21.05/03.0/000671/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MAJELIS GURU TK NEGERI 1 JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	50.693.180,00
138	21.05/03.0/000672/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS PKBM	96.591.367,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		ANAMBAS CERDAS DESA ARUNG HIJAU KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	
139	21.05/03.0/000673/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS PKBM ANAMBAS CERDAS DESA ARUNG HIJAU KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	6.105.000,00
140	21.05/03.0/000674/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD DOA IBU REKAM KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	47.502.450,00
141	21.05/03.0/000675/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UKS BESERTA PERABOTNYA TK NEGERI 1 SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	23.633.010,00
142	21.05/03.0/000676/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEKERJAAN KANOPI TK NEGERI 1 JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	23.258.940,00
143	21.05/03.0/000677/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN HALAMAN ATAP KANOPI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	19.997.760,00
144	21.05/03.0/000678/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN ATAP TEMPAT BERMAIN ANAK PAUD KASIH IBU KELURAHAN LETUNG KECAMATAN JEMAJA (DAU SG 2024)	22.377.600,00
145	21.05/03.0/000679/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING DAN SEMENISASI HALAMAN PAUD KASIH IBU DESA TELUK SIANTAN KECAMATAN SIANTAN TENGAH (DAU SG 2024)	22.044.600,00
146	21.05/03.0/000680/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN KECAMATAN KUTE SIANTAN (DAU SG 2024)	22.050.150,00
147	21.05/03.0/000681/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	41.906.140,00
148	21.05/03.0/000682/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	42.477.657,00
149	21.05/03.0/000683/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	93.763.920,00
150	21.05/03.0/000684/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	36.810.530,00
151	21.05/03.0/000685/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 JEMAJA (DAK 2024)	38.779.404,00
152	21.05/03.0/000686/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LEMBAH REWAK KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	45.493.447,00
153	21.05/03.0/000687/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM (IPA) BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 AIR ASUK KEC. SIANTAN TENGAH (DAK 2024)	65.563.881,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
154	21.05/03.0/000688/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LEMBAH REWAK KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	37.047.804,00
155	21.05/03.0/000689/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SDN 007 ETANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAK 2024)	48.516.768,00
156	21.05/03.0/000690/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 004 GENTING PULUR KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	34.010.400,00
157	21.05/03.0/000691/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 002 ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	34.010.400,00
158	21.05/03.0/000692/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN REHABILITASI RUANG UKS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SDN 002 ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAK 2024)	24.046.507,00
159	21.05/03.0/000693/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	34.010.400,00
160	21.05/03.0/000694/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	18.921.733,00
161	21.05/03.0/000695/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	41.723.479,00
162	21.05/03.0/000696/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 JEMAJA (DAK 2024)	53.951.239,00
163	21.05/03.0/000697/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 PIABUNG KECAMATAN PALMATAK (DAK 2024)	38.335.404,00
164	21.05/03.0/000698/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN REHABILITASI TOILET (JAMBA) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA SANITASINYA SDN 008 AIR BIRU KECAMATAN JEMAJA (DAK 2024)	17.279.814,00
165	21.05/03.0/000699/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEMASANGAN BATU MIRING LAPANGAN SERBA GUNA DESA PIASAN KEC. SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	197.894.768,00
166	21.05/03.0/000700/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY AIR NANGAK KEC. SIANTAN TENGAH (DAU SG 2024)	22.723.920,00
167	21.05/03.0/000701/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENIMBUNAN LAPANGAN VOLY RT 7 RW 4 DUSUN 2 DESA BAYAT KEC. SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	22.693.950,00
168	21.05/03.0/000702/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN PAGAR LAPANGAN BOLA KAKI DESA TEMBURUN KEC. SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	23.786.190,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
169	21.05/03.0/000703/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH BESERTA PERABOTNYA TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	45.301.639,00
170	21.05/03.0/000704/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN BATU MIRING LAPANGAN BOLA KAKI DESA BAYAT KEC. SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	22.693.950,00
171	21.05/03.0/000705/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN RENOVASI LAPANGAN VOLY DESA LADAN (DAU SG 2024)	22.747.230,00
172	21.05/03.0/000706/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIT LAPANGAN BOLA KAKI DESA TEBANG (DAU SG 2024)	22.747.230,00
173	21.05/03.0/000707/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN BATU MIRING LAPANGAN SERBA GUNA DESA PIASAN KEC. SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	22.861.560,00
174	21.05/03.0/000708/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SEMENISASI DAN PAGAR LAPANGAN OLAHRAGA SELAMBAK KEC. SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	23.785.080,00
175	21.05/03.0/000709/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN PAGAR LAPANGAN VOLY DESA SERAT KEC. SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	24.423.330,00
176	21.05/03.0/000710/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN PAGAR LAPANGAN BOLA KAKI LAMA DESA TAREMPA SELATAN KEC. SIANTAN (DAU SG 2024)	20.663.760,00
177	21.05/03.0/000711/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN PAGAR LAPANGAN VOLY RADEN SALEH KELURAHAN TAREMPA (DAU SG 2024)	20.657.100,00
178	21.05/03.0/000712/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN PAGAR DAN TRIBUN LAPANGAN BOLA KAKI DESA TIANGAU KEC. SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	20.663.760,00
179	21.05/03.0/000713/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGADAAN BAJU SEPAK BOLA SE KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS (DAU SG 2024)	74.925.000,00
180	21.05/03.0/000714/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUANG KELAS SDN 008 DUSUN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	197.401.122,00
181	21.05/03.0/000715/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 008 DUSUN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	20.854.125,00
182	21.05/03.0/000716/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN LINGAI KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	138.543.916,00
183	21.05/03.0/000717/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN LINGAI KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.481.050,00
184	21.05/03.0/000718/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 004 JEMAJA KECAMATAN JEMAJA (DAU SG 2024)	197.111.294,00
185	21.05/03.0/000719/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 004 JEMAJA KECAMATAN JEMAJA (DAU SG 2024)	23.257.830,00
186	21.05/03.0/000720/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUANG KELAS SDN 010 DUSUN LUAP KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	198.153.139,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
187	21.05/03.0/000721/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 010 DUSUN LUAP KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	23.853.900,00
188	21.05/03.0/000722/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTIN SMPN 2 SIANTAN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	20.907.960,00
189	21.05/03.0/000723/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING DAN SEMENISASI HALAMAN SMPN 5 ARUNG HIJAU KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.573.180,00
190	21.05/03.0/000724/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SDN 008 DUSUN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	17.633.793,00
191	21.05/03.0/000725/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 007 BELIBAK KECAMATAN PALMATAK (DAU SG 2024)	22.866.000,00
192	21.05/03.0/000726/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SMP SATAP 6 LINGAI LENGKE KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.554.310,00
193	21.05/03.0/000727/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 SIANTAN TIMUR KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAU SG 2024)	23.898.300,00
194	21.05/03.0/000728/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 005 LEMBAH REWAK KECAMATAN JEMAJA (DAU SG 2024)	23.171.250,00
195	21.05/03.0/000729/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SDN 002 AIR NANGAK KECAMATAN SIANTAN TENGAH (DAU SG 2024)	22.889.310,00
196	21.05/03.0/000730/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET/WC SMPN 2 SIANTAN KECAMATAN SIANTAN (DAU SG 2024)	20.879.433,00
197	21.05/03.0/000731/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 003 BUKIT PADI KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	197.944.912,00
198	21.05/03.0/000732/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 003 BUKIT PADI KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	23.220.645,00
199	21.05/03.0/000734/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 001 KUALA MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	23.437.650,00
200	21.05/03.0/000735/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% PEMBANGUNAN BATU MIRING SMPN 1 PALMATAK KECAMATAN PALMATAK (DAU SG 2024)	138.778.981,00
201	21.05/03.0/000736/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SMPN 1 PALMATAK KECAMATAN PALMATAK (DAU SG 2024)	23.076.900,00
202	21.05/03.0/000737/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 003 SUNGGAK KECAMATAN JEMAJA BARAT (DAU SG 2024)	139.078.513,00
203	21.05/03.0/000738/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 003 SUNGGAK KECAMATAN JEMAJA BARAT (DAU SG 2024)	24.100.320,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
204	21.05/03.0/000739/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 004 GENTING KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	123.260.942,00
205	21.05/03.0/000740/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 004 GENTING KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.478.830,00
206	21.05/03.0/000741/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN TELAGA KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	138.706.563,00
207	21.05/03.0/000742/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN TELAGA KECAMATAN SIANTAN SELATAN (DAU SG 2024)	24.425.550,00
208	21.05/03.0/000743/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 006 TEBANG KECAMATAN PALMATAK (DAU SG 2024)	138.634.677,00
209	21.05/03.0/000744/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RUMAH DINAS SDN 006 TEBANG KECAMATAN PALMATAK (DAU SG 2024)	22.820.490,00
210	21.05/03.0/000745/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 003 BAYAT KECAMATAN SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	138.731.954,00
211	21.05/03.0/000746/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 003 BAYAT KECAMATAN SIANTAN UTARA (DAU SG 2024)	22.798.290,00
212	21.05/03.0/000747/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.466.000,00
213	21.05/03.0/000748/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.516.000,00
214	21.05/03.0/000749/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTU KEGIATAN KANTOR -PERABOT KANTOR KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.500.500,00
215	21.05/03.0/000750/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT LISTRIK KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.900.000,00
216	21.05/03.0/000751/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT LISTRIK KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.900.000,00
217	21.05/03.0/000752/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.880.000,00
218	21.05/03.0/000753/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTU KEGIATAN KANTOR - PERABOT KANTOR KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	16.240.000,00
219	21.05/03.0/000754/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINIMAN RAPAT 01.38 (DAU SG 2024)	880.000,00
220	21.05/03.0/000755/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 01.39 (DAU SG 2024)	690.000,00
221	21.05/03.0/000756/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU 02.39 (DAU SG 2024)	840.000,00
222	21.05/03.0/000757/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU 02.40 (DAU SG 2024)	4.000.000,00
223	21.05/03.0/000758/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 02.39 (DAU SG 2024)	690.000,00
224	21.05/03.0/000759/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN 02.39 (DAU SG 2024)	5.940.000,00
225	21.05/03.0/000760/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.880.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
226	21.05/03.0/000761/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT (BELANJA KURSI TAMU) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12.500.000,00
227	21.05/03.0/000762/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TANGKI AIR KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.836.000,00
228	21.05/03.0/000763/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH-PAKAIAN BAJU KURUNG MELAYU KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.150.000,00
229	21.05/03.0/000764/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 001 AIR NANGAK KECAMATAN SIANTAN TENGAH	18.161.368,00
230	21.05/03.0/000765/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB LABORATORIUM BESERTA PERABOTNYA SMPN 001 AIR NANGAK KECAMATAN SIANTAN TENGAH	18.161.368,00
231	21.05/03.0/000766/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN UKS BESERTA PERABOTNYA SMPN 004 DUSUN KECAMATAN SIANTAN	31.471.314,00
232	21.05/03.0/000767/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 001 AIR NANGAK KECAMATAN SIANTAN TENGAH	32.781.114,00
233	21.05/03.0/000768/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 002 BAYAT KECAMATAN SIANTAN UTARA	94.072.793,00
234	21.05/03.0/000769/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 06 LINGAI KECAMATAN SIANTAN SELATAN	35.776.632,00
235	21.05/03.0/000770/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA PERENCANAAN RUANG ADMINISTRASI BESERTA PERABOTNYA SMPN 004 DUSUN KECAMATAN SIANTAN	70.075.916,00
236	21.05/03.0/000771/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 004 DUSUN KECAMATAN SIANTAN	28.271.034,00
237	21.05/03.0/000772/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET BESERTA SANITASINYA SMPN 006 LINGAI KECAMATAN SIANTAN SELATAN	19.591.020,00
238	21.05/03.0/000773/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET BESERTA SANITASINYA SMPN 001 AIR NANGAK KECAMATAN SIANTAN TENGAH	18.161.368,00
239	21.05/03.0/000774/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM BESERTA PERABOTNYA SDN 009 NOKOK KECAMATAN SIANTAN TIMUR	79.635.600,00
240	21.05/03.0/000775/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER (DAU SG 2024)	3.915.500,00
241	21.05/03.0/000776/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (DAU SG 2024)	1.548.000,00
242	21.05/03.0/000777/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (DAU SG 2024)	1.960.000,00
243	21.05/03.0/000778/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER (DAU SG 2024)	3.166.500,00
244	21.05/03.0/000779/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN ADMINISTRASI UMU PERANGKAT DAERAH	16.620.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
245	21.05/03.0/000780/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR , PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN.	10.980.000,00
246	21.05/03.0/000781/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM STAF ADMINISTRASI KEGIATAN BULAN JANUARI-DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	89.800.000,00
247	21.05/03.0/000782/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	20.004.944,00
248	21.05/03.0/000782/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	122.270.000,00
249	21.05/03.0/000782/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	2.820.334.000,00
250	21.05/03.0/000782/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SD SMP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BULAN DESEMBER 2024	266.882.357,00
251	21.05/03.0/000783/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMINJ 100% REHABILITASI RUANG KELAS SDN 001 KUALA MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR (DAU SG 2024)	138.928.042,00
JUMLAH			22.767.205.129,00

Tabel 197

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000738/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN NOVEMBER 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.021.689.426
2	21.05/03.0/000739/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN DESEMBER 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.032.594.353
3	21.05/03.0/000741/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN NOVEMBER 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	387.041.157
4	21.05/03.0/000742/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA GAJI PTT BULAN DESEMBER 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.200.336.281
5	21.05/03.0/000745/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN DESEMBER 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	385.808.650
6	21.05/03.0/000746/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER TAHUN 2024	568.315.000
8	21.05/03.0/000749/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2.700.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
9	21.05/03.0/000750/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN LAPTOP DAN PC (PERSONAL COMPUTER)	5.400.000
10	21.05/03.0/000752/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MATERAI PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.559.000
11	21.05/03.0/000753/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA INSENTIF TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BULAN DESEMBER 2024	390.000.000
12	21.05/03.0/000754/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA PADA PEKERJAAN BELANJA MAKAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.500.000
13	21.05/03.0/000755/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PEMBANTU PEMBINA KB DESA/KELURAHAN (PPKBD) AGUSTUS-DESEMBER 2024	80.500.000
14	21.05/03.0/000756/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM SUB PEMBANTU PEMBINA KB DEDA/KELURAHAN (SUB PPKBD) BULAN AGUSTUS-OKTOBER	78.000.000
15	21.05/03.0/000757/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA PERTALITE (DIDALAM WILAYAH ANAMBAS) BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER RSUD TAREMPA	5.855.000
16	21.05/03.0/000758/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT RSUD TAREMPA	2.277.000
17	21.05/03.0/000759/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA SURVEY AKREDITASI DI PUSKESMAS JEMAJA BARAT	21.600.000
18	21.05/03.0/000761/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	13.800.000
19	21.05/03.0/000762/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MOERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (PELATIHAN ENUMERATOR EHRA) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	4.800.000
20	21.05/03.0/000763/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA KURSUS SINGKAT PELATIHAN HONORARIUM SURVEIOR KEGIATAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS SIANTAN UTARA	16.200.000
21	21.05/03.0/000764/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK DOKUMEN EHRA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	6.840.000
22	21.05/03.0/000766/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA VALIDASI PENYUSUNAN DOKUMEN DATA EHRA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	2.750.000
23	21.05/03.0/000767/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS RSUD JEMAJA BULAN OKTOBER 2024	25.216.000
24	21.05/03.0/000768/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	43.770.000
25	21.05/03.0/000769/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN	28.860.000
26	21.05/03.0/000770/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	32.965.000
27	21.05/03.0/000771/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA PADA PEKERJAAN BELANJA PRINTER PUSKESMAS KUTE SIANTAN	9.000.000
28	21.05/03.0/000772/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	7.818.000
29	21.05/03.0/000773/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA MATERAI	22.000.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
30	21.05/03.0/000774/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA FOTOCOPY	32.970.000
31	21.05/03.0/000775/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (PETUGAS RUJUKAN PASIEN DAN AKOMODASI TRANSPORTASI PASIEN) SUB KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	175.794.344
32	21.05/03.0/000776/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (PETUGAS RUJUKAN PASIEN) SUB KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.603.000
33	21.05/03.0/000778/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	14.953.500
34	21.05/03.0/000780/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS (BELANJA MATERAI)	1.430.000
35	21.05/03.0/000781/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK (JILID DAN FOTOCOPY)	8.459.000
36	21.05/03.0/000783/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PAKET/PENGIRIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JEMAJA BULAN NOVEMBER 2024	5.000.000
37	21.05/03.0/000786/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS BULAN DESEMBER 2024	847.000
38	21.05/03.0/000790/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JEMAJA BULAN DESEMBER 2024	65.464.400
39	21.05/03.0/000792/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK KONSULTASI PENGUATAN PERENCANAAN PEMENUHAN SPA RUMAH SAKIT PADA TANGGAL 21 S/D 25 JUNI 2024 DI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG	3.643.200
40	21.05/03.0/000793/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA DUA PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.205.000
41	21.05/03.0/000794/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	40.850.000
42	21.05/03.0/000795/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	75.491.500
43	21.05/03.0/000796/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100%PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	9.355.080
44	21.05/03.0/000797/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	14.124.750
45	21.05/03.0/000798/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	21.367.500
46	21.05/03.0/000799/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT-LAINNYA BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (DAU SG)	73.573.000
47	21.05/03.0/000800/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	206.620.000
48	21.05/03.0/000801/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	11.000.000
49	21.05/03.0/000804/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	11.616.000
50	21.05/03.0/000805/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARANM TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	101.401.310
51	21.05/03.0/000806/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	259.937.100

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
52	21.05/03.0/000808/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	56.509.000
53	21.05/03.0/000809/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	200.740.000
54	21.05/03.0/000810/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	1.718.160
55	21.05/03.0/000811/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	232.200.000
56	21.05/03.0/000812/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	19.945.000
57	21.05/03.0/000813/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	209.975.000
58	21.05/03.0/000814/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	18.181.484
59	21.05/03.0/000815/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) TELUK SUNTING PADA KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (DAU SG)	338.456.181
60	21.05/03.0/000816/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	17.982.000
61	21.05/03.0/000817/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	47.768.000
62	21.05/03.0/000818/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	20.700.000
63	21.05/03.0/000819/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	55.065.400
64	21.05/03.0/000820/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PADA PEKERJAAN BELANJA PEMBANGUNAN BATU MIRING PUSKESMAS PEMBANTU TELUK SUNTING (DAU SG)	198.349.000
65	21.05/03.0/000822/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	6.493.500
66	21.05/03.0/000823/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTASI PERENCANAAN DED PEMBANGUNAN POS KESEHATAN DUSUN PALAH (DAU SG)	25.158.150
68	21.05/03.0/000825/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT LAINNYA BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (DAU SG)	9.367.500
69	21.05/03.0/000826/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	747.000
70	21.05/03.0/000827/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	52.197.750
71	21.05/03.0/000828/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	15.000.000
72	21.05/03.0/000830/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	35.563.460

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
73	21.05/03.0/000831/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	489.454.020
75	21.05/03.0/000833/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	14.400.000
76	21.05/03.0/000834/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	19.148.000
77	21.05/03.0/000835/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK CAIR (DAU SG)	6.439.500
78	21.05/03.0/000836/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	34.051.700
79	21.05/03.0/000837/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	14.630.000
80	21.05/03.0/000838/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	70.000.000
81	21.05/03.0/000839/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	199.649.500
82	21.05/03.0/000840/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT LAINNYA BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (APBD) TAHUN 2024 (DAU SG)	93.241.825
83	21.05/03.0/000842/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT-OBATAN LAINNYA BELANJA BAHAN REAGENSIA DAN LABORATORIUM (APBD) TAHUN 2024 (DAU SG)	41.898.060
84	21.05/03.0/000843/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	6.741.000
85	21.05/03.0/000844/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT ANGGARAN APBD TAHUN 2024 (DAU SG)	16.159.500
86	21.05/03.0/000845/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	117.290.000
87	21.05/03.0/000846/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	16.488.000
88	21.05/03.0/000847/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT ANGGARAN APBD TAHUN 2024 (DAU SG)	11.488.500
89	21.05/03.0/000848/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (APBD) (DAU SG)	149.030.000
90	21.05/03.0/000849/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT ANGGARAN APBD TAHUN 2024 (DAU SG)	23.778.600
91	21.05/03.0/000850/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	7.480.000
92	21.05/03.0/000851/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	4.615.450
93	21.05/03.0/000852/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	78.100.200
94	21.05/03.0/000853/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	203.841.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
95	21.05/03.0/000854/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	345.539.800
96	21.05/03.0/000855/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAB-OBAT-OBATAN LAINNYA BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (DAU SG)	349.249.120
97	21.05/03.0/000856/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	31.948.000
98	21.05/03.0/000857/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	9.400.000
99	21.05/03.0/000858/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	9.378.800
100	21.05/03.0/000859/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	9.373.800
101	21.05/03.0/000860/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	28.480.000
102	21.05/03.0/000861/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT- OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	17.833.200
103	21.05/03.0/000862/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT-OBATAN LAINNYA BELANJA BAHAN REAGENSIA DAN LABORATORIUM (DAU SG)	16.711.050
104	21.05/03.0/000863/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	5.535.000
105	21.05/03.0/000864/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	8.491.500
106	21.05/03.0/000865/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT- OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	8.090.000
107	21.05/03.0/000869/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	16.082.000
108	21.05/03.0/000870/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT- OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	11.442.000
109	21.05/03.0/000872/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	17.690.000
110	21.05/03.0/000873/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT PADAT (DAU SG)	14.604.950
111	21.05/03.0/000874/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA OBAT- OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	163.728.300
112	21.05/03.0/000875/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT LAINNYA BELANJA BAHAN REAGENSIA DAN LABORATORIUM (DAU SG)	781.286.324
113	21.05/03.0/000876/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA KONSULTASI DAN SOSIALISASI TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS DI PUSKESMAS SIE LANGKAI BATAM	10.014.748
114	21.05/03.0/000877/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT	31.413.000
115	21.05/03.0/000878/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN LAINNYA ALAT KESEHATAN LABORATORIUM KLINIK	87.700.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
116	21.05/03.0/000879/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASABELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BENDA POS	7.700.000
117	21.05/03.0/000880/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (DAU SG)	10.855.500
118	21.05/03.0/000881/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG - PENGIRIMAN PERSEDIAAN BAHAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI (DAU SG)	23.575.000
119	21.05/03.0/000882/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN (DAU SG)	146.101.530
120	21.05/03.0/000883/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA PADA PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERIZINAN AUTOCLAVE RSUD TAREMPA	82.695.000
121	21.05/03.0/000884/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA PADA PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERIZINAN AUTOCLAVE RSUD PALMATAK	82.695.000
122	21.05/03.0/000885/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN-ALAT KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	62.604.000
123	21.05/03.0/000886/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	29.415.000
124	21.05/03.0/000887/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN-ALAT KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	49.506.000
125	21.05/03.0/000888/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN RUMAH MESIN GASMEDIK RSUD	49.605.900
126	21.05/03.0/000889/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU BATU AMPAR	58.136.250
127	21.05/03.0/000890/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN PUEKESMAS PEMBANTU BATU BERAPIT	58.084.080
128	21.05/03.0/000892/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) REVITALISASI INSTALASI FARMASI RSUD TAREMPA	43.406.550
129	21.05/03.0/000893/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMASANGAN PAVING BLOK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	23.032.500
130	21.05/03.0/000894/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KASUR PASIEN KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.450.000
131	21.05/03.0/000895/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PADA PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) TELUK SUNTING	78.465.900
132	21.05/03.0/000896/LS/1.02.2.14. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA TEMPAT TIDUR PASIEN,	95.000.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP	
133	21.05/03.0/000897/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN OEMBANGUNAN RUMAH DINAS PUSKESMAS SIANTAN UTARA	59.151.900
134	21.05/03.0/000898/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PUSKESMAS KUTE SIANTAN	59.151.900
135	21.05/03.0/000899/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN RUANG OPERASI RSUD JEMAJA	73.482.000
136	21.05/03.0/000900/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH DI RSUD PALMATAK	25.296.900
137	21.05/03.0/000901/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTANSI PERENCANAAN DED PEMBANGUNAN INCENERATOR RSUD JEMAJA	23.088.000
138	21.05/03.0/000902/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU AIR BIRU	25.964.010
139	21.05/03.0/000906/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Jemaja barat	62.082.300
140	21.05/03.0/000908/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BATU MIRING PUSKESMAS PEMBANTU TELUK SUNTING	25.224.750
141	21.05/03.0/000909/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN NOVEMBER 2024	2.500.000
142	21.05/03.0/000910/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANAJ MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERNAGKAT DAERAH	13.600.000
143	21.05/03.0/000912/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK SEMI PADAT (DAU SG)	7.900.000
144	21.05/03.0/000913/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN DED PEMBANGUNAN TPS LIMBAH PADAT RSUD TAREMPA	22.510.800
145	21.05/03.0/000914/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-CETAK SPANDUK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	1.653.000
146	21.05/03.0/000915/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS HVS SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	3.654.000
147	21.05/03.0/000917/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	11.500.000
148	21.05/03.0/000918/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR	73.341.400
149	21.05/03.0/000919/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR (DAU SG)	32.013.550
150	21.05/03.0/000920/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL DAN PEKERJAAN BELANJA PENGHANCUR KERTAS,	6.676.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
151	21.05/03.0/000923/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KAGIATAN ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH TANGGAL 16 S/D 18 DESEMBER 2024	4.620.000
152	21.05/03.0/000924/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN RUANG IPSRS RSUD TAREMPA	74.053.650
153	21.05/03.0/000925/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DI RSUD TAREMPA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU MULAI TANGGAL 30 NOVEMBER S/D 30 JANUARI 2025 SEBAGAI SENIOR RESIDEN PPDS PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH	3.761.300
154	21.05/03.0/000927/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK PADAT (DAU SG)	9.890.000
155	21.05/03.0/000928/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK CAIR (DAU SG)	4.635.000
156	21.05/03.0/000929/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100 % BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA	129.160.000
157	21.05/03.0/000931/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN RAWAT JALAN RSUD PALMATAK (DAK FISIK KESEHATAN)	364.054.800
158	21.05/03.0/000932/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN REVITALISASI BANGUNAN RAWAT JALAN RSUD PALMATAK (DAK FISIK KESEHATAN)	96.608.850
159	21.05/03.0/000933/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PADA PEKERJAAN BELANJA KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS KUTE SIANTAN (DAU SG)	301.320.600
161	21.05/03.0/000935/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TERMIN 100% PEKERJAAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT PENGADAAN OBAT SPESIALISTIK OBAT CAIR	920.000
162	21.05/03.0/000935/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan)	1.269.082.595
JUMLAH			19.467.159.098,00

Tabel 198

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000263/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Penanganan Long Segment Jalan Impol - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAK)	2.067.931.523,00
2	21.05/03.0/000267/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran gaji PTT bulan Desember 2024	229.158.603,00
3	21.05/03.0/000268/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas bulan Desember 2024	15.400.000,00
4	21.05/03.0/000271/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS bulan November 2024	331.274.036,00
5	21.05/03.0/000272/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK bulan November 2024	16.224.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
6	21.05/03.0/000273/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2024	331.274.036,00
7	21.05/03.0/000274/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK bulan Desember 2024	16.224.000,00
8	21.05/03.0/000275/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Teluk Kaut- semuak-Atap Kec. Jemaja (DAU SG)	441.055.566,00
9	21.05/03.0/000276/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Pembuangan Sampah RT. 03 RW. 02 Desa Piabung Kecamatan Palmatak (DAU SG)	197.591.587,00
10	21.05/03.0/000277/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Masuk Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG)	48.581.506,00
11	21.05/03.0/000278/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan Agustus 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.154.000,00
12	21.05/03.0/000279/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan September 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.154.000,00
13	21.05/03.0/000280/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan Oktober 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.154.000,00
14	21.05/03.0/000281/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.674.000,00
15	21.05/03.0/000282/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.674.000,00
16	21.05/03.0/000283/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) (DAU SG)	539.997.485,00
17	21.05/03.0/000284/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni a.n. MARIYAM pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024	100.000.000,00
18	21.05/03.0/000285/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni a.n. ADAM pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024	100.000.000,00
19	21.05/03.0/000286/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (DAU SG)	49.877.850,00
20	21.05/03.0/000287/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Menuju Rumah Khusus (DAU SG)	87.688.890,00
21	21.05/03.0/000288/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Bunga Tanjung RT. 05 RW. 03 Dusun II Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur (DAU SG)	198.666.229,00
22	21.05/03.0/000289/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Profesi Ahli Kegiatan a.n RIKO HERRIYANTO,ST, dkk bulan Juni-Desember 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF	18.200.000,00
23	21.05/03.0/000290/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan a.n SYARIF AHMAD, SE., M.Si, dkk bulan Juni-Desember 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF	36.750.000,00
24	21.05/03.0/000291/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung - Air Tang Kecamatan Siantan Timur (DAU SG)	103.163.400,00
25	21.05/03.0/000292/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bulan Agustus dan September Tahun 2024 (DAU SG) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	10.400.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
26	21.05/03.0/000293/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut - Semuak - Atap Kec. Jemaja (DAU SG)	154.163.194,00
27	21.05/03.0/000294/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staf Pendukung Administrasi Kegiatan dari Bulan Juni 2024 s/d Desember 2024 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000,00
28	21.05/03.0/000295/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staf Pendukung Administrasi Kegiatan dari Bulan Juni 2024 s/d Desember 2024 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.200.000,00
29	21.05/03.0/000297/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 45,29% Pengawasan Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG)	112.409.140,00
30	21.05/03.0/000298/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Jalan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas	55.186.980,00
31	21.05/03.0/000299/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.413.837,00
32	21.05/03.0/000301/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Ruang Studio DPUPRPRKP Kepulauan Anambas	29.542.650,00
33	21.05/03.0/000302/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Bunga Tanjung RT. 05 RW. 03 Dusun II Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur dan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Pembuangan Sampah RT. 03 RW. 02 Desa Piabung Kecamatan Palmatak (DAU SG)	46.797.795,00
34	21.05/03.0/000304/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG)	150.781.000,00
35	21.05/03.0/000306/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Daftar Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Kolam Retensi Sudi Mampir (DAU SG)	83.646.825,00
36	21.05/03.0/000307/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pemeliharaan Drainase Kecamatan Siantan (DAU SG)	25.129.290,00
37	21.05/03.0/000308/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG)	48.925.727,00
38	21.05/03.0/000309/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan (DAU SG)	206.191.784,00
39	21.05/03.0/000310/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% DED jalan menuju pelabuhan teluk durian, DED jalan menuju puskesmas kute siantan dan jalan menuju rumah medis Jemaja barat	99.272.850,00
40	21.05/03.0/000312/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Dusun Batu Nyodong - Desa Batu Ampar	198.814.814,00
41	21.05/03.0/000313/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Semenisasi Jalan lingkaran Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan	73.567.095,00
42	21.05/03.0/000314/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Semenisasi Jalan lingkaran Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan	24.741.900,00
43	21.05/03.0/000316/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Inventarisasi dan Indetifikasi Layanan SPAM dan SPALD SeKabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG)	180.652.500,00
44	21.05/03.0/000318/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura Nomor Pesanan PO-174415081124-002 Tanggal 8	7.992.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
45	21.05/03.0/000320/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Operasional Belanja PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (SWAKELOLA) bulan Agustus - Oktober Tahun 2024 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.213.000,00
46	21.05/03.0/000321/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Masjid Desa Mampok Kecamatan Jemaja (DAU SG)	99.409.380,00
47	21.05/03.0/000322/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staff Administrasi Kegiatan a.n MUH. FAHMI HUSAIN, SE dkk Bulan Juli - Desember Tahun 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	7.200.000,00
48	21.05/03.0/000323/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staff Administrasi Kegiatan a.n MUH. FAHMI HUSAIN, SE dkk Bulan Juli - Desember Tahun 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	7.200.000,00
49	21.05/03.0/000324/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Printer Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.600.000,00
50	21.05/03.0/000326/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover berdasarkan SP no. PO-174415-081124-001 Tanggal 6 November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.888.000,00
51	21.05/03.0/000327/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor berdasarkan SP no. PO-174415-121124-009 Tanggal 12 November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.360.619,00
52	21.05/03.0/000328/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Kimia berdasarkan SP no. PO-174415-131124-004 Tanggal 13 November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.923.850,00
53	21.05/03.0/000330/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. MHD. TAIMI, ST Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	29.881.100,00
54	21.05/03.0/000331/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. AMIRUDDIN, S.I.P. Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	11.850.000,00
55	21.05/03.0/000332/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor berdasarkan SP no. 05/SP.BELANJAPERABOTKANTOR-PPPK/DPUPRPRKP/07.2024 Tanggal 8 Juli 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.980.000,00
56	21.05/03.0/000334/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Kimia berdasarkan SP no. 03/SP.BELANJABKIMIAKANTOR-PPPK/DPUPRPRKP/06.2024 Tanggal 8 Juli 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.420.000,00
57	21.05/03.0/000335/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor berdasarkan SP no. 05/SP/ATK-DPUPRPRKP/06.2024 Tanggal 10 Juni 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.323.000,00
58	21.05/03.0/000336/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. FITRIANI, SE Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	58.568.612,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
59	21.05/03.0/000337/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. PRAYOGI WIBOWO, SH, Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.440.000,00
60	21.05/03.0/000338/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. ISPANTY ANGGRIANY, ST Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	3.135.000,00
61	21.05/03.0/000339/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. WILDAN HALIM, S.Tr.T Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	16.834.000,00
62	21.05/03.0/000341/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. MIRWAN, S.Ars Dkk Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	5.823.473,00
63	21.05/03.0/000342/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. ARDELIANA, S.Si Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	3.300.000,00
64	21.05/03.0/000343/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Upah Tenaga Pekerja PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (SWAKELOLA) bulan Agustus - Oktober Tahun 2024 a.n ATIM SUPRIATIN, dkk	41.231.100,00
65	21.05/03.0/000344/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan (DAU SG)	40.065.450,00
66	21.05/03.0/000345/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. MUHAMMAD ISKANDAR Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.820.000,00
67	21.05/03.0/000346/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n DIDI SAPUTRA. K, S.T Dkk Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.500.000,00
68	21.05/03.0/000347/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. MICHO. ZP, S.T. Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16.159.302,00
69	21.05/03.0/000348/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. MICHO. ZP, S.T. Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	14.640.000,00
70	21.05/03.0/000349/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Masjid Al - Fajri Desa Temburun Kecamatan Siantan Timur (DAU SG)	198.225.992,00
71	21.05/03.0/000350/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN MASJID PASIRAN JEMAJA TIMUR (DAU SG)	59.645.850,00
72	21.05/03.0/000352/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DI KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAU SG)	29.851.230,00
73	21.05/03.0/000353/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. ZULFAHRI EFFENDY, ST Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	3.220.000,00
74	21.05/03.0/000354/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. MUHAMMAD EFENDI, ST.M.Eng Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	10.200.000,00
75	21.05/03.0/000355/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. ZULFAHRI EFFENDY, ST Dkk Tahun Anggaran	5.790.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		2024 Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
76	21.05/03.0/000356/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG)	1.559.490.585,00
77	21.05/03.0/000357/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n M. Hadler Rolin, S.T Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	13.495.800,00
78	21.05/03.0/000358/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas bulan Juli-September berdasarkan SP no. 07.SP.BELANJABBMDANPELUMAS-PPPK/DPUPRPRKP/06.2024 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.315.000,00
79	21.05/03.0/000359/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n JULIANA, S.T Dkk Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	9.280.000,00
80	21.05/03.0/000360/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Ressania, S.Si Dkk Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	9.280.000,00
81	21.05/03.0/000361/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DI KECAMATAN SIANTAN (DAU SG)	63.547.500,00
82	21.05/03.0/000362/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Agung Baitul Makmur Kepulauan Anambas (DAU SG)	119.242.041,00
83	21.05/03.0/000363/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Prasasti dan Plang Asmaul Husna di Masjid Agung (DAU SG)	151.035.213,00
84	21.05/03.0/000364/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PEMBANGUNAN MASJID PASIRAN JEMAJA TIMUR (DAU SG)	422.453.560,00
85	21.05/03.0/000365/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat berdasarkan SP no. 05/SP.BELANJAMAKANANDANMINUMANRAPAT-PPPK/DPUPRPRKP/06.2024 Tanggal 03 Juni 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8.970.000,00
86	21.05/03.0/000366/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat berdasarkan SP no. 06/SP.BELANJAMAKANANDANMINUMANRAPAT-PPPK/DPUPRPRKP/07.2024 Tanggal 15 Juli 2024 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung	8.970.000,00
87	21.05/03.0/000367/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat berdasarkan SP no. 07/SP.BELANJAMAKANANDANMINUMANRAPAT-PPPK/DPUPRPRKP/08.2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	7.590.000,00
88	21.05/03.0/000368/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat berdasarkan SP no. 14/SP.BELANJAMAKANANDANMINUMANRAPAT-PPPK/DPUPRPRKP/09.2024 Tanggal 10 September 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.340.000,00
89	21.05/03.0/000369/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua berdasarkan SP no. 06/SP.BIAYAPEMELIHARAAN/DPUPRPRKP/12.2024 Tanggal 20 Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	3.738.000,00
90	21.05/03.0/000371/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur (DAU SG)	611.834.052,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
91	21.05/03.0/000372/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA (DAU SG)	297.861.840,00
92	21.05/03.0/000373/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% PENGAWASAN PEMBANGUNAN MASJID DESA TELAGA BESAR TELUK KLIMPAN (DAU SG)	75.174.750,00
93	21.05/03.0/000374/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Penghubung Antar Desa Belibak - Desa Tebang Kecamatan Palmatak (DAU SG)	160.084.200,00
94	21.05/03.0/000378/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. MULIADI,A.Md, Dkk Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.190.000,00
95	21.05/03.0/000379/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Pengawasan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa (DAU SG)	134.448.080,00
96	21.05/03.0/000380/LS/1.03.1.04. 2.10.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Penghubung Desa Tebang - Desa Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG)	878.480.125,00
97	Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran	Pekerjaan Penanganan Long Segmen Jalan Arung Hijau - Limbung - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAK)	1.388.731.090,00
98	Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran	Pembayaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan (DAU SG)	1.558.104.876,00
JUMLAH			15.377.253.762,00

Tabel 199

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000136/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2024	158.004.914
2	21.05/03.0/000137/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November 2024	84.003.248
3	21.05/03.0/000138/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan November 2024	91.936.000
4	21.05/03.0/000139/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2024	84.003.248
5	21.05/03.0/000140/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bulan November - Desember 2024	17.720.000
6	21.05/03.0/000162/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran - Apar	31.350.000
7	21.05/03.0/000142/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bulan September-Desember T.A 2024	3.596.000
8	21.05/03.0/000143/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/13.2/SETDA.DPKP/ST/12/2024, Tanggal 13 Desember 2024 Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVI Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Banten.	7.783.700
9	21.05/03.0/000147/LS/1.05.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Tinta Printer Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2024	9.725.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
10	21.05/03.0/000148/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.805.000
11	21.05/03.0/000149/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman aktivitas Lapangan	13.795.000
12	21.05/03.0/000151/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pemabayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos - Materai	1.815.000
13	21.05/03.0/000152/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2.130.000
14	21.05/03.0/000153/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Lainnya Umbul-Umbul	8.550.000
15	21.05/03.0/000154/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alata Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.920.000
16	21.05/03.0/000155/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Baju Anti Binatang Berbisa	25.850.000
17	21.05/03.0/000156/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Senter Kepala LED	6.000.000
18	21.05/03.0/000157/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa - Alat Penangkap Reptil	12.000.000
19	21.05/03.0/000158/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000
20	21.05/03.0/000165/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.810.000
21	21.05/03.0/000166/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Fotocopy	5.500.000
22	21.05/03.0/000159/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Mebel	49.500.000
23	21.05/03.0/000161/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam kebakaran - Tangga Penyelamat	9.500.000
TOTAL			656.777.110,00

Tabel 200

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000174/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (PNS) Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	218.673.768
2	21.05/03.0/000175/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (PPPK) Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.744.000
3	21.05/03.0/000176/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (PNS) Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	218.673.768
4	21.05/03.0/000177/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (PPPK) Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.744.000
5	21.05/03.0/000201/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Gaji/Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	359.109.432
6	21.05/03.0/000178/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bulan Agustus s/d Desember (5 Bulan) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024	81.950.000
7	21.05/03.0/000180/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.212.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
8	21.05/03.0/000181/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.986.000
9	21.05/03.0/000182/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.700.082
10	21.05/03.0/000185/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	594.000
11	21.05/03.0/000186/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000
12	21.05/03.0/000190/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Angkutan-Suku Cadang Pada Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.800.000
13	21.05/03.0/000192/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	3.650.000
14	21.05/03.0/000193/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.052.000
15	21.05/03.0/000194/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.400.000
16	21.05/03.0/000195/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/26/BPBD/ST.DD.03.0003/01/2024 Pada Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000
17	21.05/03.0/000197/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/14/BPBD/ST.DD.03.0003/01/2024 Pada Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000
18	21.05/03.0/000198/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/69/BPBD/ST.DD.03.03/02/2024 Pada Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	450.000
19	21.05/03.0/000202/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000
20	21.05/03.0/000203/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000
21	21.05/03.0/000205/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/80.b/BPBD/ST.DD.03.03/02/2024 Pada Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.050.000
22	21.05/03.0/000206/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.289.902
23	21.05/03.0/000207/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.600.000
JUMLAH			Rp1.050.978.952

Tabel 201
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000090/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.402.702
2	21.05/03.0/000091/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	208.873.287
3	21.05/03.0/000092/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	208.873.287
JUMLAH			904.149.276

Tabel 202
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000141/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	38.376.014
2	21.05/03.0/000142/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	131.909.131
3	21.05/03.0/000143/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.112.000
4	21.05/03.0/000144/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	131.921.595
5	21.05/03.0/000145/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.112.000
6	21.05/03.0/000146/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	35.060.000
7	21.05/03.0/000147/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.738.000
8	21.05/03.0/000148/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BULAN NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	6.250.000
9	21.05/03.0/000149/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR RAKOR FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BULAN	4.300.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	
10	21.05/03.0/000150/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM KOORDINATOR PELATIH PASKIBRAKA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	6.000.000
11	21.05/03.0/000151/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.810.127
12	21.05/03.0/000152/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	14.900.626
13	21.05/03.0/000153/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	32.987.774
14	21.05/03.0/000154/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	8.645.000
15	21.05/03.0/000157/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	44.970.000
16	21.05/03.0/000159/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKU TRIPLEK PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	17.000.000
17	21.05/03.0/000160/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (TIANG BENDERA) PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	6.426.000
18	21.05/03.0/000161/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA AIR MINERAL PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	5.168.000
19	21.05/03.0/000162/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN FRAME PHOTO PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	4.000.000
20	21.05/03.0/000163/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	2.340.000
21	21.05/03.0/000166/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN SEMINAR KIT PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	5.280.000
22	21.05/03.0/000168/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR DAN TINTA KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.959.000
23	21.05/03.0/000169/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN PERABOT KANTOR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.481.000
24	21.05/03.0/000171/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA TATA RIAS PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	10.500.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
25	21.05/03.0/000173/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR KAOS KAKI PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	1.300.000
26	21.05/03.0/000174/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR TALI BENDERA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	1.050.000
27	21.05/03.0/000175/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN CETAK FOTOCOPY PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	317.000
28	21.05/03.0/000176/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	480.000
29	21.05/03.0/000177/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS MATERAI PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	429.000
30	21.05/03.0/000178/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	590.000
31	21.05/03.0/000179/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.000.000
32	21.05/03.0/000180/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	4.865.000
33	21.05/03.0/000181/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN 17 AGUTUS 2024 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	6.450.000
34	21.05/03.0/000182/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT & BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	6.150.000
35	21.05/03.0/000183/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA SEWA RUANG RAPAT PERTEMUAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	1.750.000
36	21.05/03.0/000184/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ST NO. 800.1.11.1/238/BAKESBANGPOL/ST/11.2024 PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.100.000
37	21.05/03.0/000185/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT & BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.120.000
38	21.05/03.0/000186/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.280.000
39	21.05/03.0/000187/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PEMBUATAN PAPAN BUNGA UCAPAN HUT TNI KE 79 TAHUN 2024	500.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
40	21.05/03.0/000188/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT DAPUR TABUNG GAS DAN REGULATOR SET PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.000.000
41	21.05/03.0/000189/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN ISI TABUNG GAS PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.170.000
42	21.05/03.0/000191/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER LAPTOP PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.600.000
43	21.05/03.0/000192/LS/1.05.8.01.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KANTOR PRINTER T400DW, PRINTER L3210, SCANNER DAN HANDY TALKY (HT) PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.100.000
JUMLAH			766.497.267

Tabel 203
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000131/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.747.581
2	21.05/03.0/000132/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran TPP ASN Bulan Nopember 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	180.378.089
3	21.05/03.0/000133/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran TPP P3K Bulan Nopember 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	2.704.000
4	21.05/03.0/000134/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	180.378.089
5	21.05/03.0/000135/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran TPP P3K Bulan Desember 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	2.704.000
6	21.05/03.0/000136/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.214.240
7	21.05/03.0/000137/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.450.000
8	21.05/03.0/000138/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.500.000
9	21.05/03.0/000139/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.800.000
10	21.05/03.0/000140/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.800.000
11	21.05/03.0/000141/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000
12	21.05/03.0/000142/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000
13	21.05/03.0/000143/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.941.188

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
14	21.05/03.0/000144/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.300.000
15	21.05/03.0/000148/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.952.000
16	21.05/03.0/000149/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.681.600
17	21.05/03.0/000150/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.655.000
18	21.05/03.0/000151/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.950.000
19	21.05/03.0/000152/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.950.000
20	21.05/03.0/000153/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.960.000
21	21.05/03.0/000154/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.250.000
22	21.05/03.0/000155/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.024.000
23	21.05/03.0/000156/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.304.000
24	21.05/03.0/000157/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.200.000
25	21.05/03.0/000158/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000
26	21.05/03.0/000159/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.936.000
27	21.05/03.0/000160/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.980.000
28	21.05/03.0/000162/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.100.000
29	21.05/03.0/000163/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.260.000
30	21.05/03.0/000164/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.950.000
31	21.05/03.0/000165/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.164.000
32	21.05/03.0/000166/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.450.000
33	21.05/03.0/000167/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.045.000
34	21.05/03.0/000168/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.040.000
35	21.05/03.0/000169/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.415.000
36	21.05/03.0/000170/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000
37	21.05/03.0/000171/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.000.000
38	21.05/03.0/000172/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Mebel	5.000.000
39	21.05/03.0/000173/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Personal Computer	51.000.000
40	21.05/03.0/000174/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.475.000
41	21.05/03.0/000175/LS/1.06.2.08.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.650.000
JUMLAH			962.908.787

Tabel 204

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000116/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Gaji PTT Bulan Desember Tahun 2024	157.346.550
2	21.05/03.0/000117/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Nopember Tahun 2024	279.125.814
3	21.05/03.0/000120/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Nopember Tahun 2024	10.816.000
4	21.05/03.0/000121/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Desember Tahun 2024	279.125.814
5	21.05/03.0/000122/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember Tahun 2024	10.816.000
6	21.05/03.0/000123/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Nopember - Desember Tahun 2024	23.136.000
7	21.05/03.0/000124/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) bagi Non ASN Bulan November dan Desember Tahun 2024	1.610.280
8	21.05/03.0/000126/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.440.000
9	21.05/03.0/000127/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.220.000
10	21.05/03.0/000128/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.990.000
11	21.05/03.0/000129/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2.790.000
12	21.05/03.0/000130/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.522.614
13	21.05/03.0/000131/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6.014.400
14	21.05/03.0/000132/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gudang Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.560.000
15	21.05/03.0/000133/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Uninterrupted Power Supply (UPS) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.967.368
16	21.05/03.0/000134/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Cetak Buku Profil Kependudukan Kabupaten Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	6.480.000
17	21.05/03.0/000135/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.960.000
18	21.05/03.0/000136/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	880.000
19	21.05/03.0/000137/LS/2.12.0.00.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.000.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
20	21.05/03.0/000138/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.625.000
21	21.05/03.0/000139/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Fotocopy dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.826.000
JUMLAH			863.251.840

Tabel 205

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/0000166/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN GAJI TIDAK TETAP PTT BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	26.898.628
2	21.05/03.0/0000167/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	85.244.249
3	21.05/03.0/0000168/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN NOVEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.331.581
4	21.05/03.0/0000169/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	72.453.011
5	21.05/03.0/0000170/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN DESEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.408.000
6	21.05/03.0/0000171/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS s/DESEMBER 2024	50.850.000
7	21.05/03.0/0000172/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENATAUSAHAAN PENGGUNA BULAN AGUSTUS s/d DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.000.000
8	21.05/03.0/0000173/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM OPERATOR APLIKASI E- DABU BULAN JULI s/d DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	2.400.000
9	21.05/03.0/0000174/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM OPERATOR APLIKASI OM- SPAM BULAN JULI s/d DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	3.600.000
10	21.05/03.0/0000176/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.500.000
11	21.05/03.0/0000177/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.050.000
12	21.05/03.0/0000178/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.467.400
13	21.05/03.0/0000179/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMABAYARAN BELAJA CETAK MAP DINAS SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
14	21.05/03.0/0000180/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMABYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.966.000
15	21.05/03.0/0000181/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMABYARAN BELANJA ALAT/ BHAN TINTA KOMPUTER SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.125.000
16	21.05/03.0/0000182/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.490.000
17	21.05/03.0/0000183/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER SUB KEGIATAN Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000
18	21.05/03.0/0000184/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL KURSI KERJA PEJABAT SUB KEGIATAN Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	20.500.000
19	21.05/03.0/0000185/LS/2.13.0.00.0.00.01/0000/PPRI/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL MEJA KERJA PEJABAT SUB KEGIATAN Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	27.290.000
JUMLAH			462.573.869

Tabel 206

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000179/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024	489.836.120,00
2	21.05/03.0/000181/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.056.244,00
3	21.05/03.0/000182/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.112.000,00
4	21.05/03.0/000183/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.056.244,00
5	21.05/03.0/000184/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.112.000,00
6	21.05/03.0/000185/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Agustus - Desember 2024	138.160.000,00
7	21.05/03.0/000186/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Juli s/d Desember 2024 a.n. VIQI VELDA,SST.Mar pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun Anggaran 2024	1.200.000,00
8	21.05/03.0/000265/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja	99.234.000,00
9	Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran	Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Berapit Kec. Jemaja	1.039.621.645,00
10	21.05/03.0/000189/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi Bulan Juli s/d Desember tahun 2024 a.n.DEPRIZAL, S.Hut, DKK pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun Anggaran 2024	3.600.000,00
11	21.05/03.0/000190/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) Tahun a.n Siti Kamila, S.S., M.Pd, Dkk Bulan Februari-Maret 2024	1.425.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
12	21.05/03.0/000191/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Agustus-Desember 2024 a.n Hidayatun Najah,ST, DKK pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024	9.000.000,00
13	21.05/03.0/000192/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Solar pada Kios BBM-Rezeki Baru bulan November dan Desember Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.800.000,00
14	21.05/03.0/000193/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang a.n Marwandi rute (Sedak-Tarempa-Sedak) bulan Januari s/d Desember 2024	30.672.000,00
15	21.05/03.0/000194/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPT Pengelolaan Sampah	1.800.000,00
16	21.05/03.0/000195/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	3.284.000,00
17	21.05/03.0/000196/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA. 2024	4.681.000,00
18	21.05/03.0/000197/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA. 2024	4.825.000,00
19	21.05/03.0/000198/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA. 2024	4.600.000,00
20	21.05/03.0/000200/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Rutinitas Perkantoran	13.895.200,00
21	21.05/03.0/000201/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Rutinitas Perkantoran	18.484.000,00
22	21.05/03.0/000203/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Peralite pada Kios BBM Al-Baaqii bulan September s/d Oktober Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.320.000,00
23	21.05/03.0/000205/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tagihan Air Bulan Januari s/d Desember kepada Fahrullazi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.380.000,00
24	21.05/03.0/000206/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk Operasional Sampah Bulan November-Desember kepada Tn. Abdullah pada Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.220.000,00
25	21.05/03.0/000207/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Truk Daihatsu (Truk Tarempa) dan Dump Truk Hino (Truk Letung) kepada Tn. Fahrullazi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.054.000,00
26	21.05/03.0/000208/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Speed Sampah di Tarempa kepada Tn. Fahrullazi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.915.000,00
27	21.05/03.0/000209/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura pada CV. Dharma Lestari Anambas Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor	2.736.000,00
28	21.05/03.0/000210/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Pick Up Sampah kepada Tn. Fahrullazi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya	3.900.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
29	21.05/03.0/000211/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Bulan Januari s/d September kepada Aris Sofyan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.780,00
30	21.05/03.0/000212/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tosa Sampah kepada Tn. Fahrullasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.765.000,00
31	21.05/03.0/000213/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.900.000,00
32	21.05/03.0/000214/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Token Listrik kepada Sdr. Yulifrizal pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.002.000,00
33	21.05/03.0/000215/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Banner Siber kepada Sdr. Nurullah pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1.000.000,00
34	21.05/03.0/000216/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kepada CV. Darma Lestari Anambas Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.701.000,00
35	21.05/03.0/000217/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kepada CV. Darma Lestari Anambas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.422.000,00
36	21.05/03.0/000218/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tinta Printer kepada CV. Darma Lestari Anambas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.945.000,00
37	21.05/03.0/000219/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Fotocopy kepada CV. Darma Lestari Anambas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000,00
38	21.05/03.0/000220/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Kertas kepada CV. Darma Lestari Anambas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.380.000,00
39	21.05/03.0/000221/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Kantor Kepada Sdr. Tuminah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.655.000,00
40	21.05/03.0/000222/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Kimia kepada CV. Darma Lestari pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	2.650.000,00
41	21.05/03.0/000223/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Cetak Kalender kepada CV. Darma Lestari pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00
42	21.05/03.0/000224/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perabot Kantor kepada CV Darma Lestari pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.917.000,00
44	21.05/03.0/000226/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Minyak Pelumas untuk Bahan Bakar dan Pelumas untuk Bulan November kepada Tn. Abdullah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.698.700,00
45	21.05/03.0/000227/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura kepada CV Darma Lestari pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.650.000,00
46	21.05/03.0/000228/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Minyak Pelumas/Oli Mesin Kapal KMP. Anambas Bermadah 7 pada Kios BBM Rezeki Baru bulan Mei s/d Agustus Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.440.000,00
47	21.05/03.0/000229/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gadung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA.2024	35.090.430,00
48	21.05/03.0/000230/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan	5.272.500,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA.2024	
49	21.05/03.0/000232/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Speed Boat Anambas 3	8.974.905,00
50	21.05/03.0/000233/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-Trandes Jemaja Timur BP 7014 S dan Double Cabin Jemaja BP 8020 S Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA.2024	16.577.850,00
51	21.05/03.0/000234/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Papan Bunga Kepada Sdr.Novita pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024	11.200.000,00
52	21.05/03.0/000235/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Benda Pos Kepada CV.Darma Lestari pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2024	4.950.000,00
53	21.05/03.0/000236/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Masih Speedd Boad BLH Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TA.2024	45.562.170,00
54	21.05/03.0/000237/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-Trandes Palmatak BP 7012 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TA.2024	18.992.100,00
55	21.05/03.0/000238/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepada TOKO MAKTUM Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2024	10.260.000,00
56	21.05/03.0/000239/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.486.300,00
57	21.05/03.0/000240/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kepada TOKO MAK TUM Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2024	4.080.000,00
58	21.05/03.0/000241/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kepada TOKO MAK TUM Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun Anggaran 2024	10.780.000,00
59	21.05/03.0/000242/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kepada Toko Mak Tum Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.866.500,00
60	21.05/03.0/000243/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun Anggaran 2024	1.850.000,00
61	21.05/03.0/000244/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi	9.752.460,00
62	21.05/03.0/000245/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Pemeliharaan Pelabuhan Apung di Pelabuhan Sri Siantan Kec.Siantan pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun Anggaran 2024	29.664.000,00
63	21.05/03.0/000246/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan	95.104.800,00
64	21.05/03.0/000247/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi pada Sub Kegiatan Pembangunan	87.617.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pelabuhan Pengumpulan Lokal Tahun Anggaran 2024	
65	21.05/03.0/000248/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termiinj 100% Belanja Modal Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan	591.282.359,00
66	21.05/03.0/000249/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Apung di Pelabuhan Sri Siantan Kecamatan Siantan	7.348.200,00
67	21.05/03.0/000250/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.000.000,00
68	21.05/03.0/000251/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Modal Personal Komputer Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	36.600.000,00
69	21.05/03.0/000254/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Secara Sekaligus Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.190.500,00
73	21.05/03.0/000258/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Printer Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup TA.2024	16.800.000,00
74	21.05/03.0/000259/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer-Laptop Kepada PT.Agres Batam Teknologi pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.349.800,00
75	21.05/03.0/000260/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Secara Sekaligus Pekerjaan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Pelabuhan Roro Kecamatan Siantan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	97.902.000,00
JUMLAH			3.977.255.807,00

Tabel 207

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000275/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024 Diskominfotik KKA	60.404.797,00
2	21.05/03.0/000276/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November Tahun 2024 Diskominfotik KKA	167.534.623,00
3	21.05/03.0/000277/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan November Tahun 2024 Diskominfotik KKA	5.408.000,00
4	21.05/03.0/000278/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember Tahun 2024 Diskominfotik KKA	169.029.438,00
5	21.05/03.0/000279/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember Tahun 2024 Diskominfotik KKA	5.408.000,00
6	21.05/03.0/000281/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Agustus-Desember 2024 An. JAPRIZAL, S.Kom, MA DKK	78.050.000,00
7	21.05/03.0/000283/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (Honor BMD) Bulan Agustus-Desember 2024 An. SUSANTI, A.Md DKK	13.985.000,00
8	21.05/03.0/000340/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahap Kedua) kepada (JEPS CAFE)	7.480.000,00
9	21.05/03.0/000285/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Desember 2024 Diskominfotik KKA	17.000.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
10	21.05/03.0/000286/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Termin (100%) Belanja Relokasi Triangle (Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	46.000.000,00
11	21.05/03.0/000289/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Tahunan PPID (8 Buku) Kepada CV. DARMA LESTARI ANAMBAS (SRI WAHYUNI)	2.000.000,00
12	21.05/03.0/000292/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan November-Desember 2024, Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November 2024)	45.000.000,00
13	21.05/03.0/000293/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November 2024 dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) KABAR BATAM (REFI)	9.000.000,00
14	21.05/03.0/000294/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November 2024),Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan September 2024)	13.500.000,00
15	21.05/03.0/000295/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Jasa Iklan Banner Bulan September 2024) KORAN BATAM.COM (ROMMEL SIRINGO RINGO)	31.500.000,00
16	21.05/03.0/000296/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) LANCANGKUNINGNEWS.COM (FENDI)	9.000.000,00
17	21.05/03.0/000297/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November 2024) WARTA KEPRI MEDIA (M.RAMADAN)	31.500.000,00
18	21.05/03.0/000298/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galeri Foto (Belanja Galeri Foto Bulan Desember 2024) JURNALSIDIK.COM (AGUS SURADI)	9.000.000,00
19	21.05/03.0/000299/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) TRANSKEPRI.COM (MAHYUDDIN)	27.000.000,00
20	21.05/03.0/000300/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-Desember 2024) ANTENA.ID (FAIDILLAH)	54.000.000,00
21	21.05/03.0/000301/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-Desember 2024) METROSIDIK.CO.ID (FITRI HADI)	54.000.000,00
22	21.05/03.0/000302/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November 2024) KORAN PERBATASAN (AZMI ANEKA PUTRA)	9.000.000,00
23	21.05/03.0/000303/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Juli-Agustus 2024), Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan September 2024) dan Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) ZONA SIDIK (PINNI)	27.000.000,00
24	21.05/03.0/000304/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan November 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan November 2024) BATAM TODAY (FREDY SILALAH)	31.500.000,00
25	21.05/03.0/000305/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) CENTRALIPUTANESIA GROUP (TENGKU AZHAR)	9.000.000,00
26	21.05/03.0/000306/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Oktober 2024) GOKEPRI.COM (WISNU NOVANDI YUDHA)	4.500.000,00
27	21.05/03.0/000307/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan Desember 2024) POJOKBATAM.ID (RIKASWIN)	13.500.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
28	21.05/03.0/000308/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan November 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan Desember 2024) RANAPOS (HARIYADI)	9.000.000,00
29	21.05/03.0/000309/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan September 2024) MEDIA TRIAS (HARI KURNIAWAN)	9.000.000,00
30	21.05/03.0/000310/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galeri Foto (Belanja Galeri Foto Bulan Oktober 2024) BURSAKOTA.CO.ID (JUNAIDI)	9.000.000,00
31	21.05/03.0/000311/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) MANDALAPO.CO.ID (YAHYA)	18.000.000,00
32	21.05/03.0/000312/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024 IGNNEWS.ID (JULINAWATI)	27.000.000,00
33	21.05/03.0/000313/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan September-Oktober 2024) MELAYUNEW (JOHANDA SIMATUPANG)	27.000.000,00
34	21.05/03.0/000314/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto(Belanja Galery Foto Bulna Juli-November 2024)dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan Agustus-November 2024) KABARANAMBAS.COM (FIRMAN DANI)	45.000.000,00
35	21.05/03.0/000315/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan September-Desember 2024), Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan September-November 2024) TRIBUN BATAM (NOVENRI HALOMOAN SIMANJUNTAK)	45.000.000,00
36	21.05/03.0/000316/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Agustus-November 2024) SAMUDRA KEPRI.CO.ID (RIANDI PRIBADI)	18.000.000,00
37	21.05/03.0/000317/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Agustus-Desember 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan November-Desember 2024) ANAMBASNEWS.COM (ROZA PADRI)	63.000.000,00
38	21.05/03.0/000318/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) BATAMPOS (MUHAMMAD IHSAN IMADDUDIN)	9.000.000,00
39	21.05/03.0/000319/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan Oktober 2024) KEPRIDAY.CO.ID (YOLANA SEFTIA MONISA)	4.500.000,00
40	21.05/03.0/000320/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) SINARPERBATASAN.COM (THONI HARYANTO)	9.000.000,00
41	21.05/03.0/000321/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto(Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) TABLOIT PUAN KEPRI (ISKANDAR ZAINI)	18.000.000,00
42	21.05/03.0/000322/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery(Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan Agustus-November 2024)LIPUTANNEWS (SAIFATUL HASANAH)	72.000.000,00
43	21.05/03.0/000323/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Oktober 2024) SUARA BATAM (NURDIN)	45.000.000,00
44	21.05/03.0/000324/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) KEPRIGLOBAL (KASTARANI)	18.000.000,00
45	21.05/03.0/000325/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Jasa Banner (Belanja Banner Bulan November-Desember 2024) dan Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan September 2024) RADAR SATU (ZAMIRI)	18.000.000,00
46	21.05/03.0/000326/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan Oktober 2024) CENTRALBATAM.CO.ID (ASYIAH)	4.500.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
47	21.05/03.0/000327/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Iklan Banner Bulan Oktober 2024) JABATNEWS.COM (EDDY SUPRIATNA)	67.500.000,00
48	21.05/03.0/000328/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery (Belanja Galery Foto Bulan Juni , September-November 2024) dan Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan Juni 2024) Harian Anambas Pos (Asril Masbah)	94.500.000,00
49	21.05/03.0/000329/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan September-November 2024)	13.500.000,00
50	21.05/03.0/000330/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Banner (Belanja Banner Bulan September-November 2024) MEDIA KEPRI (ROPI KAHARDI)	13.500.000,00
51	21.05/03.0/000333/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Galery Foto (Belanja Galery Foto Bulan Oktober-November 2024) dan Belanja Jasa Iklan Banner (Belanja Banner Bulan Agustus-September 2024)	27.000.000,00
52	21.05/03.0/000337/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Lapangan Pertama Kepada Elintina Elisia (DAPUR IMA)	1.672.500,00
53	21.05/03.0/000338/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kedua ELINTINA ELISIA (DAPUR IMA)	2.720.000,00
54	21.05/03.0/000339/LS/2.16.2.21.2. 20.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tagihan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) Bulan Desember 2024 PTT Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	304.020,00
JUMLAH			1.638.996.378,00

Tabel 208

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000210/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM, JASA TENAGA ADMINISTRASI (PTT) DAN HONOR PENYULUH ATAU PENDAMPING BULAN DESEMBER 2024 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	95.242.712,00
2	21.05/03.0/000211/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TPP PNS BULAN NOVEMBER 2024 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	203.657.931,00
3	21.05/03.0/000212/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TPP PNS BULAN DESEMBER 2024 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	203.375.917,00
4	21.05/03.0/000213/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TPP PPPK BULAN NOVEMBER 2024 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18.928.000,00
5	21.05/03.0/000214/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TPP PPPK BULAN DESEMBER 2024 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18.928.000,00
6	21.05/03.0/000215/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) BULAN JANUARI S/D JULI 2024 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.750.000,00
7	21.05/03.0/000216/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPING UKM BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN	5.700.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		SEKALAUSAHA MENJADI USAHA KECIL (DAK NON FISIK)	
8	21.05/03.0/000218/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN TRANSPORTASI PENYULUHAN ATAU PENDAMPING UKM BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SEKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL (DAK NON FISIK)	600.000,00
9	21.05/03.0/000221/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TRANSPORTASI NARASUMBER SERTIFIKAT HALAL KEGIATAN PENEGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	16.000.000,00
10	21.05/03.0/000222/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SPT NOMOR 000.1.2.3/285/DKUMPP/ST/12 2024 DALAM RANGKA PENINJAUAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIKM	2.450.000,00
11	21.05/03.0/000223/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI SERTIFIKAT HALAL - PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN	8.750.000,00
12	21.05/03.0/000224/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA TRANSPORTASI NARASUMBER PELATIHAN PERKOPERASIAN KEGIATAN PENEGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	2.339.600,00
13	21.05/03.0/000225/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PENGINAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERKOPERASIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SEKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	880.000,00
14	21.05/03.0/000226/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PENGINAPAN NARASUMBER SERTIFIKAT HALAL KEGIATAN PENEGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	4.290.000,00
15	21.05/03.0/000227/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	24.750.000,00
16	21.05/03.0/000228/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PELATIHAN PERKOPERASIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SEKALAUSAHA MENJADI USAHA KECIL	1.720.900,00
17	21.05/03.0/000230/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN LEMARI ARSIP KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	10.278.600,00
18	21.05/03.0/000231/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	22.188.900,00
19	21.05/03.0/000233/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKU KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	22.355.400,00
20	21.05/03.0/000234/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA ALAT/BAHAN TANGGA ALUMINIUM KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.509.600,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
21	21.05/03.0/000237/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KANTOR SOUND SYSTEM, PAPAN NAMA INTANSI PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	7.503.600,00
22	21.05/03.0/000238/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL LEMARI DAN ARSIP PEJABAT KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	6.660.000,00
23	21.05/03.0/000239/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	13.764.000,00
24	21.05/03.0/000240/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL MEJA KERJA PEJABAT KEGIATAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	17.760.000,00
25	21.05/03.0/000241/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL KURSI KERJA PEJABAT KEGIATAN JASA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	34.521.000,00
26	21.05/03.0/000242/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINA SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2024	29.550.000,00
27	21.05/03.0/000246/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA-JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONTRUKSI TEKNIK SIPIL AIR	14.796.300,00
28	21.05/03.0/000248/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN JARING KELAMBU KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	28.749.000,00
29	21.05/03.0/000249/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPAH TUKANG KEGIATAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	9.920.000,00
30	21.05/03.0/000250/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK - FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.902.500,00
31	21.05/03.0/000251/LS/2.17.2.07.3. 30.01.0000/PPR1/12/2024	BELANJA JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI-BANGUNAN AIR-BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM-BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	197.649.148,00
JUMLAH			1.035.471.108,00

Tabel 209

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000220/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember Tahun 2024.	32.318.480,00
2	21.05/03.0/000221/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November Tahun 2024	143.682.430,00
3	21.05/03.0/000222/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PPPK BULAN NOVEMBER TAHUN 2024	5.408.000,00
4	21.05/03.0/000223/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember Tahun 2024	143.682.430,00
5	21.05/03.0/000224/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PPPK BULAN DESEMBER TAHUN 2024	5.408.000,00
6	21.05/03.0/000225/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Keg- Bulan Agustus-Desember 2024 pada sub kepelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD Tahun 2024	32.210.000,00
7	21.05/03.0/000226/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD pada Bulan Agustus/Desember sub keg- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2024	7.940.000,00
8	21.05/03.0/000228/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bulan September s/d Oktober 2024 tahun Anggaran 2024	53.300.000,00
JUMLAH			423.949.340,00

Tabel 210

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000219/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Bulan Desember 2024	29.534.920
2	21.05/03.0/000238/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November 2024	57.705.888
3	21.05/03.0/000239/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2024	57.705.888
4	21.05/03.0/000221/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan November Tahun 2024	14.144.000
5	21.05/03.0/000223/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember Tahun 2024	15.184.000
6	21.05/03.0/000224/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan September s/d Desember Tahun 2024	26.604.000
7	21.05/03.0/000225/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Bulan November dan Desember Tahun 2024	4.000.000
8	21.05/03.0/000226/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Perpustakaan Bulan November dan Desember Tahun 2024	5.000.000
9	21.05/03.0/000227/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Bulan November dan Desember Tahun 2024	5.000.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
10	21.05/03.0/000228/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tirai/Gorden Vertical Blind TA 2024	5.161.500
11	21.05/03.0/000229/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Spanduk	3.496.500
12	21.05/03.0/000230/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran BelanjaGantungan ID card TA 2024	5.189.250
13	21.05/03.0/000231/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Lampu LED TA 2024	2.997.000
14	21.05/03.0/000232/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar	4.992.000
15	21.05/03.0/000233/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan bakar	6.000.000
16	21.05/03.0/000234/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.830.296
17	21.05/03.0/000235/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Fotocopy	3.746.250
18	21.05/03.0/000236/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Standing Banner	2.469.750
19	21.05/03.0/000237/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	2.377.600
JUMLAH			254.138.842

Tabel 211
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000172/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.533.191
2	21.05/03.0/000173/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	330.731.609
3	21.05/03.0/000174/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.002.320
4	21.05/03.0/000176/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.005.790
5	21.05/03.0/000177/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.180.000
6	21.05/03.0/000178/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.600.000
7	21.05/03.0/000179/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	400.000
8	21.05/03.0/000180/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000
9	21.05/03.0/000181/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000
10	21.05/03.0/000187/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	327.880
11	21.05/03.0/000188/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.700.000
12	21.05/03.0/000189/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	280.000
13	21.05/03.0/000190/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	16.000.000
14	21.05/03.0/000192/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	16.000.000
15	21.05/03.0/000195/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.398.600

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
16	21.05/03.0/000197/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.200.000
17	21.05/03.0/000198/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.000
18	21.05/03.0/000199/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.600.000
19	21.05/03.0/000200/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.150.000
20	21.05/03.0/000201/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000
21	21.05/03.0/000202/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	327.812.923
22	21.05/03.0/000203/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.400.000
23	21.05/03.0/000204/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.400.000
24	21.05/03.0/000205/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/PPR1/12/2024	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.713.000
JUMLAH			1.157.435.313

Tabel 212
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000137/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN GAJI PTT BULAN DESEMBER TAHUN 2024	56.782.824
2	21.05/03.0/000138/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN NOVEMBER TAHUN 2024	140.507.244
3	21.05/03.0/000139/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN NOVEMBER TAHUN 2024	8.040.405
4	21.05/03.0/000140/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024	140.617.777
5	21.05/03.0/000141/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK BULAN DESEMBER TAHUN 2024	8.054.526
6	21.05/03.0/000142/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI BUPATI BIDANG SENI DAN BUDAYA BULAN DESEMBER TAHUN 2024	12.000.000
7	21.05/03.0/000143/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN HONORARIUM PPKD, PPTK DAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024	31.480.000
8	21.05/03.0/000144/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA DALAM RANGKA MENGIKUTI PELATIHAN BAGI PELATIH KEPEMANDUAN WISATA BERBASIS KOMPETENSI TANGGAL 30 SEPTEMBER S/D 03 OKTOBER TAHUN 2024	1.086.515
9	21.05/03.0/000145/LS/3.26.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI NON ASN BULAN DESEMBER DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024	268.920

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
10	21.05/03.0/000146/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA CETAK DOKUMEN DAN PENGGANDAAN (FOTOCOPY) KEGIATAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	12.900.000
11	21.05/03.0/000147/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL TAMAN PEKERJAAN DED TUGU PENYU KEC. SIANTAN TAHUN 2024	49.368.360
12	21.05/03.0/000148/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL TAMAN PEKERJAAN DED AGRO WISATA DESA BUKIT PADI KECAMATAN JEMAJA TIMUR TAHUN 2024	49.368.360
13	21.05/03.0/000149/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN TERBUKA PEKERJAAN DED GAPURA KAMPUNG TANGGUH DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN TAHUN 2024	6.937.500
14	21.05/03.0/000150/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN TERBUKA PEKERJAAN BELANJA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG TANGGUH DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN TAHUN 2024	9.668.100
15	21.05/03.0/000151/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN TERBUKA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG TANGGUH DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN TAHUN 2024	48.683.202
16	21.05/03.0/000152/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA (PRINTER) BULAN DESEMBER KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	5.675.000
17	21.05/03.0/000153/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PENDUNGIN (KIPAS ANGIN 3 IN 1) BULAN DESEMBER KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	3.074.000
18	21.05/03.0/000154/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT (KIPAS ANGIN 3 IN 1) TAHUN 2024	1.500.000
19	21.05/03.0/000155/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT (LAPTOP ACER DAN PROJECTOR INFOCUS) TAHUN 2024	22.900.000
20	21.05/03.0/000156/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT (LEMARI KACA DAN MEJA AKRILIK/VERMIS) TAHUN 2024	17.800.000,00
21	21.05/03.0/000157/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI OBJEK WISATA AIR TERJUN NERAJA KECAMATAN JEMAJA TMUR TAHUN 2024	6.576.750,00
22	21.05/03.0/000158/LS/3.26.2.22.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI OBJEK WISATA AIR TERJUN NERAJA KECAMATAN JEMAJA TIMUR TAHUN 2024	126.436.481,00
	TOTAL		759.725.964,00

Tabel 213
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000433/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran gaji pegawai honorer/tidak tetap bulan desember 2024	593.343.268,00
2	21.05/03.0/000434/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Nopember 2024	879.245.878,00
3	21.05/03.0/000435/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Nopember 2024	46.880.136
4	21.05/03.0/000436/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Desember 2024	881.325.878
5	21.05/03.0/000437/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Desember 2024	46.880.136
6	21.05/03.0/000438/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Agustus - Desember 2024	201.400.000
7	21.05/03.0/000440/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Penceramah Kabupaten Kegiatan Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlaqul Qarimah Peringatan Maulud Nabi Muhammad Saw 1446H (a.n. KHAIRUL RAHMAD)	1.000.000
8	21.05/03.0/000441/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Pelatih Rabana Kegiatan MTQH Tingkat Provinsi	2.500.000
9	21.05/03.0/000442/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang bulan januari - desember 2024	99.620.000
10	21.05/03.0/000443/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan staf Administrasi Kegiatan Sekretariat Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Bulan September s/d Desember Tahun 2024	51.200.000
11	21.05/03.0/000444/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staf Pendukung Administrasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bulan November Tahun 2024	1.000.000
12	21.05/03.0/000569/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Sewa dan Dekorasi Mobil Hias Kegiatan MTQH Tingkat Provinsi	43.963.036
13	21.05/03.0/000447/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Petugas Protokol Acara, Pelayanan Tamu Daerah, Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan September - Desember 2024	17.200.000
14	21.05/03.0/000448/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Periode Juni - Desember 2024	16.450.000
15	21.05/03.0/000567/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000
16	21.05/03.0/000450/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Kegiatan Pelaksana Kegiatan Akhlaqul Qorimah (Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 1446 H/ 2024)	2.860.000
17	21.05/03.0/000451/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Staf Administrasi Kegiatan pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun anggaran 2024 Bulan Desember	800.000
18	21.05/03.0/000452/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa acara dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2024	31.700.000
19	21.05/03.0/000453/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Website Bulan Juni s/d Desember pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2024	7.000.000
20	21.05/03.0/000454/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Prelaksana Kegiatan Bulan Juni s/d Desember pada Sub Kegiatan	4.200.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2024	
21	21.05/03.0/000456/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.970.000
22	21.05/03.0/000457/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.900.509
23	21.05/03.0/000458/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.979.100
24	21.05/03.0/000459/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.814.000
25	21.05/03.0/000460/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.108.000
26	21.05/03.0/000461/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.249.200
27	21.05/03.0/000462/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.299.900
28	21.05/03.0/000464/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	966.080.203
29	21.05/03.0/000465/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.192.000
30	21.05/03.0/000466/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.246.000
31	21.05/03.0/000468/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.360.000
32	21.05/03.0/000469/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.802.065
33	21.05/03.0/000470/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.970.000
34	21.05/03.0/000471/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.077.400
35	21.05/03.0/000472/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.415.000
36	21.05/03.0/000473/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelesaian Hutang PT Anambas Sejahtera (Perseroda) Tahun Anggaran 2024	1.375.000
37	21.05/03.0/000474/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan (APBD, DAK FISIK dan DAU SG) TA 2024 Tanggal 13 September 2024 Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.512.500
38	21.05/03.0/000475/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Materai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024	605.000
39	21.05/03.0/000476/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Kertas HVS A4 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	2.514.150
40	21.05/03.0/000477/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tinta Printer Bagian Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024	2.897.100
41	21.05/03.0/000478/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Fotocopy Bagian Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024	1.045.000
42	21.05/03.0/000479/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Rencana Konsolidasi Pengadaan dan Persiapan Tender Dini tgl 28 November 2024 Rapat Evaluasi Kinerja PBJ TA 2024 dan Persiapan Memasuki Tahun 2025 tgl 11 Desember 2024	6.270.000
43	21.05/03.0/000480/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Papan Bunga Wilayah Kepulauan Anambas, Kota Batam, Tanjungpinang	47.952.000
44	21.05/03.0/000482/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Spanduk Anambas Digital Printing dan Advertising Kepada M. IKHSAN humala siregar Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum TA 2024	800.000
45	21.05/03.0/000483/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas HVS A4 70 gsm TA 2024 Pada Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1.190.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
46	21.05/03.0/000484/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Tinta Printer 664 Hitam dan Warna TA 2024 Pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	3.152.400
47	21.05/03.0/000485/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Studio Dokumentasi Pada Bagian Protokol Periode Januari - November 2024	605.750
48	21.05/03.0/000486/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Foto Copy Bulan Januari - November 2024	910.000
49	21.05/03.0/000487/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Januari - Agustus, dan Belanja Cetak Baliho Januari - September 2024	25.098.561
50	21.05/03.0/000488/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (fotocopy) TA 2024 Pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1.494.000
51	21.05/03.0/000489/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Umbul-Umbul TA 2024 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	26.640.000
52	21.05/03.0/000490/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Makanan Dan Minuman Rapat-Snack (3 Kue Basah dan Air Mineral) Rapat Persiapan Hari Jadi Kepri dan Hari Kesaktian Pancasila TA 2024 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Tgl 20 September 2024	1.100.000
53	21.05/03.0/000491/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Undangan Pada Peringatan Hari Jadi Kepri ke 22 di Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2024 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	4.218.000
54	21.05/03.0/000492/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Snack, Persiapan Hari Jadi Kepri dan Hari Kesaktian Pancasila TA 2024 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Tanggal 20 September 2024	1.237.500
55	21.05/03.0/000493/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Setda KKA Bulan Agustus - Desember 2024	7.115.971
56	21.05/03.0/000494/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Setda KKA Bulan Agustus - Desember 2024	7.190.418
57	21.05/03.0/000495/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Setda KKA Bulan Agustus 2024	2.339.325
58	21.05/03.0/000496/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pengadaan Suvenir Kain Batik Cual Untuk Menunjang/ Mendukung Keg Bupati Kepulauan Anambas Bulan September - Desember 2024	8.373.840
59	21.05/03.0/000497/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Penggandaan/ Fotocopy Untuk Kebutuhan Kantor Bagian Umum SETDA KKA Bulan Oktober - Desember 2024	12.432.000
60	21.05/03.0/000498/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan Kulkas di Lingkungan Kantor Bupati KKA Bulan Agustus - Desember 2024	8.547.000
61	21.05/03.0/000501/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan CCTV di Lingkungan Kantor Bupati KKA Bulan Agustus - Desember 2024	11.544.000
62	21.05/03.0/000502/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan/ Perbaikan Printer dan Komputer Di lingkungan Kantor Bupati KKA Bulan Juli - Desember 2024	8.325.000
63	21.05/03.0/000503/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Listrik Elektronik Kebutuhan Kantor Bupati KKA Bulan Agustus - Desember 2024	42.409.679
64	21.05/03.0/000504/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung, Lampu Taman dan Panel Listrik Masjid Agung Baitul Makmur KKA	13.503.150

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
65	21.05/03.0/000506/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Materai Rp.10.000 Sebanyak 940 Lembar Bulan Oktober - Desember 2024 Untuk Kebutuhan Kantor Bagian Umum SETDA KKA	9.400.000
66	21.05/03.0/000509/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Peralite (di Luar Wilayah Anambas Untuk Operasional Supir Mobil Dinas Milik Pemerintah Daerah dari Bulan Mei - Desember 2024 di Tanjungpinang	39.353.000
67	21.05/03.0/000510/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Peralite (Didalam Wilayah Anambas), 1.476 Liter, Untuk Operasional Speed Boat dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan KDH/ WKDH Serta Sekda KKA dan Lainnya	23.280.000
68	21.05/03.0/000512/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran belanja Pemeliharaan (Jasa Service) Kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil) Milik Pemerintah KKA di TANJUNGPINANG	38.073.000
69	21.05/03.0/000513/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil) Milik Pemerintah KKA di Tanjungpinang	46.066.110
70	21.05/03.0/000514/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil) T/Hulix BP 1022 S, T/Fortuner bp 1 S dan T/Rush BP 1013 S Milik Pemerintah KKA di Tanjungpinang	49.429.410
71	21.05/03.0/000515/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Service (Speed Boat) Milik Pemerintah Daerah KKA Untuk Anambas II dan VI di Tarempa	15.262.500
72	21.05/03.0/000516/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Suku Cadang (Speed Boat) Milik PEMDA KKA Untuk Anambas II dan VI Di Tarempa	11.608.380
73	21.05/03.0/000520/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Sembako KDH Bulan November 2024	19.318.651
74	21.05/03.0/000521/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Sembako KDH Bulan Desember 2024	19.248.749
75	21.05/03.0/000523/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Alat Angkut Darat Bermotor (Mobil) Di Dalam kota KKA Untuk Memfasilitasi KDH/ WKDH Serta Tamu PEMDA KKA Tanggal 14 Juni - 28 Juni 2024 di Letung	6.216.000
76	21.05/03.0/000530/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Dalam Rangka Hari Jadi ke 16 KKA Tahun 2024	49.225.000
77	21.05/03.0/000531/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Untuk Kegiatan Di lingkungan SETDA Dan Tamu Pemda KKA Bulan Juni - Oktober 2024	20.900.000
78	21.05/03.0/000534/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Penginapan/ Hotel Untuk Tamu PEMDA Dalam Daerah Spesifikasi : Double Room Bulan Mei Tahun 2024	4.532.000
79	21.05/03.0/000535/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran BBM Peralite (Di Dalam Wilayah Anambas), 1.340 Liter Untuk Operasional Speed Boat Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan KDH/ WKDH Serta SEKDA KKA Dan Tamu Lainnya	16.080.000
80	21.05/03.0/000536/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Akomodasi Penginapan/ Hotel Dalam Daerah Untuk Tamu Pemerintah KKA Tahun 2024	65.321.000
81	21.05/03.0/000539/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Alat pendingin - Air Conditioner - AC Floor Standing	170.000.000
82	21.05/03.0/000540/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Personal Computer (PC)	60.000.000
83	21.05/03.0/000541/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Kursi Kerja Staf	1.550.000
84	21.05/03.0/000542/LS/4.01.2.23.2.24. 01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Kursi Kerja Pimpinan	38.500.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
85	21.05/03.0/000543/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Meja Kerja	42.700.000
86	21.05/03.0/000544/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Meja Kerja Staf	3.600.000
87	21.05/03.0/000545/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Printer	25.600.000
88	21.05/03.0/000546/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Photo and Film Equipment - Kamera DSLR dan Tripod	7.200.000
89	21.05/03.0/000547/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer - Belanja Personal Computer	20.600.000
90	21.05/03.0/000548/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Belanja Printer	16.000.000
91	21.05/03.0/000549/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Belanja Scanner	32.500.000
92	21.05/03.0/000550/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Piala Bergilir Kegiatan MTQH Tingkat Kabupaten	15.984.000
93	21.05/03.0/000551/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua (Sepeda Motor) Yamaha N MAX (BP 4585 S) Tanggal 29 Juli 2024	3.640.800
94	21.05/03.0/000552/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perbaikan Bangunan Kantor Bupati KKA Bulan September - Desember 2024 TA 2024	17.687.850
95	21.05/03.0/000553/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Perbaikan Bangunan Kantor Bupati KKA Bulan September - Desember 2024 TA 2024	6.105.000
96	21.05/03.0/000555/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil) dinas Bupati di Letung dan Palmatak	8.097.450
97	21.05/03.0/000556/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Mesin Generating Set Kantor Bupati KKA Oktober - Desember 2024	4.184.700
98	21.05/03.0/000557/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Perbaikan Mesin Generating Set Kantor Bupati KKA (Service Dinamo Starter dan Kelistrikan) Bulan Oktober - Desember 2024	3.330.000
99	21.05/03.0/000558/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Barang Dalam Rangka Pemeliharaan AC Dikantor Bupati KKA Bulan November - Desember 2024	18.870.000
100	21.05/03.0/000559/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Barang Dalam Rangka Pemeliharaan AC Dikantor Bupati KKA Bulan November - Desember 2024	20.202.000
101	21.05/03.0/000562/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Biaya Telepon Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Tahun 2024	159.999.140
102	21.05/03.0/000564/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Akomodoasi dan Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.860.000
103	21.05/03.0/000565/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Tanggungan SETDA KKA 2024	26.195.514
104	21.05/03.0/000566/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Akomodoasi dan Transportasi Perjalanan Dinas Biasa	261.899.985
JUMLAH			6.273.749.292

Tabel 214
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000327/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024 Sekretariat DPRD	147.114.428
2	21.05/03.0/000328/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Sekretariat DPRD Bulan November 2024	152.530.784
3	21.05/03.0/000329/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK Sekretariat DPRD Bulan November 2024	5.408.000
4	21.05/03.0/000330/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Sekretariat DPRD Bulan Desember 2024	152.530.784
5	21.05/03.0/000331/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK Sekretariat DPRD Bulan Desember 2024	5.408.000
6	21.05/03.0/000332/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Bulan November dan Desember 2024	33.700.000
7	21.05/03.0/000335/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli DPRD Bulan Desember 2024	31.200.000
8	21.05/03.0/000338/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Tahun Anggaran 2024	51.080.000
9	21.05/03.0/000339/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Medical Chek Up DPRD Tahun Anggaran 2024	66.173.758
10	21.05/03.0/000340/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Penyusunan Pokir DPRD Tahun Anggaran 2024	16.637.600
11	21.05/03.0/000341/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Tahun Anggaran 2024	27.441.800
12	21.05/03.0/000342/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Tahun Anggaran 2024	31.979.000
13	21.05/03.0/000343/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Tahun Anggaran 2024	35.120.000
14	21.05/03.0/000433/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kantor Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1.956.000
15	21.05/03.0/000434/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD pada Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Tahun Anggaran 2024	224.213.300
16	21.05/03.0/000346/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Tahun Anggaran 2024	20.296.700
17	21.05/03.0/000347/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Tahun Anggaran 2024	3.150.000
18	21.05/03.0/000348/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Tahun Anggaran 2024	2.880.000
19	21.05/03.0/000349/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Tahun Anggaran 2024	81.845.000
20	21.05/03.0/000350/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tahun Anggaran 2024	309.744.486

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
21	21.05/03.0/000351/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Baju Kurung Melayu Lengkap (DPRD) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.600.000
22	21.05/03.0/000352/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.890.000
23	21.05/03.0/000353/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	63.000.000
24	21.05/03.0/000354/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.836.400
25	21.05/03.0/000355/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja bangunan Gedung Kantor	28.778.256
26	21.05/03.0/000356/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	66.000.000
27	21.05/03.0/000357/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	88.000.000
28	21.05/03.0/000358/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Termin II pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	41.000.000
29	21.05/03.0/000359/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) DPRD Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	88.000.000
30	21.05/03.0/000360/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Medical Chek Up Pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	182.288.600
31	21.05/03.0/000361/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Orientasi DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2024	98.580.000
32	21.05/03.0/000362/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12.502.000
33	21.05/03.0/000363/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	7.080.000
34	21.05/03.0/000364/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD	6.049.000
35	21.05/03.0/000365/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	8.760.000
36	21.05/03.0/000366/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kantor Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	5.424.000
37	21.05/03.0/000367/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Bulan September Tahun 2024, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Orientasi DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024	48.522.000
38	21.05/03.0/000368/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Penyerapan dan	7.080.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	
39	21.05/03.0/000369/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	11.250.000
40	21.05/03.0/000370/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.000.000
41	21.05/03.0/000371/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	8.750.000
42	21.05/03.0/000372/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Orientasi DPRD	2.160.000
43	21.05/03.0/000373/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	20.000.000
44	21.05/03.0/000374/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	11.250.000
45	21.05/03.0/000375/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Orientasi DPRD	3.750.000
46	21.05/03.0/000376/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Bulan November Tahun 2024, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	15.681.500
47	21.05/03.0/000377/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan November Tahun 2024, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	13.477.500
48	21.05/03.0/000378/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD	9.750.000
49	21.05/03.0/000379/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak bulan November Tahun 2024 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD Sekretariat DPRD	25.000.000
50	21.05/03.0/000380/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos bulan November Tahun 2024 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	3.300.000
51	21.05/03.0/000381/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	2.590.000
52	21.05/03.0/000382/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	2.500.000
53	21.05/03.0/000383/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	49.180.000
54	21.05/03.0/000384/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD	78.475.000
55	21.05/03.0/000385/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Tahun Anggaran 2024	31.000.800

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
56	21.05/03.0/000386/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.308.000
57	21.05/03.0/000388/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	14.356.000
58	21.05/03.0/000389/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20.917.000
59	21.05/03.0/000390/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
60	21.05/03.0/000391/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.022.500
61	21.05/03.0/000392/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	98.232.000
62	21.05/03.0/000393/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52.024.000
63	21.05/03.0/000394/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.270.000
64	21.05/03.0/000395/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11.426.500
65	21.05/03.0/000396/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.490.000
66	21.05/03.0/000397/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.953.600
67	21.05/03.0/000398/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	19.604.820
68	21.05/03.0/000399/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7.457.535
69	21.05/03.0/000400/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (PLAKAT) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100.455.000
70	21.05/03.0/000401/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Paper Bag) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	13.040.280
71	21.05/03.0/000402/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.320.230

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
72	21.05/03.0/000403/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.072.365
73	21.05/03.0/000404/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.122.645
74	21.05/03.0/000405/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.405.700
75	21.05/03.0/000406/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	14.498.000
76	21.05/03.0/000407/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos bulan September Tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Sub Kegiatan Orientasi DPRD	1.650.000
77	21.05/03.0/000408/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1.750.000
78	21.05/03.0/000410/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1.976.000
79	21.05/03.0/000411/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendra Mata Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Sub Kegiatan Orientasi DPRD	780.000
80	21.05/03.0/000412/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	2.058.000
81	21.05/03.0/000413/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	2.028.000
82	21.05/03.0/000414/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan September Tahun 2024, Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1.622.200
83	21.05/03.0/000415/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	1.250.000
84	21.05/03.0/000416/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tahun Anggaran 2024	125.650.410
85	21.05/03.0/000418/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Tahun Anggaran 2024	52.777.000
86	21.05/03.0/000419/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	111.180.000
87	21.05/03.0/000420/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	789.000
88	21.05/03.0/000421/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos bulan Agustus 2024 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan	550.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pembahasan APBD Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024	
89	21.05/03.0/000422/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos bulan November 2024 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024	550.000
90	21.05/03.0/000423/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos bulan September Tahun 2024 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024	550.000
91	21.05/03.0/000424/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	438.000
92	21.05/03.0/000425/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.000.000
93	21.05/03.0/000426/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9.000.000
94	21.05/03.0/000427/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Rohaniwan Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.200.000
95	21.05/03.0/000429/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.420.000
96	21.05/03.0/000430/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.245.000
97	21.05/03.0/000431/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya -Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	49.230.248
98	21.05/03.0/000432/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Tahun Anggaran 2024	42.840.500
JUMLAH			3.476.225.229

Tabel 215
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000249/LS/5.01.5.05.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.087.905
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.523.264
2	21.05/03.0/000250/LS/5.01.5.05.0.0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.781.471
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	102.299.130
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	153.448.696
3		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	416.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
	21.05/03.0/000251/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.160.000
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.240.000
4	21.05/03.0/000252/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.709.822
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	101.739.186
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	152.608.779
5	21.05/03.0/000253/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	416.000
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.160.000
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.240.000
6	21.05/03.0/000254/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	96.150.000
7	21.05/03.0/000255/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.200.000
8	21.05/03.0/000256/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.600.000
9	21.05/03.0/000257/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000
10	21.05/03.0/000258/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.500.000
11	21.05/03.0/000259/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.862.270
12	21.05/03.0/000260/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000
13	21.05/03.0/000261/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.513.575
14	21.05/03.0/000262/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000
15	21.05/03.0/000263/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.970.110
16	21.05/03.0/000264/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.391.200
17	21.05/03.0/000265/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.325.000
18	21.05/03.0/000266/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.715.200
19	21.05/03.0/000267/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.612.610
20	21.05/03.0/000268/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.506.400
21	21.05/03.0/000269/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.386.616
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.800.000
22	21.05/03.0/000270/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.450.000
23	21.05/03.0/000271/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.276.000
24	21.05/03.0/000272/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.915.600
25	21.05/03.0/000273/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95.911.400
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.477.000
26	21.05/03.0/000275/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Ahli	354.134.400
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.064.000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.000.000
27	21.05/03.0/000276/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Ahli	212.480.640
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.395.600
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.631.350

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
28	21.05/03.0/000278/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.738.410
29	21.05/03.0/000279/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.618.900
30	21.05/03.0/000280/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.989.228
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.710.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.076.000
31	21.05/03.0/000281/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.250.000
32	21.05/03.0/000282/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.783.880
33	21.05/03.0/000283/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.556.000
34	21.05/03.0/000284/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.832.600
35	21.05/03.0/000285/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.800.000
36	21.05/03.0/000286/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.076.250
37	21.05/03.0/000287/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.060.600
38	21.05/03.0/000288/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.156.000
39	21.05/03.0/000289/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	928.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.425.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.500.000
40	21.05/03.0/000291/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.807.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.026.223
41	21.05/03.0/000292/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	638.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.000.000
42	21.05/03.0/000293/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.800.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.570.000
43	21.05/03.0/000294/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.700.000
44	21.05/03.0/000295/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.687.960
45	21.05/03.0/000296/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.098.000
46	21.05/03.0/000297/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.350.000
47	21.05/03.0/000298/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.800.000
48	21.05/03.0/000299/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.450.000
49	21.05/03.0/000300/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.400.000
50	21.05/03.0/000301/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.040.000
51	21.05/03.0/000302/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.380.000
52	21.05/03.0/000303/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000
53	21.05/03.0/000304/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.543.500

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.470.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.176.500
54	21.05/03.0/000305/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.380.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.973.400
55	21.05/03.0/000306/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.895.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000
56	21.05/03.0/000307/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Belanja Modal Pengadaan CCTV)	35.000.000
57	21.05/03.0/000308/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya(Belanja Modal Pengadaan Video Converence)	30.900.000
58	21.05/03.0/000309/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Digital ADL)	51.000.000
59	21.05/03.0/000311/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.100.000
60	21.05/03.0/000312/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.320.000
61	21.05/03.0/000313/LS/5.01.5.05.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.700.000
JUMLAH			2.404.856.175

Tabel 216

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/02.0/000925/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) ke Batam dan Bandung pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	61.349.048,00
2	21.05/02.0/000926/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) ke Jakarta, Batam dan Tanjungpinang pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.308.100,00
3	21.05/02.0/000928/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) ke Jakarta dan Batam pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	17.178.400,00
4	21.05/02.0/000931/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (Personal Computer) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.900.000,00
5	21.05/02.0/000932/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin (Air Conditioner) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.400.000,00
6	21.05/02.0/000933/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Modal Alat Kantor Lainnya (Rak Buku) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.900.000,00
7	21.05/02.0/000934/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00
8	21.05/02.0/000937/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	3.300.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
9	21.05/02.0/000940/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) ke Batam pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12.703.400,00
10	21.05/02.0/000941/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Bulan Desember Tahun 2024 pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.055.440,00
11	21.05/02.0/000942/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	358.411.658,00
12	21.05/02.0/000943/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.408.000,00
13	21.05/02.0/000944/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	361.601.046,00
14	21.05/02.0/000945/LS/5.02.0.00.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.408.000,00
15	Alokasi Dana Desa (DD) berdasarkan BA	Pembayaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa (ADD)	199.507.662,50
16	BHPRD berdasarkan BA	Pembayaran Kurang Salur BHPRD	1.170.935.779,00
JUMLAH			2.493.866.533,50

Tabel 217

Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000130/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.076.712,00
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.698.628,00
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.301.360,00
2	21.05/03.0/000131/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.111.082,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.520.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	135.780.000,00
3	21.05/03.0/000132/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.248.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.480.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	18.720.000,00
4	21.05/03.0/000133/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.111.082,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.520.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	135.780.000,00
5	21.05/03.0/000134/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.248.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.480.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	18.720.000,00
6	21.05/03.0/000135/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.700.000,00
7	21.05/03.0/000136/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00
8	21.05/03.0/000138/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.179.200,00
9	21.05/03.0/000139/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.765.905,00
10	21.05/03.0/000140/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.580.400,00
11	21.05/03.0/000141/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.693.578,00
12	21.05/03.0/000142/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000,00
13	21.05/03.0/000143/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.890.000,00
14	21.05/03.0/000144/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	360.000,00
15	21.05/03.0/000145/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	930.000,00
16	21.05/03.0/000146/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.315.000,00
17	21.05/03.0/000147/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.825.000,00
18	21.05/03.0/000148/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.000,00
19	21.05/03.0/000149/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.610.000,00
20	21.05/03.0/000150/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.360.000,00
21	21.05/03.0/000151/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00
22	21.05/03.0/000152/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.025.000,00
23	21.05/03.0/000153/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.380.000,00
24	21.05/03.0/000154/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	113.312.500,00
25	21.05/03.0/000155/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.192.800,00
26	21.05/03.0/000162/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.300.000,00
27	21.05/03.0/000163/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.650.000,00
28	21.05/03.0/000164/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	1.460.000,00
29	21.05/03.0/000165/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	700.000,00
30	21.05/03.0/000166/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.250.000,00
31	21.05/03.0/000167/LS/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Personal Computer	22.000.000,00
JUMLAH			994.674.247,00

Tabel 218
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000117/LS/5.06.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember Tahun 2024	15.700.000
2	21.05/03.0/000118/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan November Tahun 2024	91.526.925
3	21.05/03.0/000119/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PPPK Bulan November Tahun 2024	8.112.000
4	21.05/03.0/000120/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan Desember Tahun 2024	91.526.925
5	21.05/03.0/000121/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PPPK Bulan Desember Tahun 2024	8.112.000
6	21.05/03.0/000122/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan BPPD Bulan Agustus s.d Desember Tahun 2024	46.850.000
7	21.05/03.0/000125/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Barang Bulan September s.d Desember 2024	2.436.000
8	21.05/03.0/000126/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah a.n. REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.I.P pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.278.800
9	21.05/03.0/000127/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah a.n. KHOIRUL SYAHPUTRA, S.Pd.I.,M.Si ke Tanjung Pinang pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	4.027.400
10	21.05/03.0/000128/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	4.320.000
11	21.05/03.0/000129/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	18.356.000
12	21.05/03.0/000130/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.525.000
13	21.05/03.0/000160/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran belanja alat tulis kantor pada sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan T.A 2024	4.748.000
14	21.05/03.0/000161/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (snack) pada sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	2.400.000
15	21.05/03.0/000162/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Kotak) pada sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	2.150.000
16	21.05/03.0/000163/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	365.000
17	21.05/03.0/000164/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Kertas dan Cover	740.000
18	21.05/03.0/000167/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Cetak	2.219.500
19	21.05/03.0/000168/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	12.985.000
20	21.05/03.0/000169/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Kertas dan Cover	11.804.000
21	21.05/03.0/000170/LS/5.06.0.00.0.0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Komputer	11.260.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
22	21.05/03.0/000171/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Benda Pos (Materai)	4.928.000
23	21.05/03.0/000172/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Cetak	14.340.000
24	21.05/03.0/000173/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perabot Kantor	6.334.600
25	21.05/03.0/000174/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.515.000
26	21.05/03.0/000175/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Listrik	7.919.500
27	21.05/03.0/000176/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Kertas dan Cover	475.000
28	21.05/03.0/000177/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	609.000
29	21.05/03.0/000178/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.059.800
30	21.05/03.0/000179/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.447.500
31	21.05/03.0/000180/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.350.000
32	21.05/03.0/000181/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.831.300
33	21.05/03.0/000182/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.688.000
34	21.05/03.0/000183/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Servis Kendaraan Roda Dua	3.465.000
35	21.05/03.0/000184/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk	551.000
36	21.05/03.0/000185/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Servis Alat Pendingin	2.652.900
37	21.05/03.0/000186/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan Agustus s.d Desember 2024	33.699.600
38	21.05/03.0/000187/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua	79.614.000
39	21.05/03.0/000188/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer	15.300.000
40	21.05/03.0/000189/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Lemari Arsip dan Laci Susun Filing Kabinet	30.500.000
41	21.05/03.0/000190/LS/5.06.0.00.0.0 0.04.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Modal Kursi	7.500.000
JUMLAH			639.222.750

Tabel 219
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Inspektorat Daerah
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000276/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) - Desember 2024	87.726.983
2	21.05/03.0/000277/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan PNS Nopember 2024	390.705.285
3	21.05/03.0/000278/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan PPPK - Nopember 2024	5.408.000
4	21.05/03.0/000279/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan PNS - Desember 2024	390.677.659
5	21.05/03.0/000280/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan PPPK - Desember 2024	5.408.000
6	21.05/03.0/000281/LS/6.01.0.00.0.00. 01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan / BMD	6.845.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
7	21.05/03.0/000346/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Cetak	807.300
8	21.05/03.0/000352/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	350.000
9	21.05/03.0/000284/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	49.370.000
10	21.05/03.0/000350/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Kontribusi	5.000.000
11	21.05/03.0/000354/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Saber Pungli)	89.100.000
12	21.05/03.0/000287/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Korsupgah)	7.950.000
13	21.05/03.0/000288/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000
14	21.05/03.0/000351/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.550.000
15	21.05/03.0/000290/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panita (BPKP)	7.200.000
16	21.05/03.0/000291/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panita (BPKP)	54.000.000
17	21.05/03.0/000292/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	126.518.754
18	21.05/03.0/000293/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Kontribusi/ Diklat dan Perjalanan Dinas Biasa	119.589.460
19	21.05/03.0/000294/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	17.213.555
20	21.05/03.0/000355/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	24.432.025
21	21.05/03.0/000296/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.300.000
22	21.05/03.0/000297/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	32.355.500
23	21.05/03.0/000298/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	10.078.929
24	21.05/03.0/000299/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	10.364.472
25	21.05/03.0/000300/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa	31.393.037
26	21.05/03.0/000301/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.379.000
27	21.05/03.0/000302/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Biasa (Diklat)	29.826.200
28	21.05/03.0/000317/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.875.000
29	21.05/03.0/000318/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000
30	21.05/03.0/000319/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.127.000
31	21.05/03.0/000320/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000
32	21.05/03.0/000321/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000
33	21.05/03.0/000322/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000
34	21.05/03.0/000323/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000
35	21.05/03.0/000324/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.657.000
36	21.05/03.0/000325/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	612.500
37	21.05/03.0/000326/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.220.000
38	21.05/03.0/000327/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000
39	21.05/03.0/000328/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	770.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
40	21.05/03.0/000358/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.189.600
41	21.05/03.0/000356/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	621.300
42	21.05/03.0/000331/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.750.000
43	21.05/03.0/000332/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000
44	21.05/03.0/000357/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	325.600
45	21.05/03.0/000334/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	175.000
46	21.05/03.0/000336/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan Natura	2.272.200
47	21.05/03.0/000337/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan Natura	2.707.200
48	21.05/03.0/000338/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer	6.006.800
49	21.05/03.0/000339/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Cetak	600.000
50	21.05/03.0/000340/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Beroda Dua	445.000
51	21.05/03.0/000341/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Beroda Dua	705.000
52	21.05/03.0/000342/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	200.000
53	21.05/03.0/000343/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Cetak	1.750.000
54	21.05/03.0/000344/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Komputer	1.390.000
55	21.05/03.0/000345/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Kertas dan Cover	258.000
56	21.05/03.0/000347/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000
57	21.05/03.0/000359/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pembayaran Pajak	1.740.000
JUMLAH			1.750.211.359

Tabel 220
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulan November 2024)	48.034.237
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Bulan November 2024)	75.471.356
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Bulan November 2024)	4.578.843
2	21.05/03.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulan Desember 2024)	43.514.453
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Bulan Desember 2024)	71.811.680
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Bulan Desember 2024)	4.330.843
3	21.05/03.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Bulan Agustus - Desember 2024)	70.960.000
4	21.05/03.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tenaga Administrasi (Desember 2024)	42.323.299

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Belanja Tenaga Kebersihan (Desember 2024)	8.541.780
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Desember 2024)	4.142.448
5	21.05/03.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Forkopimcam Okt - Des 2024)	9.750.000
6	21.05/03.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Bulan Agustus - Desember 2024)	6.000.000
7	21.05/03.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.242.800
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.972.500
8	21.05/03.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	834.100
9	21.05/03.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tagihan Listrik	10.030.000
10	21.05/03.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tagihan Air	1.050.000
11	21.05/03.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Tangga Aluminium)	1.370.000
12	21.05/03.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.347.500
13	21.05/03.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.916.000
		Belanja Isi Tabung Gas	930.000
14	21.05/03.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.323.000
15	21.05/03.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Cetak (Spanduk)	1.320.000
16	21.05/03.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.800.000
17	21.05/03.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.077.000
18	21.05/03.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan Cetak (Spanduk)	330.000
19	21.05/03.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.489.000
20	21.05/03.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.200.000
21	21.05/03.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Alat Pendingin	16.950.000
22		Belanja Modal Personal Computer	16.150.000
23	21.05/03.0/000191/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.850.000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	29.400.000
24	21.05/03.0/000192/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.850.000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	29.400.000
25	21.05/03.0/000193/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura	935.000
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	24.025.000
26	21.05/03.0/000194/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.000.000
27	21.05/03.0/000195/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000
28	21.05/03.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tagihan Listrik	2.144.559
JUMLAH			660.515.398

Tabel 221
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.011.079
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.279.696
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.676.688
2	21.05/03.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.487.876
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	78.731.815
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.635.239
3	21.05/03.0/000095/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.401.845
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	78.602.766
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.635.239
4	21.05/03.0/000096/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPKD)	73.350.000
5	21.05/03.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (KJK)	33.600.000
6	21.05/03.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (RT/RW/KALING)	66.450.000
7	21.05/03.0/000099/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (KADER POSYANDU)	16.800.000
8	21.05/03.0/000100/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Laptop	40.300.000
9	21.05/03.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Infocus	12.500.000
10	21.05/03.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024	Belanja Modal Printer	8.850.000
JUMLAH			603.312.243

Tabel 222
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Palmatak
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulan November 2024)	44.838.655

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Bulan November 2024)	67.257.982
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Bulan November 2024)	4.004.324
2	21.05/03.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulan Desember 2024)	44.819.838
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Bulan Desember 2024)	67.229.758
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Bulan Desember 2024)	4.004.324
3	21.05/03.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tenaga Administrasi (Desember 2024)	69.893.616
		Belanja Tenaga Kebersihan (Desember 2024)	21.735.990
		Belanja Tenaga Supir (Desember 2024)	3.575.121
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Desember 2024)	8.131.472
JUMLAH			335.491.080

Tabel 223
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Timur
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Gaji PTT Bulan Desember 2024	42.169.160
2	21.05/03.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	TPP PNS Bulan Desember 2024	56.470.830
3	21.05/03.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	TPP PNS Bulan Nopember 2024	56.470.830
4	21.05/03.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Honorarium PPKD Bulan Agustus-Desember 2024	38.750.000
5	21.05/03.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.650.000
6	21.05/03.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2024	2.700.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
7	21.05/03.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2024	4.200.000
8	21.05/03.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura Bulan Mei 2024 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.941.087
9	21.05/03.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura Bulan Nopember 2024 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.384.421
10	21.05/03.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.693.300
11	21.05/03.0/0000100/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tinta Printer Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.792.650
12	21.05/03.0/0000101/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Upacara 17 dan Festival Layar Jongkong Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.830.000
13	21.05/03.0/0000103/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Paskibra Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000
JUMLAH			289.052.278

Tabel 224
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Selatan
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)			
NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/0000100/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bulan Agustus s/d Desember 2024	576.450
2	21.05/03.0/0000101/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayara Gaji PTT Bulan Desember 2024	23.642.000
3	21.05/03.0/0000102/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan Nopember 2024	71.421.746
4	21.05/03.0/0000103/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2024	71.421.746
5	21.05/03.0/0000104/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Srptember 2024	7.750.000
6	21.05/03.0/0000105/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Oktober 2024	7.750.000
7	21.05/03.0/0000106/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Nopeember 2024	7.750.000
8	21.05/03.0/0000107/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Desember 2024	7.750.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
9	21.05/03.0/0000108/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium BMD Bulan September 2024	1.900.000
10	21.05/03.0/0000109/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium BMD Bulan Oktober 2024	1.900.000
11	21.05/03.0/0000110/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium BMD Bulan November 2024	1.900.000
12	21.05/03.0/0000111/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium BMD Bulan Desember 2024	1.300.000
13	21.05/03.0/0000112/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000
14	21.05/03.0/0000113/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Sembako Bulan Desember 2024	748.000
15	21.05/03.0/0000115/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat Pembersih Bulan Nov s.d Des 2024	1.130.000
16	21.05/03.0/0000116/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Dinas Bulan Juli s.d Nov 2024	6.425.000
17	21.05/03.0/0000117/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Listrik Kantor Jan s.d okt 2024	7.790.000
18	21.05/03.0/0000119/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Pengadaan Belanja Modal personal Computer	40.800.000
19	21.05/03.0/0000121/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Peralatan Computer(printer)	8.400.000,00
20	21.05/03.0/0000122/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Alat Pendingin(kipas angin)	2.600.000,00
21	21.05/03.0/0000123/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Mebel(kursi plastik)	11.400.000,00
22	21.05/03.0/0000124/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja sparepart Kendaraan Bermotor Roda Dua	4.943.000,00
23	21.05/03.0/0000125/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Roda Dua	500.000,00
JUMLAH			295.797.942

Tabel 225
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja Timur
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024	40.144.662
2	21.05/03.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan November 2024	72.095.874
3	21.05/03.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2024	69.513.353
4	21.05/03.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Agustus - Desember 2024	43.250.000
5	21.05/03.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.747.500
6	21.05/03.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pengajuan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.744.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
7	21.05/03.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.0 6.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.375.000
JUMLAH			283.870.389

Tabel 226
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Siantan Tengah
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000089/LS/7.01.0.00.07. 0000/PPR1/12/2024	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	72.963.305
2	21.05/03.0/000090/LS/7.01.0.00.07. 0000/PPR1/12/2024	Administrasi keuangan perangkat daerah (Penyediaan gaji dan tunjangan ASN)	75.765.715
3	21.05/03.0/000091/LS/7.01.0.00.07. 0000/PPR1/12/2024	Administrasi keuangan perangkat daerah (Penyediaan gaji dan tunjangan ASN)	75.705.441
4	21.05/03.0/000092/LS/7.01.0.00.07. 0000/PPR1/12/2024	Administrasi keuangan perangkat daerah Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	18.676.000
5	21.05/03.0/0000117/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik)	2.550.000
6	21.05/03.0/0000118/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyediaan peralatan rumah tangga)	1.800.000
7	21.05/03.0/0000119/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyediaan peralatan rumah tangga)	1.811.000
8	21.05/03.0/0000120/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyediaan peralatan rumah tangga)	330.000
9	21.05/03.0/0000121/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik)	2.500.000
10	21.05/03.0/0000122/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyediaan peralatan rumah tangga)	3.026.000
11	21.05/03.0/0000124/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD)	11.650.000
12	21.05/03.0/0000125/LS/7.01.0.00.0 7.0000/PPR1/12/2024	Administrasi umum perangkat daerah (Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan)	5.740.000
JUMLAH			272.517.461

Tabel 227
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kecamatan Siantan Utara
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	21.05/03.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024	32.652.052

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
2.	21.05/03.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan November 2024	69.799.211
3	21.05/03.0/000099/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2024	70.824.355
4.	21.05/03.0/000100/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan November - Desember 2024	13.500.000
5.	21.05/03.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium BMD Bulan November - Desember 2024	1.798.000
JUMLAH			188.573.618

Tabel 228
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Jemaja Barat
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Gaji PTT Bulan Desember 2024	26.393.140
2	21.05/03.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan November 2024	59.829.841
3	21.05/03.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2024	63.592.986
4	21.05/03.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2024	40.000.000
5	21.05/03.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.025.000
6	21.05/03.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.430.000
7	21.05/03.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit-Personal Komputer	2.920.000
8	21.05/03.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024	Pembayaran Belanja Personal Komputer PC dan Printer	4.200.000
JUMLAH			203.390.967

Tabel 229
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kute Siantan
Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000119/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Jasa Administrasi	43.367.120
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.363.696

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.488.356
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.676.688
2	21.05/03.0/000120/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.482.000
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	34.820.000
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestas Kerja PNS	52.230.000
3	21.05/03.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.482.000
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	34.820.000
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestas Kerja PNS	52.230.000
4	21.05/03.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	710.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	35.990.000
5	21.05/03.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000
6	21.05/03.0/000143/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Tagihan Listrik	3.018.000
7	21.05/03.0/000144/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.242.500
8	21.05/03.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.500.000
9	21.05/03.0/000146/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Sovenir/ Cendera Mata	900.000
10	21.05/03.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000
11	21.05/03.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000
12	21.05/03.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Sovenir/ Cendera Mata	1.800.000
13	21.05/03.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	2.442.000
14	21.05/03.0/000151/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	10.073.361
15	21.05/03.0/000152/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	29.947.800
16	21.05/03.0/000153/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.847.480
17	21.05/03.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas	600.000
18	21.05/03.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemilihan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	1.980.000
19	21.05/03.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover	255.000

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
20	21.05/03.0/000157/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	600.000
21	21.05/03.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.320.000
22	21.05/03.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	5.500.000
23	21.05/03.0/000160/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	588.000
24	21.05/03.0/000161/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000
25	21.05/03.0/000162/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000
26	21.05/03.0/000163/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000
27	21.05/03.0/000164/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.886.050
28	21.05/03.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.200.000
29	21.05/03.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksa Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.400.000
30	21.05/03.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Honorarium Tim Pelaksa Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	910.000
36	21.05/03.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.950.732
32	21.05/03.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Honorarium narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.700.000
33	21.05/03.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000
34	21.05/03.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
35	21.05/03.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.000.000
J U M L A H			446.130.783

7.6.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang belanja modal tahun anggaran berkenaan, bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*), utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga dan uang muka. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp99.044.000,00 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 230
Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Utang Jangka Pendek Lainnya	99.044.000,00	0,00	99.044.000,00	0,00
Jumlah	99.044.000,00	0,00	99.044.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2024 yang belum dilakukan pelunasan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024 tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang.

7.6.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.938.981.680.414,64. Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.938.981.680.414,64 mengalami penurunan sebesar Rp171.929.805.294,93 atau 8,87%.

7.6.4. LAPORAN OPERASIONAL

7.6.4.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 yaitu pada BABVIII tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO.

Akun Pendapatan Daerah - LO diklasifikasikan menurut kelompok yaitu Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Realisasi Pendapatan Daerah – LO Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebesar Rp756.962.470.730,08 dan Tahun 2023 sebesar Rp967.142.183.014,65 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 231
Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	37.343.050.459,08	29.413.046.087,65	7.930.004.371,43	26,96
2	Pendapatan Transfer-LO	719.462.551.608,00	937.673.160.793,00	(218.210.609.185,00)	(23,27)
3	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah-LO	156.868.663,00	55.976.134,00	100.892.529,00	180,24
	JUMLAH	756.962.470.730,08	967.142.183.014,65	(210.179.712.284,57)	(21,73)

Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp756.962.470.730,08. Mengalami penurunan sebesar Rp210.179.712.284,57 atau sebesar 21,78% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp967.142.183.014,65. Akun-akun yang terdapat pada Pendapatan Daerah-LO terdiri dari Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, untuk rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.6.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO merujuk pada total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber daya yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh daerah tersebut, yang tercatat dalam Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen utama dalam keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan yang dapat diperoleh tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp37.343.050.459,08 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.930.004.371,43 atau sebesar 26,96% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp29.413.046.087,65, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 232
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	20.312.677.552,72	16.409.048.498,92	3.903.629.053,80	23,79
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.550.865.563,42	6.997.096.274,00	(5.446.230.710,58)	(77,84)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	1.241.953.264,00	1.596.888.717,00	(354.935.453,00)	(22,23)

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	14.237.554.078,94	4.410.012.597,73	9.827.541.481,21	222,85
JUMLAH		37.343.050.459,08	29.413.046.087,65	7.930.004.371,43	26,96

7.6.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.312.677.552,72. Mengalami kenaikan sebesar Rp3.903.629.053,80 atau sebesar 23,79% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp16.409.048.498,92, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 233
Saldo Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel – LO	5.442.897.052,00	4.176.976.544,00	1.265.920.508,00	30,31
2	Pajak Restoran – LO	11.014.372.531,72	8.345.781.184,92	2.668.591.346,80	31,98
3	Pajak Hiburan-LO	64.588.609,00	68.150.450,00	(3.561.841,00)	(5,23)
4	Pajak Reklame – LO	10.113.325,00	13.692.300,00	(3.578.975,00)	(26,14)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	2.563.596.994,00	2.551.351.688,00	12.245.306,00	0,48
6	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	44,44
7	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan – LO	33.516.661,00	155.490.397,00	(121.973.736,00)	(78,44)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	481.482.934,00	509.367.116,00	(27.884.182,00)	(5,47)
9	PBBP2-LO	692.509.446,00	583.738.819,00	108.770.627,00	18,63
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
JUMLAH		20.312.677.552,72	16.409.048.498,92	3.903.629.053,80	23,79

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 234
Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pajak Daerah	20.312.677.552,72	18.599.426.707,00	1.713.250.845,72
	Jumlah	20.312.677.552,72	18.599.426.707,00	1.713.250.845,72

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.713.250.845,72. Selisih tersebut merupakan penambahan Piutang Pokok PBBP2 Tahun 2024 sebesar Rp289.475.596,00, Penambahan Piutang Pajak Katering Rp1.431.841.405,00 dan Pengurangan Piutang Pajak Restoran Rp8.066.155,28.

7.6.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 4 (empat) SKPD penghasil yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan besaran retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp1.550.865.563,00. Mengalami penurunan sebesar Rp5.446.230.711,00 atau sebesar 77,84% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp6.997.096.274,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 235
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO	29.382.600,00	162.739.052,00	(133.356.452,00)	81,94)
2	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah – LO	692.684.700,00	6.150.770.400,00	(5.458.085.700,00)	(88,74)
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	13.550.000,00	0,00	13.550.000,00	100,00
3	Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum – LO	30.884.000,00	54.408.000,00	(23.524.000,00)	(43,24)
4	Retribusi Los – LO	65.833.240,00	77.282.820,00	(11.449.580,00)	(14,82)
5	Retribusi Kios – LO	221.169.500,00	240.387.800,00	(19.218.300,00)	(7,99)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	0,00	15.419.000,00	(15.419.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	114.447.000,00	0,00	114.447.000,00	100,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	29.952.960,42	0,00	29.952.960,42	100,00
7	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	296.089.202,00	(296.089.202,00)	(100,00)
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	352.961.563,00	0,00	352.961.563,00	100,00
JUMLAH		1.550.865.563,42	6.997.096.274,00	(5.446.230.710,58)	(77,84)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 236
Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.550.865.563,42	1.566.244.153,00	15.378.589,58
Jumlah		1.550.865.563,42	1.566.244.153,00	15.378.589,58

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2024 yaitu sebesar Rp15.378.590,00. Selisih tersebut merupakan Penyesuaian atas Pendapatan diterima dimuka dari perjanjian kerjasama antara Pemkab Anambas dengan PT. Telkom Indonesia, Tbk sebesar Rp1.500.000/Tahun selama 25 Tahun dan dibayarkan dimuka Sebesar Rp 37.500.000,00) pada TA 2021 dan Penambahan Pencatatan Pendapatan diterima dimuka dari perjanjian kerjasama antara Pemkab Anambas dengan PT. PALAPA RING BARAT sebesar Rp11.703.756,00 dan PT. JASTIPMAN COMMERCE MART sebesar Rp5.174.834,00.

- Penyusutan Pendapatan diterima dimuka Rp1.500.000 (-);
- Penambahan Pendapatan Sewa Pemanfaatan BMD Tahun 2024 Rp11.703.756,25 (+);
- Penambahan Pendapatan Sewa Pemanfaatan BMD Tahun 2024 Rp5.174.834,33 (+).

7.6.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 sebesar Rp1.241.953.264,00. Mengalami penurunan sebesar Rp354.935.453,00 atau sebesar 22,23% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.596.888.717,00. Tidak terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dengan LO. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 237
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMDLO	1.241.953.264,00	1.596.888.717,00	(354.935.453,00)	(22,23)
JUMLAH		1.241.953.264,00	1.596.888.717,00	(354.935.453,00)	(22,23)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 238
Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.241.953.264,00	1.241.953.264,00	0,00
Jumlah		1.241.953.264,00	1.241.953.264,00	00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2024.

7.6.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.237.554.078,94. Mengalami peningkatan sebesar Rp9.318.381.981,21 atau sebesar 222,85% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp9.827.541.481,21. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 239
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sewa BMD-LO	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2	Jasa Giro Daerah - LO	294.915.462,00	393.602.509,00	(98.687.047,00)	(25,07277)
3	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	296.754.908,00	(296.754.908,00)	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	43.873.135,00	(43.873.135,00)	(100,00)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	245.677.995,00	0,00	245.677.995,00	100,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	81.307.000,00	(81.307.000,00)	(100,00)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.079.950.187,47	269.675.674,00	810.274.513,47	300,46259
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.199.734.979,59	284.238.838,59	2.915.496.141,00	1025,7205
7	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	8.108.883,00	53.922.580,00	(45.813.697,00)	(84,96199)
8	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	99.278.739,00	103.331.811,10	(4.053.072,10)	(3,922386)
9	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	3.987.140,00	0,00	3.987.140,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	7.458,00	0,00	7.458,00	100,00
11	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	194.800,00	(194.800,00)	(100,00)
12	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	0,00	152.910,00	(152.910,00)	(100,00)
13	Pendapatan Denda PBBP2-LO	100.629.007,00	90.917.572,00	9.711.435,00	10,68
14	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	98.976,00	(98.976,00)	(100,00)
15	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO	870.028,00	22.344,00	847.684,00	3793,788
16	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	1.081.000,00	(1.081.000,00)	(100,00)
17	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	509.159.500,00	1.000,00	509.158.500,00	(100,00)
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	137.002.086,04	(137.002.086,04)	(100,00)
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO	64.897.598,00	0,00	64.897.598,00	100,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	45.526.140,00	0,00	45.526.140,00	100,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK-LO	10.531.509,00	0,00	10.531.509,00	100,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-	7.006.710,00	0,00	7.006.710,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO				
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO	202.078.960,00	0,00	202.078.960,00	100,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	4.548.249,00	1.000.000,00	3.548.249,00	354,8249
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	15.966.278,00	3.400,00	15.962.878,00	469,496
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	292.167.200,00	(292.167.200,00)	(100,00)
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	241.843.090,00	131.226,00	241.711.864,00	184195,1
32	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	8.051.183.617,88	0,00	8.051.183.617,88	100,00
33	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	2358793628	(2.358.793.628,00)	(100,00)
34	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	41.302.548,00	0,00	41.302.548,00	100,00
JUMLAH		14.237.554.078,94	4.410.012.597,73	9.827.541.481,21	222,85

Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 240
Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Lain-Lain PAD Yang Sah	14.237.554.078,94	13.627.765.571,94	100.629.007,00
	Jumlah	14.237.554.078,94	13.627.765.571,94	100.629.007,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LRA dengan saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp100.629.007,00 merupakan penambahan atas Denda PBBP2 – LO Tahun 2024.

7.6.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer - LO ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD. Saldo Pendapatan Transfer - LO untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp719.462.551.608,00. Mengalami penurunan sebesar Rp218.210.609.185,00 atau sebesar 23,27% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp937.673.160.793,00. Terdapat 3 (tiga) sumber Pendapatan Transfer - LO yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Transfer Antar Daerah - LO, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 241
Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) – LO	659.342.149.689,00	859.814.761.237,00	(200.472.611.548,00)	(23,32)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO)	5.680.723.000,00	16.356.155.000,00	(10.675.432.000,00)	(65,27)
3	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO)	54.439.678.919,00	61.502.244.556,00	(7.062.565.637,00)	(11,48)
	JUMLAH	719.462.551.608,00	937.673.160.793,00	(218.210.609.185,00)	(23,27)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer - LRA diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 242
Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer	719.462.551.608,00	773.804.025.511,00	(54.341.473.903,00)
Jumlah		719.462.551.608,00	773.804.025.511,00	(54.341.473.903,00)

Pengakuan Pendapatan Transfer dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer dalam LRA TA 2024. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer dalam LO. Atas Perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan Pendapatan Transfer – LRA Pada Tahun 2024 sebesar Rp54.341.473.903,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat Penerimaan Pendapatan Pokok DBH yang di (TDF) kan pada Tahun 2023 yang telah disalurkan ke Kasda Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 sebesar Rp21.553.208.050,00 dimana Tahun 2023 sudah diakui sebagai Pendapatan – LO (+);
- Terdapat Pengakuan Pendapatan DBH yang disalurkan melalui TDF pada Tahun 2024 sebesar Rp3.916.735.000,00 yang telah diakui sebagai Pendapatan – LO namun belum pada Pendapatan – LRA (-);
- Terdapat Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 atas Dana Bagi Hasil Provinsi berupa Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp15.117.049.818,00 (-);
- Terdapat Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 tidak dicatat dan diakui sebagai Pendapatan - LO sedangkan pada Pendapatan – LRA diakui sebagai Pendapatan sebesar Rp39.367.634.000,00 ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (+);
- Terdapat Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 atas Dana Bagi Hasil Provinsi berupa Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp12.454.416.671,00 (+).

7.6.4.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp659.342.149.689,00. Mengalami penurunan sebesar Rp200.472.611.548,00 atau sebesar 23,32% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp859.814.761.237,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 243
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	142.075.102.910,00	329.835.359.070,00	(187.760.256.160,00)	(56,93)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	395.427.123.385,00	383.849.195.981,00	11.577.927.404,00	3,02
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	77.454.547.851,00	100.946.353.790,00	(23.491.805.939,00)	(23,27)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	44.385.375.543,00	45.183.852.396,00	(798.476.853,00)	1,77
JUMLAH		659.342.149.689,00	859.814.761.237,00	(200.472.611.548,00)	23,32

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 244
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat	659.342.149.689,00	676.978.622.739,00	(17.636.473.050,00)
Jumlah		659.342.149.689,00	676.978.622.739,00	(17.636.473.050,00)

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun 2024. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil tunda salur TDF 2023 yang disalurkan pada Tahun 2024 sebesar Rp21.553.208.050,00, dan Penambahan Pencatatan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil (TDF) yang sudah disalurkan RKUN ke Rekening penampung Bank Indonesia atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dimana per 31 Desember 2024 belum dilakukan penyaluran ke RKUD sebesar 3.916.735.000,00.

7.6.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO

Saldo Dana Bagi Hasil Pajak – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.219.955.910,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp8.521.881.840,00 atau sebesar 17,87%. Dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp47.698.074.070,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 245
Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DBH PBB-LO	39.035.542.000,00	25.423.255.000,00	13.612.287.000,00	53,54
2	DBH PPh Pasal 21-LO	16.485.571.000,00	21.245.524.000,00	(4.759.953.000,00)	(22,40)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	687.525.000,00	1.025.591.000,00	(338.066.000,00)	(32,96)
4	DBH CHT-LO	11.317.910,00	3.704.070,00	7.613.840,00	205,55
JUMLAH		56.219.955.910,00	47.698.074.070,00	8.521.881.840,00	17,87

Penjelasan Perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak – LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 246
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Bagi Hasil Pajak	56.219.955.910,00	77.483.389.960,00	21.263.434.050,00
Jumlah		56.219.955.910,00	77.483.389.960,00	21.263.434.050,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak - LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun 2024. Selisih tersebut merupakan Penyesuaian Treasury Deposit Facility (TDF) atas Pendapatan Transfer Pusat yang sudah diakui pada Tahun 2023 dan di Transfer Tahun 2024 (Rekening telah disesuaikan atas Audited TA 2023 yaitu pada Rekening DBH-PBB) sebesar Rp21.553.208.050,00 dan Penyesuaian atas Tambahan TDF TA 2024 sebesar Rp289.774.000,00.

7.6.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO

Saldo Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.855.147.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp196.282.138.000,00 atau sebesar 69,57% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp282.137.285.000,00. Rincian Realiasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 247
Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	19.440.604.000,00	212.096.529.738,00	(192.655.925.738,00)	(90,83)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	60.200.363.000,00	62.397.545.262,00	(2.197.182.262,00)	(3,52)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	339.945.000,00		339.945.000,00	100,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.000,00	884.582.000,00	(884.581.000,00)	(100,00)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	24.833.000,00	20.186.000,00	4.647.000,00	23,02
6	DBH SDA Perikanan-LO	5.849.401.000,00	6.738.442.000,00	(889.041.000,00)	(13,19)
JUMLAH		85.855.147.000,00	282.137.285.000,00	(196.282.138.000,00)	(69,57)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 248
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	85.855.147.000,00	82.228.186.000,00	3.626.961.000,00
Jumlah		85.855.147.000,00	82.228.186.000,00	3.626.961.000,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LRA Tahun 2024 sebesar Rp3.626.961.000,00, hal ini dikarenakan Tahun 2024 adanya penambahan TDF pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp395.427.123.385,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp11.577.927.404,00 atau sebesar 3,02% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp383.849.195.981,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 249
Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DAU-LO	299.390.806.000,00	383.849.195.981,00	(84.458.389.981,00)	(22,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian	3.504.211.385,00	0,00	3.504.211.385,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO				
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	37.815.691.000,00	0,00	37.815.691.000,00	100,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	18.358.729.000,00	0,00	18.358.729.000,00	100,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	35.957.686.000,00	0,00	35.957.686.000,00	100,00
JUMLAH		395.427.123.385,00	383.849.195.981,00	11.577.927.404,00	3,02

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 250
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Umum-LO	395.427.123.385,00	395.427.123.385,00	0,00
Jumlah		395.427.123.385,00	395.427.123.385,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA Tahun 2024.

7.6.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.839.923.394,00. Mengalami penurunan sebesar Rp24.290.282.792,00 atau sebesar 16,62%. dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp146.130.206.186,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 251
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	77.454.547.851,00	100.946.353.790,00	(23.491.805.939,00)	(23,27)
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	44.385.375.543,00	45.183.852.396,00	(798.476.853,00)	(1,77)
JUMLAH		121.839.923.394,00	146.130.206.186,00	(24.290.282.792,00)	(16,62)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 252
Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	121.839.923.394,00	121.839.923.394,00	0,00
Jumlah		121.839.923.394,00	121.839.923.394,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Tahun 2024.

7.6.4.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO

Saldo Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.680.723.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp10.675.432.000,00 atau sebesar 65,27% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp16.356.155.000,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 253
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	10.659.002.000,00	(10.659.002.000,00)	100,00
2	Insentif Fiskal - LO	5.680.723.000,00	5.697.153.000,00	(16.430.000,00)	(0,29)
JUMLAH		5.680.723.000,00	16.356.155.000,00	(10.675.432.000,00)	(65,27)

Penjelasan Perbedaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 254
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.680.723.000,00	45.048.357.000,00	39.367.634.000,00
Jumlah		5.680.723.000,00	45.048.357.000,00	39.367.634.000,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 yang tidak dicatat pada LO dan hanya diakui sebagai Pendapatan - LRA sebesar Rp39.367.634.000,00, ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

7.6.4.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Saldo Dana Insentif Daerah (DID) - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp10.659.002.000,00 atau sebesar 100% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp10.659.002.000,00. Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 255
Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	10.659.002.000,00	(10.659.002.000,00)	(100,00)
JUMLAH		0,00	10.659.002.000,00	(10.659.002.000,00)	(100,00)

Penjelasan Perbedaan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 256
Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LRA

7.6.4.1.2.2.2. Insentif Fiskal – LO

Saldo Insentif Fiskal - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.680.723.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp16.430.000,00 atau sebesar 0,29% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp5.697.153.000,00. Rincian Insentif Fiskal – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 257
Pendapatan Insentif Fiskal - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Insentif Fiskal - LO	5.680.723.000,00	5.697.153.000,00	(16.430.000,00)	(0,29)
JUMLAH		5.680.723.000,00	5.697.153.000,00	(16.430.000,00)	(0,29)

Penjelasan Perbedaan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 258
Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Fiskal antara LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Insentif Fiskal	5.680.723.000,00	5.680.723.000,00	0,00
Jumlah		5.680.723.000,00	5.680.723.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LRA.

7.6.4.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA - LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.439.678.919,00. Mengalami penurunan sebesar Rp7.062.565.637,00 atau sebesar 11,48% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp61.502.244.556,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 259
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	54.354.178.919	56.317.662.642,00	(1.963.483.723,00)	(3,49)
2	Bantuan Keuangan - LO	85.500.000,00	5.184.581.914,00	(5.099.081.914,00)	(98,35)
JUMLAH		54.439.678.919,00	61.502.244.556,00	(7.062.565.637,00)	(11,48)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 260
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	54.439.678.919,00	51.777.045.772,00	2.662.633.147,00
Jumlah		54.439.678.919,00	51.777.045.772,00	2.662.633.147,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO dengan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LRA sebesar 2.662.633.147,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp 12.454.416.671,00 dan Penambahan Piutang atas Tunda Salur sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Rp15.117.049.818,00.

7.6.4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp54.354.178.919,00. Mengalami penurunan sebesar Rp1.963.483.723,00 atau sebesar Rp3,49% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp56.317.662.642,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 261
Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	12.865.869.641,00	11.562.299.851,00	1.303.569.790,00	11,27
2	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	11.336.985.675,00	9.591.371.336,00	1.745.614.339,00	18,20
3	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	20.407.661.179,00	25.883.447.233,00	(5.475.786.054,00)	(21,16)
4	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan – LO	43.016.353,00	35.911.012,00	7.105.341,00	19,79
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	9.700.646.071,00	9.244.633.210,00	456.012.861,00	4,93
JUMLAH		54.354.178.919,00	56.317.662.642,00	(1.963.483.723,00)	(3,49)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil - LRA Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 262
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	54.354.178.919,00	51.691.545.772,00	2.662.633.147,00
Jumlah		54.354.178.919,00	51.691.545.772,00	2.662.633.147,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO dengan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LRA sebesar Rp2.662.633.147,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp12.454.416.671,00 dan Penambahan atas Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 atas Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp15.117.049.818,00.

7.6.4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan – LO

Saldo Pendapatan Bantuan Keuangan - LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp85.500.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp5.099.081.914,00 atau sebesar 98,35% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.184.581.914,00. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 263
Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Keuangan - LO	85.500.000,00	5.184.581.914	(5.099.081.914,00)	(98,35)
JUMLAH		85.500.000,00	5.184.581.914	(5.099.081.914,00)	(98,35)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bantuan Keuangan– LO dengan Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 264
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Bantuan Keuangan	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
Jumlah		85.500.000,00	85.500.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan – LO dengan Bantuan Keuangan – LRA.

7.6.4.1.3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp156.868.663,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp156.868.663,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp11.552.146.713,00. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO. Rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 265
Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Lainnya – LO	156.868.663,00	55.976.134,00	100.892.529,00	180,24
JUMLAH		156.868.663,00	55.976.134,00	100.892.529,00	180,24

Tabel 266
Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Lainnya – LO	156.868.663,00	156.868.663,00	0,00
Jumlah		156.868.663,00	156.868.663,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2024 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Lainnya -LO dan LRA.

7.6.4.2. BEBAN – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (diskonto) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022. Beban yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Saldo Beban Tahun 2024 sebesar Rp939.595.002.728,69 mengalami kenaikan sebesar Rp41.249.676.943,18 atau 4,59% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp898.345.325.785,51. Akuntansi beban disajikan dalam rangka menyusun Laporan Operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7.6.4.2.1. BEBAN OPERASI – LO

Beban Operasi merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 (satu) Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban Operasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Saldo Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp881.454.082.002,19. Mengalami kenaikan sebesar Rp56.886.767.811,68 atau sebesar 6,90% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp824.567.314.190,51. Rincian Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 267
Beban Operasi SKPKD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Beban Operasi	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai - LO	385.656.673.477,00	334.517.144.489,73	51.139.528.987,27	15,29
2	Beban Barang - LO	82.075.286.624,78	85.994.032.217,74	(3.918.745.592,96)	(4,56)
3	Beban Jasa - LO	160.561.731.211,11	191.310.121.160,00	(30.748.389.948,89)	(16,07)
4	Beban Pemeliharaan - LO	4.392.930.276,00	5.109.736.048,00	(716.805.772,00)	(14,03)
5	Beban Perjalanan Dinas - LO	46.998.224.310,00	47.617.887.044,00	(619.662.734,00)	(1,30)
6	Beban Hibah - LO	23.100.436.536,00	17.149.119.101,00	5.951.317.435,00	34,70
7	Beban Bantuan Sosial - LO	629.305.000,00	161.614.000,00	467.691.000,00	289,39
8	Beban Penyisihan - LO	199.817.669,01	177.056.125,80	22.761.543,21	12,86
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	177.839.676.898,29	142.530.604.004,24	35.309.072.894,05	24,77
Jumlah		881.454.082.002,19	824.567.314.190,51	56.886.767.811,68	6,90

7.6.4.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Beban Pegawai BLUD. Saldo Beban Pegawai - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp385.656.673.477,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp51.231.464.987,27 atau sebesar 15,29 % dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp334.517.144.489,73. Rincian Beban Pegawai-LO Per SKPD Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 268
Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	20.012.411.636,00	17.603.356.232,00	2.409.055.404,00	13,69
2	Sekretariat DPRD	14.193.221.421,00	12.843.317.578,00	1.349.903.843,00	10,51
3	Inspektorat	8.382.809.385,00	7.772.144.312,00	610.665.073,00	7,86
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	140.123.076.071,00	117.617.078.763,00	22.505.997.308,00	19,13
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81.963.757.665,00	67.389.460.334,73	14.574.297.330,27	21,63
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.375.426.100,00	8.695.716.718,00	679.709.382,00	7,82
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.343.068.455,00	4.161.533.135,00	181.535.320,00	4,36
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.731.499.593,00	3.828.216.763,00	(96.717.170,00)	(2,53)
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	8.922.949.421,00	7.626.490.640,00	1.296.458.781,00	17,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6.066.476.302,00	5.376.411.982,00	690.064.320,00	12,84

No	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.333.758.223,00	5.504.281.975,00	829.476.248,00	15,07
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.489.333.450,00	4.315.969.388,00	173.364.062,00	4,02
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	5.584.699.213,00	5.146.383.341,00	438.315.872,00	8,52
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.651.687.234,00	3.311.086.807,00	340.600.427,00	10,29
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4.968.823.674,00	4.680.803.256,00	288.020.418,00	6,15
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.107.723.889,00	4.900.028.328,00	1.207.695.561,00	24,65
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.596.771.909,00	16.984.539.993,00	(7.387.768.084,00)	(43,50)
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	5.853.881.649,00	5.439.435.584,00	414.446.065,00	7,62
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	3.408.274.776,00	2.746.758.013,00	661.516.763,00	24,08
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.421.709.633,00	4.438.560.767,00	983.148.866,00	22,15
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.441.221.306,00	1.926.636.752,00	514.584.554,00	26,71
22	Kecamatan Jemaja	3.731.909.299,00	3.601.024.703,00	130.884.596,00	3,63
23	Kecamatan Jemaja Timur	1.905.020.320,00	1.813.397.944,00	91.622.376,00	5,05
24	Kecamatan Palmatak	2.934.005.660,00	2.681.341.138,00	252.664.522,00	9,42
25	Kecamatan Siantan	3.065.707.157,00	2.797.666.959,00	268.040.198,00	9,58
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.816.049.740,00	1.701.746.408,00	114.303.332,00	6,72
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.908.852.644,00	1.784.013.433,00	124.839.211,00	7,00
28	Kecamatan Siantan Timur	1.614.594.676,00	1.637.451.453,00	(22.856.777,00)	(1,40)
29	Kecamatan Siantan Utara	1.707.888.566,00	1.504.523.042,00	203.365.524,00	13,52
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.450.471.550,00	1.448.141.201,00	2.330.349,00	0,16
31	Kecamatan Kute Siantan	2.192.988.953,00	2.094.104.999,00	98.883.954,00	4,72
32	Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.368.665.525,00	46.080.000,00	4.322.585.525,00	9.380,61
33	Dinas Perpustakaan dan Arsipan Daerah	1.820.263.010,00	1.007.535.548,00	812.727.462,00	80,66

No	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.167.675.372,00	91.907.000,00	2.075.768.372,00	2.258,55
JUMLAH		385.656.673.477,00	334.517.144.489,73	51.139.528.987,27	15,29

Tabel 269
Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Pegawai	385.656.673.477,00	354.110.209.828,00	31.546.463.649,00
Jumlah		385.656.673.477,00	354.110.209.828,00	31.546.463.649,00

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2024 terdapat selisih sebesar Rp31.546.463.649,00 antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini tidak sama dengan pengakuan Belanja Pegawai pada LRA. Selisih tersebut merupakan Adanya Penambahan Hutang Pegawai akibat ketidak tersediaanya dana operasional untuk melakukan pembayaran terhadap beban pegawai yang timbul per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.847.649.649,00, pengurangan atas pelunasan hutang beban pegawai pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp209.250.000 atas Hutang Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru dan Pengurangan atas Koreksi Beban Pegawai SKPD Damkar yang diakui hutangnya pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp91.936.000,00.

7.6.4.2.1.2. Beban Barang – LO

Beban Barang – LO merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanandinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan Akun Beban Persediaan/Barang yaitu terdiri dari Beban Barang Pakai Habis dan Beban Barang Tak Habis Pakai, sehingga menjadi akun Beban Barang untuk mengakomodir seluruh barang yang habis pakai dan barang tidak habis pakai yang dikeluarkan oleh SKPD selama 1 satu tahun laporan.

Beban barang habis pakai dan/atau barang tidak habis pakai dicatat sebesar pemakaian barang persediaan tersebut (use of goods inventory). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian beban barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Beban Barang-LO adalah sebesar Rp82.075.286.624,78. Sedangkan Beban Barang-LO Tahun

2023 adalah sebesar Rp85.994.032.217,74 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp3.918.745.592,96 atau sebesar 4,56%.

Tabel 270
Realisasi Beban Barang Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Persediaan Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	388.903.850,00	613.238.375,00	(224.334.525,00)	(36,58)
2	Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia	153.349.056,00	165.111.378,00	(11.762.322,00)	(7,12)
3	Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.247.459.681,00	3.968.293.966,00	(720.834.285,00)	(18,16)
4	Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku	62.793.670,00	31.391.540,00	31.402.130,00	100,03
5	Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.595.171,00	18.961.600,00	(17.366.429,00)	(91,59)
6	Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	49.600.378,00	47.734.600,00	1.865.778,00	3,91
7	Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	72.741.449,00	372.859.178,00	(300.117.729,00)	(80,49)
8	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	65.667.450,00	118.127.438,00	(52.459.988,00)	(44,41)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	597.180.562,00	54.668.500,00	542.512.062,00	992,37
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	25.460.000,00	1.000.000,00	24.460.000,00	2.446,00
12	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.497.500,00	9.923.729,00	(7.426.229,00)	(74,83)
13	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424.101.761,00	1.351.904.618,00	(927.802.857,00)	(68,63)
14	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.570.656.826,00	1.942.343.571,00	(371.686.745,00)	(19,14)
15	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.502.190.167,00	2.797.275.121,00	(295.084.954,00)	(10,55)
16	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	575.924.700,00	616.451.588,00	(40.526.888,00)	(6,57)
17	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.123.774.237,00	1.680.633.063,00	(556.858.826,00)	(33,13)
18	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	506.701.092,00	750.494.897,00	(243.793.805,00)	(32,48)
19	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk	2.448.588.863,00	1.070.701.471,00	1.377.887.392,00	128,69

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Kantor- Alat Listrik				
20	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	86.764.440,00	599.795.440,00	(513.031.000,00)	(85,53)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporalap dan Perlengkapan Satwa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	540.879.770,00	477.320.056,00	63.559.714,00	13,32
23	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	882.630.298,00	444.199.351,00	438.430.947,00	98,70
24	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.094.954.942,00	526.088.694,10	568.866.247,90	108,13
25	Beban Persediaan Obat-Obatan	5.582.453.869,29	12.158.862.002,00	(6.576.408.132,71)	(54,09)
26	Beban Persediaan Obat-Obatan Lainnya	4.018.320.990,49	2.295.684.759,00	1.722.636.231,49	75,04
27	Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.363.849.141,00	23.458.174.934,00	(1.094.325.793,00)	(4,67)
28	Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.678.649.712,00	5.125.559.464,00	(3.446.909.752,00)	(67,25)
29	Beban Persediaan Natura dan Pakan-Natura	1.987.429.206,00	2.239.065.296,00	(251.636.090,00)	(11,24)
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	75.774.689,00	(75.774.689,00)	(100,00)
31	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	3.082.719.980,00	3.503.018.316,00	(420.298.336,00)	(12,00)
32	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.143.092.759,00	1.429.843.197,00	(286.750.438,00)	(20,05)
33	Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	71.832.500,00	74.526.000,00	(2.693.500,00)	(3,61)
34	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.680.039.427,00	4.392.382.570,00	287.656.857,00	6,55
35	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	305.000.000,00	305.111.200,00	(111.200,00)	(0,04)
36	Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	254.650.000,00	346.405.020,00	(91.755.020,00)	(26,49)
37	Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	151.984.000,00	829.485.560,00	(677.501.560,00)	(81,68)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
38	Beban Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
39	Beban Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	63.592.566,00	(63.592.566,00)	(100,00)
40	Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah	657.098.000,00	919.152.680,00	(262.054.680,00)	(28,51)
41	Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	102.210.000,00	135.895.000,00	(33.685.000,00)	(24,79)
42	Beban Persediaan Pakaian Olahraga	323.850.000,00	355.471.270,00	(31.621.270,00)	(8,90)
43	Beban Pakaian Paskibraka	243.735.000,00	166.644.500,00	77.090.500,00	46,26
44	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.530.000,00	8.603.000,00	(7.073.000,00)	(82,22)
45	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	534.033.250,00	521.896.740,00	12.136.510,00	2,33
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00	100,00
47	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	9.213.000,00	0,00	9.213.000,00	100,00
48	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	201.112.492,00	0,00	201.112.492,00	100,00
49	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	197.649.148,00	0,00	197.649.148,00	100,00
49	Beban Barang dan Jasa BOS	7.258.208.007,00	7.666.383.280,64	(408.175.273,64)	(5,32)
49	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.622.156.077,00	0,00	3.622.156.077,00	100,00
49	Beban Barang dan Jasa BLUD	4.882.900.181,00	0,00	4.882.900.181,00	100,00
50	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.062.154.022,00	2.256.432.000,00	(194.277.978,00)	(8,61)
Jumlah		82.075.286.624,78	85.994.032.217,74	(3.918.745.592,96)	(4,56)

Rincian Beban Barang pada masing-masing SKPD pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 271
Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	6.482.367.965,00	6.792.735.237,00	(310.367.272,00)	(4,57)
2	Sekretariat DPRD	3.034.286.117,00	2.341.389.053,00	692.897.064,00	29,59
3	Inspektorat	249.329.531,00	211.327.000,00	38.002.531,00	17,98
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	12.660.233.530,00	16.284.773.464,64	(3.624.539.934,64)	(22,26)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.358.346.897,93	22.759.987.473,10	1.598.359.424,83	7,02
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.893.090.983,00	7.407.149.984,00	7.485.940.999,00	101,06
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	546.242.496,00	544.667.848,00	1.574.648,00	0,29
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.995.424,00	279.235.793,00	(141.240.369,00)	(50,58)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	592.314.799,00	497.342.185,00	94.972.614,00	19,10
10	Dinas Perikanan. Pertanian Dan Pangan	4.847.922.024,85	11.464.013.991,00	(6.616.091.966,15)	(57,71)
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	1.130.101.510,00	2.035.814.789,00	(905.713.279,00)	(44,49)
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	494.023.796,00	336.726.984,00	157.296.812,00	46,71
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	279.791.150,00	124.379.700,00	155.411.450,00	124,95
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	326.388.610,00	306.179.412,00	20.209.198,00	6,60
15	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	884.303.083,00	1.245.955.528,00	(361.652.445,00)	(29,03)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	549.612.100,00	2.835.091.023,00	(2.285.478.923,00)	(80,61)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	302.989.484,00	1.516.904.326,00	(1.213.914.842,00)	(80,03)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	529.227.200,00	302.235.340,00	226.991.860,00	75,10
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	856.233.214,00	617.439.965,00	238.793.249,00	38,67
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	1.277.232.693,00	773.655.338,00	503.577.355,00	65,09
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	791.660.750,00	422.959.750,00	368.701.000,00	87,17
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.857.588.482,00	533.319.690,00	1.324.268.792,00	248,31
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	220.542.658,00	477.913.160,00	(257.370.502,00)	(53,85)
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	210.898.441,00	153.005.799,00	57.892.642,00	37,84
25	Kecamatan Jemaja	647.709.505,00	413.585.240,00	234.124.265,00	56,61

No.	SKPD	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
26	Kecamatan Jemaja Timur	360.117.600,00	258.032.510,00	102.085.090,00	39,56
27	Kecamatan Palmatak	523.953.500,00	942.355.120,00	(418.401.620,00)	(44,40)
28	Kecamatan Siantan	1.196.182.073,00	1.730.300.335,00	(534.118.262,00)	(30,87)
29	Kecamatan Siantan Selatan	316.050.010,00	444.955.506,00	(128.905.496,00)	(28,97)
30	Kecamatan Siantan Tengah	229.877.100,00	399.178.825,00	(169.301.725,00)	(42,41)
31	Kecamatan Siantan Timur	511.370.937,00	863.074.273,00	(351.703.336,00)	(40,75)
32	Kecamatan Siantan Utara	214.580.365,00	170.461.800,00	44.118.565,00	25,88
33	Kecamatan Jemaja Barat	259.991.350,00	342.230.976,00	(82.239.626,00)	(24,03)
34	Kecamatan Kute Siantan	302.731.246,00	165.654.800,00	137.076.446,00	82,75
Jumlah		82.075.286.624,78	85.994.032.217,74	(3.918.745.592,96)	(4,56)

Perbandingan perbedaan Beban Barang - LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 272
Perbedaan Realisasi Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang (Persediaan)-
LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Persediaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Persediaan	82.075.286.624,78	62.303.858.431,00	20.667.347.193,78
Jumlah	82.075.286.624,78	62.303.858.431,00	20.667.347.193,78

Tabel di atas menunjukkan selisih antara Beban Persediaan - LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA pada Tahun 2024 sebesar Rp19.771.428.193,78 terdiri dari penambahan Hutang Beban Operasi yang berakhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.901.310.355,37, pengurangan beban atas pelunasan hutang Rp137.764.034,63 dan penyesuaian atas sisa persediaan Tahun 2024 Rp5.732.353.803,78.

7.6.4.2.1.3. Beban Jasa – LO

Saldo Beban Jasa - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp160.561.731.211,11. Mengalami penurunan sebesar Rp30.748.389.948,89 atau sebesar 16,07% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp191.310.121.160,00.

Tabel 273
Beban Jasa-LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,	1.994.385.000,00	3.276.375.000,00	(1.281.990.000,00)	(39,13)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.443.855.000,00	5.372.510.000,00	71.345.000,00	1,33
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	390.529.837,00	295.202.274,00	95.327.563,00	32,29
4	Beban Honorarium Rohaniwan	729.700.000,00	719.800.000,00	9.900.000,00	1,38
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	443.120.000,00	447.190.000,00	(4.070.000,00)	(0,91)
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	130.000.000,00	188.100.000,00	(58.100.000,00)	(30,89)
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	738.000.000,00	675.600.000,00	62.400.000,00	9,24
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	10.016.657.344,11	15.034.040.772,00	(5.017.383.427,89)	(33,37)
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	24.142.500,00	9.657.000,00	14.485.500,00	150,00
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	773.182.044,00	722.624.575,00	50.557.469,00	7,00
11	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.550.601.178,00	5.677.592.198,00	(126.991.020,00)	(2,24)
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.305.576.358,00	2.561.518.810,00	(255.942.452,00)	(9,99)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.307.571.327,00	4.036.941.922,00	270.629.405,00	6,70
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	75.330.561,00	(75.330.561,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.586.081.500,00	2.064.011.944,00	(477.930.444,00)	(23,16)
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	329.563.855,00	447.685.693,00	(118.121.838,00)	(26,38)
17	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	339.835.588,00	0,00	339.835.588,00	#DIV/0!
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	39.500.000,00	345.500.000,00	(306.000.000,00)	(88,57)
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	64.274.919.137,00	74.215.203.788,00	(9.940.284.651,00)	(13,39)
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	139.397.290,00	(139.397.290,00)	(100,00)
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.699.583.936,00	3.993.034.408,00	(1.293.450.472,00)	(32,39)
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.540.794.042,00	3.441.688.064,00	99.105.978,00	2,88
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.864.847.178,00	7.316.164.751,00	(451.317.573,00)	(6,17)
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.353.156.753,00	959.383.746,00	393.773.007,00	41,04
25	Beban Jasa Tenaga Supir	1.368.191.728,00	1.640.522.971,00	(272.331.243,00)	(16,60)
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	360.451.391,00	369.171.087,00	(8.719.696,00)	(2,36)
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	74.552.736,00	59.552.736,00	15.000.000,00	25,19
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	127.500.000,00	92.600.000,00	34.900.000,00	37,69
29	Beban Jasa Tata Rias	10.500.000,00	5.940.000,00	4.560.000,00	76,77

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
30	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	577.245.658,00	155.066.323,00	422.179.335,00	272,26
31	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	53.776.368,00	277.196.661,00	(223.420.293,00)	(80,60)
32	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	#DIV/0!
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	418.017.200,00	(418.017.200,00)	(100,00)
34	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	19.679.370,00	21.087.249,00	(1.407.879,00)	(6,68)
35	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.396.395.000,00	5.324.847.000,00	(928.452.000,00)	(17,44)
36	Beban Jasa Operator Kapal	2.199.960.377,00	1.868.845.361,00	331.115.016,00	17,72
37	Beban Tagihan Telepon	99.853.300,00	114.589.156,00	(14.735.856,00)	(12,86)
38	Beban Tagihan Air	55.205.180,00	75.724.341,00	(20.519.161,00)	(27,10)
39	Beban Tagihan Listrik	3.753.389.552,00	3.633.231.388,00	120.158.164,00	3,31
40	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	4.820.000,00	(4.820.000,00)	(100,00)
41	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.687.388.152,00	2.861.005.712,00	(173.617.560,00)	(6,07)
42	Beban Paket/Pengiriman	199.830.560,00	324.235.100,00	(124.404.540,00)	(38,37)
43	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	74.452.900,00	105.845.950,00	(31.393.050,00)	(29,66)
44	Beban Medical Check Up	182.288.600,00	157.839.034,00	24.449.566,00	15,49
45	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	29.983.560,00	0,00	29.983.560,00	#DIV/0!
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	903.544.856,00	0,00	903.544.856,00	#DIV/0!
47	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.170.952.700,00	8.221.629.200,00	(50.676.500,00)	(0,62)
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	657.196.400,00	601.795.600,00	55.400.800,00	9,21
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.941.463.581,00	8.299.281.713,00	(1.357.818.132,00)	(16,36)
50	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	564.920.716,49	800.060.808,00	(235.140.091,51)	(29,39)
51	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	543.552.334,51	675.459.370,00	(131.907.035,49)	(19,53)
52	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	24.000.000,00	31.968.000,00	(7.968.000,00)	(24,92)
53	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	308.627.036,00	210.739.670,00	97.887.366,00	46,45
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.245.000,00	4.830.000,00	26.415.000,00	546,89
55	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	54.322.958,00	72.821.030,00	(18.498.072,00)	(25,40)
56	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.706.799.000,00	2.042.060.818,00	(335.261.818,00)	(16,42)
57	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	54.300.000,00	20.000.000,00	34.300.000,00	171,50
58	Beban Sewa Peralatan Jaringan	93.600.000,00	93.600.000,00	-	-
59	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.796.407.835,00	4.087.091.791,00	(1.290.683.956,00)	(31,58)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
60	Beban Sewa Bangunan Gudang	797.051.299,00	748.926.463,00	48.124.836,00	6,43
61	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	15.898.302,00	0,00	15.898.302,00	#DIV/0!
62	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	539.282.500,00	247.034.980,00	292.247.520,00	118,30
63	Beban Sewa Bangunan Parkir	0,00	21.970.000,00	(21.970.000,00)	(100,00)
64	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	64.130.000,00	(64.130.000,00)	(100,00)
65	Beban Sewa Asrama	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	#DIV/0!
66	Beban Sewa Hotel	111.300.000,00	47.364.500,00	63.935.500,00	134,99
67	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	270.950.000,00	299.650.000,00	(28.700.000,00)	(9,58)
68	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	180.508.000,00	205.135.182,00	(24.627.182,00)	(12,01)
69	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	9.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)
70	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	171.305.500,00	194.947.000,00	(23.641.500,00)	(12,13)
71	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.508.053.055,00	192.390.298,00	1.315.662.757,00	683,85
72	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	270.125.160,00	2.393.891.327,00	(2.123.766.167,00)	(88,72)
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	180.652.500,00	659.593.080,00	(478.940.580,00)	(72,61)
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	496.066.215,00	1.921.866.695,00	(1.425.800.480,00)	(74,19)
75	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	305.363.611,00	102.686.100,00	202.677.511,00	197,38
76	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.347.922.068,00	1.876.875.596,00	(528.953.528,00)	(28,18)
77	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	34.299.000,00	4.445.559.909,00	(4.411.260.909,00)	(99,23)
78	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	54.861.750,00	243.681.075,00	(188.819.325,00)	(77,49)
79	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	497.719.825,00	1.657.240.290,00	(1.159.520.465,00)	(69,97)
80	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	57.500.000,00	(57.500.000,00)	(100,00)
81	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
82	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	318.908.000,00	814.341.600,00	(495.433.600,00)	(60,84)
83	Beban Bimbingan Teknis	0,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(100,00)
84	Beban Diklat Kepemimpinan	298.285.000,00	277.309.000,00	20.976.000,00	7,56

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	160.561.731.211,11	191.310.121.160,00	(30.748.389.948,89)	(16,07)

Rincian Beban Jasa-LO Tahun 2024 dan 2023 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 274
Beban Jasa Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	11.476.565.344,00	12.772.801.448,00	(1.296.236.104,00)	(10,15)
2	Sekretariat DPRD	4.384.178.573,00	5.477.278.111,00	(1.093.099.538,00)	(19,96)
3	Inspektorat	2.002.339.803,00	2.251.835.761,00	(249.495.958,00)	11,08)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	41.291.402.037,00	46.243.511.996,00	(4.952.109.959,00)	(10,71)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.554.845.810,11	41.001.503.328,00	(7.446.657.517,89)	(18,16)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.926.784.163,00	17.682.439.233,00	(11.755.655.070,00)	(66,48)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	877.715.770,00	1.416.067.885,00	(538.352.115,00)	(38,02)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	916.060.940,00	1.031.680.972,00	(115.620.032,00)	(11,21)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	841.932.720,00	702.993.649,00	138.939.071,00	19,76
10	Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	3.889.016.843,00	4.305.657.035,00	(416.640.192,00)	(9,68)
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	7.085.783.943,00	7.235.807.456,00	(150.023.513,00)	(2,07)
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.222.684.462,00	2.367.737.616,00	(145.053.154,00)	(6,13)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.530.705.808,00	1.138.578.560,00	392.127.248,00	34,44
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.187.319.524,00	6.561.247.993,00	(373.928.469,00)	(5,70)
15	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	2.527.603.196,00	2.860.863.343,00	(333.260.147,00)	(11,65)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.676.086.379,00	2.388.835.607,00	(712.749.228,00)	(29,84)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	6.381.181.563,00	6.629.804.259,00	(248.622.696,00)	(3,75)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.161.719.145,00	1.649.962.624,00	(488.243.479,00)	(29,59)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.578.344.219,00	8.790.588.591,00	(3.212.244.372,00)	(36,54)
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	3.382.794.679,00	2.991.059.049,00	391.735.630,00	13,10
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.003.139.639,00	949.614.598,00	53.525.041,00	5,64

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.890.991.919,00	4.754.484.688,00	136.507.231,00	2,87
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	348.180.202,00	356.967.592,00	(8.787.390,00)	(2,46)
24	Kecamatan Jemaja	1.520.496.872,00	1.619.985.409,00	(99.488.537,00)	(6,14)
25	Kecamatan Jemaja Timur	568.479.750,00	683.570.890,00	(115.091.140,00)	(16,84)
26	Kecamatan Palmatak	1.328.614.156,00	1.372.238.505,00	(43.624.349,00)	(3,18)
27	Kecamatan Siantan	1.483.225.417,00	1.528.091.666,00	(44.866.249,00)	(2,94)
28	Kecamatan Siantan Selatan	331.361.248,00	356.761.046,00	(25.399.798,00)	(7,12)
29	Kecamatan Siantan Tengah	924.441.393,00	961.401.247,00	(36.959.854,00)	(3,84)
30	Kecamatan Siantan Timur	539.366.360,00	704.220.680,00	(164.854.320,00)	(23,41)
31	Kecamatan Siantan Utara	566.124.797,00	590.965.896,00	(24.841.099,00)	(4,20)
32	Kecamatan Jemaja Barat	378.251.330,00	467.205.320,00	(88.953.990,00)	(19,04)
33	Kecamatan Kute Siantan	1.179.345.366,00	1.328.686.110,00	(149.340.744,00)	(11,24)
34	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.604.647.841,00	135.672.997,00	2.468.974.844,00	1.819,80
JUMLAH		160.561.731.211,11	191.310.121.160,00	(30.748.389.948,89)	(16,07)

Tabel 275
Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Jasa		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Jasa	160.561.731.211,11	145.521.778.202,00	15.039.953.009,11
Jumlah	160.692.131.211,11	145.521.778.202,00	15.039.953.009,11

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih antara Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa – LRA pada Tahun 2024 sebesar Rp15.039.953.009,11. Selisih tersebut merupakan adanya penambahan hutang atas beban operasi pada Tahun 2024 sebesar Rp16.525.923.718,00, koreksi kurang atas penyesuaian Pelunasan hutang tahun 2024 sebesar Rp1.355.570.708,89 dan Koreksi kurang atas Beban Honorarium sebesar Rp130.400.000,00.

7.6.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan – LO

Saldo Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.392.930.276,00. Mengalami penurunan sebesar Rp716.805.772,00 atau sebesar 14,03%. Dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp5.109.736.048,00. Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 276
Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	14.444.500,00	49.117.500,00	(34.673.000,00)	(70,59)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	69.137.200,00	94.585.430,00	(25.448.230,00)	(26,91)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	317.315.005,00	375.042.780,00	(57.727.775,00)	(15,39)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	28.000.850,00	44.745.850,00	(16.745.000,00)	(37,42)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	35.020.500,00	(35.020.500,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	643.949.411,00	388.315.790,00	255.633.621,00	65,83
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	199.669.822,00	220.006.380,00	(20.336.558,00)	(9,24)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	547.624.490,00	190.216.036,00	357.408.454,00	187,90
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	86.408.500,00	34.658.085,00	51.750.415,00	149,32
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	338.896.926,00	351.236.564,00	(12.339.638,00)	(3,51)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	850.000,00	3.634.965,00	(2.784.965,00)	(76,62)
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	#DIV/0!
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	149.470.000,00	(149.470.000,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	437.216.800,00	1.139.021.400,00	(701.804.600,00)	(61,61)
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	166.666.378,00	140.242.630,00	26.423.748,00	18,84
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	112.051.500,00	(112.051.500,00)	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	6.541.500,00	(6.541.500,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
18	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	85.342.350,00	(85.342.350,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.291.365.684,00	1.246.171.569,00	45.194.115,00	3,63
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	190.384.710,00	0,00	190.384.710,00	#DIV/0!
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	29.145.000,00	(29.145.000,00)	(100,00)
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	198.997.719,00	(198.997.719,00)	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	140.082.000,00	(140.082.000,00)	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	76.090.500,00	(76.090.500,00)	(100,00)
25	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
JUMLAH		4.392.930.276,00	5.109.736.048,00	(716.805.772,00)	(14,03)

Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 dan 2023 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 277
Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	1.049.117.851,00	1.037.375.404,00	11.742.447,00	1,13
2	Sekretariat DPRD	126.454.504,00	21.011.750,00	105.442.754,00	501,83
3	Inspektorat	245.425.807,00	32.550.800,00	212.875.007,00	653,98
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	39.879.000,00	61.128.000,00	(21.249.000,00)	(34,76)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	814.526.337,00	2.171.918.375,00	(1.357.392.038,00)	(62,50)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	460.508.777,00	478.494.403,00	(17.985.626,00)	(3,76)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.573.300,00	32.531.250,00	(16.957.950,00)	(52,13)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.652.900,00	17.544.700,00	(5.891.800,00)	(33,58)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	2.934.051,00	0,00	2.934.051,00	100,00
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	31.025.000,00	22.830.000,00	8.195.000,00	35,90

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	841.998.627,00	404.757.910,00	437.240.717,00	108,03
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	40.724.886,00	100.774.080,00	(60.049.194,00)	(59,59)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.778.850,00	7.224.400,00	1.554.450,00	21,52
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	78.570.000,00	225.424.350,00	(146.854.350,00)	(65,15)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	33.119.210,00	131.225.900,00	(98.106.690,00)	(74,76)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.410.000,00	5.000.000,00	14.410.000,00	288,20
17	Satuan Polisi Pamong Praja	61.516.700,00	73.407.300,00	(11.890.600,00)	(16,20)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.505.000,00	6.850.000,00	4.655.000,00	67,96
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	228.273.100,00	106.954.750,00	121.318.350,00	113,43
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.741.000,00	15.704.000,00	15.037.000,00	95,75
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.951.216,00	(3.951.216,00)	(100,00)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.300.000,00	25.450.000,00	26.850.000,00	105,50
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	27.520.000,00	10.025.520,00	17.494.480,00	174,50
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.564.386,00	2.969.000,00	5.595.386,00	188,46
25	Kecamatan Jemaja	19.480.000,00	7.630.000,00	11.850.000,00	155,31
26	Kecamatan Jemaja Timur	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	100,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	18.494.640,00	(18.494.640,00)	(100,00)
28	Kecamatan Siantan	41.030.000,00	34.470.000,00	6.560.000,00	19,03
29	Kecamatan Siantan Selatan	60.414.940,00	13.500.000,00	46.914.940,00	347,52
30	Kecamatan Siantan Tengah	13.540.000,00	18.083.000,00	(4.543.000,00)	(25,12)
31	Kecamatan Siantan Timur	0,00	8.991.000,00	(8.991.000,00)	(100,00)
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	5.682.800,00	(5.682.800,00)	(100,00)
33	Kecamatan Jemaja Barat	8.030.000,00	5.081.500,00	2.948.500,00	58,02
34	Kecamatan Kute Siantan	6.746.050,00	2.700.000,00	4.046.050,00	149,85
	Jumlah	4.392.930.276,00	5.109.736.048,00	(716.805.772,00)	(14,03)

Tabel 278
Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Pemeliharaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Pemeliharaan	4.392.930.276,00	3.076.666.230,00	1.316.264.046,00
Jumlah	4.392.930.276,00	3.076.666.230,00	1.316.264.046,00

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp1.316.264.046,00 antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada Tahun 2024.

Selisih tersebut merupakan adanya penambahan atas hutang beban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebesar Rp1.316.264.046,00.

7.6.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Saldo Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp46.998.224.310,00. Mengalami penurunan sebesar Rp619.662.734,00 atau sebesar 1,30% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp47.614.828.944,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 279
Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.271.446.092,00	32.998.291.522,00	1.273.154.570,00	3,86
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.688.028.218,00	14.567.115.522,00	(1.879.087.304,00)	(12,90)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.750.000,00	30.480.000,00	8.270.000,00	27,13
JUMLAH		46.998.224.310,00	47.617.887.044,00	(619.662.734,00)	(1,30)

Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 dan 2023 pada masing-masing SKPD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 280
Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	7.094.196.651,00	7.318.724.006,00	(224.527.355,00)	(3,07)
2	Sekretariat DPRD	9.846.055.779,00	9.614.663.233,00	231.392.546,00	2,41
3	Inspektorat	1.533.620.211,00	1.357.641.844,00	175.978.367,00	12,96
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.705.985.490,00	2.352.934.694,00	353.050.796,00	15,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.096.360.500,00	5.935.619.560,00	(1.839.259.060,00)	(30,99)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.879.209.045,00	2.479.858.148,00	(600.649.103,00)	(24,22)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.502.655.784,00	1.308.000.053,00	194.655.731,00	14,88
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.344.189,00	662.812.397,00	163.531.792,00	24,67
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	759.023.863,00	657.575.351,00	101.448.512,00	15,43
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	901.197.632,00	884.903.192,00	16.294.440,00	1,84

No.	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	683.504.196,00	723.762.312,00	(40.258.116,00)	(5,56)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	855.171.476,00	909.537.548,00	(54.366.072,00)	(5,98)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Des	758.295.496,00	708.741.315,00	49.554.181,00	6,99
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.005.109.222,00	1.151.390.249,00	(146.281.027,00)	(12,70)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.004.854.759,00	1.151.585.116,00	(146.730.357,00)	(12,74)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.207.384.733,00	1.713.234.536,00	(505.849.803,00)	(29,53)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	322.937.509,00	709.789.926,00	(386.852.417,00)	(54,50)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	897.479.350,00	595.563.222,00	301.916.128,00	50,69
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.563.542.566,00	3.195.807.856,00	367.734.710,00	11,51
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	1.747.922.721,00	1.442.898.272,00	305.024.449,00	21,14
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.026.982.368,00	657.517.678,00	369.464.690,00	56,19
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	590.506.058,00	613.423.318,00	(22.917.260,00)	(3,74)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	201.445.099,00	140.324.296,00	61.120.803,00	43,56
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	523.166.870,00	291.299.708,00	231.867.162,00	79,60
25	Kecamatan Jemaja	320.031.419,00	191.456.881,00	128.574.538,00	67,16
26	Kecamatan Jemaja Timur	146.109.600,00	103.743.000,00	42.366.600,00	40,84
27	Kecamatan Palmatak	138.284.800,00	118.048.600,00	20.236.200,00	17,14
28	Kecamatan Siantan	79.943.385,00	48.558.400,00	31.384.985,00	64,63
29	Kecamatan Siantan Selatan	153.168.506,00	122.109.403,00	31.059.103,00	25,44
30	Kecamatan Siantan Tengah	112.925.500,00	85.589.899,00	27.335.601,00	31,94
31	Kecamatan Siantan Timur	81.836.400,00	58.275.000,00	23.561.400,00	40,43
32	Kecamatan Siantan Utara	50.566.500,00	46.061.200,00	4.505.300,00	9,78
33	Kecamatan Jemaja Barat	228.600.701,00	166.914.600,00	61.686.101,00	36,96
34	Kecamatan Kute Siantan	153.805.932,00	99.522.231,00	54.283.701,00	54,54
JUMLAH		46.998.224.310,00	47.617.887.044,00	(619.662.734,00)	(1,30)

Tabel 281
Perbedaan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Perjalanan Dinas		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	46.998.224.310,00	40.854.707.865,00	6.143.516.445,00
Jumlah	46.998.224.310,00	40.854.707.865,00	6.143.516.445,00

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp6.143.516.445,00 antara Beban Perjalanan Dinas – LO dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2024.

Selisih tersebut merupakan penambahan atas Hutang Tahun 2024 pada beban perjalanan dinas.

7.6.4.2.1.6. Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO Beban adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Beban Hibah digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban Hibah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Beban Hibah-LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun 2024 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Saldo Beban Hibah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp23.100.436.536,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp5.951.317.435,00 atau sebesar 34,70% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp17.149.119.101,00. Rincian Beban Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 282
Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Lebih/(Kurang)	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.188.000.000,00	0,00	1.188.000.000,00	100,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.540.586.300,00	12.954.870.000,00	7.585.716.300,00	58,55
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	0,00	127.756.920,00	(127.756.920,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi		Lebih/(Kurang)	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
	Perundang-Undangan				
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	170.501.800,00	239.990.000,00	(69.488.200,00)	(28,95)
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	1.802.404.650,00	(1.802.404.650,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	297.400.761,00	1.166.185.714,00	(868.784.953,00)	(74,50)
8	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	404.587.675,00	397.127.718,00	7.459.957,00	1,88
10	Beban Hibah Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota	499.360.000,00	460.784.099,00	38.575.901,00	8,37
JUMLAH		23.100.436.536,00	17.149.119.101,00	5.951.317.435,00	34,70

Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 283

Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Hibah	23.100.436.536,00	23.100.436.536,00	0,00
Jumlah		23.100.436.536,00	23.100.436.536,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA pada Tahun 2024.

Tabel 284
Beban Hibah Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	0,00	100,00
2	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	2.583.570.000,00	2.627.654.099,00	(44.084.099,00)	(1,68)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.501.800,00	2.486.902.064,00	(2.316.400.264,00)	(93,14)
4	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.400.761,00	338.100.000,00	(40.699.239,00)	(12,04)
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.188.000.000,00	0,00	1.188.000.000,00	-
6	Kecamatan Jemaja	0,00	127.756.920,00	(127.756.920,00)	-
7	Kecamatan Kute Siantan	0,00	383.578.300,00	(383.578.300,00)	-
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.730.963.975,00	9.805.127.718,00	7.925.836.257,00	80,83
JUMLAH		23.100.436.536,00	17.149.119.101,00	5.951.317.435,00	34,70

Tabel 285**Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Per SKPD Tahun 2024 dan 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.188.000.000,00	0,00	1.188.000.000,00	100,00
JUMLAH		1.188.000.000,00	0,00	1.188.000.000,00	100,00

Tabel 286

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga	2.084.210.000,00	2.166.870.000,00	(82.660.000,00)	(3,81)
2	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	0,00
3	Sekretariat Daerah	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	0,00	100,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.408.000.000,00	(9.408.000.000,00)	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.326.376.300,00	0,00	17.326.376.300,00	100,00
Jumlah		20.540.586.300,00	12.954.870.000,00	7.585.716.300,00	58,55

Tabel 287
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Jemaja	0,00	127.756.920,00	127.756.920,00	0,00
Jumlah		0,00	127.756.920,00	127.756.920,00	0,00

Tabel 288
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan Terdaftar Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.501.800,00	239.990.000,00	(69.488.200,00)	(28,95)
Jumlah		170.501.800,00	239.990.000,00	(69.488.200,00)	(28,95)

Tabel 289
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	1.418.826.350,00	1.418.826.350,00	(100,00)
2	Kecamatan Kute Siantan	0,00	383.578.300,00	383.578.300,00	(100,00)
Jumlah		0,00	1.802.404.650,00	1.802.404.650,00	(100,00)

Tabel 290
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.400.761,00	338.100.000,00	(40.699.239,00)	(12,04)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	828.085.714,00	(828.085.714,00)	(100,00)
		297.400.761,00	1.166.185.714,00	(868.784.953,00)	(74,50)

Tabel 291
Beban Hibah Dana BOS Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	499.360.000,00	460.784.099,00	38.575.901,00	8,37
		499.360.000,00	460.784.099,00	38.575.901,00	8,37

Tabel 292
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	404.587.675,00	397.127.718,00	7.459.957,00	1,88
	Jumlah	404.587.675,00	397.127.718,00	7.459.957,00	1,88

7.6.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Saldo Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp629.305.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp467.691.000,00 atau sebesar 289,39% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp161.614.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 293
Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	629.305.000,00	161.614.000,00	467.691.000,00	389,39
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	629.305.000,00	161.614.000,00	467.691.000,00	389,39

Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 294
Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Bantuan Sosial	629.305.000,00	629.305.000,00	0,00
Jumlah		629.305.000,00	629.305.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA pada Tahun 2024.

7.6.4.2.1.8. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang - LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp199.817.669,01. Mengalami kenaikan sebesar Rp22.761.543,21 atau sebesar 12,86 % dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp177.056.125,80. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 295
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang	199.817.669,01	177.056.125,80	22.761.543,21	12,86
JUMLAH		199.817.669,01	177.056.125,80	22.761.543,21	12,86

Tabel 296
Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
Penyisihan Piutang	177.056.125,80	22.761.543,2	0,00	199.817.669,01
Jumlah	177.056.125,80	22.761.543,2	0,00	199.817.669,01

Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 297
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan Piutang s.d 31 Desember 2024
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	(131.038.933)

2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	(59.914.353)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(1.705.176)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(7.159.207,03)
JUMLAH		(199.817.669,01)

7.6.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp177.839.676.898,29 Mengalami kenaikan sebesar Rp35.309.072.894,05 atau sebesar 24,77% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar 142.530.604.004,24. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 298
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024	Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2024
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	12.877.662.361,59	0,00	12.877.662.361,59
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	31.424.843.805,62	39.500.000,00	31.464.343.805,62
3	Dinas PUPRRKP	98.324.863.899,68	347.777.166,67	98.672.641.066,35
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(584.725.822,59)	0,00	(584.725.822,59)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	285.713.295,38	0,00	285.713.295,38
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	242.692.994,44	0,00	242.692.994,44
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	368.660.486,33	0,00	368.660.486,33
8	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	11.752.539.503,80	9.985.560,00	11.762.525.063,80
9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	1.187.354.373,96	0,00	1.187.354.373,96
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1.983.761.781,34	24.469.500,00	2.008.231.281,34
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	114.764.610,31	6.650.000,00	121.414.610,31
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	22.556.568,73	0,00	22.556.568,73
13	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	828.263.759,83	88.641.666,67	916.905.426,50
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	955.228.722,97	108.164.399,98	1.063.393.122,95
15	Sekretariat Daerah	10.328.048.266,98	91.637.616,66	10.419.685.883,64
16	Sekretariat DPRD	561.622.205,93	0,00	561.622.205,93
17	Inspektorat Daerah	68.989.015,13	0,00	68.989.015,13
18	Satuan Polisi Pamong Praja	833.072.549,56	0,00	833.072.549,56
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	152.560.429,93	0,00	152.560.429,93
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	346.867.863,95	76.407.016,67	423.274.880,62
21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.869.895,62	0,00	163.869.895,62
22	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	62.402.058,12	0,00	62.402.058,12

No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2024	Beban Amortisasi Tahun 2024	Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2024
1	2	3	4	5
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.099.320.368,65	0,00	1.099.320.368,65
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.182.434,00	0,00	12.182.434,00
25	Kecamatan Siantan	1.798.082.079,71	0,00	1.798.082.079,71
26	Kecamatan Jemaja	199.784.326,67	0,00	199.784.326,67
27	Kecamatan Palmatak	182.257.726,00	0,00	182.257.726,00
28	Kecamatan Siantan Timur	273.554.354,00	0,00	273.554.354,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	369.088.595,23	0,00	369.088.595,23
30	Kecamatan Jemaja Timur	195.073.774,00	0,00	195.073.774,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	332.503.847,00	0,00	332.503.847,00
32	Kecamatan Siantan Utara	36.297.507,77	0,00	36.297.507,77
33	Kecamatan Jemaja Barat	98.121.625,00	0,00	98.121.625,00
34	Kecamatan Kute Siantan	148.564.707,00	0,00	148.564.707,00
JUMLAH		177.046.443.971,63	793.232.926,65	177.839.676.898,29

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp177.839.676.898,29, yang terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp177.046.443.971,63 dan Amortisasi sebesar Rp793.232.926,65.

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp53.752.620.837,35. Mengalami penurunan sebesar Rp19.187.765.455,01 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp34.564.855.382,34 atau 55,51%. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 299
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	53.752.620.837,35	34.564.855.382,34	19.187.765.455,01	55,51
JUMLAH		53.752.620.837,35	34.564.855.382,34	19.187.765.455,01	55,51

b. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp31.235.811.618,38. Mengalami penurunan sebesar Rp12.686.623.823,38 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp18.549.187.795,00 atau 68,39%. Beban penyusutan Gedung dan bangunan Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 300
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	31.235.811.618,37	18.549.187.795,00	12.686.623.823,37	68,39
JUMLAH		31.235.811.618,37	18.549.187.795,00	12.686.623.823,37	68,39

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp90.556.897.515,91. Mengalami penurunan sebesar Rp4.178.268.132,34 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp86.378.629.383,57 atau 4,84%. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 301
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi	90.556.897.515,91	86.378.629.383,57	4.178.268.132,34	4,84
JUMLAH		90.556.897.515,91	86.378.629.383,57	4.178.268.132,34	4,84

d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.501.114.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.501.114.000,00 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 302
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.501.114.000,00	0,00	1.501.114.000,00	100,00
JUMLAH		1.501.114.000,00	0,00	1.501.114.000,00	100,00

e. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp1.018.134.570,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.018.134.570,00 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 303
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Aset Lain- Lain	1.018.134.570,00	0,00	1.018.134.570,00	100,00
JUMLAH		1.018.134.570,00	0,00	1.018.134.570,00	100,00

f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp793.232.926,66. Mengalami penurunan sebesar Rp3.831.164.369,98 dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp3.037.931.443,32 atau 126,11%. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 304
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(793.232.926,66)	3.037.931.443,32	(3.831.164.369,98)	(126,11)
Jumlah		(793.232.926,66)	3.037.931.443,32	(3.831.164.369,98)	(126,11)

7.6.4.2.2. BEBAN TRANSFER – LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah kepada suatu entitas pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp58.140.920.726,50. Mengalami penurunan sebesar Rp15.637.090.868,50 atau sebesar 21,19% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp73.778.011.595,00. Rincian Beban Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 305
Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil – LO	2.016.563.086,00	2.298.647.561,00	(282.084.475,00)	(12,27)
2	Beban Bantuan Keuangan - LO	56.124.357.640,50	71.479.364.034,00	(15.355.006.393,50)	(21,48)
Jumlah		58.140.920.726,50	73.778.011.595,00	(15.637.090.868,50)	(21,19)

7.6.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil - LO

Beban bagi hasil merupakan pembagian hasil yang diterima atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk alokasi dana yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. Saldo Beban Bagi Hasil – LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 306
Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	2.016.563.086,00	2.298.647.561,00	(282.084.475,00)	(12,27)
Jumlah		2.016.563.086,00	2.298.647.561,00	(282.084.475,00)	(12,27)

Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp2.016.563.086,00. Mengalami penurunan sebesar Rp282.084.475,00 atau 12,27% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp2.298.647.561,00.

7.6.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan – LO

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan alokasinya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 307
Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	56.124.357.640,50	71.479.364.034,00	(15.355.006.393,50)	(21,48)
JUMLAH		56.124.357.640,50	71.479.364.034,00	(15.355.006.393,50)	(21,48)

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp56.124.357.640,50. Mengalami peningkatan sebesar Rp15.355.006.393,50 atau 21,48% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp71.479.364.034,00.

Penjelasan Perbedaan Beban Transfer - LO dengan Belanja Transfer - LRA Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 308
Perbedaan Realisasi Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Transfer	58.140.920.726,50	96.138.111.285,00	(37.997.190.558,50)
Jumlah		58.140.920.726,50	96.138.111.285,00	(37.997.190.558,50)

Tabel diatas menunjukkan terdapat selisih antara Beban Transfer – LO dengan Belanja Transfer – LRA pada Tahun 2024. Selisih tersebut merupakan adanya Penambahan Hutang pada Tahun 2024 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.170.935.779,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp199.507.662,50. Kemudian terdapat Pendapatan yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa atau Dana Desa sesuai dengan BULTEK

Akuntansi pada akun Pendapatan – LO tidak tercatat sebagai pendapatan, Pendapatan hanya diakui pada Pendapatan - LRA saja sebesar Rp39.367.634.000,00.

Surplus/Defisit dari Operasi - LO

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Saldo Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp182.632.531.998,61. Mengalami kenaikan sebesar Rp251.429.389.227,75 atau sebesar 365,47% di bandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp68.796.857.229,14. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 309
Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan – LO	756.962.470.730,08	967.142.183.014,65	(210.179.712.284,57)	(21,73)
2	Beban – LO	939.595.002.728,69	898.345.325.785,51	41.249.676.943,18	4,59
JUMLAH		(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)

7.6.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan/penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional).

7.6.4.4. POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa).

7.6.4.5. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp182.632.531.998,61. Mengalami penurunan sebesar Rp251.429.389.227,75 atau sebesar 365,47% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp68.796.857.229,14.

Tabel 310
Surplus/Defisit - LO Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		(182.632.531.998,61)	68.796.857.229,14	(251.429.389.227,75)	(365,47)

7.6.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, di mana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 311
Realisasi Arus Kas Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	81.708.215.970,94	202.391.640.093,09
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(104.420.106.437,00)	(184.291.542.980,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	984.223.303,67	(1.134.954.983,98)
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas		(21.727.667.162,39)	16.965.142.129,11

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2024 sebesar Rp21.727.667.162,39 mengalami Penurunan bersih kas sebesar Rp4.762.525.033,28.

7.6.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 312
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	809.505.443.369,94	998.370.281.042,73
2	Arus Kas Keluar	727.797.227.399,00	795.978.640.949,64
Jumlah (1 – 2)		81.708.215.970,94	202.391.640.093,09

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp81.708.215.970,94 mengalami penurunan sebesar Rp120.683.424.122,15 atau sebesar 59,63% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp202.391.640.093,09. Arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

7.6.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus Masuk Kas Tahun 2024 sebesar Rp809.505.443.369,94 mengalami penurunan sebesar Rp188.864.837.672,79 atau sebesar 18,92% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp998.370.281.042,73. Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp18.599.426.707,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.288.652.950,00 atau sebesar 14,03% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp16.310.773.757,00.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.566.244.153,00. Mengalami penurunan sebesar Rp5.568.590.521,00 atau sebesar 78,05% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp7.134.834.674,00.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 yang berasal dividen PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp1.241.953.264,00. Mengalami penurunan sebesar Rp354.935.453,00 atau sebesar 22,23% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.596.888.717,00.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.136.925.071,94. Mengalami kenaikan sebesar Rp9.817.180.126,21 atau sebesar 227,26% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp4.319.744.945,73.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp159.711.575.960,00. Mengalami penurunan sebesar Rp161.892.285.848,00 atau sebesar 50,34% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp321.603.861.808,00.

f. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 adalah sebesar Rp395.427.123.385,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp11.577.927.404,00 atau sebesar 3,02% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp383.849.195.981,00.

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 adalah sebesar Rp77.454.547.851,00. Mengalami penurunan sebesar - Rp23.491.805.939,00 atau sebesar 23,27% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp100.946.353.790,00.

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 adalah sebesar Rp44.385.375.543,00. Mengalami penurunan sebesar -

Rp798.476.853,00 atau sebesar 1,77% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp45.183.852.396,00.

i. Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp10.659.002.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp10.659.002.000,00.

j. Penerimaan Dana Desa

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp39.367.634.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp241.572.000,00 atau sebesar 0,62% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp39.126.062.000,00.

k. Penerimaan Insentif Fiskal

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.680.723.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp16.430.000,00 atau sebesar 0,29% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp5.697.153.000,00.

l. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebesar Rp51.691.545.772,00. Mengalami penurunan sebesar Rp5.066.430.288,00 atau sebesar 8,93% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp56.757.976.060,00.

m. Penerimaan Bantuan Keuangan

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebesar Rp85.500.000,00 Mengalami penurunan sebesar Rp5.099.081.914,00 atau sebesar 98,35% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp5.184.581.914,00.

n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Arus Masuk Kas dari Penerimaan dari Pendapatan Lainnya (Penerimaan Kapitasi) Tahun 2024 adalah sebesar Rp156.868.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp156.868.663,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

7.6.5.1.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun 2024 sebesar Rp727.796.727.399,00 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

a. Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp354.110.209.828,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp20.355.154.588,00 atau sebesar 6,10% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp333.755.055.240,00.

b. Pembayaran Barang dan Jasa

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang Tahun 2024 adalah sebesar Rp253.819.164.750,00. Mengalami penurunan sebesar Rp78.948.415.539,64 atau sebesar 23,72% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp332.767.580.289,64.

c. Pembayaran Belanja Hibah

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp23.100.436.536,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp5.951.317.435,00 atau sebesar 34,70% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp17.149.119.101,00.

d. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2024 adalah sebesar Rp629.305.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp467.691.000,00 atau sebesar 289,39% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp161.614.000,00.

e. Pembayaran Tak Terduga

Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga di Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan realisasi di Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga).

f. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp96.137.611.285,00. Mengalami penurunan sebesar Rp16.007.661.034,00 atau sebesar 14,27% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp112.145.272.319,00.

7.6.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 313
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	104.420.106.437,00	184.291.542.980,00
Jumlah (1 – 2)		(104.420.106.437,00)	(184.291.542.980,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar 103.910.946.937,00. Mengalami penurunan sebesar Rp80.380.596.043,00 atau sebesar 43,62% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp184.291.542.980,00.

7.6.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi).

7.6.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar Rp104.420.106.437,00. Mengalami penurunan sebesar Rp80.380.596.043,00 atau sebesar 43,62% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp184.291.542.980,00. Arus Keluar Kas digunakan untuk belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan perolehan aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Perolehan Tanah

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan tanah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

b. Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.372.465.503,00. Mengalami penurunan sebesar - Rp24.816.228.684,00 atau sebesar 48,48% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp51.188.694.187,00.

c. Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.344.494.672,00 mengalami penurunan sebesar - Rp8.155.860.257,00 atau sebesar 23,64% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp34.500.354.929,00.

d. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.267.079.992,00. Mengalami penurunan sebesar Rp47.151.671.935,00 atau sebesar 48,66% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp96.909.592.427,00.

e. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.436.066.270,00. mengalami penurunan sebesar Rp256.835.167,00 atau sebesar 15,17% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.692.901.437,00.

7.6.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

Tabel 314
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	984.223.303,67	865.045.016,02
2	Arus Kas Keluar	0,00	2.000.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Jumlah (1 – 2)	984.223.303,67	(1.134.954.983,98)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 surplus sebesar Rp984.223.303,67 yang merupakan pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun 2024 dengan pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (penyaluran dana bergulir) dan pada Tahun 2024 tidak terdapat penyaluran dana bergulir.

7.6.5.3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada pokok dana bergulir di Tahun 2024 sebesar Rp984.223.303,67. Mengalami kenaikan sebesar Rp119.178.287,65 atau sebesar 13,78% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp865.045.016,02.

7.6.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan penyaluran pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 100% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

7.6.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 315
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
2	Arus Kas Keluar	50.312.153.135,00	73.763.342.623,00
	Jumlah (1 – 2)	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara dan tidak terdapat selisih karena Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyeter selurunya atas potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

7.6.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.312.153.135,00. Mengalami penurunan sebesar Rp23.451.189.488,00 atau sebesar 31,79% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp73.763.342.623,00.

7.6.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.312.153.135,00. Mengalami penurunan sebesar - Rp23.451.189.488,00 atau sebesar Rp31,79% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar Rp73.763.342.623,00.

7.6.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2024 sebesar Rp23.949.728.959,68 merupakan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2023. Saldo awal di BUD terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp22.327.961.923,56;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp15.369.994,00;
- c. Kas Dana BOS sebesar Rp 1,12; dan
- d. Kas Lainnya (Kas Dana BOK Puskesmas) sebesar Rp 1.606.397.041,00.

Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.965.142.129,11 atau sebesar Rp242,89% dibandingkan dengan realisasi saldo awal di BUD Tahun 2023 sebesar Rp6.984.586.830,57.

Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29 terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.928.105,88;
- b. Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp67.891.988,00;
- c. Kas di Kas di BLUD sebesar Rp1.456.758.963,29;
- d. Kas di Dana BOS sebesar Rp1,12; dan
- e. Kas di Kas Lainnya (Kas Dana BOK Puskesmas) Sebesar Rp605.482.739,00.

Atas saldo Akhir diatas Kas yang dapat digunakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mendukung operasional adalah kas yang berada pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.928.105,88. Sedangkan untuk KAS di Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Kas di BLUD, Kas di Dana BOS dan Kas di Kas Lainnya (Kas Dana BOK Puskesmas) hannya boleh digunkan oleh Unit Pengelolanya yang disebutkan di atas.

7.6.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp1.938.981.680.414,64 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023, sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (*audited*) Tahun 2023;
- b. Surplus/defisit - LO sebesar Rp182.632.531.998,61 merupakan defisit atas kegiatan operasional Tahun 2024 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2024;
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp10.702.726.703,68 merupakan penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) Koreksi atas Nilai Persediaan Tahun 2024 pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp889.931.857,50 koreksi tersebut merupakan koreksi atas sisa persediaan Tahun Tahun 2023, dengan Rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi Persediaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp1.113.700,00;
 - b) Koreksi Persediaan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.695.000,00;
 - c) Koreksi Persediaan pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp71.792.041,50;
 - d) Koreksi Persediaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp806.450,00;
 - e) Koreksi Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp55.044.345,00;
 - f) Koreksi Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp695.600,00;
 - g) Koreksi Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.083.800,00;
 - h) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp740.600,00;
 - i) Koreksi Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp590.000,00;
 - j) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp1.075.900,00;
 - k) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp590.700,00;
 - l) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Palmatak sebesar Rp886.000,00;
 - m) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp8.550.000,00;

- n) Koreksi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.376.507,00;
 - o) Koreksi Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.615.500,00;
 - p) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja Barat sebesar Rp225.000,00;
 - q) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja sebesar Rp 985.100,00;
 - r) Koreksi Persediaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 5.608.000,00;
 - s) Koreksi Persediaan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp29.982.033,00;
 - t) Koreksi Persediaan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp 174.400,00;
 - u) Koreksi Persediaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp 331.400,00;
 - v) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp939.550,00;
 - w) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp508.000,00;
 - x) Koreksi Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp130.236.285,00;
 - y) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan sebesar Rp1.622.706,00 ;
 - z) Koreksi Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.980.000,00;
 - aa) Koreksi Persediaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp39.852.135,00;
 - bb) Koreksi Persediaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp246.546.080,00;
 - cc) Koreksi Persediaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp323.840,00;
 - dd) Koreksi Persediaan pada Inspektorat Daerah sebesar Rp419.200,00;
 - ee) Koreksi Persediaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp12.629.620,00;
 - ff) Koreksi Persediaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp264.912.365,00;
- 2) Koreksi Lain-lain sebesar Rp11.592.658.561,18 terdiri dari Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain, Koreksi Ektrakomptable dan koreksi atas Penyusutan atas Aset Lainnya, dengan Rincian sebagai Berikut:
- a) Koreksi Tambah, terdiri dari:
 - 1) Penyesuaian atas Penerimaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp967.123.303,67;
 - 2) Penyesuaian atas Penerimaan Dana Bergulir pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp17.100.000,00;
 - 3) Perpindahan Aset dari Pengelola (Setda) ke Kecamatan Siantan sebesar Rp5.696.609.000,00;
 - 4) Penyesuaian atas Penambahan pencatatan Aset Lain-Lain (Buku) Rp200.000,00;

- 5) Perpindahan Aset Tetap dari Dinas Sosial ke Dinas DPMD sebesar Rp373.016.440,00;
- 6) Perpindahan Aset dari Dinsos ke DPUPRPRKP atas SK Penghapusan Nomor 482 Tahun 2024 Tgl 28 Juni 2024 Rp.1.454.541.900,31 (Pembangunan Jalan Kampung Baru Atas Kelurahan Tarempa) sebesar Rp1.454.541.900,31;
- 7) Perpindahan Aset Tetap Gedung Kantor atas SK Hibah (Pengalihan dari DPUPRPRKP ke SETDA (Pengelola) SK Penetapan Bupati Nomor 626 Tahun 2024 Tgl 31 Juli 2024 RP.24.538.402.641 (Pembangunan Gedung Kantor OPD dan Landclearing Sebesar Rp.928.752.880)) sebesar Rp24.538.402.641,00;
- 8) Perpindahan Aset Tetap dari Disdikpora ke Dinkes Pengalihan dari Disdikpora ke DinkesPPKB SK Penetapan Bupati Rp.842.380.000 SMAN 1 Siantan Rp.190.000.000 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Siantan sebesar Rp1.032.380.000,00;
- 9) Penyesuaian atas Reklas Persediaan ke Aset Tetap Sebesar Rp1.955.919.000,00;
- 10) Penyesuaian atas Reklasifikasi Aset Penambahan Hutang Belanja Barjas Rp1.383.359.712,00;
- 11) Perpindahan Aset Tetap Tanah dari SKPD Setda ke Kecamatan Siantan Tengah, berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp.31.485.000 berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp31.485.000,00;
- 12) Perpindahan Aset Peralatan dan Mesin dari SKPD Setda ke DAMKAR berupa Pick Up sebesar Rp.192.500.000 berdasarkan SK penghapusan Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024
- 13) Perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Setda-Bagian Umum ke Kecamatan Jemaja Timur berupa Sepeda Motor sebesar Rp.21.714.600 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 603 Tahun 2024;
- 14) Pengalihan Status Penggunaan BMD dari Setda-Bagian Umum ke Kecamatan Siantan Selatan berupa Speed Boat / Motor Tempel sebesar Rp184.327.125 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 602 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024;
- 15) Penyesuaian atas Penyusutan Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp227.550.000,00;
- 16) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Sekretariat DPRD TA 2024 Rp97.900.000,00;
- 17) Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga TA 2024 Rp1.478.038.446,00;
- 18) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA 2024 Rp72.125.323,26;
- 19) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman TA 2024 Rp431.518.860,00;

- 20) Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA 2024 Rp31.098.540,00;
 - 21) Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2024 Rp 899.257.084,79;
 - 22) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan TA 2024 Rp230.158.958,00;
 - 23) Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 Rp1.112.731.424,00;
 - 24) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik TA 2024 Rp98.450.000,00
 - 25) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian TA 2024 Rp1.267.809.740,00;
 - 26) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Satuan Polisi Pamong Praja TA 2024 Rp97.900.000,00;
 - 27) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2024 Rp70.438.065,00;
 - 28) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik TA 2024 Rp98.650.000,00;
 - 29) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Jemaja TA 2024 Rp389.004.032,00;
 - 30) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Jemaja Timur TA 2024 Rp104.350.000,00;
 - 31) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Palmatak TA 2024 Rp216.574.600,00;
 - 32) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Siantan TA 2024 Rp254.775.000,00;
 - 33) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Siantan Selatan TA 2024 Rp98.450.000,00;
 - 34) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Siantan Tengah TA 2024 Rp98.450.000,00;
 - 35) Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain pada Kecamatan Siantan Timur TA 2024 Rp96.077.437,50; dan
 - 36) Koreksi tambah atas Aset Kesalahan Penganggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023 pada Dinas PUPRPRKP Rp4.391.027.791,00
- b) Koreksi Kurang, terdiri dari:
- 1) Penyesuaian TGR Tahun 2022 sesuai dengan LHP BPK Tahun Anggaran 2023 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan dan Kekurangan Volume Rp81.447.496,00;
 - 2) Penyesuaian atas Sisa Baki Debet Dana Bergulir TA 2007-2024 Rp951.327.833,49
 - 3) Perpindahan Aset dari Pengelola (Setda) Rp6.802.379.824,42;
 - 4) Penyesuaian atas Aset Ekstrakomtable pada Kecamatan Siantan Selatan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.000.000,00;
 - 5) Penyesuaian atas Aset Ekstrakomtable pada Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp1.680.000,00;

- 6) Penyesuaian atas Pengurangan Aset Ekstrakomtable pada Kecamatan Siantan Tengah Sebesar Rp1.800.000,00;
 - 7) Perpindahan Aset Tetap dari Dinas Sosial ke Dinas DPMD sebesar Rp2.205.574.780,31;
 - 8) Penyesuaian atas Penghapusan Aset Rusak Berat Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor15 Tahun 2024 Tgl berupa Peralatan dan Mesin dan ATB (Software) sebesar Rp1.116.584.570,00;
 - 9) Penyesuaian atas Aset Ekstrakomtable pada Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Rp6.500.000;
 - 10) Perpindahan Aset Tetap Gedung Kantor atas SK Hibah (Pengalihan dari DPUPRPRKP ke SETDA (Pengelola) SK Penetapan Bupati Nomor 626 Tahun 2024 Tgl 31 Juli 2024 RP.24.538.402.641 (Pembangunan Gedung Kantor OPD dan Landclearing Sebesar Rp.928.752.880));
 - 11) Penyesuaian atas Ekstrakomtable pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sebesar Rp23.860.968,00, dengan Rincian Berikut ini: -Realisasi Lunas BM Rp.2.304.968 Tunda Bayar BM Rp.765.000 (Mouse 3 Unit @Rp.255.000) - Relisasi BMRp.3.441.000(kursi besi susun 10 Unit @Rp.450.000) - Realisasi Blud Rp.12.900.000 (kursi rapat 30 Unit @Rp.430.000) - Realisasi Blud Rp.3.441.000 (Apar 4 Unit @Rp.860.250)
 - 12) Penyesuaian atas Hibah Barang Peralatan Mesin pada pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Penghapusan dari Dinkes Ke Pihak3 BUMN SK Penghapusan Nomor 218 Tahun 2024 Tgl 18 Maret 2024 Rp.850.000.000 (Ambulance Laut Hibah BUMN);
 - 13) Perpindahan Aset Tetap dari Disdikpora ke Dinkes Pengalihan dari Disdikpora ke DinkesPPKB SK Penetapan Bupati Rp.842.380.000 SMAN 1 Siantan Rp.190.000.000 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Siantan;
 - 14) Perpindahan Aset Tetap Tanah dari SKPD Setda ke Kecamatan sebesar Rp1.381.549.825,00;
 - 15) Penyesuaian atas Ekstrakomtable pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sebesar Rp400.744.143;
 - 16) Penyesuaian atas Ekstrakomtable pada pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Rp3.600.000,00.
- d. Saldo Akhir Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.938.981.680.414,64. Penurunan tersebut merupakan akibat dampak dari Beban Operasioanal yang ditimbulkan pada Tahun berjalan yaitu adanya Penambahan Hutang, Koreksi terhadap Saldo Awal Persediaan dan Penyusutan Aset Tetap dan Lainnya pada Tahun sebelumnya. Karena pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan SIMDA BMD yang dimiliki oleh BPKP, namun pada Tahun 2024 sudah beralih menggunakan Aplikasi E-BMD, merupakan Aplikasi yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga pada saat Migrasi data dari SIMDA BMD ke E-BMD atas penyusutan aset tersebut tidak sinkron dan perlu adanya penyesuaian, sehingga pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tersebut, sehingga antara Kertas Kerja dan Aplikasi menjadi satu kesatuan dan tidak lagi terdapat perbedaan data yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

7.6.7. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS. UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Bermula di Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2024 seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penganggaran telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri, dimana salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan dan mengaplikasikan sistem SIPD mulai dari Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan.

Seiringan berjalannya penggunaan Aplikasi SIPD Kemendagri masih terdapat kekurangan dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, dikarenakan jaringan serta sumber daya manusia yang masih baru terhadap aplikasi tersebut sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan secara beriringan Aplikasi dari Tim Pengembangan Simda BMD BPKP dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta besar harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat memperoleh capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian dan pengungkapan neraca pada pos-pos aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, antara

lain terdapat pengelompokan piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Pada pos aset tetap dicatat akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selama 1 (satu) tahun akuntansi pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat beberapa hal yang dapat Kami ungkapkan antara lain pada pos kewajiban dalam penerapan akuntansi basis akrual terdapat pengungkapan pengakuan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya yang tidak terbayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan dan dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya pada program dan kegiatan serta rekening obyek belanja yang sama dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya pada Pergeseran APBD ataupun APBD Perubahan.

Untuk pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2024 yang berbasis *accrual* direklasifikasikan menjadi ekuitas.

7.6.7.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah - LRA / Pendapatan Asli Daerah LAK

Tabel 316
Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	18.599.426.707,00	18.599.426.707,00	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.566.244.153,00	1.566.244.153,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.241.953.264,00	1.241.953.264,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	14.136.925.071,94	14.136.925.071,94	0,00
	Jumlah	35.544.549.195,94	35.544.549.195,94	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Asli Daerah - LRA dengan Pendapatan Asli Daerah – LAK.

7.6.7.2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer - LRA / Pendapatan Transfer - LAK

Tabel 317
Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	676.978.622.739,00	676.978.622.739,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	45.048.357.000,00	45.048.357.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.691.545.772,00	51.691.545.772,00	0,00

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
4	Bantuan Keuangan	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
Jumlah		773.804.025.511,00	773.804.025.511,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LAK.

7.6.7.3. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA / Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK

Tabel 318

Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	156.868.663,00	156.868.663,00	0,00
Jumlah		156.868.663,00	156.868.663,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK.

7.6.7.4. Pengungkapan Perbedaan Belanja Operasi - LRA/ Belanja Operasi - LAK

Tabel 319

Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	354.110.209.828,00	354.110.209.828,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	253.819.164.750,00	253.819.164.750,00	0,00
3	Belanja Hibah	23.100.436.536,00	23.100.436.536,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	629.305.000,00	629.305.000,00	0,00
Jumlah		631.659.116.114,00	631.659.116.114,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Belanja Operasi - LRA dengan Belanja Operasi - LAK.

7.6.7.5. Pengungkapan Perbedaan Belanja Tidak Terduga - LRA/ Belanja Tidak Terduga - LAK

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Belanja Tidak Terduga - LRA dengan Belanja Tidak Terduga - LAK. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp0,00.

7.6.7.6. Pengungkapan Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

Pengungkapan Belanja Transfer – LRA yaitu akun belanja bagi hasil dan akun belanja bantuan keuangan dengan Transfer Bantuan Keuangan Keuangan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 320
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)	96.138.111.285,00	96.138.111.285,00	0,00
	Jumlah	96.138.111.285,00	96.138.111.285,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

7.6.7.7. Pengungkapan Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK

Tabel 321
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.372.465.503,00	26.372.465.503,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.344.494.672,00	26.344.494.672,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.267.079.992,00	50.267.079.992,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.436.066.270,00	1.436.066.270,00	0,00
	Jumlah	104.420.106.437,00	104.420.106.437,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Belanja Belanja Moda - LRA dengan Belanja Modal - LAK.

7.6.7.8. Pengungkapan Perbedaan antara Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 322
Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	984.223.303,67	984.223.303,67	0,00
	Jumlah	984.223.303,67	984.223.303,67	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.6.7.9. Pengungkapan Perbedaan antara Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 323
Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat selisih antara Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.7. **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari peraturan yang legal dan formal, serta semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, maka muncul berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Tuntutan yang datang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah untuk mengatur sendiri pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai otonomi daerah, yang terus di gaungkan di masing-masing daerah. Salah satunya daerah kepulauan yang turut menggaungkan pemekaran perubahan untuk mengelola pemerintahan sendiri yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas agar daerahnya dibentuk menjadi kabupaten pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut yang sebelumnya di bawah wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran daerah ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Kepulauan Anambas kepada Pemerintah atas ketidakmerataan pembangunan dan minimnya fasilitas publik di Daerah yang kaya sumber daya alam dan migas tersebut. Beranjak dari hal tersebut muncul suatu keinginan untuk membentuk kabupaten baru dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak terikat lagi dengan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2008 melalui proses pemekaran wilayah. Proses pemekaran menjadikan Kepulauan Anambas sebagai sebuah kabupaten melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai ketika Kepulauan Riau dibentuk menjadi sebuah Propinsi pada Tahun 2002. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi dinamika politik dan proses tarik ulur kepentingan antara elit-elit politik lokal daerah Anambas dengan kabupaten induk sehingga perjalanan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sempat terhenti karena terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota kabupaten dan

akhirnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi kandungan laut dan migas ini ditetapkan menjadi kabupaten. Pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dimaksud untuk mendekatkan rentang kendali dan memperpendek jalur birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mengingat kondisi Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari Kabupaten Natuna yaitu sekitar 15 jam perjalanan kapal laut dan lebih dekat dengan Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Di samping sarana transportasi yang terbatas yang dikelilingi oleh lautan yang luas, di mana pada musim-musim tertentu sulit ditempuh dengan menggunakan kapal laut dan belum tersedianya transportasi udara sampai saat ini untuk menuju ibukota Kabupaten Natuna dalam rangka mengakses pelayanan publik. Dukungan untuk keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri merupakan hal usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kaum intelektual, ulama, para pengusaha dan wakil rakyat serta masyarakat awam melalui Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat anambas dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Akhirnya setelah lebih dari lima Tahun cita-cita untuk memiliki, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan yang didasarkan pada kearifan lokal terwujud sudah dengan ditetapkannya Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 24 Juli 2008. Terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur, dua kelurahan dan 34 desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bapak Aneng sebagai Bupati Kepulauan Anambas dan Bapak Raja Bayu Febri Gunadian, SE sebagai Wakil Bupati untuk Periode Masa Bhakti 2025-2030. Pada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, maka bertambah 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat. Pada Tahun 2019 dilakukan pemekaran lagi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan sehingga Jumlah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan.

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur.

Sebagai wilayah Kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna Utara. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas $\pm 46.664.15 \text{ km}^2$ hanya 607.72 km^2 (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya $\pm 46.056.43 \text{ km}^2$ (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam sepuluh kecamatan, dua kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa meliputi:

- a. Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Barat Daya dan Desa Sri Tanjung;
- b. Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, terdiri dari Desa Tiangau, Desa Mengkait, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil dan Desa Air Bini;
- c. Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, terdiri atas Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Munjan, Desa Temburun, Desa Serat dan Desa Air Putih;
- d. Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, terdiri atas Desa Teluk Siantan, Desa Air Asuk, Desa Air Sena, Desa Lidi, Desa Teluk Sunting dan Desa Liuk;
- e. Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, terdiri dari Desa Piabung, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Langir, Desa Putik, Desa Candi dan Desa Belibak;
- f. Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, terdiri dari satu Kelurahan, Desa Rewak, Desa Mampok, Desa Air Biru, Desa Batu Berapit dan Desa Landak dan;
- g. Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, terdiri dari Desa Ulu Maras, Desa Kuala Maras, Desa Genting Pulur dan Desa Bukit Padi.
- h. Kecamatan Jemaja Barat ibu kota Impol terdiri dari Desa Impol, Desa Sunggak dan Desa Keramut;
- i. Kecamatan Siantan Utara ibu kota Mubur terdiri dari Desa Mubur, Desa Bayat dan Desa Piasan;
- j. Kecamatan Kute Siantan ibu kota Payalaman terdiri dari Desa Payalaman, Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak $\pm 38.70 \text{ mil}$, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak $\pm 37.37 \text{ mil}$. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak ($\pm 208.41 \text{ mil}$) dan Siantan Tengah ($\pm 205.16 \text{ mil}$). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut. untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui

transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202.29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205.97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318.91 mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640.72 mil.

7.7.1. Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi pendukung dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 antara lain:

a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Tahun 2023 merupakan Tahun dimulainya dalam mengimplementasikan SIPD secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu dari proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Peratanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem SIPD masih terdapat beberapa kekurangan dan perbaikan kedepan dalam rangka penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang terjadi dilapangan.

b. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai akhir Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan sebagai aplikasi pendamping sampai aplikasi e-BMD kedepan bisa digunakan secara maksimal dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke *database server* yang ada di ruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan *expot* dan *import* data dari *client* ke server atau sebaliknya. Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara update data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung pencatatan dan pelaporan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Aplikasi SIMGAJI TASPEN

Aplikasi SIMGAJI TASPEN yang dikeluarkan oleh PT TASPEN. Tbk. dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Agustus 2015 sampai sekarang. Aplikasi SIMGAJI Taspen yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk pelaporan ke Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pemotongan PPh 21, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Aplikasi SIMGAJI TASPEN dipergunakan secara terpusat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penginputan dan pencetakan daftar gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pangkat dan golongan yang ada

dimasing-masing organisasi/SKPD. Penginputan data perubahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilakukan setiap awal bulan berjalan dan pencetakan daftar gaji bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan, daftar gaji yang telah dicetak dapat diambil oleh bendahara pengeluaran SKPD di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pengajuan pembayaran gaji PNSD diawal bulan dengan batas pengajuan pada tanggal 5 bulan berjalan, sehingga mempermudah staf gaji untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

d. Aplikasi Anambas *Single Information System*

Aplikasi *Anambas Single Information System* dirancang oleh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Memenuhi tantangan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi. Aplikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan, mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai dan SP2D *Online* yang terintegrasi ke Aplikasi *Payment system* pada perbankan (Bank Riau Kepri) yang bermanfaat untuk memastikan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, informasi posisi kas secara real time dan proses tutup buku lebih cepat dan handal serta kedisiplinan pengelolaan keuangan meningkat.

e. *Cast Management System (CMS)*

Aplikasi *Monitoring* Transaksi dari Bank Riau Kepri Syariah digunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan monitoring Keluar dan Masuk Dana pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.7.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

Peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
- b. Peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

a. Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 belum diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2024 tanggal 10 Maret 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 324
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024	Jumlah Dana Bagi Hasil Tunda Salur Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Pajak Kendaraan Bermotor	12.865.869.641,00	8.149.923.834,00	4.715.945.807,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.336.985.675,00	6.717.952.320,00	4.619.033.355,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.407.661.179,00	14.639.341.020,00	5.768.320.159,00
4	Pajak Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	43.016.353,00	29.265.856,00	13.750.497,00
Jumlah		44.653.532.848,00	29.536.483.030,00	15.117.049.818,00

b. Pelaksanaan Pekerjaan Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi menuju Laut Kecamatan Siantan

Sehubungan dengan adanya keputusan kontrak atas Paket Pekerjaan Sodetan *Drainase* Penghubung dari Sungai Sugi menuju Laut Kecamatan Siantan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP). Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan Pembayaran Uang Muka 30% atau sebesar Rp3.054.957.000 sesuai dengan SP2D Nomor 21.05/04.0/000065/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/M/6/2024 Tanggal 28 Juni 2024. Atas peristiwa tersebut telah dilakukan beberapa langkah mitigasi resiko diantaranya adalah dengan dilakukannya *Join Probity Audit* bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 18 November 2024 Nomor: R/700.1.2.1/147/ITDA/LHA/11/2024 dengan merekomendasikan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) untuk memerintahkan PPK segera:

- a. Melaksanakan Prosedur keputusan kontrak kritis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas peristiwa tersebut diatas nilai pembebanan yang harus dikembalikan oleh CV. Tapak Anak Bintang sebesar Rp2.943.305.661,00 dengan telah memperhitungkan harga prestasi pekerjaan sebesar Rp111.651.339,00. Pada Tanggal 18 Desember 2025 Terdapat pencairan atas Uang Jaminan sebesar Rp509.159.500 yang ditransfer melalui RKUD Kab Kepulauan Anambas. Sehingga Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, masih terhadap sisa uang Muka yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atas Paket Pekerjaan Sodetan *Drainase* Penghubung dari Sungai Sugi menuju Laut Kecamatan Siantan.

c. Terdapat 4 Pelaksanaan Paket Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 masih terdapat 4 Paket yang masih belum selesai dan adanya permintaan penambahan waktu atas paket tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 325
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah
1	2	3	4
1	DPUPRPRKP	Pekerjaan Penanganan Long Segmen Jalan Arung Hijau - Limbung - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAK)	1.388.731.090,00
2	DPUPRPRKP	Pembayaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan (DAU SG)	1.558.104.876,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan (Dak Fisik Kesehatan)	1.269.082.595,00
4	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Berapit Kec. Jemaja	1.039.621.645,00
Jumlah			5.255.540.206,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa sampai dengan Laporan Keuangan *Unaudited* disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 atas 4 paket Pekerjaan tersebut telah dilakukan Reviu oleh APIP Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga empat paket Pekerjaan tersebut sudah diakomodir dalam Laporan Keuangan pada komponen Pengakuan Hutang Tahun Anggaran 2024.

7.8. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

